



# GAMBARAN UMUM

## KABUPATEN KARAWANG 2024

*Sumber : RKPD Kabupaten Karawang Tahun 2024*

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

#### **2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah**

Kondisi umum daerah terdiri dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah, dan inovasi daerah.

##### **2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi**

Analisis pada aspek geografi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan aspek demografi menggambarkan kondisi penduduk secara keseluruhan dalam waktu tertentu.

###### **2.1.1.1 Aspek Geografi**

Aspek geografi terdiri dari karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana.

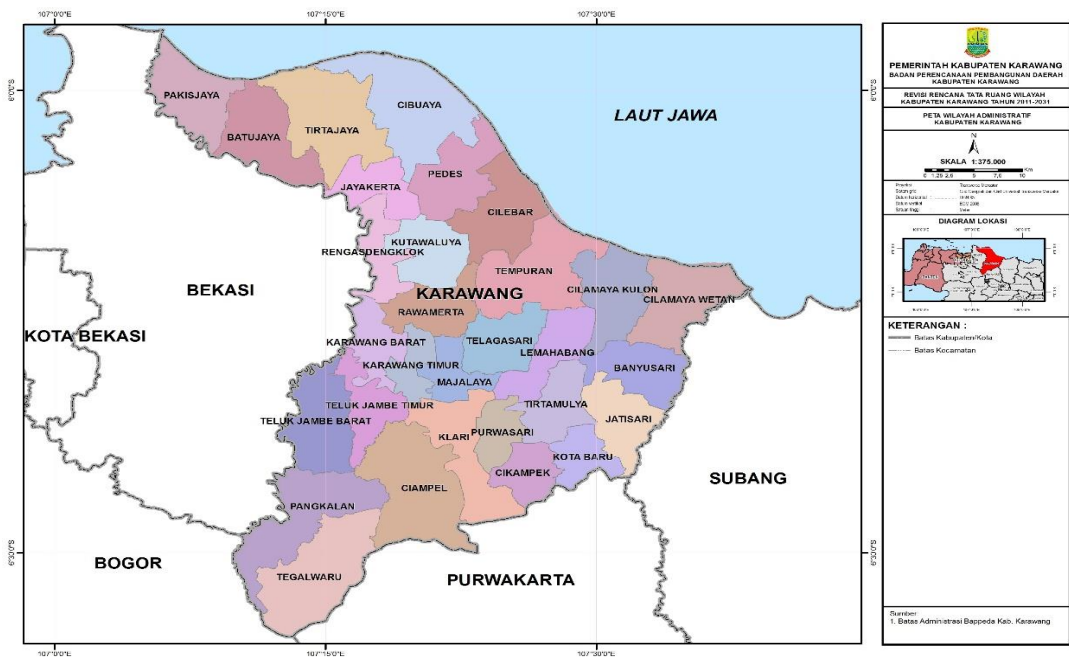
###### **a. Karakteristik Lokasi dan Wilayah**

Kabupaten Karawang menjadi salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat, dengan jarak sekitar 126 Km dari Pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Barat di Bandung dan sekitar 70 Km dari pusat Pemerintahan Republik Indonesia di Jakarta.

###### **1) Luas dan Batas Wilayah Administrasi**

Luas wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2022 sebesar 1.911,09 Km<sup>2</sup>. Gambar 2.1 menyajikan peta administrasi Kabupaten Karawang. Secara administratif, Karawang mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kabupaten Subang
- Sebelah Tenggara : Kabupaten Purwakarta
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bogor
- Sebelah Barat : Kabupaten Bekasi



**Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Karawang**

Kabupaten Karawang memiliki 30 kecamatan dan 309 desa/kelurahan yang terdiri dari 297 desa dan 12 kelurahan. Berdasarkan kategorinya, sebanyak 175 desa/kelurahan berkategori swadaya, 126 desa/ kelurahan swakarya, dan 8 desa/ kelurahan swasembada. Penamaan Kecamatan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang yaitu tercantum pada Tabel 2.1.

**Tabel 2.1  
Luas Daerah dan Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di  
Kabupaten Karawang Tahun 2022**

No	Kecamatan	Ibukota	Luas (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Desa/Kelurahan
1.	Pangkalan	Ciptasari	97,38	8
2.	Tegalwaru	Cintalaksana	109,45	9
3.	Ciampel	Kutapohaci	117,63	7
4.	Telukjambe Timur	Telukjambe	45,86	9
5.	Telukjambe Barat	Karangmulya	66,63	10
6.	Klari	Duren	72,76	13
7.	Cikampek	Dawuan Tengah	38,71	10
8.	Purwasari	Sukasari	31,58	8
9.	Tirtamulya	Citarik	46,60	10
10.	Jatisari	Mekarsari	54,85	14
11.	Banyusari	Gembongan	55,30	12
12.	Kotabaru	Wancimekar	33,56	9
13.	Cilamaya Wetan	Mekarmaya	77,95	12

No	Kecamatan	Ibukota	Luas (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Desa/Kelurahan
14.	Cilamaya Kulon	Sukamulya	66,74	12
15.	Lemahabang	Karangtanjung	54,22	11
16.	Telagasari	Talagasari	53,47	14
17.	Majalaya	Majalaya	33,04	7
18.	Karawang Timur	Adiarsa Timur	31,22	8
19.	Karawang Barat	Tanjungmekar	38,76	8
20.	Rawamerta	Sukamerta	51,56	13
21.	Tempuran	Pancakarya	93,15	14
22.	Kutawaluya	Waluya	55,60	12
23.	Rengasdengklok	Rengasdengklok Selatan	36,59	9
24.	Jayakarta	Jayamakmur	41,32	8
25.	Pedes	Payungsari	69,63	12
26.	Cilebar	Kertamukti	69,28	10
27.	Cibuaya	Pejaten	112,35	11
28.	Tirtajaya	Subajaya	110,63	11
29.	Batujaya	Batujaya	78,38	10
30.	Pakisjaya	Tanjungbungin	65,81	8
<b>Jumlah</b>			<b>1911,09</b>	<b>309</b>

## 2) Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Karawang secara geografis terletak antara 107° 02'-107° 40' Bujur Timur dan 5° 56'-6° 34' Lintang Selatan. Kabupaten Karawang merupakan salah satu daerah yang memiliki lahan subur di Jawa Barat, sehingga sebagian besar lahannya digunakan untuk pertanian.

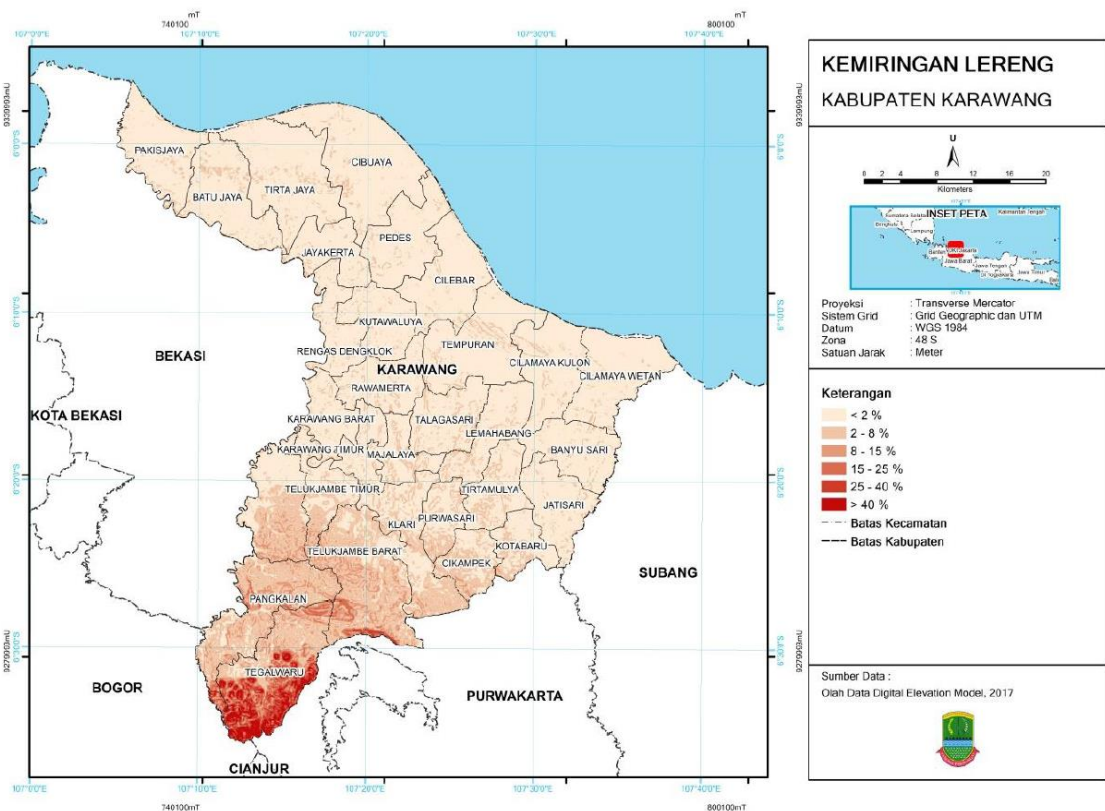
## 3) Kondisi Topografi

Wilayah Kabupaten Karawang termasuk daerah dataran yang relatif rendah, mempunyai variasi ketinggian antara 0-1.279 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan wilayah 0-20, 2-150, 15-400, dan di atas 400. Topografi di Kabupaten Karawang sebagian besar berbentuk dataran yang relatif rendah (25 mdpl) seperti yang dijelaskan pada Gambar 2.2. Kondisi topografi Kabupaten Karawang dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini:

**Tabel 2.2**  
**Kondisi Topografi di Kabupaten Karawang**

No	Ketinggian	Kecamatan
1.	0-250 m	Kecamatan Pakisjaya, Kecamatan Batujaya, Kecamatan Tirtajaya, Kecamatan Cibuaya, Kecamatan Pedes, Kecamatan Jayakarta,

No	Ketinggian	Kecamatan
		Kecamatan Lemahabang, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kecamatan Kotabaru, Kecamatan Banyusari, Kecamatan Jatisari, Kecamatan Tirtamulya, Kecamatan Rengasdengklok, Kecamatan Kutawaluya, Kecamatan Tempuran, Kecamatan Rawamerta, Kecamatan Karawang Barat, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Majalaya, Kecamatan Telagasari, Kecamatan Purwasari, Kecamatan Cikampek, Kecamatan Klari, sebagian Kecamatan Ciampel, sebagian Kecamatan Tegalwaru, sebagian Kecamatan Pangkalan
2.	250-500 m	Sebagian kecil Kecamatan Ciampel
3.	500-1200 m	Sebagian besar Kecamatan Tegalwaru, sebagian kecil Kecamatan Pangkalan



Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Karawang, 2020

**Gambar 2.2** **Peta Topografi Kabupaten Karawang**

#### 4) Kondisi Geologi

Kabupaten Karawang bagian utara sebagian besar tertutup dataran pantai yang luas, terhampar di bagian pantai Utara dan merupakan batuan sedimen yang dibentuk oleh bahan-bahan lepas, terutama endapan laut dan aluvium vulkanik. Di bagian tengah ditempati oleh perbukitan, terutama dibentuk oleh batuan sedimen.

Sedangkan di bagian Selatan terletak Gunung Sanggabuana dengan ketinggian  $\pm 1.291$  m di atas permukaan laut. Sesuai dengan bentuk morfologinya, Kabupaten Karawang terdiri dari dataran rendah. Kabupaten Karawang dilewati oleh aliran sungai Citarum yang terdiri atas Satuan Endapan Sungai Muda, Satuan Endapan Dataran Banjir, dan Satuan Batupasir Konglomeratan dan Batulanau.

Kabupaten Karawang disusun oleh batuan berupa batupasir, andesit, tufa, dan aluvial. Satuan endapan aluvial di Kabupaten Karawang berumur Holesen, serta merupakan hasil pelapukan batuan penyusun di wilayah Karawang dan sekitarnya. Andesit merupakan batuan beku dengan struktur kompak. Komposisi utamanya adalah kuarsa, plagioklas, homblende, biotit, dan piroksen. Sementara batuan tufa adalah jenis batuan sedimen bertekstur klastik halus dengan struktur berlapis. Komposisi mineral batuan tufa adalah fieldspard dan glass vulkanik.

Jawa Barat terbagi menjadi empat zona fisiografi, yaitu zona Bogor, zona Bandung, dataran pantai Jakarta dan zona pegunungan selatan Jawa Barat. Kabupaten Karawang masuk di dalam zona Bogor yang membentang dari Tangerang sampai Kuningan. Zona ini umumnya bermorfologi perbukitan yang memanjang dari barat ke timur. Batuan penyusun zona ini terdiri atas batuan sedimen tersier dan batuan beku. Morfologi perbukitan tersebut diberi nama oleh Van Bemmelen sebagai antiklinorium kuat yang disertai pensesaran.

## **5) Kondisi Hidrologi**

Kabupaten Karawang dilalui oleh aliran sungai yang melandai ke Utara arah Sungai Citarum dan merupakan pemisah antara Kabupaten Karawang dengan Kabupaten Bekasi, sedangkan Sungai Cilamaya merupakan batas wilayah dengan Kabupaten Subang. Selain sungai, terdapat juga 3 buah saluran irigasi yang besar yaitu Saluran Induk Tarum Utara, Saluran Induk Tarum Tengah dan Saluran Induk Tarum Barat yang dimanfaatkan untuk pengairan sawah, tambak dan pembangkit tenaga listrik. Aliran air permukaan di Kabupaten Karawang disajikan pada Tabel 2.3.



**Tabel 2.3**  
**Aliran Air Permukaan di Kabupaten Karawang**

No	Kelompok Sungai, Danau, dan Aliran Permukaan Lainnya	Nama Sungai, Danau, dan Aliran Permukaan Lainnya
1.	Sungai yang melalui atau melintasi Kabupaten Karawang	Sungai Citarum, Cilamaya, Cipamingkis, dan Cibeet
2.	Sungai-sungai yang hanya berada di dalam wilayah Kabupaten Karawang	Sungai Cigentis, Citaman, Cihambulu, Cipagaduren, Cikaranggolam, Cibayat, Ciawitemen, Cijati, Cacaban, Cibarengkok, Cipicung
3.	Situs dan bending	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bendung Walahar di Kecamatan Klari</li> <li>• Situ Kamojing di Kecamatan Cikampek</li> <li>• Situ Cipule di Kecamatan Ciampel</li> <li>• Situ dan danau di Kecamatan Klari, Ciampel, Telukjambe Timur, dan Karawang Barat</li> </ul>
4.	Saluran Irigasi Besar	Saluran Induk Tarum Utara, Saluran Induk Tarum Tengah, dan Saluran Induk Tarum Barat

## 6) Kondisi Klimatologi

Kabupaten Karawang beriklim tropis, mempunyai musim yang hampir sama dengan wilayah di Kabupaten wilayah Pantai Utara Jawa pada umumnya, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Rata-rata Suhu, Kelembaban, Kecepatan Angin, dan Tekanan Udara di Kabupaten Karawang selama dua belas bulan pada tahun 2022 ditunjukkan pada Tabel 2.4. Suhu rata-rata berkisar antara 22,7° celcius sampai dengan 24,3° celcius. Rata-rata suhu tertinggi terjadi pada Bulan Januari dan terendah pada Bulan Februari. Kelembaban rata-rata Kabupaten Karawang berkisar 71% sampai dengan 83%. Kecepatan Angin rata-rata tertinggi terjadi pada Bulan Januari sebesar 1,9 m/det dan terendah terjadi pada bulan April, Juni, Oktober sebesar 0,9 m/det. Tekanan udara rata-rata Kabupaten Karawang berkisar 922,0 mbar sampai dengan 922,8 mbar.

**Tabel 2.4**  
**Pengamatan Unsur Iklim Rata-Rata Menurut Bulan**  
**di Kabupaten Karawang Tahun 2022**

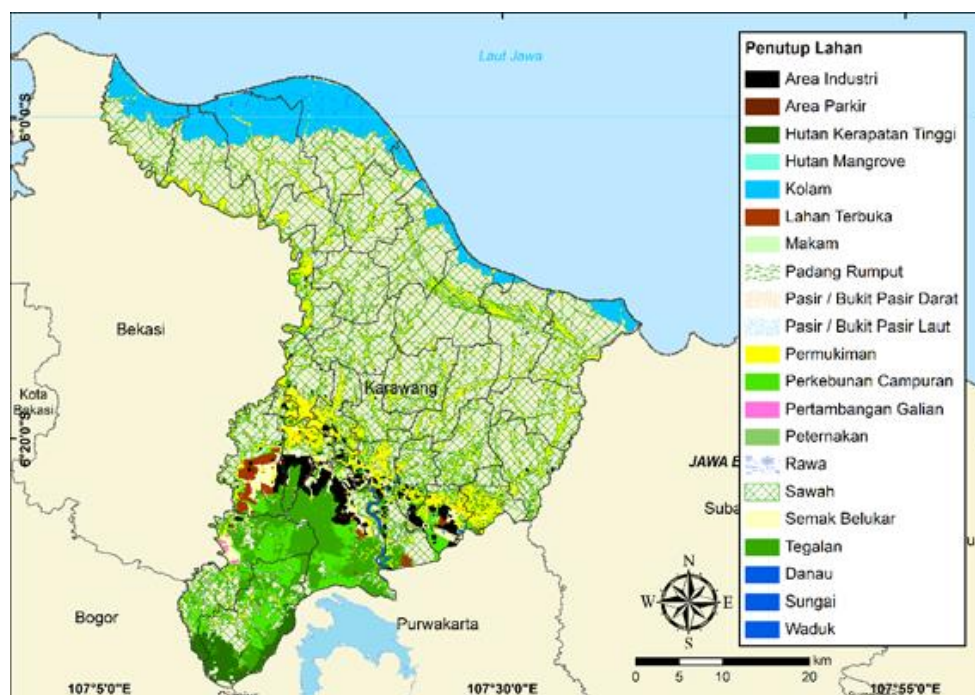
No	Bulan	Suhu (°C)	Kelembaban (%)	Kecepatan Angin (m/det)	Tekanan Udara (mbar)
1.	Januari	24,3	75	1,9	922,7
2.	Februari	22,7	71	1,5	922,0
3.	Maret	24,1	78	1,5	921,7
4.	April	23,3	83	0,9	922,2
5.	Mei	23,9	80	1,3	922,4
6.	Juni	22,8	82	0,9	922,7
7.	Juli	23,1	78	1,1	922,3
8.	Agustus	23,3	76	1,2	922,6
9.	September	23,3	79	1,1	923,4
10.	Oktober	23,2	82	0,9	922,8
11.	November	23,4	82	1,1	922,3
12.	Desember	23,3	82	1,2	922,0

*Sumber : Kabupaten Karawang dalam Angka 2023*

## 7) Kondisi Penggunaan Lahan

Berdasarkan data tutupan lahan tersedia data terbaru yakni tutupan lahan tahun 2016, Kabupaten Karawang memiliki 21 jenis penutup lahan yang ditunjukkan pada Gambar 2.3. Berdasarkan Tabel 2.5, Kabupaten Karawang didominasi oleh penutup lahan sawah, permukiman, dan kolam. Sawah menutupi Kabupaten Karawang dari wilayah tengah ke arah utara dengan luas 109.245 Ha atau 57% dari total luas Kabupaten Karawang. Sementara penutup lahan permukiman (12%) dominan berada di wilayah tengah Kabupaten Karawang. Wilayah utara Kabupaten Karawang didominasi oleh kolam untuk kegiatan tambak. Luas kolam cukup besar yaitu sekitar 17.495 Ha atau sekitar 9% dari total luas Kabupaten Karawang. Wilayah ini menjadi perhatian untuk pengembangan minapolitan. Selain terdapat tambak, perairan Kabupaten Karawang juga dilalui beberapa sungai seperti Sungai Citarum dan Sungai Cimalaya. Sementara di bagian selatan merupakan kawasan hijau berupa hutan kerapatan tinggi (1,55%), perkebunan campuran (5,62%), dan tegalan (6,35%).





Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Karawang, 2020

**Gambar 2.3** Peta Penutupan Lahan Kabupaten Karawang Tahun 2016

Selain itu, terdapat pula penutup lahan dalam sektor pertambangan dan industri di Kabupaten Karawang. Penutup lahan pada sektor pertambangan adalah pertambangan galian A dan pasir/bukit pasir darat atau laut. Sementara area industri di Kabupaten Karawang mencapai luas 4.652 Ha. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian di Kabupaten Karawang tidak hanya didorong oleh sektor pertanian.

**Tabel 2.5**

**Luas Penutup Lahan di Kabupaten Karawang Tahun 2016**

Penutup Lahan	Luas (Ha)	Persentase Luas
Area Industri	4.652,35	2,44%
Area Parkir	15,45	0,01%
Area Tertutup Awan	225,86	0,12%
Danau	362,31	0,19%
Hutan Kerapatan Tinggi	2.954,86	1,55%
Hutan Mangrove	79,51	0,04%
Kolam/tambak	17.495,87	9,17%
Lahan Terbuka	1.886,35	0,99%
Makam	118,70	0,06%
Padang Rumput	283,45	0,15%
Pasir / Bukit Pasir Darat	6,06	0,00%
Pasir / Bukit Pasir Laut	63,58	0,03%
Permukiman	23.614,83	12,38%
Perkebunan Campuran	10.717,03	5,62%

<b>Penutup Lahan</b>	<b>Luas (Ha)</b>	<b>Persentase Luas</b>
Pertambangan Galian A	146,06	0,08%
Peternakan	11,08	0,01%
Rawa	40,24	0,02%
Sawah	109.244,73	57,29%
Semak Belukar	4.784,09	2,51%
Sungai	1.802,36	0,95%
Tegalan	12.108,82	6,35%
Waduk	81,17	0,04%
<b>Total</b>	<b>190.694,75</b>	<b>100,00%</b>

Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Karawang, 2020

## **b. Potensi Pengembangan Wilayah**

Kabupaten Karawang diarahkan menjadi salah satu gerbang (*gateway city*) pembangunan di wilayah Indonesia bagian barat sebagai penyangga Ibukota Negara. Dikenal juga sebagai gudang beras dan lumbung pangan nasional.

Wilayah Kabupaten Karawang berdasarkan kondisi geologis merupakan kawasan yang relatif aman dari bencana gempa bumi, walaupun mempunyai resistensi dari beberapa potensi bencana seperti : banjir (kawasan perkotaan di sepanjang aliran sungai), rob di pesisir laut, tanah longsor (Pangkalan, Tegalwaru) dan puting beliung di beberapa kecamatan.

Kabupaten Karawang juga mempunyai potensi pariwisata berupa wisata alam, budaya, dan sejarah. Wisata Alam berupa pantai (Pantai Tanjung Baru, Pantai Tanjung Pakis, Pantai Pisangan, Pantai Samudra Baru, Pantai Sedari), pegunungan (Sanggabuana), air terjun (Curug Cigentis, Curug Bandung, Curug Cikoleangkap, Curug Lalay, Curug Santri, *Green Canyon*), wisata sejarah berupa Tugu Perjuangan Rengasdengklok, Rumah Sejarah Ir. Soekarno di Rengasdengklok, Makam Syekh Quro, Situ Cipule, Bendungan Walahar, Wisata Air Leuweungseureuh, Monumen Rawagede, Situs Candi Jiwa dan Candi Blandongan dan Monumen Surotokunto.

Kabupaten Karawang dilalui oleh aliran sungai yang melandai ke utara. Sungai Citarum merupakan pemisah antara Kabupaten Karawang dengan Kabupaten Bekasi, sedangkan sungai Cilamaya

merupakan batas wilayah dengan Kabupaten Subang. Selain sungai, terdapat 3 buah saluran irigasi yang besar yaitu Saluran Induk Tarum Utara, Saluran Induk Tarum tengah dan Saluran Induk Tarum Barat yang dimanfaatkan untuk pengairan sawah, tambak dan pembangkit tenaga listrik. Sungai Citarum dengan 3 Waduk utama yaitu Saguling, Cirata dan Jatiluhur. Aliran Bendungan Jatiluhur terdapat intake di Curug yang memberikan pasok air ke saluran Tarum Barat (WTC) dan saluran Tarum Timur (ETC).

Kabupaten Karawang terdapat Sungai Cibeet yang mempunyai Cabang, yaitu Sungai Cipamingkis. Sungai Cibeet ini memberikan tambahan pasok kepada saluran Tarum Barat (WTC) dari Bendung Beet. Di bagian batas Timur Kabupaten Karawang terdapat Sungai Cilamaya yang mempunyai Cabang Sungai Ciherang. Selain waduk yang telah ada, terdapat potensi waduk yang bisa dikembangkan yaitu waduk Pangkalan di Sungai Cibeet, waduk Ciherang di Sungai Ciherang dan waduk Maya di Sungai Cilamaya. Gambaran ketersediaan dan kebutuhan air setiap tempat ditampilkan pada satuan luas terkecil wilayah sungai, yaitu sub daerah sungai.

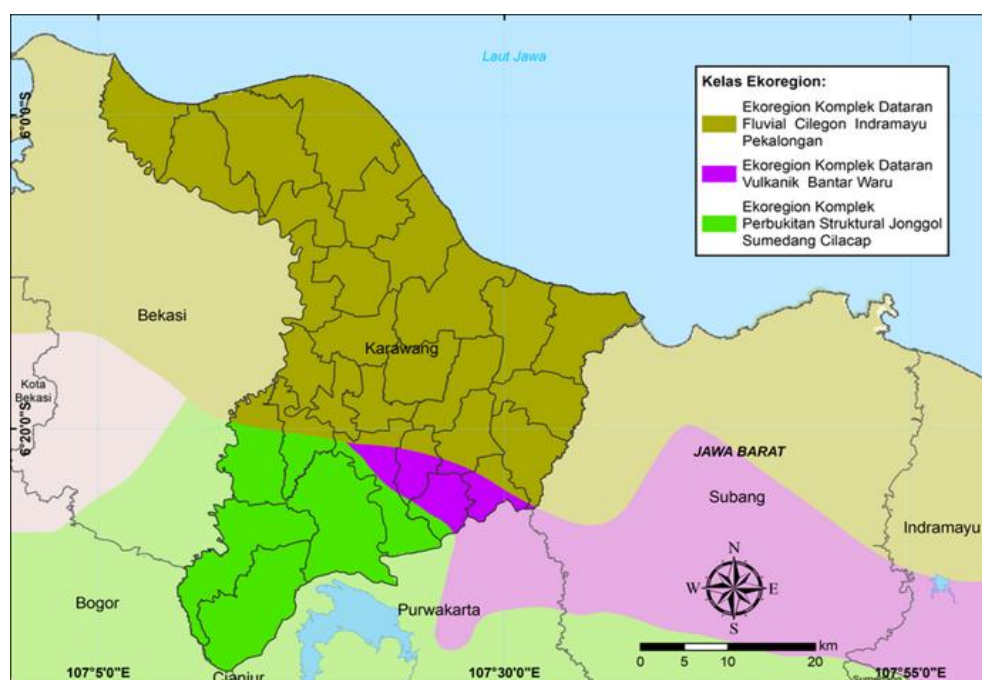
Wilayah Sungai Citarum abstraksi air tanah masih di bawah batas ideal pengambilan air tanah, yaitu masih 25%. Namun, untuk beberapa lokasi misalnya di CAT Bekasi- Karawang, CAT Subang dan CAT Batujajar pengambilan air tanah sudah melampaui batas ideal pengambilan air tanah. Walaupun saat ini pengambilan air tanah di CAT Bandung-Soreang masih dibawah batas ideal pengambilan air tanah (masih 27%), akan tetapi di beberapa tempat seperti di daerah Majalaya, Ranca Ekek, Dayeuh Kolot, Leuwi Gajah dan sebagainya, pengambilan air tanah ini sudah melampaui batas ideal pengambilan air tanah, dimana di daerah ini sudah terjadi penurunan muka air tanah dan juga penurunan tanah yang cukup serius.

### **c. Wilayah Rawan Bencana**

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009, ekoregion didefinisikan sebagai wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.

Ekoregion ditetapkan berdasarkan 8 pertimbangan, yaitu karakteristik bentang alam, daerah aliran sungai, iklim, flora dan fauna, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat, dan hasil inventarisasi lingkungan hidup. Ekoregion tidak terpisah oleh batas administrasi wilayah. Peta ekoregion dapat digunakan sebagai unit analisis dalam penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dasar dalam memberikan arah untuk penetapan RPPLH yang mempertimbangkan keterkaitan antar ekosistem dalam satu ekoregion (Kementerian Lingkungan Hidup, 2013).

Wilayah Kabupaten Karawang masuk dalam tiga kelas ekoregion kompleks, yaitu Dataran Fluvial Cilegon Indramayu Pekalongan, Perbukitan Struktural Jonggol Sumedang Cilacap, dan Dataran Vulkanik Bantar Waru. Secara umum ketiga ekoregion kompleks tersebut masuk kedalam tiga jenis bentang alam yaitu dataran fluvial, perbukitan struktural, dan dataran vulkanik (Gambar 2.4).



Sumber : *Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Karawang, 2020*

**Gambar 2.4 Peta Ekoregion Kabupaten Karawang**

Ketiga jenis ekoregion kompleks di Kabupaten Karawang secara umum masuk kedalam tiga jenis bentang alam, yaitu dataran fluvial, perbukitan struktural, dan dataran vulkanik. Dataran fluvial memiliki karakteristik: geomorfologi datar berombak dan kemiringan  $\leq 15\%$ . Kondisi hidrologi berupa air tanah dan air permukaan yang tersedia

dengan cukup dan berkualitas relatif baik; pemanfaatan lahan pada bentang alam ini meliputi lahan sawah, ladang, permukiman, dan semak belukar; dan kerawanan lingkungan yang mungkin terjadi adalah pencemaran air, banjir dan kekeringan. Perbukitan struktural memiliki karakteristik: ketinggian dominan <500 mdpl dengan geomorfologi relief dan lereng berbukit dan kemiringan >16%; kondisi hidrologis berupa sumber daya air yang melimpah dengan tipe sungai berpola aliran radial sentrifugal, mata air tidak besar, dan air tanah pada dataran kaki gunung; tipe tutupan lahan beragam seperti hutan, semak belukar, savana, ladang dan permukiman; dan kerawanan lingkungan yang terjadi adalah tanah longsor dan erosi. Dataran vulkanik memiliki karakteristik: morfologi datar hingga landai dengan kemiringan lereng umum 0-3%, lereng berombak 3-8%, dan lereng bergelombang 8-15%; sistem hidrologi terdiri dari aliran air tanah dangkal (<30 m) dengan pola aliran meandering dan dendritik, dan banyak dijumpai mata air; dan ancaman bahaya yang sering muncul di jenis ekoregion ini adalah letusan gunung api dan gempa bumi.

#### **2.1.1.2 Aspek Demografi**

Berdasarkan Tabel 2.6, pada tahun 2022 jumlah penduduk Kabupaten Karawang mencapai 2.505.247 jiwa. Angka ini didapatkan dari hasil proyeksi dan masih sementara. Penduduk laki-laki pada tahun 2022 berjumlah 1.268.737 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 1.236.510 jiwa. Seks rasio penduduk Kabupaten Karawang tahun 2022 sebesar 102,61 yang artinya penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan. Dengan luas Kabupaten Karawang sebesar 1.911,09 km<sup>2</sup> didapatkan kepadatan penduduk per km<sup>2</sup> sebesar 1.286,76 jiwa.

**Tabel 2.6**  
**Jumlah Penduduk Kabupaten Karawang Tahun 2018-2022**

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
1.	Jumlah Penduduk (jiwa)	2.336.009	2.353.915	2.370.488	2.468.600	2.505.250
2.	Komposisi menurut jenis kelamin :					
	Laki-laki (jiwa)	1.196.692	1.205.186	1.213.004	1.250.585	1.286.737
	Perempuan (jiwa)	1.139.317	1.148.729	1.157.484	1.217.991	1.236.510

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
3.	Pertumbuhan Penduduk (LPP %)	0,84	0,77	0,84	1,60	1,49
4.	Tingkat Kepadatan Penduduk (per km <sup>2</sup> )	1.332	1.343	1.435	1.290	1.286,76

Sumber : Kabupaten Karawang Dalam Angka Tahun 2023

Hal lain yang menggambarkan karakteristik penduduk adalah komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah susunan atau pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu. Dalam hal ini adalah berdasarkan usia dan jenis kelamin yang tergambarkan dari bentuk piramida penduduk pada Gambar 2.5.



Sumber: Kabupaten Karawang Dalam Angka Tahun 2023

**Gambar 2.5 Piramida Penduduk Kabupaten Karawang Tahun 2022**

Piramida penduduk tersebut menunjukkan penduduk di Kabupaten Karawang termasuk jenis yang ekspansif ditandai dengan bentuk yang besar pada bagian bawah dan semakin kecil ke bagian puncak. Bentuk piramida ini menunjukkan penduduk Kabupaten Karawang berada dalam keadaan bertumbuh dimana penduduk usia

muda lebih besar. Hal ini berarti, angka kelahiran masih cukup tinggi, sementara tingkat kematian bayi cukup rendah. Kondisi ini menandakan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Karawang termasuk yang cepat. Hal ini dapat terkonfirmasi dari angka laju pertumbuhan penduduk tahun 2022 yang mencapai 1,49%. Kondisi demikian menuntut perlu adanya kebijakan pengendalian jumlah penduduk, karena penduduk yang terlalu banyak akan berpengaruh pada pemerataan sumber daya dan pembangunan.

Tabel 2.7 menyajikan luas wilayah, jumlah penduduk, kepadatan, dan penyebaran penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Karawang Tahun 2022. Penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Klari, yaitu 204.788 jiwa atau sebesar 8,17% sedangkan jumlah penduduk terkecil berada di Kecamatan Tegalwaru dengan jumlah 40.000 jiwa atau sebesar 1,60%.

**Tabel 2.7**  
**Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Kepadatan dan Penyebaran Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Karawang Tahun 2022**

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk (ribu)	Kepadatan (per km <sup>2</sup> )	Proporsi Penyebaran Penduduk (%)
1.	Pangkalan	97,38	41,90	401,98	1,67
2.	Tegalwaru	109,45	40,00	375,00	1,60
3.	Ciampel	117,63	45,14	393,43	1,80
4.	Telukjambe Timur	45,86	135,36	2.956,43	5,40
5.	Telukjambe Barat	66,63	56,88	809,52	2,27
6.	Klari	72,76	204,79	2.586,87	8,17
7.	Cikampek	38,71	122,22	3.290,92	4,88
8.	Purwasari	31,58	83,75	2.508,90	3,34
9.	Tirtamulya	46,60	51,29	1.106,21	2,05
10.	Jatisari	54,85	82,48	1.463,08	3,29
11.	Banyusari	55,30	57,39	1.041,38	2,29
12.	Kotabaru	33,56	141,26	4.123,15	5,64
13.	Cilamaya Wetan	77,95	81,58	1.037,01	3,26
14.	Cilamaya Kulon	66,74	67,42	986,95	2,69
15.	Lemahabang	54,22	67,44	1.256,94	2,69
16.	Telagasari	53,47	70,71	1.340,93	2,82
17.	Majalaya	33,04	80,43	2.102,18	3,21
18.	Karawang Timur	31,22	159,80	5.044,35	6,38
19.	Karawang Barat	38,76	166,86	4.200,66	6,66
20.	Rawamerta	51,56	55,34	1.097,91	2,21



No	Kecamatan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk (ribu)	Kepadatan (per km <sup>2</sup> )	Proporsi Penyebaran Penduduk (%)
21.	Tempuran	93,15	66,47	713,57	2,65
22.	Kutawaluya	55,60	62,16	1.133,00	2,48
23.	Rengasdengklok	36,59	118,62	3.044,90	4,73
24.	Jayakarta	41,32	68,93	1.570,16	2,75
25.	Pedes	69,63	80,84	1.232,93	3,23
26.	Cilebar	69,28	46,10	629,00	1,84
27.	Cibuaya	112,35	54,43	458,90	2,17
28.	Tirtajaya	110,63	71,76	698,48	2,86
29.	Batujaya	78,38	82,23	1.101,50	3,28
30.	Pakisjaya	65,81	41,68	612,20	1,66
	<b>Jumlah</b>	<b>1.911,09</b>	<b>2.505,25</b>	<b>1.286,76</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Kabupaten Karawang Dalam Angka Tahun 2023

## 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

### 2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita, rasio gini, pemerataan pendapatan versi Bank Dunia, Indeks Ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional), persentase penduduk di atas garis kemiskinan, dan angka kriminalitas yang tertangani.

#### 2.1.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang umum digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian dengan fungsinya yang dapat menggambarkan struktur ekonomi dan laju pertumbuhan serta pendapatan perkapita penduduk. Pada tingkat regional PDRB dapat dijadikan ukuran kemampuan suatu wilayah dalam menciptakan nilai tambah yang diharapkan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Semakin besar nilai tambah yang dihasilkan suatu daerah menggambarkan besaran pendapatan masyarakat yang bersangkutan.

Perekonomian Kabupaten Karawang berdasarkan PDRB menurut lapangan usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada

tahun 2022 mencapai Rp 268.228,78,- miliar yang ditunjukkan pada Tabel 2.5. Sedangkan PDRB menurut lapangan usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada tahun 2022 mencapai Rp 177.470,89,- miliar yang ditunjukkan pada Tabel 2.8. Hal ini memperlihatkan tingkat pertumbuhan ekonomi sebagai refleksi capaian yang diperoleh dalam pembangunan.

**Tabel 2.8**  
**PDRB Seri 2010 ADHB Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)**  
**Tahun 2018-2022**

No.	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8.329,53	9.141,25	9.773,51	9.605,73	10.103,35
B.	Pertambangan dan Penggalian	2.808,54	2.789,05	2.267,57	2.315,60	2.563,92
C.	Industri Pengolahan	154.545,39	162.596,95	156.544,46	172.568,73	191.460,50
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	1.955,33	2.057,13	1.923,32	2.052,37	2.272,24
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	148,83	170,93	208,86	238,77	250,61
F.	Konstruksi	8.811,24	10.056,92	9.619,08	10.865,36	11.495,91
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	20.773,71	23.177,85	22.109,59	23.718,93	25.777,24
H.	Transportasi dan Pergudangan	4.059,67	4.484,23	4.559,52	4.669,33	5.087,94
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.163,46	2.479,88	2.537,02	2.771,94	3.113,35
J.	Informasi dan Komunikasi	1.934,49	2.145,74	3.022,46	2.910,42	3.016,53
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.605,22	2.760,36	2.733,35	2.959,88	3.281,09
L.	Real Estate	462,63	515,56	575,66	677,96	761,58
M, N.	Jasa Perusahaan	76,93	94,94	83,48	92,58	107,69
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.168,85	2.293,61	2.268,31	2.244,27	2.270,08
P.	Jasa Pendidikan	2.263,91	2.682,03	3.010,85	3.153,39	3.448,38
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	624,03	706,47	730,55	780,34	842,86
R, S, T, U.	Jasa lainnya	1.815,59	2.048,44	2.079,16	2.087,62	2.375,43
	<b>PDRB</b>	<b>215.549,37</b>	<b>230.021,38</b>	<b>225.063,63</b>	<b>243.713,20</b>	<b>268.228,78</b>

Sumber: Kabupaten Karawang Dalam Angka Tahun 2023

Selama lima tahun terakhir (2018-2022) struktur perekonomian Kabupaten Karawang didominasi oleh 4 (empat) kategori lapangan usaha, yaitu : Industri pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Konstruksi; dan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan pada Tabel 2.9. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Karawang.

**Tabel 2.9**  
**PDRB Seri 2010 ADHK Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)**  
**Tahun 2018 s.d 2022**

No.	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.656,03	4.724,51	4.937,17	5.051,87	5.166,51
B.	Pertambangan dan Penggalian	3.548,59	3.441,58	3.228,52	3.023,30	2.946,00
C.	Industri Pengolahan	113.120,28	116.773,91	111.073,03	118.943,08	127.898,88
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	113.120,28	1.037,78	964,726	1.031,53	1.095,04
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	99,11	108,54	130,85	148,78	152,52
F.	Konstruksi	6.347,31	6.949,37	6.615,75	6.995,47	6.962,60
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15.278,87	16.537,39	15.413,07	15.958,60	16.639,75
H.	Transportasi dan Pergudangan	2.822,25	3.061,95	3.052,52	3.101,20	3.347,74
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.633,98	1.796,99	1.732,26	1.759,24	1.877,25
J.	Informasi dan Komunikasi	1.971,13	2.244,04	3.158,91	3.359,85	3.531,69
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.809,24	1.869,58	1.851,43	1.937,31	1.930,72
L.	Real Estate	395,35	434,70	485,043	534,48	579,23
M, N.	Jasa Perusahaan	55,27	60,48	51,36	55,05	59,69
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.260,66	1.326,07	1.301,28	1.271,69	1.256,20
P.	Jasa Pendidikan	1.461,57	1.574,66	1.713,82	1.726,71	1.802,49
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	459,13	503,65	506,95	540,89	576,67

No.	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
R,S ,T, U	Jasa lainnya	1.381,70	1.501,63	1.494,60	1.502,44	1,647,81
	<b>PDRB</b>	<b>157.319,86</b>	<b>163.946,85</b>	<b>157.710,59</b>	<b>166.941,49</b>	<b>177.470,89</b>

Sumber: Kabupaten Karawang Dalam Angka Tahun 2023

Tabel 2.10 menunjukkan persentase PDRB Kabupaten Karawang ADHB menurut lapangan usaha (%) tahun 2018-2022. Merujuk tabel tersebut, selama tahun 2018-2022, lapangan usaha industri pengolahan menjadi penyumbang perekonomian Kabupaten Karawang terbesar Kabupaten Karawang. Pada tahun 2022, lapangan usaha industri pengolahan menyumbang mencapai 71,38% dari total PDRB ADHB Kabupaten Karawang. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran menjadi penyumbang terbesar kedua terhadap perekonomian Kabupaten Karawang yaitu sebesar 9,61%. Penyumbang perekonomian Kabupaten Karawang terkecil terjadi pada lapangan usaha jasa perusahaan yang hanya mampu menyumbang 0,04% dari total PDRB ADHB Kabupaten Karawang.

**Tabel 2.10**  
**Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Karawang ADHB Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2018 - 2022**

No.	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,86	3,97	4,36	3,94	3,77
B.	Pertambangan dan Penggalian	1,30	1,21	1,01	0,95	0,96
C.	Industri Pengolahan	71,70	70,63	69,87	70,81	71,38
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,91	0,89	0,86	0,84	0,85
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,07	0,07	0,09	0,10	0,09
F.	Konstruksi	4,09	4,37	4,29	4,46	4,29
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,64	10,07	9,87	9,73	9,61
H.	Transportasi dan Pergudangan	1,88	1,95	2,04	1,92	1,90
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,00	1,08	1,13	1,14	1,16
J.	Informasi dan Komunikasi	0,90	0,93	1,35	1,19	1,12
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,21	1,20	1,22	1,21	1,22
L.	Real Estate	0,21	0,22	0,26	0,28	0,28

No.	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
M,N.	Jasa Perusahaan	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,01	1,00	1,01	0,92	0,85
P.	Jasa Pendidikan	1,05	1,17	1,34	1,29	1,29
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,29	0,31	0,33	0,32	0,31
R,S,T,U.	Jasa lainnya	0,84	0,89	0,93	0,86	0,89
	<b>PDRB</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Kabupaten Karawang Dalam Angka Tahun 2023

Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Karawang ADHK 2010 menurut lapangan usaha tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel 2.11. Berdasarkan tabel tersebut, pada tahun 2022, laju pertumbuhan PDRB ADHK tertinggi terjadi pada lapangan usaha jasa lainnya mencapai 9,68%. Sedangkan laju pertumbuhan PDRB ADHK terendah terjadi pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Bahkan ada lapangan usaha yang mengalami penurunan sebesar 2,56% yaitu lapangan usaha pertambangan dan penggalian.

**Tabel 2.11**  
**Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Karawang Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen)**  
**Tahun 2018 - 2022**

No.	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,33	1,47	4,50	2,32	2,27
B.	Pertambangan dan Penggalian	-2,33	-3,02	-6,19	-6,36	-2,56
C.	Industri Pengolahan	6,58	3,23	-4,88	7,09	7,53
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	-5,35	2,01	-7,04	6,92	6,16
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,42	9,52	20,56	13,69	2,52
F.	Konstruksi	8,21	9,49	-4,80	5,74	-0,47
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,25	8,24	-6,80	3,54	4,27
H.	Transportasi dan Pergudangan	5,93	8,49	-0,31	1,59	7,95
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,50	9,98	-3,60	1,56	6,71
J.	Informasi dan Komunikasi	10,62	13,85	40,74	6,39	5,11

No.	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,05	3,34	-0,97	4,64	-0,34
L.	Real Estate	11,38	9,95	11,58	10,19	8,37
M,N.	Jasa Perusahaan	8,99	9,44	-15,08	7,18	8,43
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,61	5,19	-1,87	-2,27	-1,22
P.	Jasa Pendidikan	10,33	7,74	8,84	0,75	4,39
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,27	9,70	0,66	6,69	6,62
R,S,T,U.	Jasa lainnya	9,45	8,68	-0,47	0,53	9,68
	<b>LPE</b>	<b>6,04</b>	<b>4,08</b>	<b>-3,80</b>	<b>5,85</b>	<b>6,31</b>

Sumber: Kabupaten Karawang Dalam Angka Tahun 2023

Pada Tabel 2.12 dan Gambar 2.6 menyajikan perbandingan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karawang dengan target daerah Kabupaten Karawang. Dengan melihat Tabel 2.12, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karawang selama 5 tahun terakhir dari tahun 2018 sampai tahun 2022, mengalami pertumbuhan, kecuali pada tahun 2020.

**Tabel 2.12**  
**Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dengan Target Daerah Tahun 2018-2022**

Tahun	Target	Realisasi
<b>2018</b>	3-6	6,04
<b>2019</b>	3-6	4,08
<b>2020</b>	3-6	-3,80
<b>2021</b>	0,39-5,80	5,85
<b>2022</b>	1-5,9	6,31

Sumber: Kabupaten Karawang Dalam Angka Tahun 2023

Pada tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi terkontraksi sebesar 3,80%. Terkontraksinya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karawang pada tahun 2020 ini sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang menyebabkan penurunan aktivitas produksi di beberapa lapangan usaha.



Sumber: Kabupaten Karawang Dalam Angka Tahun 2023

**Gambar 2.6 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karawang dengan Target Daerah Tahun 2018-2022**

Berdasarkan Gambar 2.6, pada tahun 2018, 2019, 2021 dan 2022, Kabupaten Karawang berhasil mencapai target laju pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, laju pertumbuhan ekonomi sempat berkontraksi pada tahun 2020 akibat dari pandemi COVID-19. Sebelum pandemi COVID-19, rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karawang pada tahun 2018 dan 2019 hanya mencapai 5,06%. Kondisi terkini, setelah pandemi COVID-19 rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karawang pada tahun 2021 dan 2022 sebesar 6,08%. Laju pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2022 hingga mencapai 6,31%.

Dari angka-angka indeks harga implisit PDRB dapat diketahui kenaikan harga dari waktu ke waktu baik secara agregat maupun secara sektoral. Secara agregat indeks implisit di Kabupaten Karawang tahun 2022 sebesar 151,14 dan laju pertumbuhannya sebesar 3,53%. Sedangkan secara sektoral, pertumbuhan indeks implisit yang paling cepat atau di atas angka rata-rata indeks implisit Kabupaten Karawang pada tahun 2022 terjadi pada sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 13,63%. Sektor lain yang perkembangan indeks implisitnya paling berkontraksi adalah sektor informasi dan komunikasi yaitu sebesar 1,40%.



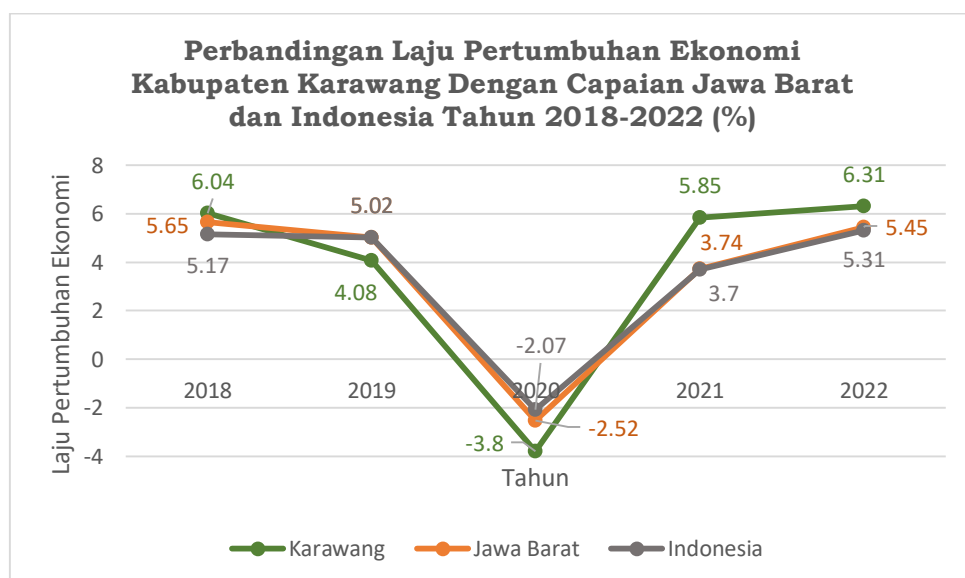


**Tabel 2.13**  
**Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karawang**  
**dengan Rata-Rata Capaian Wilayah yang Setara**

No	Kab/Kota	Pertumbuhan LPE 2022	LPE	
			2021	2022
1	Majalengka	1,88	4,75	6,63
<b>2</b>	<b>Karawang</b>	<b>0,46</b>	<b>5,85</b>	<b>6,31</b>
3	Kota Cimahi	1,73	4,19	5,92
4	Kota Bogor	1,89	3,76	5,65
5	Kuningan	1,97	4,19	5,53
6	Kota Bandung	1,65	3,76	5,41
7	Bandung	1,79	3,56	5,35
8	Kota Sukabumi	1,64	3,71	5,35
9	Bandung Barat	1,88	3,46	5,34
<b>Rata-Rata Capaian Pertumbuhan LPE Wilayah yang Setara</b>				<b>5,72</b>

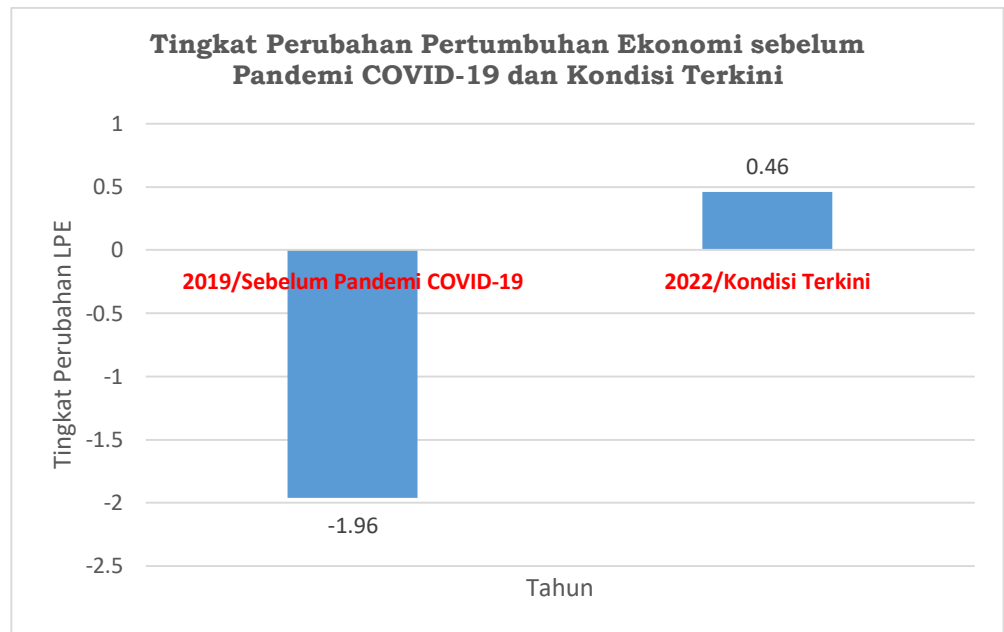
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat 2023

Dengan melihat Gambar 2.8, tahun 2018 LPE Kabupaten Karawang berada di atas capaian LPE Provinsi Jawa Barat dan Indonesia. Namun, tahun 2019, LPE Kabupaten Karawang berada di bawah capaian LPE Provinsi Jawa Barat dan Indonesia. Keadaan ini berlanjut hingga tahun 2020 saat terjadinya pandemi COVID-19, LPE Kabupaten Karawang mengalami penurunan drastis. Kondisi terkini, yaitu pada tahun 2021 dan 2022, LPE Kabupaten Karawang kembali berada di atas capaian LPE Provinsi Jawa Barat dan Indonesia. Dengan kata lain, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karawang lebih baik dari capaian nasional.



Sumber: Kabupaten Karawang Dalam Angka Tahun 2023

**Gambar 2.8 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karawang dengan Capaian Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2018-2022 (%)**

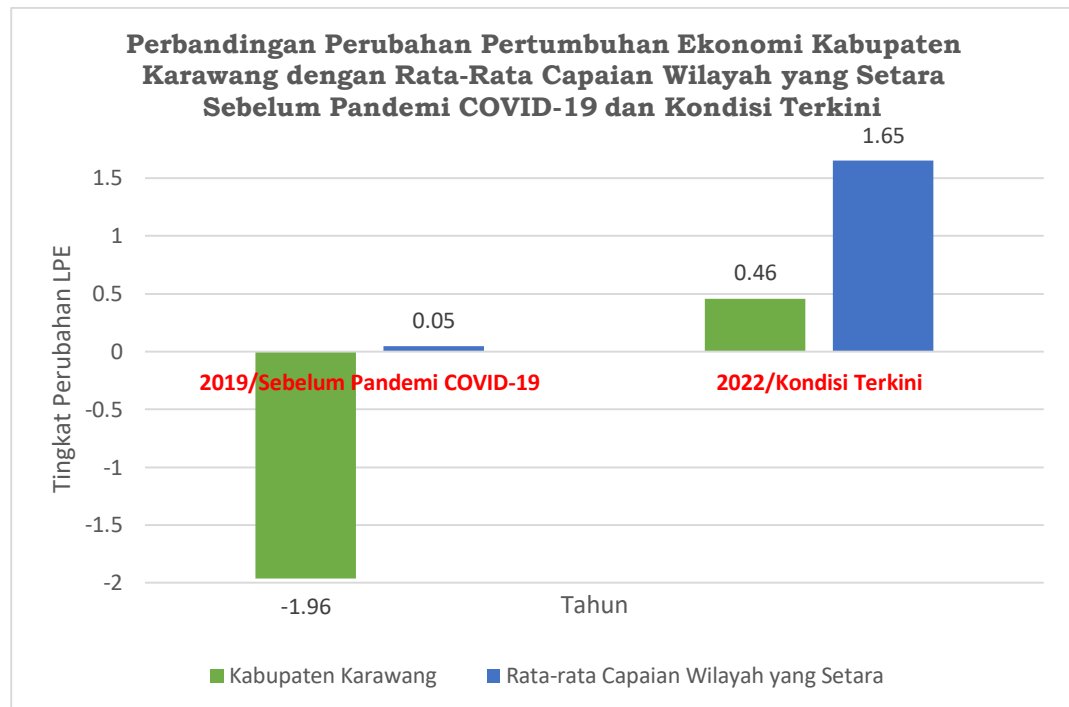


Sumber: Kabupaten Karawang Dalam Angka Tahun 2023

**Gambar 2.9 Tingkat Perubahan Pertumbuhan Ekonomi sebelum Pandemi COVID-19 dan Kondisi Terkini**

Tingkat perubahan ekonomi sebelum Pandemi COVID-19 dan kondisi terkini disajikan pada Gambar 2.9. Berdasarkan gambar tersebut, perubahan pertumbuhan ekonomi sebelum pandemi COVID-19 bernilai negatif atau kurang dari nol. Hal ini berarti terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2022 atau kondisi terkini perubahan pertumbuhan ekonomi bernilai positif atau lebih dari nol. Hal ini berarti setelah pandemi COVID-19 atau pada tahun 2022 terjadi pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan Gambar 2.10, perubahan pertumbuhan ekonomi sebelum pandemi COVID-19 Kabupaten Karawang sebesar -1,96 dan rata-rata capaian wilayah setara sebesar 0,05. Sementara itu, perubahan pertumbuhan ekonomi kondisi terkini Kabupaten Karawang sebesar 0,46 dan rata-rata capaian wilayah yang setara sebesar 1,65.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2023

**Gambar 2.10 Perbandingan Perubahan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karawang dengan Rata-Rata Capaian Wilayah yang Setara Sebelum Pandemi COVID-19 dan Kondisi Terkini**

Dapat disimpulkan, baik sebelum pandemi COVID-19 maupun kondisi terkini perubahan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karawang lebih buruk dari rata-rata capaian wilayah yang setara.

Berdasarkan Tabel 2.14, pada tahun 2018, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karawang berada pada peringkat tertinggi ke-11 dari 27 kab/kota di Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya, pada tahun 2019, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karawang mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi peringkat ke-25. Hal ini disebabkan terjadinya pandemi COVID-19 menjelang akhir tahun dimana pergerakan manusia mulai terbatas dan berujung pada aktivitas ekonomi yang terhambat dan hal ini pun berlanjut di tahun 2020. Oleh karena itu, pada tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karawang semakin menurun hingga menempati posisi terendah yaitu ke-27 di Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2021, Kabupaten Karawang berusaha untuk bertahan dengan situasi dan kondisi pandemi yang sudah dijalani selama 1 tahun dan dengan adanya kebijakan era *new normal* berdampak baik pada laju pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan melesat tinggi sehingga Kabupaten Karawang menempati posisi ke-1 di antara

kabupaten/kota lain yang ada di Jawa Barat. Pada tahun 2022, situasi dan kondisi pandemi COVID-19 sudah semakin membaik. Kabupaten Karawang pun berhasil meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi namun belum bisa bertahan di posisi ke-1.

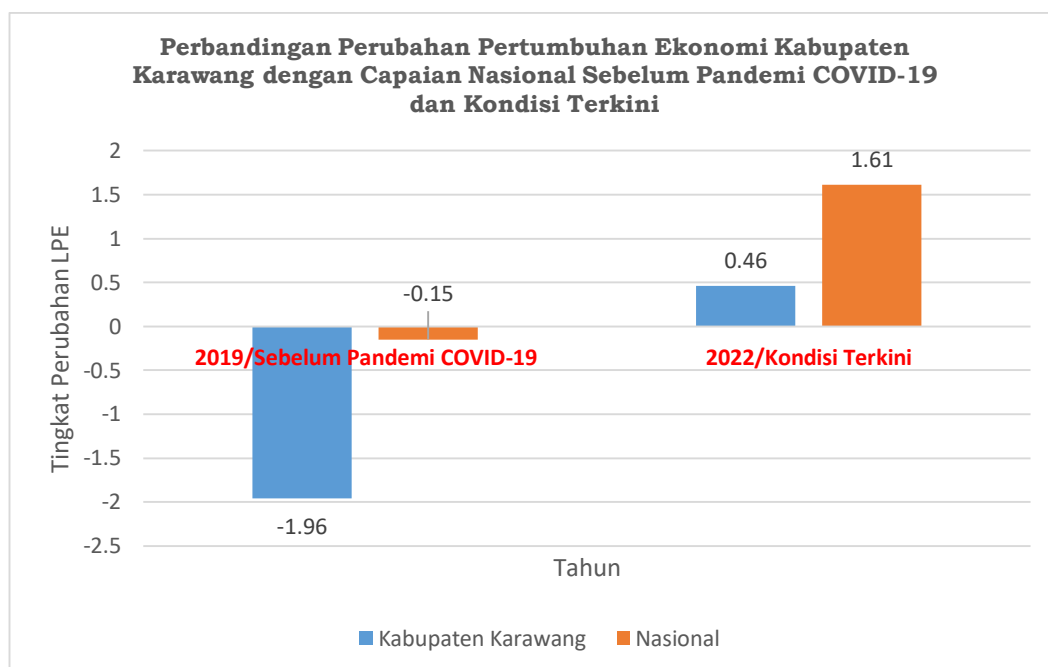
**Tabel 2.14**  
**Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Capaian Wilayah Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat**  
**Tahun 2018-2022**

No	Kab/Kota	2018	No	Kab/Kota	2019	No	Kab/Kota	2020	No	Kab/Kota	2021	No	Kab/Kota	2022
1	Kota Bandung	7,08	1	Kota Cimahi	7,85	1	Kota Banjar	0,94	1	Karawang	5,85	1	Majalengka	6,63
2	Kota Depok	6,97	2	Majalengka	7,77	2	Majalengka	0,89	2	Majalengka	4,75	2	Karawang	6,31
3	Majalengka	6,48	3	Kota Bandung	6,79	3	Kuningan	0,11	3	Kota Cimahi	4,19	3	Kota Cimahi	5,92
4	Kota Cimahi	6,46	4	Kota Depok	6,74	4	Pangandaran	-0,05	4	Kota Bogor	3,76	4	Kota Bogor	5,65
5	Kuningan	6,43	5	Kuningan	6,59	5	Ciamis	-0,14	5	Kota Bandung	3,76	5	Kuningan	5,53
6	Bandung	6,26	6	Bandung	6,36	6	Kota Bogor	-0,41	6	Kota Depok	3,76	6	Kota Bandung	5,41
7	Cianjur	6,24	7	Sumedang	6,33	7	Cianjur	-0,78	7	Sukabumi	3,75	7	Bandung	5,35
8	Kota Cirebon	6,2	8	Kota Cirebon	6,29	8	Sukabumi	-0,92	8	Kota Sukabumi	3,71	8	Kota Sukabumi	5,35
9	Bogor	6,19	9	Kota Bogor	6,19	9	Tasikmalaya	-0,98	9	Pangandaran	3,67	9	Bandung Barat	5,34
10	Kota Bogor	6,14	10	Kota Tasikmalaya	5,97	10	Kota Cirebon	-0,98	10	Ciamis	3,66	10	Bekasi	5,30
11	Karawang	6,04	11	Pangandaran	5,94	11	Cirebon	-1,08	11	Bekasi	3,65	11	Bogor	5,25
12	Bekasi	6,02	12	Bogor	5,85	12	Sumedang	-1,12	12	Garut	3,58	12	Purwakarta	5,24
13	Kota Tasikmalaya	5,93	13	Cianjur	5,67	13	Subang	-1,15	13	Kota Tasikmalaya	3,57	13	Kota Depok	5,24
14	Kota Bekasi	5,86	14	Sukabumi	5,64	14	Garut	-1,26	14	Bandung	3,56	14	Sukabumi	5,12
15	Sukabumi	5,81	15	Kota Sukabumi	5,53	15	Kota Sukabumi	-1,49	15	Kuningan	3,56	15	Kota Cirebon	5,10
16	Sumedang	5,79	16	Tasikmalaya	5,43	16	Indramayu	-1,58	16	Bogor	3,55	16	Garut	5,08
17	Tasikmalaya	5,7	17	Kota Bekasi	5,41	17	Bogor	-1,76	17	Cianjur	3,48	17	Cianjur	5,04
18	Kota Sukabumi	5,52	18	Ciamis	5,38	18	Bandung	-1,8	18	Bandung Barat	3,46	18	Sumedang	5,03
19	Bandung Barat	5,5	19	Bandung Barat	5,05	19	Kota Depok	-1,92	19	Kota Banjar	3,46	19	Pangandaran	5,03
20	Pangandaran	5,32	20	Kota Banjar	5,03	20	Kota Tasikmalaya	-2,01	20	Tasikmalaya	3,43	20	Ciamis	5,02
21	Ciamis	5,31	21	Garut	5,02	21	Purwakarta	-2,13	21	Purwakarta	3,42	21	Kota Tasikmalaya	5,01

No	Kab/Kota	2018	No	Kab/Kota	2019	No	Kab/Kota	2020	No	Kab/Kota	2021	No	Kab/Kota	2022
22	Kota Banjar	5,05	22	Cirebon	4,68	22	Kota Cimahi	-2,26	22	Kota Bekasi	3,22	22	Kota Bekasi	4,96
23	Cirebon	5,02	23	Subang	4,61	23	Kota Bandung	-2,28	23	Sumedang	3,17	23	Tasikmalaya	4,70
24	Purwakarta	4,98	24	Purwakarta	4,37	24	Bandung Barat	-2,41	24	Kota Cirebon	3,04	24	Subang	4,21
25	Garut	4,96	25	Karawang	4,21	25	Kota Bekasi	-2,58	25	Cirebon	2,47	25	Kota Banjar	4,19
26	Subang	4,41	26	Bekasi	3,95	26	Bekasi	-3,4	26	Subang	2,40	26	Cirebon	4,09
27	Indramayu	1,34	27	Indramayu	3,2	27	Karawang	-3,8	27	Indramayu	0,58	27	Indramayu	2,88

Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angkat Tahun 2023





Sumber: Kabupaten Karawang Dalam Angka Tahun dan BPS Indonesia 2023

**Gambar 2.11 Perbandingan Perubahan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karawang Dengan Capaian Nasional Sebelum Pandemi COVID-19 dan Kondisi Terkini**

Dengan melihat Gambar 2.11, perubahan pertumbuhan ekonomi sebelum pandemi COVID-19 Kabupaten Karawang sebesar -1,96 dan capaian nasional sebesar -0,15. Sementara itu, perubahan pertumbuhan ekonomi kondisi terkini Kabupaten Karawang sebesar 0,46 dan capaian nasional sebesar 1,61. Hal ini berarti, baik sebelum pandemi COVID-19 maupun kondisi terkini perubahan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karawang lebih buruk dari capaian nasional.

Struktur perekonomian suatu wilayah dapat menggambarkan sektor-sektor yang menjadi mesin pertumbuhan ekonomi daerah (*engine growth*). Di Kabupaten Karawang yang menjadi motor penggerak utama pertumbuhan adalah sektor industri pengolahan, hal tersebut terbukti dari peranan sektor industri yang mendominasi perekonomian di Kabupaten Karawang dari tahun ke tahun.

Berdasarkan konsep dan definisi dari BPS (*sumber: <https://www.bps.go.id>*), Industri Pengolahan adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir.

Dari definisi tersebut dapat diklaim bahwa faktor pendukung tumbuhnya LPE Kabupaten Karawang Tahun 2021 adalah Kebijakan Pemerintahan Daerah melalui APBD yang banyak diarahkan ke program-program yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung tumbuhnya industri pengolahan, yaitu: Pembentukan Mal Pelayanan Publik dalam rangka mempermudah perizinan, kebijakan insentif pajak, Pengadaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian dan perkebunan (Mesin Huller Kopi, Pengadaan Mesin, Pullper Kopi, Pengadaan mesin, sortir warna kopi, Pengadaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian dan perkebunan (Roasting kopi, Pengadaan mesin, grinder kopi, Pengadaan mesin Packing kopi, Pengadaan mesin, Sortir Greenbean Kopi, Pengadaan mesin Pengolahan Pupuk Organik Kopi, Pengadaan mesin Pencuci Kopi HS, Pengadaan Tempat Pengering Kopi/Drying Station, Pelatihan Kelompok Tani Perkebunan), Pengadaan IKM Kerajinan, Pengadaan IKM Perbengkelan, Sarana pengolahan hasil perikanan, Sarana pemasaran hasil perikanan, Pelatihan Berbasis Kompetensi (Kejuruan Teknik Listrik, Kejuruan Teknik Las, Kejuruan Teknik Manufaktur, Kejuruan Teknik Otomotif, Kejuruan Teknologi Informasi, Kejuruan Elektronika, Kejuruan Bisnis dan Manajemen, Kejuruan Garmen Apparel, Kejuruan Tata Rias, Kejuruan Barrista), Pelatihan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif, adanya kelompok masyarakat yang dilatih menjadi wirausaha pemula dan diberikan alat produksi, pemberian kemasan kepada masyarakat untuk menambah nilai jual produksinya, pemberian alat penunjang produksi kepada pelaku usaha dan lain-lain.

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita ADHB menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

PDRB per Kapita ADHK dan ADHB Kabupaten Karawang tahun dapat dilihat pada Tabel 2.15. PDRB per kapita ADHK berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi penduduk di suatu wilayah. PDRB per kapita ADHK di Kabupaten Karawang mengalami kenaikan pada tahun 2019 sebesar 4,30% dari 67,35 juta rupiah menjadi 70,24 juta rupiah. Lalu, akibat pandemi COVID-19 PDRB per kapita ADHK Kabupaten Karawang mengalami penurunan hingga 7,67% menjadi 64,85 juta rupiah. Dua tahun berikutnya yaitu 2021 dan 2022 PDRB per kapita ADHK Kabupaten Karawang kembali mengalami kenaikan. Pada tahun 2022 kenaikannya mencapai 4,75% menjadi 70,84%. Namun, kenaikan yang terjadi tidak setinggi pada kenaikan PDRB per kapita ADHB. Hal ini terjadi karena PDRB per kapita ADHK tidak dipengaruhi oleh faktor inflasi.

**Tabel 2.15**  
**Perkembangan dan Nilai Pendapatan Perkapita**  
**Kabupaten Karawang Tahun 2018-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan perkapita ADHB (juta Rupiah)</b>	<b>Perubahan ADHB (%)</b>	<b>Pendapatan perkapita ADHK (juta Rupiah)</b>	<b>Pertumbuhan ADHK (%)</b>
<b>2018</b>	92,27	8,27%	67,35	5,15%
<b>2019</b>	98,63	6,89%	70,24	4,30%
<b>2020</b>	92,13	-6,59%	64,85	-7,67%
<b>2021</b>	98,73	7,16%	67,63	4,28%
<b>2022</b>	107,07	8,44%	70,84	4,75%

*Sumber : BPS Kabupaten Karawang Tahun 2023, diolah*

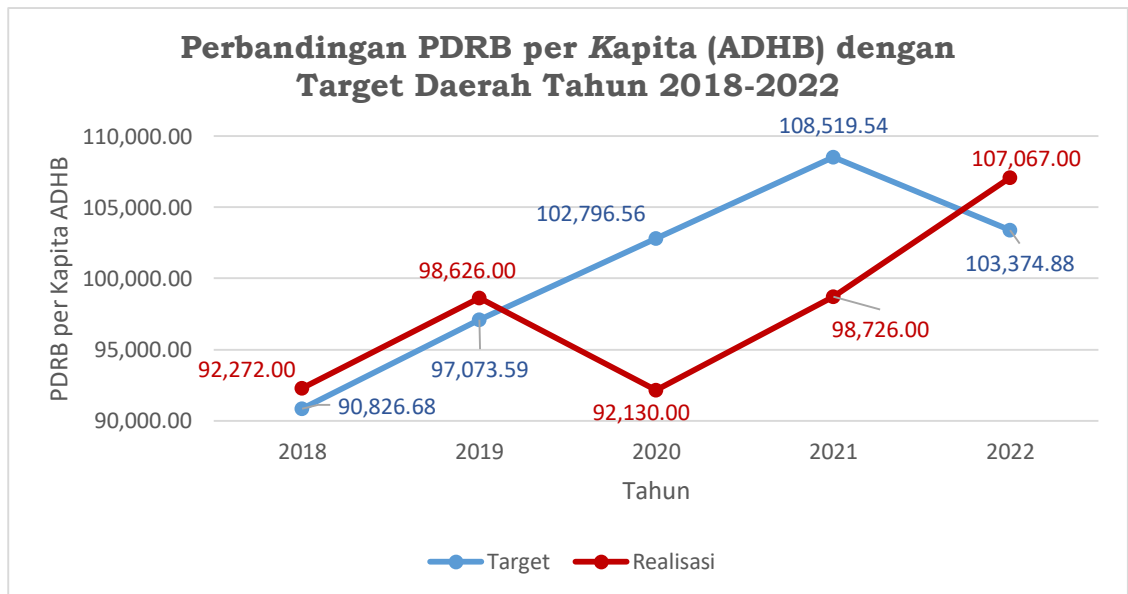
Nilai PDRB per kapita ADHB Kabupaten Karawang sejak tahun 2018 hingga 2022 senantiasa mengalami kenaikan. Penurunan PDRB per kapita ADHB hanya terjadi pada tahun 2020 akibat dari pandemi COVID-19, turun sebesar 6,59%. Kenaikan PDRB per kapita ADHB tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 8,44% menjadi 107,07 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan oleh faktor inflasi. Kabupaten Karawang telah membentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah yang intensif melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian distribusi dan ketersediaan pasokan barang.

**Tabel 2.16**  
**Perbandingan PDRB Per Kapita (ADHB) Dengan Target Daerah (Ribu Rupiah) Tahun 2018-2022**

	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Target</b>	90.826,68	97.073,59	102.796,56	108.519,54	103.374,88
<b>Realisasi</b>	92.272,00	98.626,00	92.130,00	98.726,00	107.067,00

Sumber : Target: angka proyeksi, capaian: BPS Tahun 2023

Tabel 2.16 dan Gambar 2.12 menyajikan perbandingan PDRB per Kapita ADHB dengan target daerah pada tahun 2018-2022. Berdasarkan tabel dan gambar tersebut tahun 2018, 2019, dan 2022 PDRB per kapita ADHB Kabupaten Karawang berhasil melebihi target daerah. Namun, pada tahun 2020 dan 2021 PDRB per kapita Kabupaten Karawang berada di bawah target daerah. Hal ini terjadi akibat dampak dari pandemi COVID-19.



Sumber: Target: angka proyeksi, capaian: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2023

**Gambar 2.12 Perbandingan PDRB per Kapita (ADHB) dengan Target Daerah Tahun 2018-2022**

Perbandingan PDRB per Kapita ADHK dengan target daerah tahun 2018-2022 dapat dilihat pada Tabel 2.17 dan Gambar 2.13. Berdasarkan tabel dan gambar tersebut, hal yang sama juga terjadi pada PDRB per kapita ADHK, yang membedakan antara PDRB per kapita ADHK dan ADHB hanyalah nilai yang dicapai setiap tahunnya. PDRB per kapita ADHK pada tahun 2018, 2019, dan 2022 berhasil melebihi target. Sedangkan tahun 2020 dan 2021 PDRB per kapita ADHK berada di bawah target.



Dengan melihat Gambar 2.14 yaitu perbandingan pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK Kabupaten Karawang dengan rata-rata capaian wilayah yang setara, Kabupaten Karawang termasuk ke dalam Wilayah 3. Rincian capaian wilayah yang setara dengan Kabupaten Karawang terdapat pada Tabel 2.18 dengan rata-rata pertumbuhan PDRB per kapita ADHK sebesar 4,52%. Hal ini berarti pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK Kabupaten Karawang Tahun 2022 sebesar 4,75% lebih baik dari rata-rata capaian wilayah yang setara sebesar 4,52%.

**Tabel 2.18**  
**Perbandingan Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK dengan rata-rata Capaian Wilayah yang Setara**

No	Kab/Kota	PDRB Per Kapita ADHK		Pertumbuhan PDRB Per Kapita ADHK 2022
		2021	2022	
1	Majalengka	17.278	18.197	5,32
2	Kota Cimahi	40.718	42.857	5,25
<b>3</b>	<b>Karawang</b>	<b>67.627</b>	<b>70.840</b>	<b>4,75</b>
4	Kota Bogor	31.712	33.153	4,54
5	Sumedang	21.059	21.972	4,34
6	Garut	15.349	15.991	4,18
7	Ciamis	18.401	19.169	4,17
8	Kuningan	14.811	15.426	4,15
9	Kota Bekasi	27.212	28.283	3,94
<b>Rata-Rata Capaian Pertumbuhan PDRB Per Kapita ADHK Wilayah yang Setara</b>				<b>4,52</b>

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Tabel 2.19, PDRB per kapita ADHK Kabupaten Karawang selama dua tahun yaitu tahun 2018 dan 2019 berada di peringkat ke-2 tertinggi dari 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. PDRB per kapita ADHK Kabupaten Karawang berada di bawah PDRB per kapita ADHK Kota Bandung. Selama tiga tahun berikutnya yaitu tahun 2020, 2021, dan 2022, PDRB per kapita ADHK Kabupaten Karawang menempati peringkat ke-3 dari 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. PDRB per kapita ADHK Kabupaten Karawang berada di bawah PDRB per kapita Kota Bandung dan Kabupaten Bekasi. Walaupun mengalami penurunan peringkat, dapat dikatakan bahwa kemakmuran penduduk Kabupaten Karawang sudah lebih tinggi dari kabupaten/kota lain di Jawa Barat.

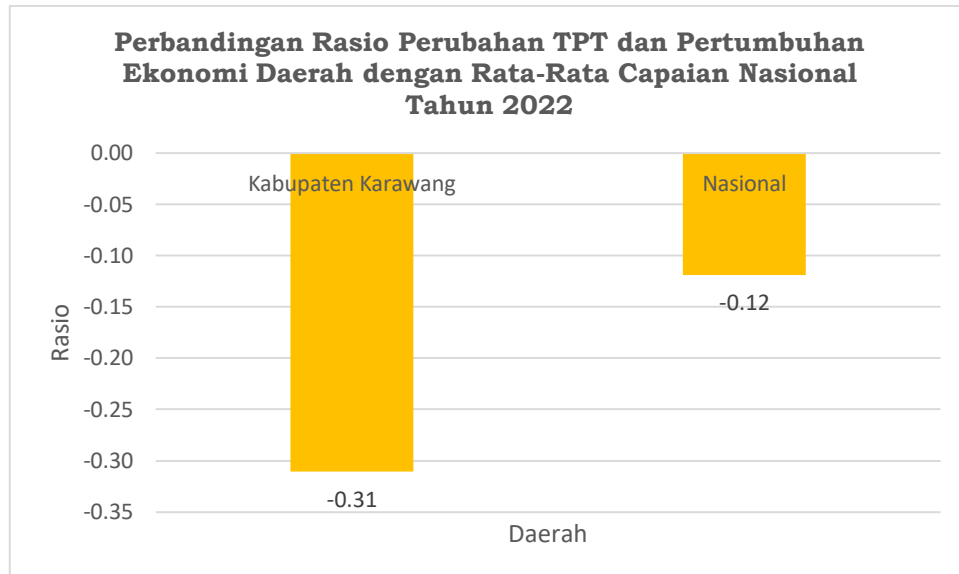
**Tabel 2.19**  
**Perbandingan Pertumbuhan PDRB Per Kapita ADHK dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat**  
**Tahun 2018-2022 (Ribu Rupiah)**

No	Kab/Kota	2018	No	Kab/Kota	2019	No	Kab/Kota	2020	No	Kab/Kota	2021	No	Kab/Kota	2022
1	Kota Bandung	73.924	1	Kota Bandung	77545	1	Kota Bandung	79.032	1	Kota Bandung	81.704	1	Kota Bandung	82.820
2	Karawang	67.345	2	Karawang	70.240	2	Bekasi	78.341	2	Bekasi	79.744	2	Bekasi	82.472
3	Bekasi	66.636	3	Bekasi	68.158	3	Karawang	64.852	3	Karawang	67.627	3	Karawang	70.840
4	Kota Cirebon	50.011	4	Kota Cirebon	53.245	4	Kota Cirebon	50.075	4	Kota Cirebon	50.924	4	Kota Cirebon	52.838
5	Purwakarta	46.508	5	Purwakarta	48.924	5	Purwakarta	45.549	5	Purwakarta	46.309	5	Purwakarta	47.924
6	Kota Cimahi	34.867	6	Kota Cimahi	38.002	6	Kota Cimahi	39.336	6	Kota Cimahi	40.718	6	Kota Cimahi	42.857
7	Indramayu	33.904	7	Indramayu	34.629	7	Indramayu	32.336	7	Indramayu	32.162	7	Kota Bogor	33.153
8	Kota Bogor	27.729	8	Kota Bogor	29.643	8	Kota Bogor	30.893	8	Kota Bogor	31.712	8	Indramayu	32.727
9	Bogor	25.373	9	Bogor	26.709	9	Bogor	28.476	9	Bogor	29.070	9	Bogor	30.173
10	Kota Sukabumi	25.162	10	Kota Sukabumi	26.527	10	Kota Bekasi	26.629	10	Kota Bekasi	27.212	10	Kota Bekasi	28.283
11	Kota Bekasi	22.458	11	Kota Bekasi	23.580	11	Kota Sukabumi	24.724	11	Kota Sukabumi	25.231	11	Kota Sukabumi	26.161
12	Kota Tasikmalaya	22.421	12	Kota Tasikmalaya	23.320	12	Kota Depok	23.496	12	Kota Depok	23.945	12	Kota Depok	24.756
13	Bandung	20.879	13	Bandung	22.321	13	Bandung	22.432	13	Bandung	22.898	13	Bandung	23.782
14	Kota Depok	19.731	14	Kota Depok	20.802	14	Kota Tasikmalaya	21.601	14	Kota Tasikmalaya	22.076	14	Kota Tasikmalaya	22.879
15	Sumedang	19.574	15	Sumedang	20.490	15	Sumedang	20.552	15	Sumedang	21.059	15	Sumedang	21.972
16	Pangandaran	18.401	16	Pangandaran	19.307	16	Pangandaran	18.304	16	Pangandaran	18.762	16	Pangandaran	19.488
17	Sukabumi	17.938	17	Bandung Barat	18.773	17	Ciamis	17.898	17	Ciamis	18.401	17	Ciamis	19.169
18	Bandung Barat	17.752	18	Sukabumi	18.651	18	Subang	17.796	18	Subang	18.043	18	Subang	18.580
19	Ciamis	17.565	19	Ciamis	18.329	19	Bandung Barat	17.198	19	Bandung Barat	17.474	19	Majalengka	18.197
20	Subang	17.358	20	Subang	18.264	20	Sukabumi	17.008	20	Sukabumi	17.358	20	Bandung Barat	18.080
21	Kota Banjar	16.777	21	Majalengka	17.759	21	Majalengka	16.704	21	Majalengka	17.278	21	Sukabumi	17.953
22	Majalengka	16.682	22	Kota Banjar	17.291	22	Kota Banjar	16.228	22	Kota Banjar	16.539	22	Kota Banjar	16.983
23	Cirebon	14.779	23	Kuningan	15.560	23	Garut	14.949	23	Garut	15.349	23	Garut	15.991
24	Kuningan	14.725	24	Cirebon	15.421	24	Cirebon	14.696	24	Cirebon	14.897	24	Kuningan	15.426

No	Kab/Kota	2018	No	Kab/Kota	2019	No	Kab/Kota	2020	No	Kab/Kota	2021	No	Kab/Kota	2022
25	Garut	14.282	25	Garut	14.939	25	Kuningan	14.495	25	Kuningan	14.811	25	Cirebon	15.342
26	Cianjur	13.412	26	Cianjur	13.900	26	Tasikmalaya	13.081	26	Tasikmalaya	13.367	26	Tasikmalaya	13.829
27	Tasikmalaya	13.316	27	Tasikmalaya	13.789	27	Cianjur	12.868	27	Cianjur	13.124	27	Cianjur	13.590

Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2023

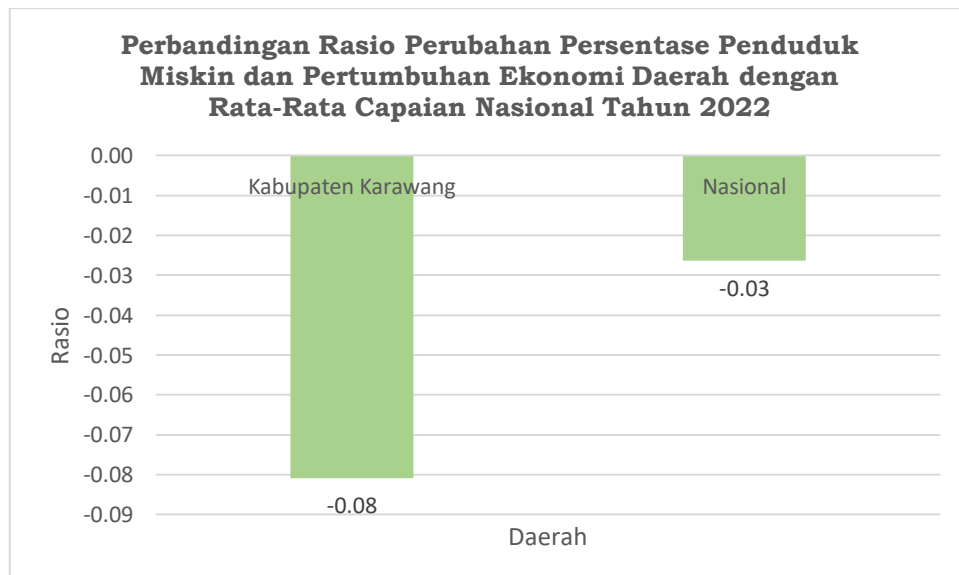




Sumber : BPS 2023

**Gambar 2.15 Perbandingan Rasio Perubahan TPT dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Rata-Rata Capaian Nasional Tahun 2022**

Berdasarkan Gambar 2.15, pada tahun 2022, rasio perubahan TPT dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karawang sebesar -0,31 yang lebih kecil dari rata-rata capaian nasional sebesar -0,12. Hal ini berarti rasio perubahan TPT dengan pertumbuhan ekonomi daerah lebih baik dari rata-rata capaian nasional.



Sumber: Karawang Dalam Angka Tahun 2023

**Gambar 2.16 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Capaian Nasional Tahun 2018-2022**

Berdasarkan Gambar 2.16, pada tahun 2022, rasio perubahan persentase penduduk miskin dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karawang sebesar -0,08 yang lebih kecil dari rata-rata capaian nasional sebesar -0,03. Hal ini berarti rasio perubahan persentase

penduduk miskin dengan pertumbuhan ekonomi daerah lebih baik dari rata-rata capaian nasional.



Sumber : Karawang Dalam Angka Tahun 2023

**Gambar 2.17 Perbandingan Rasio Gini dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Capaian Nasional Tahun 2018-2022**

Berdasarkan Gambar 2.17, pada tahun 2022, rasio perubahan rasio gini dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karawang sebesar -0,0033 yang lebih kecil dari rata-rata capaian nasional sebesar 0,00. Hal ini berarti rasio perubahan persentase penduduk miskin dengan pertumbuhan ekonomi daerah lebih baik dari rata-rata capaian nasional. Rata-rata capaian nasional bernilai nol karena pada tahun 2021 dan 2022 capaian rasio gini sama yaitu sebesar 0,384 sehingga perubahan rasio gini sebesar nol.

#### 2.1.2.1.2 Laju Inflasi

Inflasi di suatu daerah adalah indikator penting untuk bahan analisis ekonomi karena menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang terjadi karena adanya kegiatan ekonomi dengan adanya permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*). Tabel 2.20 menyajikan target dan realisasi inflasi tahun 2021-2022.

**Tabel 2.20**  
**Target dan Realisasi Inflasi Tahun 2021 – 2024**

NO	URAIAN	2021		2022		Target 2023
		T	R	T	R	
1	Inflasi	5-6	0,89	5-6	N/A	5-6

Sumber: BPS Berita Resmi Statistik : Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi Desember 2020

Berdasarkan Tabel 2.21, laju inflasi tahun kalender “*year to date*” Desember 2020 Karawang sebesar 1,94%. Pada tahun 2021, inflasi Kabupaten Karawang mengalami penurunan menjadi 0,89%.

**Tabel 2.21**  
**Laju Inflasi Kabupaten Karawang Tahun 2018-2022**

Tahun	Inflasi Januari – Desember
2018	3,59
2019	3,13
2020	1,94
2021	0,89
2022	N/A

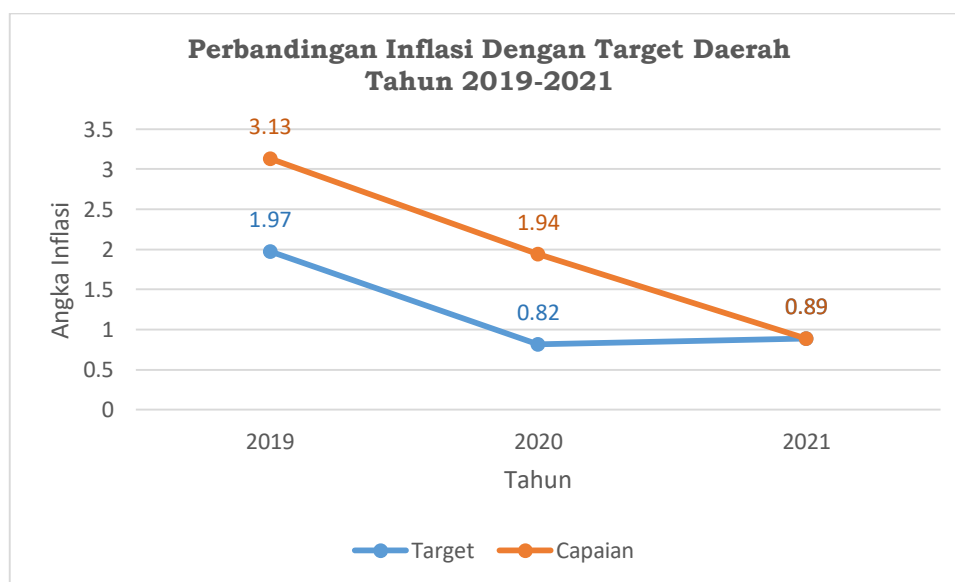
Sumber : BPS Berita Resmi Statistik : Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi Desember 2021

Dengan melihat Tabel 2.22 dan Gambar 2.18, selama periode 2018-2020 Kabupaten Karawang, belum berhasil mencapai target inflasi daerah. Pada tahun 2021, inflasi Kabupaten Karawang berhasil mencapai target inflasi daerah.

**Tabel 2.22**  
**Perbandingan Inflasi Dengan Target Daerah Tahun 2018-2022**

	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Target</b>	N/A	1,97	0,82	0,89	N/A
<b>Capaian</b>	3,59	3,13	1,94	0,89	N/A

Sumber: Target: angka proyeksi, capaian: BPS Tahun 2023



Sumber: Target: angka proyeksi, capaian: BPS Tahun 2021

**Gambar 2.18** Perbandingan Inflasi Dengan Target Daerah Tahun 2019-2021

Tabel 2.23 menyajikan realisasi indikator makro kabupaten Karawang untuk tahun 2023-2024.

**Tabel 2.23**  
**Realisasi Indikator Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang**  
**Tahun 2024**

NO	INDIKATOR	Realisasi	
		2021	2022
1	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) (Poin)	70,94	71,74
2	LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI (LPE) (%)	5,85	6,31
3	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA	11,83	9,87
4	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN (%)	8,95	8,44
5	RASIO GINI (%)	0,374	0,353
6	LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK (LPP) (%)	1,60	1,49
7	PENDAPATAN PER KAPITA ADHB (Juta Rupiah)	98,73	107,07

Sumber: RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2021-2026 dan angka proyeksi

Sedangkan proyeksi indikator pembangunan daerah Kabupaten Karawang dapat dilihat pada tabel 2.24. Diharapkan angka proyeksi yang sudah direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2021-2026 dapat tercapai pada tahun yang bersangkutan.

**Tabel 2.24**  
**Realisasi Indikator Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang**  
**Tahun 2023-2024**

No	Indikator Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi	
			2021	2022
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	70,94	71,74
2	Angka kemiskinan	Persen	8,95	8,44
3	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,85	6,31
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	44,8	44,92
5	Pertumbuhan PDRB Sektor Infrastruktur (infrastruktur pelayanan dasar, jalan, air bersih, listrik)	Persen	26,35	8,21
6	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Indeks	60,16	63,36

Sumber: RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2021-2026

#### **2.1.2.2 Tingkat Pengangguran Terbuka dan Jumlah Penganggur**

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3)

penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (*supply*) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi, perubahan siklus bisnis dan teknologi, dan lain-lain. Perbedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antar kelompok tersebut. Tabel 2.25 menyajikan target dan realisasi TPT tahun 2021-2024.

**Tabel 2.25**  
**Target dan Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka**  
**Tahun 2021 - 2024**

NO	URAIAN	2021		2022		Target 2023
		T	R	T	R	
1	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (%)	11,24	11,83	10,95	9,87	10,68
2	JUMLAH ANGKATAN KERJA	1.220.442	1.161.202	1.195.185	1.195.947	1.214.858

Sumber : BPS Kabupaten Karawang 2023 dan RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2021-2026

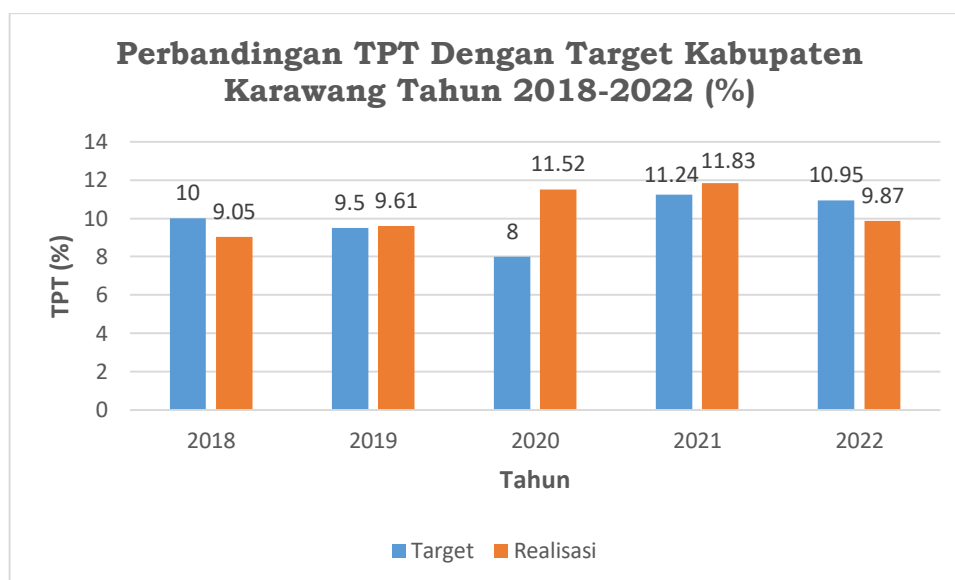
Berdasarkan Tabel 2.26 dan Gambar 2.19, tahun 2018, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karawang berhasil terealisasi di bawah target Kabupaten Karawang.

**Tabel 2.26**  
**Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Dengan Target**  
**Kabupaten Karawang Tahun 2018-2022 (Persen)**

Tahun	Target	Realisasi
2018	10	9,5
2019	9,50	9,61
2020	8,00	11,52
2021	11,24	11,83
2022	10,95	9,87

Sumber : Target: angka Proyeksi, Capaian: BPS Kabupaten Karawang Tahun 2023

Namun, tahun 2019 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karawang berada 0,11 di atas target daerah. Sama halnya dengan tahun 2020 dan 2021, realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karawang berada di atas target daerah. Hal ini terjadi akibat dampak dari pandemi COVID-19. Tahun 2022, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karawang berhasil kembali terealisasi di bawah target Kabupaten Karawang.



Sumber: Target: angka Proyeksi, Capaian: BPS Kabupaten Karawang Tahun 2023

**Gambar 2.19 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Dengan Target Kabupaten Karawang Tahun 2018-2022 (Persen)**

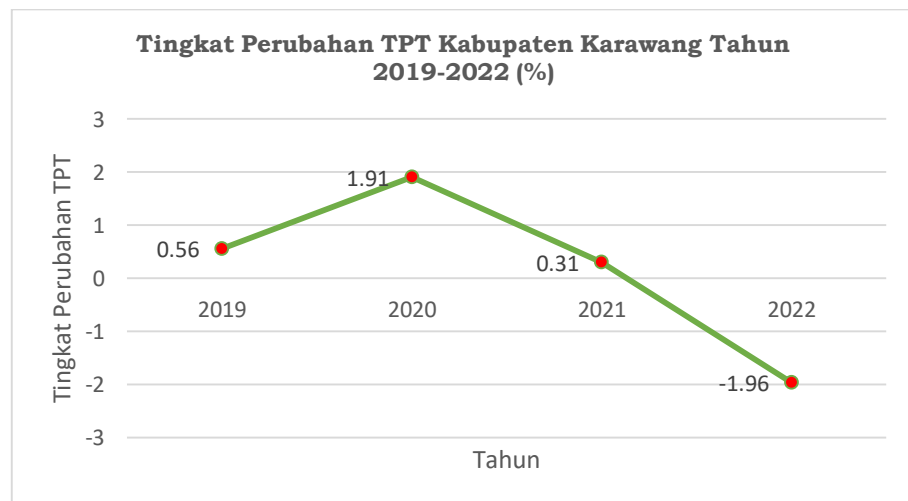
Tabel 2.27 dan Gambar 2.20 menyajikan tingkat perubahan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karawang Tahun 2019-2022. Berdasarkan tabel tersebut, kenaikan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karawang paling tinggi sebesar 1,91% terjadi pada tahun 2020. Tahun 2021 masih terjadi kenaikan pada Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karawang, namun tidak setinggi kenaikan pada tahun 2020 hanya sebesar 0,31%. Pada tahun 2022, terjadi penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karawang hingga mencapai 1,96%. Hal ini berarti tingkat perubahan TPT Kabupaten Karawang lebih kecil dari nol.

**Tabel 2.27**  
**Tingkat Perubahan TPT**  
**Kabupaten Karawang Tahun 2019-2022 (Persen)**

<b>KARAWANG</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Realisasi	9,05	9,61	11,52	11,83	9,87
Perubahan		0,56	1,91	0,31	-1,96

*Sumber: Target: angka Proyeksi, Capaian: BPS Kabupaten Karawang Tahun 2023*

Berdasarkan Gambar 2.20, dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karawang pada tahun 2020. Setelah itu pada tahun 2021 dan 2022 cenderung terjadi penurunan. Hal ini berarti penanganan dampak COVID-19 di Kabupaten Karawang berhasil menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Karawang.

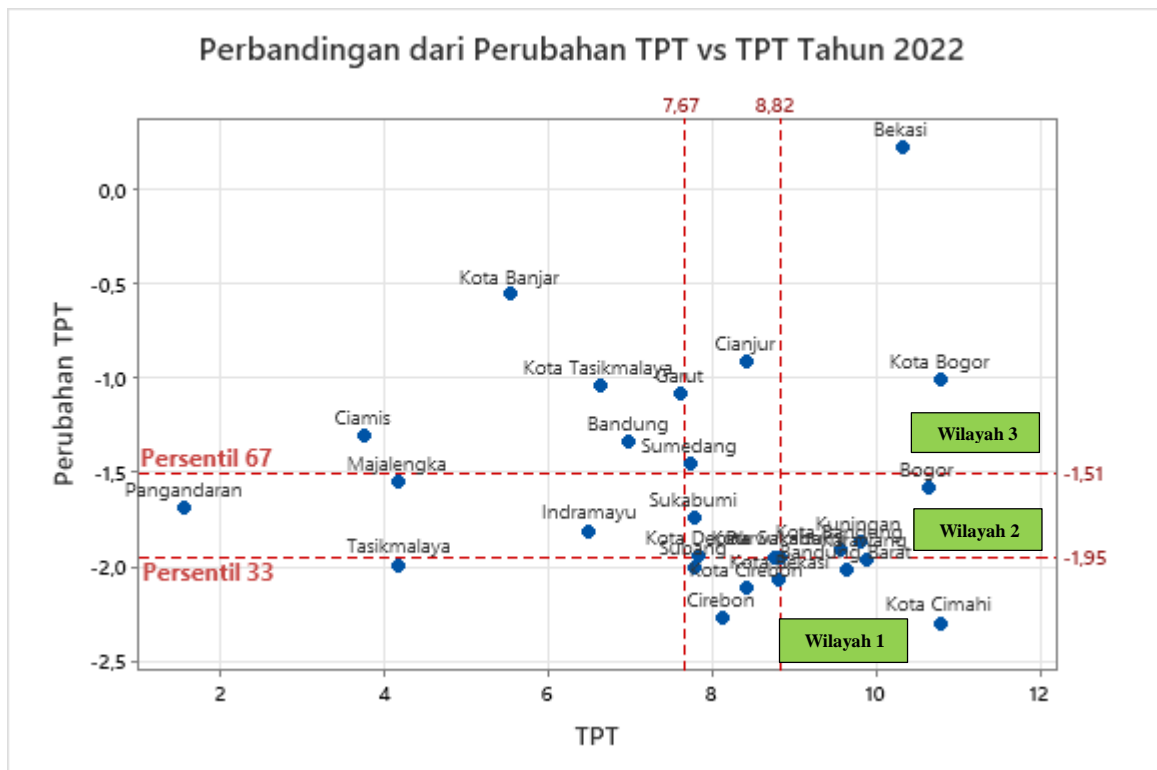


*Sumber: Diolah Bappeda Kabupaten Karawang 2023*

**Gambar 2.20 Tingkat Perubahan TPT Kabupaten Karawang Tahun 2019-2022 (Persen)**

Di Kabupaten Karawang terdapat industri besar dan internasional namun tingkat pengangguran masih tinggi dikarenakan keterampilan masyarakat Karawang belum dapat memenuhi kebutuhan industri. Upah Minimum Kabupaten Karawang yang semakin meningkat tiap tahun menarik warga pendatang untuk mencari pekerjaan di Kabupaten Karawang. Kabupaten Karawang memiliki Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dengan jelas menyebutkan Setiap perusahaan wajib mengupayakan dan mengutamakan secara maksimal agar lowongan pekerjaan yang terbuka diisi oleh Tenaga Kerja Lokal. Namun kondisi di lapangan, masyarakat Kabupaten

Karawang belum sepenuhnya memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan.



Sumber: BPS Karawang Tahun 2023, diolah

**Gambar 2.21 Perbandingan Perubahan TPT Daerah Kabupaten Karawang dengan Rata-Rata Capaian Wilayah yang Setara Tahun 2022**

Dengan melihat Gambar 2.21 yaitu perbandingan perubahan TPT Kabupaten Karawang dengan rata-rata capaian wilayah yang setara, Kabupaten Karawang termasuk ke dalam Wilayah 1.

**Tabel 2.28 Perbandingan Perubahan TPT Daerah Kabupaten Karawang dengan Rata-Rata Capaian Wilayah yang Setara**

No	Kab/Kota	TPT		Perubahan TPT 2022
		2021	2022	
1	Kota Cimahi	13,07	10,77	-2,30
2	Cirebon	10,38	8,11	-2,27
3	Kota Cirebon	10,53	8,42	-2,11
4	Kota Bekasi	10,88	8,81	-2,07
5	Bandung Barat	11,65	9,63	-2,02
6	Subang	9,77	7,77	-2,00
7	Tasikmalaya	6,16	4,17	-1,99
8	Karawang	11,83	9,87	-1,96
9	Purwakarta	10,70	8,75	-1,95
10	Kota Sukabumi	10,78	8,83	-1,95
<b>Rata-Rata Capaian Perubahan TPT Wilayah yang Setara</b>				<b>-2,06</b>

Sumber: BPS Jawa Barat Tahun 2023, diolah



Rincian capaian wilayah yang setara dengan Kabupaten Karawang terdapat pada Tabel 2.28 dengan rata-rata perubahan TPT sebesar -2,06%. Hal ini berarti perubahan TPT Kabupaten Karawang Tahun 2022 sebesar -1,96% lebih buruk dari rata-rata capaian wilayah yang setara sebesar -2,06%.

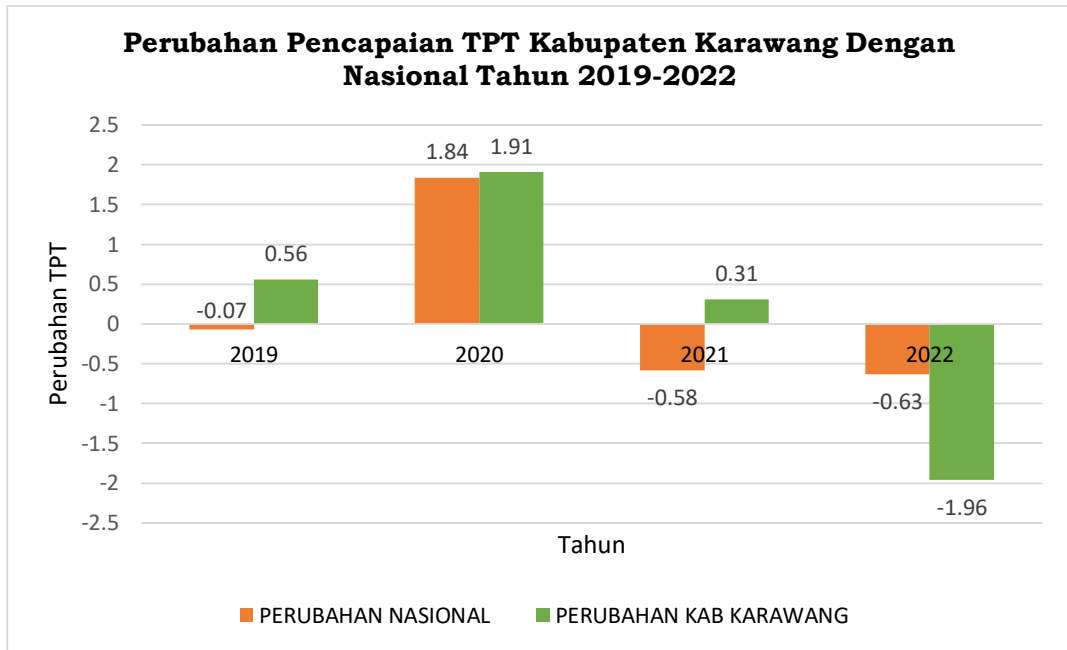
Tabel 2.29 menyajikan perbandingan perubahan pencapaian TPT Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional pada tahun 2019 hingga 2022. Tahun 2019 Jawa Barat dan Nasional mengalami penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka. Namun, Kabupaten Karawang mengalami kenaikan hingga mencapai 0,56%. Tahun 2020 TPT Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional mengalami kenaikan. Kenaikan tertinggi terjadi pada Provinsi Jawa Barat sebesar 2,42%. Nasional dan Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2021.

**Tabel 2.29**  
**Perbandingan Perubahan Capaian TPT**  
**Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat Dan Nasional**  
**Tahun 2019-2022 (Persen)**

<b>TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA</b>	<b>CAPAIAN</b>				
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
NASIONAL	5,3	5,23	7,07	6,49	5,86
PERUBAHAN NASIONAL		-0,07	1,84	-0,58	-0,63
PROVINSI JAWA BARAT	8,23	8,04	10,46	9,82	8,31
PERUBAHAN PROVINSI JAWA BARAT		-0,19	2,42	-0,64	-1,51
KABUPATEN KARAWANG	9,05	9,61	11,52	11,83	9,87
PERUBAHAN KABUPATEN KARAWANG		0,56	1,91	0,31	-1,96

*Sumber: BPS Karawang Tahun 2023, diolah*

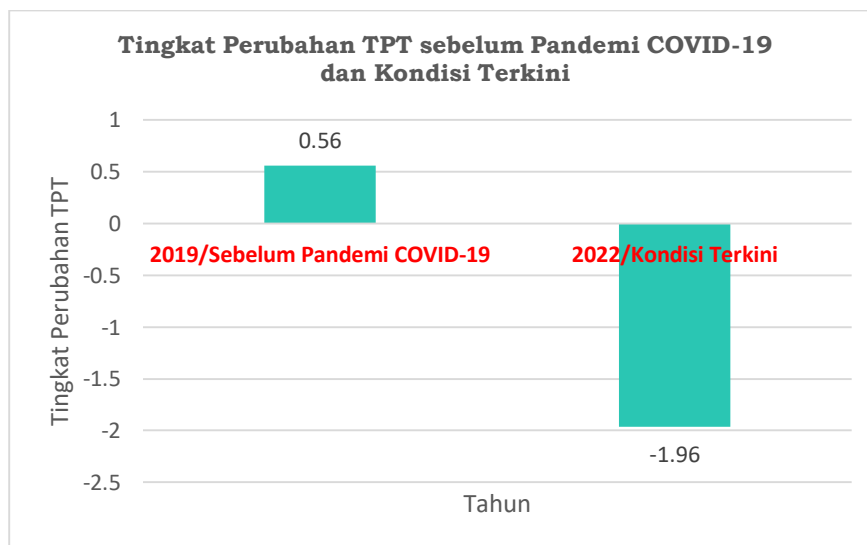
Berdasarkan Gambar 2.22, perubahan TPT daerah Kabupaten Karawang pada tahun 2022 lebih baik daripada perubahan TPT Nasional. Kabupaten Karawang mengalami perubahan TPT dari tahun sebelumnya berupa penurunan TPT sebesar 1,96%. Sedangkan perubahan TPT nasional dari tahun sebelumnya berupa penurunan TPT hanya mencapai 0,63%. Capaian perubahan TPT nasional tersebut lebih kecil 1,33% dari Capaian perubahan TPT Kabupaten Karawang.



Sumber: BPS Karawang Tahun 2023, diolah

**Gambar 2.22 Perbandingan Perubahan TPT Kabupaten Karawang Dengan Nasional Tahun 2019-2022**

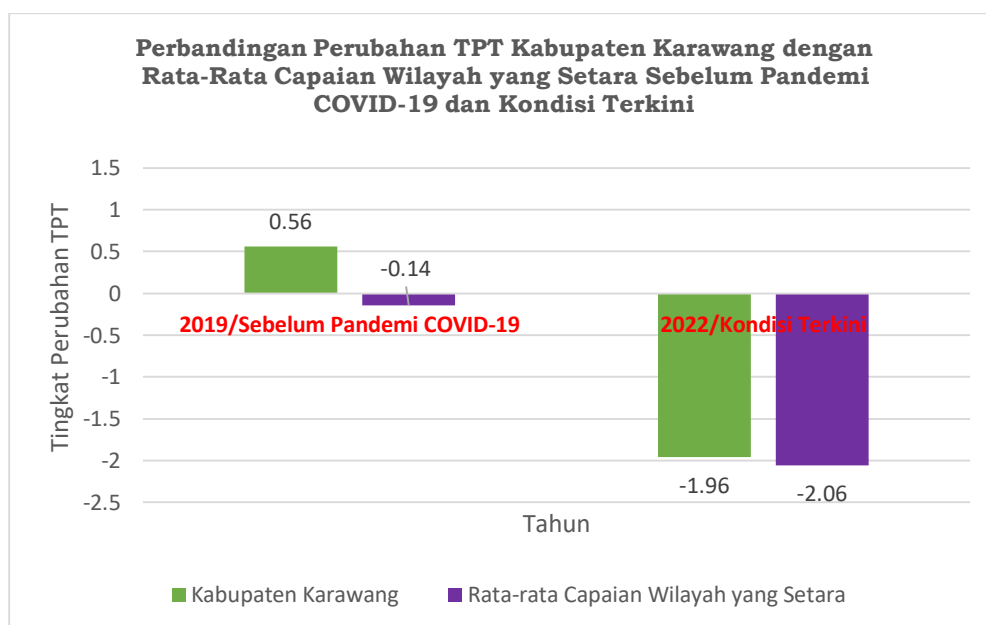
Tingkat perubahan TPT sebelum Pandemi COVID-19 dan kondisi terkini terkini disajikan pada Gambar 2.23. Berdasarkan gambar tersebut, perubahan pertumbuhan ekonomi sebelum pandemi COVID-19 bernilai positif atau lebih dari nol. Hal ini berarti terjadi kenaikan TPT pada tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2022 atau kondisi terkini perubahan TPT bernilai negatif atau kurang dari nol. Hal ini berarti setelah pandemi COVID-19 atau pada tahun 2022 terjadi penurunan TPT pada Kabupaten Karawang.



Sumber: BPS Karawang Tahun 2023, diolah

**Gambar 2.23 Tingkat Perubahan TPT Sebelum Pandemi COVID-19 dan Kondisi Terkini**

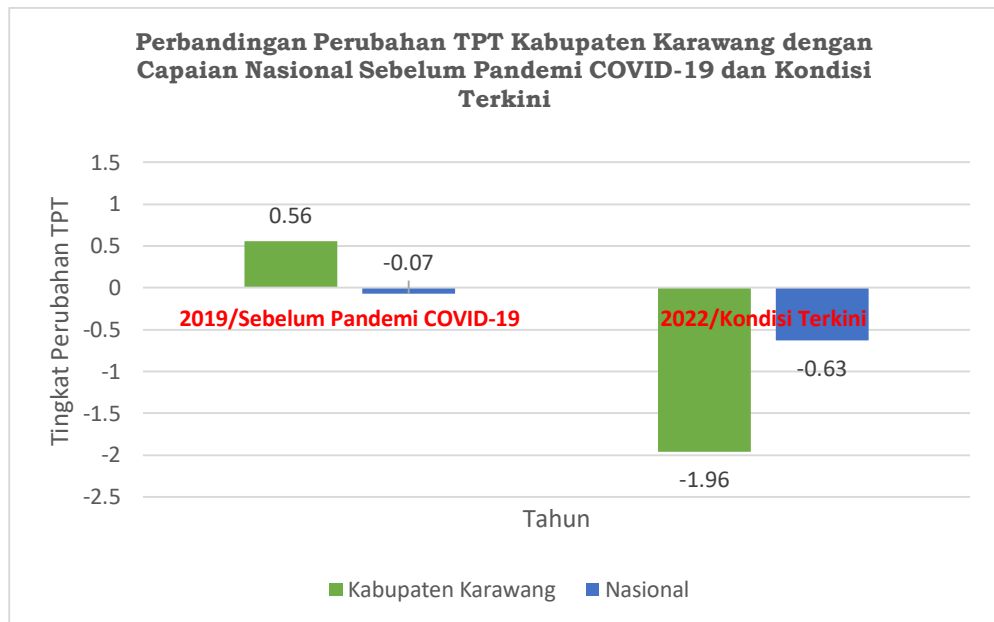
Berdasarkan Gambar 2.24, perubahan TPT sebelum pandemi COVID-19 Kabupaten Karawang sebesar 0,56 dan rata-rata capaian wilayah setara sebesar -0,14. Sementara itu, perubahan TPT kondisi terkini Kabupaten Karawang sebesar -1,96 dan rata-rata capaian wilayah yang setara sebesar -2,06. Dapat disimpulkan, baik sebelum pandemi COVID-19 maupun kondisi terkini perubahan TPT Kabupaten Karawang lebih buruk dari rata-rata capaian wilayah yang setara.



Sumber: BPS Karawang Tahun 2023, diolah

**Gambar 2.24 Perbandingan Perubahan TPT Kabupaten Karawang dengan Rata-Rata Capaian Wilayah yang Setara Sebelum Pandemi COVID-19 dan Kondisi Terkini**

Dengan melihat Gambar 2.25, perubahan TPT sebelum pandemi COVID-19 Kabupaten Karawang sebesar 0,56 dan capaian nasional sebesar -0,07. Sementara itu, perubahan TPT kondisi terkini Kabupaten Karawang sebesar -1,96 dan capaian nasional sebesar -0,63. Hal ini berarti, sebelum pandemi COVID-19 perubahan TPT Kabupaten Karawang lebih buruk dari capaian nasional. Sedangkan, dalam kondisi terkini perubahan TPT Kabupaten Karawang lebih baik dari capaian nasional.



**Gambar 2.25 Perbandingan Perubahan TPT Kabupaten Karawang dengan Nasional Sebelum Pandemi COVID-19 dan Kondisi Terkini**

Berdasarkan Tabel 2.30, TPT Kabupaten Karawang pada tahun 2018 menempati peringkat ke-8 tertinggi dari 27 kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat. Tahun 2019, peringkat TPT Kabupaten Karawang semakin meningkat menjadi peringkat ke-5. Selanjutnya, tahun 2020 TPT Kabupaten Karawang kembali lagi ke peringkat ke-8 dan kembali meningkat di tahun 2021 menjadi peringkat ke-3. Tahun 2022, TPT Kabupaten Karawang berhasil kembali lagi ke peringkat ke-5. Hal ini berarti telah terjadi penurunan jumlah pengangguran terhadap Angkatan kerja di Kabupaten Karawang.

**Tabel 2.30**  
**Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Antar Kabupaten/ Kota Se-Jawa Barat Tahun 2018-2022**

No	Kab/Kota	2018	No	Kab/Kota	2019	No	Kab/Kota	2020	No	Kab/Kota	2021	No	Kab/Kota	2022
1	Cirebon	10,64	1	Cirebon	10,35	1	Bogor	14,29	1	Kota Cimahi	13,07	1	Kota Bogor	10,78
2	Cianjur	10,23	2	Cianjur	9,81	2	Kota Cimahi	13,30	2	Bogor	12,22	2	Kota Cimahi	10,77
3	Purwakarta	9,94	3	Purwakarta	9,73	3	Kota Bogor	12,68	3	Karawang	11,83	3	Bogor	10,64
4	Bogor	9,83	4	Kuningan	9,68	4	Bandung Barat	12,25	4	Kota Bogor	11,79	4	Bekasi	10,31
5	Bekasi	9,74	5	Karawang	9,68	5	Kota Sukabumi	12,17	5	Kuningan	11,68	5	Karawang	9,87
6	Kota Bogor	9,74	6	Kota Bogor	9,16	6	Bekasi	11,54	6	Bandung Barat	11,65	6	Kuningan	9,81
7	Kota Bekasi	9,14	7	Bogor	9,11	7	Cirebon	11,52	7	Kota Bandung	11,46	7	Bandung Barat	9,63
8	Karawang	9,12	8	Kota Cirebon	9,04	8	Karawang	11,52	8	Kota Bekasi	10,88	8	Kota Bandung	9,55
9	Kuningan	9,10	9	Bekasi	9,00	9	Kuningan	11,22	9	Kota Sukabumi	10,78	9	Kota Sukabumi	8,83
10	Kota Cirebon	9,07	10	Subang	8,68	10	Kota Bandung	11,19	10	Purwakarta	10,70	10	Kota Bekasi	8,81
11	Subang	8,71	11	Kota Sukabumi	8,49	11	Purwakarta	11,07	11	Kota Cirebon	10,53	11	Purwakarta	8,75
12	Kota Sukabumi	8,57	12	Indramayu	8,35	12	Cianjur	11,05	12	Cirebon	10,38	12	Kota Cirebon	8,42
13	Bandung Barat	8,55	13	Kota Bekasi	8,30	13	Kota Cirebon	10,97	13	Bekasi	10,09	13	Cianjur	8,41
14	Indramayu	8,46	14	Bandung Barat	8,24	14	Kota Bekasi	10,68	14	Subang	9,77	14	Cirebon	8,11
15	Kota Bandung	8,05	15	Kota Bandung	8,18	15	Sumedang	9,89	15	Kota Depok	9,76	15	Kota Depok	7,82
16	Kota Cimahi	8,00	16	Kota Cimahi	8,09	16	Kota Depok	9,87	16	Sukabumi	9,51	16	Sukabumi	7,77
17	Sukabumi	7,84	17	Sukabumi	8,05	17	Sukabumi	9,60	17	Cianjur	9,32	17	Subang	7,77
18	Sumedang	7,54	18	Sumedang	7,70	18	Subang	9,48	18	Sumedang	9,18	18	Sumedang	7,72
19	Garut	7,12	19	Garut	7,35	19	Indramayu	9,21	19	Garut	8,68	19	Garut	7,60
20	Tasikmalaya	6,92	20	Kota Tasikmalaya	6,78	20	Garut	8,95	20	Bandung	8,32	20	Bandung	6,98
21	Kota Tasikmalaya	6,89	21	Tasikmalaya	6,31	21	Bandung	8,58	21	Indramayu	8,30	21	Kota Tasikmalaya	6,62
22	Kota Depok	6,66	22	Kota Banjar	6,16	22	Kota Tasikmalaya	7,99	22	Kota Tasikmalaya	7,66	22	Indramayu	6,49
23	Kota Banjar	5,95	23	Kota Depok	6,12	23	Tasikmalaya	7,12	23	Tasikmalaya	6,16	23	Kota Banjar	5,53
24	Bandung	5,07	24	Bandung	5,51	24	Kota Banjar	6,73	24	Kota Banjar	6,09	24	Tasikmalaya	4,17

No	Kab/Kota	2018	No	Kab/Kota	2019	No	Kab/Kota	2020	No	Kab/Kota	2021	No	Kab/Kota	2022
25	Majalengka	5,00	25	Ciamis	5,16	25	Majalengka	5,84	25	Majalengka	5,71	25	Majalengka	4,16
26	Ciamis	4,64	26	Pangandaran	4,52	26	Ciamis	5,66	26	Ciamis	5,06	26	Ciamis	3,75
27	Pangandaran	3,59	27	Majalengka	4,37	27	Pangandaran	5,08	27	Pangandaran	3,25	27	Pangandaran	1,56

Sumber: BPS Jawa Barat Tahun 2023

Tabel 2.31 menyajikan jumlah penganggur nasional, Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten Karawang Tahun 2018-2022. Berdasarkan tabel tersebut jumlah penganggur di Indonesia, Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten Karawang pada tahun 2018 sampai dengan 2021 cenderung mengalami peningkatan. Meningkatnya pengangguran ini disebabkan berbagai hal antara lain: pekerja baru memasuki dunia kerja, kemajuan teknologi, imobilitas, kebijakan upah minimum, permintaan konsumen rendah dan lain-lain. Sedangkan pada tahun 2022, jumlah penganggur di Indonesia, Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten Karawang sudah mengalami penurunan. Jumlah Penganggur Kabupaten Karawang tahun 2022 menjadi 118.000 orang.

**Tabel 2.31**  
**Jumlah Penganggur Nasional, Provinsi Jawa Barat**  
**Dan Kabupaten Karawang Tahun 2018-2022 (Orang)**

<b>JUMLAH PENGANGGUR</b>	<b>Tahun 2018</b>	<b>Tahun 2019</b>	<b>Tahun 2020</b>	<b>Tahun 2021</b>	<b>Tahun 2022</b>
NASIONAL	7.073.390	7.104.420	9.767.750	9.102.050	8.425.930
PROVINSI JAWA BARAT	1.877.431	1.929.515	2.533.076	2.430.147	2.125.606
KABUPATEN KARAWANG	102.138	107.723	133.898	137.412	118.008

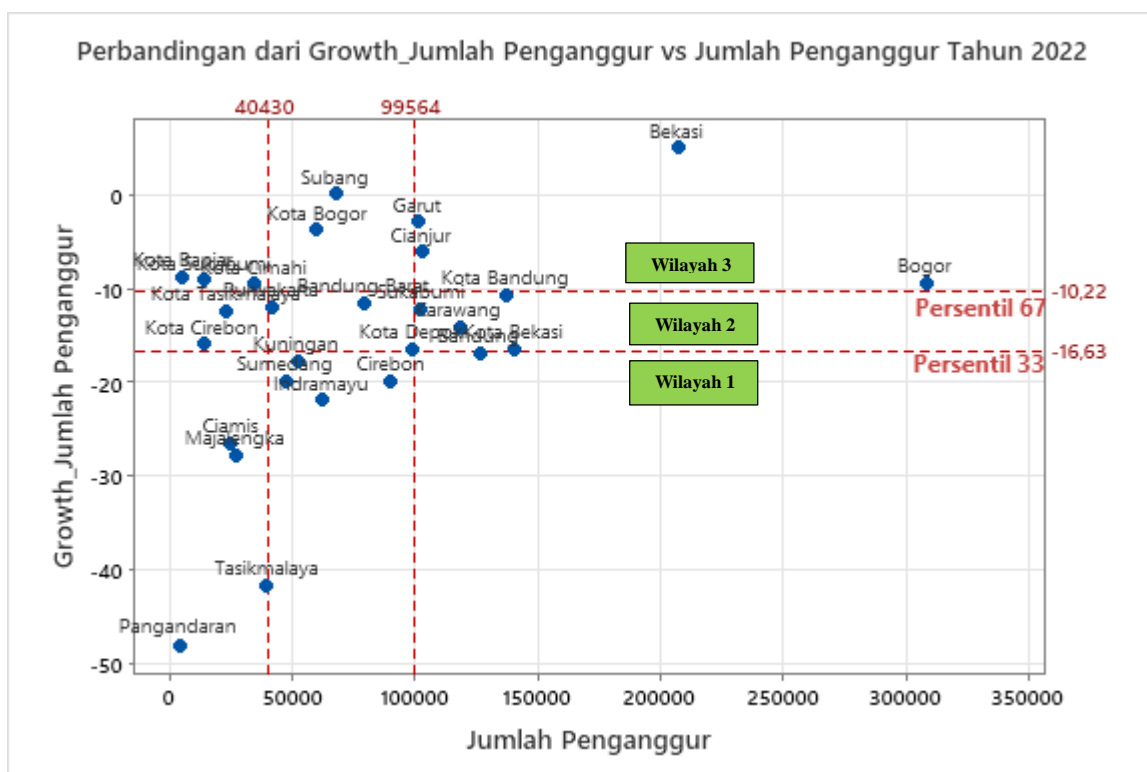
*Sumber: BPS Tahun 2023*

Dengan melihat Tabel 2.32 dapat diketahui terjadi kenaikan jumlah penganggur di Kabupaten Karawang pada tahun 2018 hingga 2021. Kenaikan jumlah penganggur tertinggi terjadi pada tahun 2020 hingga mencapai 24,29% dari tahun 2019. Hal ini terjadi akibat dari pandemi COVID-19. Beberapa pegawai/karyawan mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pengusaha terpaksa melakukan PHK terhadap para karyawannya akibat dari lemahnya permintaan pasar buntut dari kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Selanjutnya, pada tahun 2022 pertumbuhan jumlah penganggur di Kabupaten Karawang kurang dari nol. Hal ini berarti terjadi penurunan jumlah penganggur yang signifikan hingga mencapai 14,12%.

**Tabel 2.32**  
**Tingkat Pertumbuhan Jumlah Penganggur Kabupaten**  
**Karawang Tahun 2018-2022 (Persen)**

<b>KABUPATEN KARAWANG</b>	<b>Tahun 2019</b>	<b>Tahun 2020</b>	<b>Tahun 2021</b>	<b>Tahun 2022</b>
Jumlah penganggur	107.723	133.898	137.412	118.008
Pertumbuhan jumlah penganggur	5,47%	24,29%	2,62%	-14,12%

*Sumber: BPS Tahun 2023*



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2023, diolah

**Gambar 2.26 Perbandingan Pertumbuhan Jumlah Penganggur Kabupaten Karawang dengan Rata-Rata Capaian Wilayah yang Setara Tahun 2022**

Dengan melihat Gambar 2.26 yaitu perbandingan pertumbuhan jumlah penganggur Kabupaten Karawang dengan rata-rata capaian wilayah yang setara, Kabupaten Karawang termasuk ke dalam Wilayah 2.

**Tabel 2.33 Perbandingan Pertumbuhan Jumlah Penganggur Kabupaten Karawang dengan Rata-Rata Capaian Wilayah yang Setara**

No	Kab/Kota	Jumlah Penganggur		Pertumbuhan Jumlah Penganggur 2022
		2021	2022	
1	Kota Bandung	153.505	137.098	- 10,69
2	Bandung Barat	89.202	78.920	- 11,53
3	Purwakarta	46.927	41.287	- 12,02
4	Sukabumi	116.281	102.142	- 12,16
5	Kota Tasikmalaya	26.236	22.964	- 12,47
<b>6</b>	<b>Karawang</b>	<b>137.412</b>	<b>118.008</b>	<b>- 14,12</b>
7	Kota Cirebon	16.401	13.779	- 15,99
8	Kota Bekasi	167.974	140.322	- 16,46
9	Kota Depok	117.816	98.426	- 16,46
<b>Rata-Rata Capaian Pertumbuhan Jumlah Penganggur Wilayah yang Setara</b>				<b>- 13,54</b>

Sumber: BPS Tahun 2023, diolah

Rincian capaian wilayah yang setara dengan Kabupaten Karawang terdapat pada Tabel 2.33 dengan rata-rata pertumbuhan jumlah penganggur sebesar -13,54%. Hal ini berarti pertumbuhan jumlah penganggur



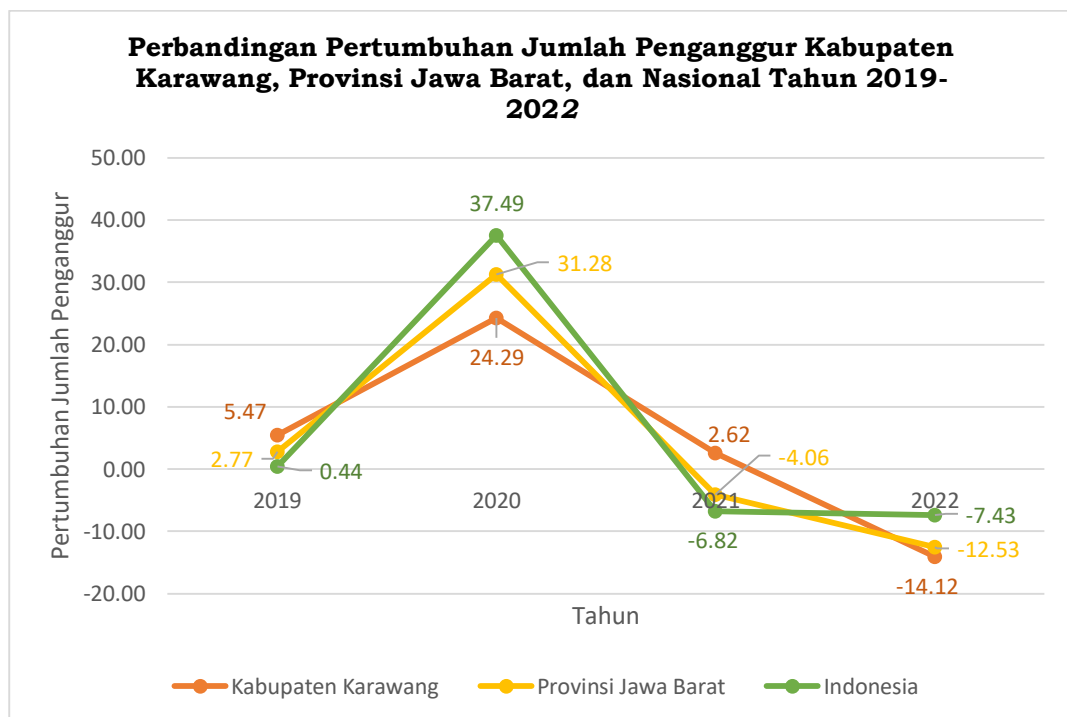
Kabupaten Karawang Tahun 2022 sebesar -14,12% lebih baik dari rata-rata capaian wilayah yang setara sebesar -13,54%.

**Tabel 2.34**  
**Perbandingan Pertumbuhan Jumlah Penganggur Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional Tahun 2019-2022**

Kabupaten/Kota	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Karawang	5,47%	24,29%	2,62%	-14,12%
Provinsi Jawa Barat	2,77%	31,28%	-4,06%	-12,53
Indonesia	0,44%	37,49%	-6,82%	-7,43

Sumber: BPS Tahun 2023, diolah

Perbandingan pertumbuhan jumlah penganggur di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional Tahun 2019 hingga 2022 disajikan pada Tabel 2.34 dan Gambar 2.27. Pada tahun 2021, Kabupaten Karawang mengalami pertumbuhan jumlah penganggur sebesar 2,62%. Namun, Provinsi Jawa Barat dan Nasional mengalami penurunan jumlah penganggur, masing-masing sebesar 4,06% dan 6,82%.



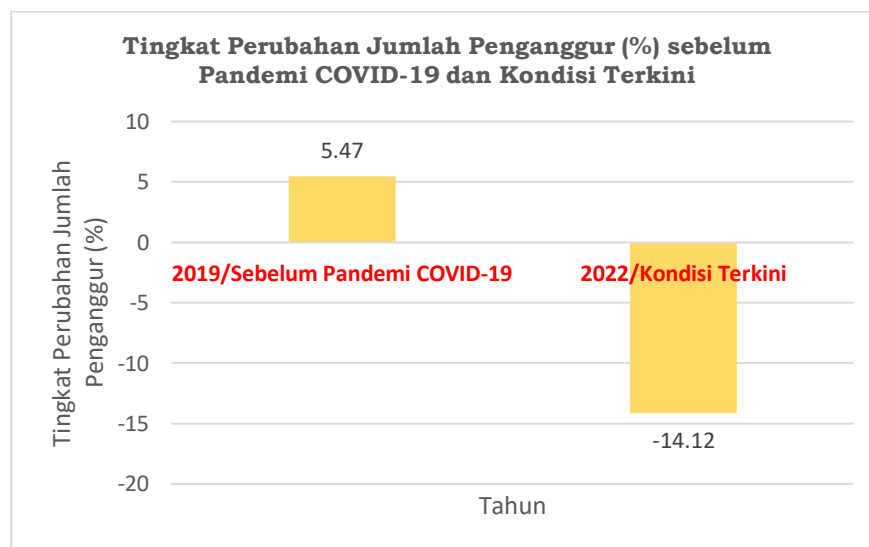
Sumber: BPS Tahun 2023, diolah

**Gambar 2.27** Perbandingan Pertumbuhan Jumlah Penganggur Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional Tahun 2019-2022

Secara umum, meningkatnya pengangguran ini disebabkan berbagai hal antara lain: pekerja baru memasuki dunia kerja, kemajuan teknologi, imobilitas, kebijakan upah minimum, permintaan konsumen rendah dan

lain-lain. Sedangkan pada tahun 2022, baik Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, maupun Indonesia mengalami penurunan jumlah penganggur, masing-masing sebesar 14,12%, 12,53%, dan 7,43%. Kabupaten Karawang mengalami penurunan jumlah penganggur tertinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Indonesia. Hal ini berarti pertumbuhan jumlah penganggur Kabupaten Karawang lebih baik daripada nasional.

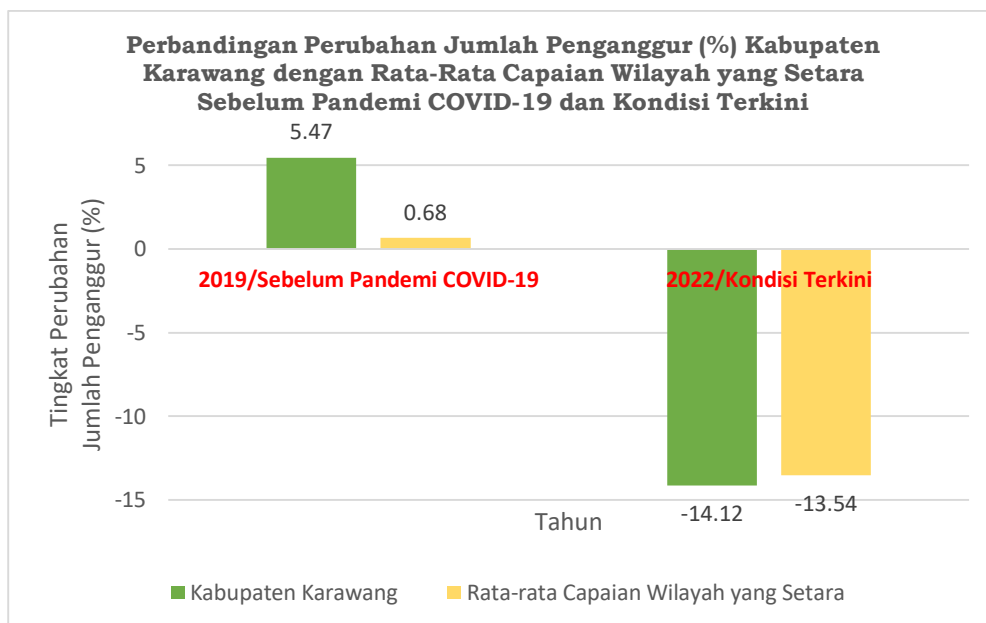
Tingkat perubahan jumlah penganggur (%) sebelum Pandemi COVID-19 dan kondisi terkini disajikan pada Gambar 2.28. Berdasarkan gambar tersebut, perubahan jumlah penganggur (%) sebelum pandemi COVID-19 bernilai positif atau lebih dari nol. Hal ini berarti terjadi kenaikan jumlah penganggur (%) pada tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2022 atau kondisi terkini perubahan jumlah penganggur (%) bernilai negatif atau kurang dari nol. Hal ini berarti setelah pandemi COVID-19 atau pada tahun 2022 terjadi penurunan jumlah penganggur pada Kabupaten Karawang.



Sumber : BPS Kabupaten Karawang Tahun 2023

**Gambar 2.28 Tingkat Perubahan Jumlah Penganggur (%) Sebelum Pandemi COVID-19 dan Kondisi Terkini**

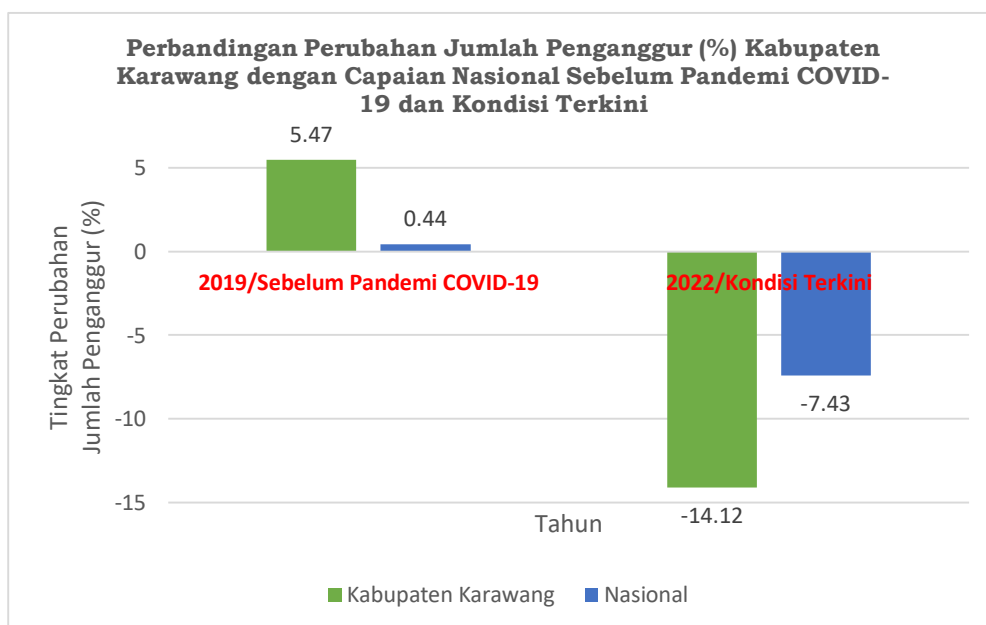
Berdasarkan Gambar 2.29, perubahan jumlah penganggur (%) sebelum pandemi COVID-19 Kabupaten Karawang sebesar 5,47 dan rata-rata capaian wilayah setara sebesar 0,68. Sementara itu, perubahan jumlah penganggur (%) kondisi terkini Kabupaten Karawang sebesar -14,12 dan rata-rata capaian wilayah yang setara sebesar -13,54. Dapat disimpulkan, sebelum pandemi COVID-19 perubahan jumlah penganggur (%) Kabupaten Karawang lebih buruk dari rata-rata capaian wilayah yang setara. Sedangkan, kondisi terkini perubahan jumlah penganggur (%) Kabupaten Karawang lebih baik dari rata-rata capaian wilayah yang setara.



Sumber : BPS Kabupaten Karawang Tahun 2023

**Gambar 2.29 Perbandingan Perubahan Jumlah Penganggur (%) Kabupaten Karawang dengan Rata-Rata Capaian Wilayah yang Setara Sebelum Pandemi COVID-19 dan Kondisi Terkini**

Dengan melihat Gambar 2.30, perubahan jumlah penganggur (%) sebelum pandemi COVID-19 Kabupaten Karawang sebesar 5,47 dan capaian nasional sebesar 0,44. Sementara itu, perubahan jumlah penganggur (%) kondisi terkini Kabupaten Karawang sebesar -14,12 dan capaian nasional sebesar -7,43.



Sumber : BPS Kabupaten Karawang Tahun 2023

**Gambar 2.30 Perbandingan Perubahan Jumlah Penganggur (%) Kabupaten Karawang dengan Nasional Sebelum Pandemi COVID-19 dan Kondisi Terkini**

Hal ini berarti, sebelum pandemi COVID-19 perubahan jumlah penganggur (%) Kabupaten Karawang lebih buruk dari capaian nasional. Sedangkan,

dalam kondisi terkini perubahan jumlah penganggur (%) Kabupaten Karawang lebih baik dari capaian nasional.

Berdasarkan Tabel 2.35, tahun 2018 jumlah penganggur Kabupaten Karawang berada pada peringkat tertinggi ke-5 dari 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Sedangkan pada tahun 2019 hingga tahun 2022, jumlah penganggur Kabupaten Karawang berhasil turun ke peringkat tertinggi ke-6 dari 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2019-2022, lima kabupaten/kota tertinggi jumlah penganggurnya yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kota Bandung, dan Kabupaten Bandung.

**Tabel 2.35**  
**Jumlah Penganggur Kabupaten/ Kota di Jawa Barat**  
**Tahun 2018-2022 (Jiwa)**

No	Kab/Kota	2018	No	Kab/Kota	2019	No	Kab/Kota	2020	No	Kab/Kota	2021	No	Kab/Kota	2022
1	Bogor	257.686	1	Bogor	254.645	1	Bogor	390.731	1	Bogor	340.604	1	Bogor	308.165
2	Bekasi	158.747	2	Bekasi	159.396	2	Bekasi	212.435	2	Bekasi	197.147	2	Bekasi	206.839
3	Kota Bekasi	132.701	3	Kota Bekasi	124.143	3	Kota Bekasi	161.311	3	Kota Bekasi	167.974	3	Kota Bekasi	140.322
4	Cirebon	106.883	4	Cirebon	111.064	4	Bandung	147.402	4	Kota Bandung	153.505	4	Kota Bandung	137.098
5	Karawang	103.641	5	Cianjur	109.574	5	Kota Bandung	147.081	5	Bandung	151.908	5	Bandung	126.289
6	Cianjur	103.043	6	Karawang	109.111	6	Karawang	133.898	6	Karawang	137.412	6	Karawang	118.008
7	Kota Bandung	99.205	7	Kota Bandung	108.508	7	Cianjur	131.016	7	Kota Depok	117.816	7	Cianjur	102.803
8	Sukabumi	89.503	8	Bandung	97.942	8	Cirebon	122.145	8	Sukabumi	116.281	8	Sukabumi	102.142
9	Bandung	83.860	9	Sukabumi	92.880	9	Kota Depok	118.032	9	Cirebon	112.429	9	Garut	101.135
10	Garut	79.087	10	Garut	86.093	10	Sukabumi	110.098	10	Cianjur	109.562	10	Kota Depok	98.426
11	Kota Depok	73.104	11	Indramayu	75.643	11	Garut	103.607	11	Garut	104.212	11	Cirebon	90.118
12	Indramayu	72.668	12	Kota Depok	72.002	12	Bandung Barat	91.557	12	Bandung Barat	89.202	12	Bandung Barat	78.920
13	Subang	67.769	13	Subang	71.822	13	Indramayu	86.661	13	Indramayu	79.241	13	Subang	67.431
14	Bandung Barat	63.909	14	Bandung Barat	63.034	14	Subang	78.183	14	Subang	67.399	14	Indramayu	61.849
15	Tasikmalaya	58.860	15	Tasikmalaya	56.299	15	Tasikmalaya	67.290	15	Tasikmalaya	67.290	15	Kota Bogor	59.971
16	Kota Bogor	50.624	16	Kuningan	49.304	16	Kota Bogor	65.203	16	Kuningan	63.377	16	Kuningan	52.075
17	Kuningan	43.839	17	Kota Bogor	48.676	17	Sumedang	63.062	17	Kota Bogor	62.358	17	Sumedang	47.055
18	Purwakarta	43.583	18	Sumedang	44.989	18	Kuningan	58.513	18	Sumedang	58.770	18	Purwakarta	41.287
19	Sumedang	42.260	19	Purwakarta	43.683	19	Purwakarta	47.885	19	Purwakarta	46.927	19	Tasikmalaya	39.247
20	Majalengka	30.619	20	Ciamis	32.702	20	Kota Cimahi	39.055	20	Kota Cimahi	38.193	20	Kota Cimahi	34.536
21	Ciamis	28.766	21	Majalengka	27.985	21	Majalengka	38.798	21	Majalengka	37.182	21	Majalengka	26.808
22	Kota Cimahi	23.696	22	Kota Cimahi	23.771	22	Ciamis	38.425	22	Ciamis	33.961	22	Ciamis	24.923
23	Kota Tasikmalaya	21.783	23	Kota Tasikmalaya	22.594	23	Kota Tasikmalaya	27.441	23	Kota Tasikmalaya	26.236	23	Kota Tasikmalaya	22.964

<b>No</b>	<b>Kab/Kota</b>	<b>2018</b>	<b>No</b>	<b>Kab/Kota</b>	<b>2019</b>	<b>No</b>	<b>Kab/Kota</b>	<b>2020</b>	<b>No</b>	<b>Kab/Kota</b>	<b>2021</b>	<b>No</b>	<b>Kab/Kota</b>	<b>2022</b>
24	Kota Cirebon	14.806	24	Kota Cirebon	13.781	24	Kota Cirebon	17.166	24	Kota Cirebon	16.401	24	Kota Sukabumi	14.096
25	Kota Sukabumi	12.532	25	Kota Sukabumi	13.145	25	Kota Sukabumi	16.995	25	Kota Sukabumi	15.519	25	Kota Cirebon	13.779
26	Pangandaran	8.743	26	Pangandaran	10.729	26	Pangandaran	12.476	26	Pangandaran	7.839	26	Kota Banjar	5.243
27	Kota Banjar	5.514	27	Kota Banjar	6.000	27	Kota Banjar	6.610	27	Kota Banjar	5.747	27	Pangandaran	4.077

*Sumber: BPS Tahun 2023*

Di era pasar global, industri di Kabupaten Karawang menjadi salah satu sektor andalan, yang tentunya mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karawang. Pasar global juga akan mengalirkan tenaga kerja dari luar Kabupaten Karawang ke wilayah Kabupaten Karawang, dan memunculkan satu fenomena baru terjadinya persaingan ketat memperebutkan pasar kerja yang jumlahnya terbatas. Oleh karena itu perlu disadari bahwa investasi substansial dan berkelanjutan dalam upaya pembangunan manusia, merupakan jalan utama meningkatkan kualitas dan produktivitas SDM. Kualitas penduduk yang tinggi diantaranya akan meningkatkan daya saing tenaga kerja Kabupaten Karawang dengan tenaga kerja pendatang, maupun meningkatkan daya tawar tenaga kerja Kabupaten Karawang di pasar global.

**Tabel 2.36**  
**Data Ketenagakerjaan Kabupaten Karawang Tahun 2018-2022**

INDIKATOR	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Angkatan Kerja (jiwa)	1.136.301	1.127.198	1.162.633	1.161.202	1.195.947
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	9,05	9,61	11,52	11,83	9,87
Pencari Kerja yang ditempatkan (orang)	31.125	36.380	35.610	12.863	9.717

Sumber: BPS Kabupaten Karawang Tahun 2023

Tabel 2.36 menyajikan data ketenagakerjaan Kabupaten Karawang Tahun 2018 hingga 2022. Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Karawang pada tahun 2022 mengalami sedikit kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2021 dari 1.161.202 jiwa menjadi 1.195.947 jiwa. Untuk jumlah pencari kerja yang ditempatkan pada tahun 2022 mencapai 9.717 orang yang ditempatkan, sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.36.

### 2.1.2.3 Indikator Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai

ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah Garis Kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Karawang mengalami peningkatan pada 2 tahun terakhir yaitu tahun 2020 sebesar 195.410 jiwa dan tahun 2021 menjadi sebesar 210.780 jiwa. Hal ini terjadi akibat dari pandemi COVID-19. Sedangkan, pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Karawang telah mengalami penurunan menjadi 199.900 jiwa. Tabel 2.37 menyajikan target dan realisasi variabel kemiskinan tahun 2021-2024.

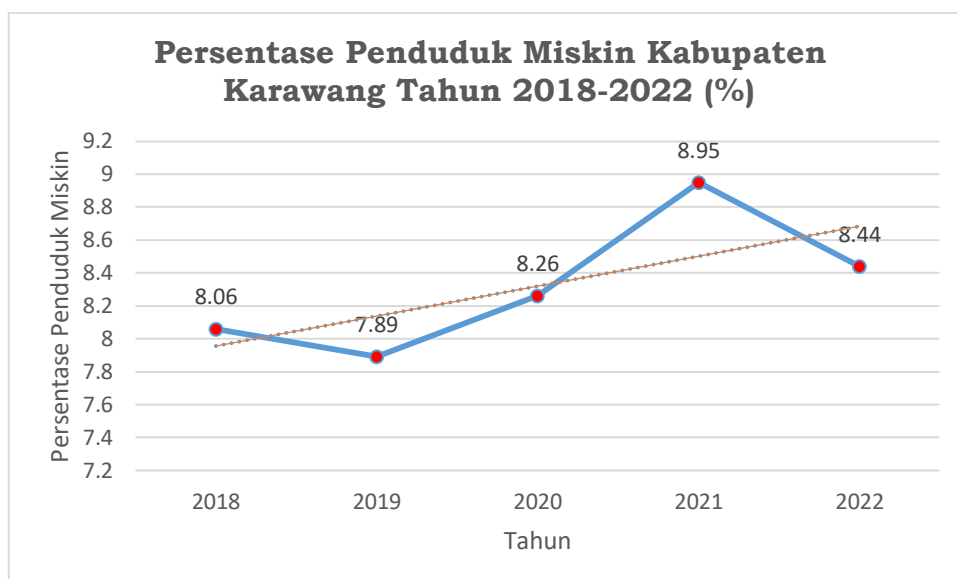
**Tabel 2.37**  
**Target dan Realisasi Variabel Kemiskinan**  
**Tahun 2021 – 2024**

NO	URAIAN	2021		2022		Target 2023
		T	R	T	R	
1	Angka Kemiskinan (%)	8,13	8,95	8,00	8,44	7,90
2	Jumlah Penduduk Miskin (dalam ribu)	197,31	210,80	209,78	199,9	193,97
3	Indeks Kedalaman kemiskinan	1,09	1,27	1,01	1,58	0,93
4	Indeks Keparahan kemiskinan	0,24	0,29	0,20	0,41	0,36

*Sumber : BPS Kabupaten Karawang Tahun 2023 dan RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2021-2026*

Adapun persentase penduduk miskin di Kabupaten Karawang menggambarkan persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Berdasarkan Gambar 2.31, Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Karawang mengalami peningkatan dalam 2 tahun terakhir, yaitu sebesar 8,26% pada tahun 2020 dan sebesar 8,95% pada tahun 2021. Peningkatan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Karawang pada tahun 2020 dan 2021 salah satunya dikarenakan dampak pandemi COVID-19. Sedangkan pada tahun 2022, Kabupaten Karawang berhasil menurunkan Persentase Penduduk Miskin menjadi 8,44%.





Sumber : BPS Kabupaten Karawang Tahun 2023

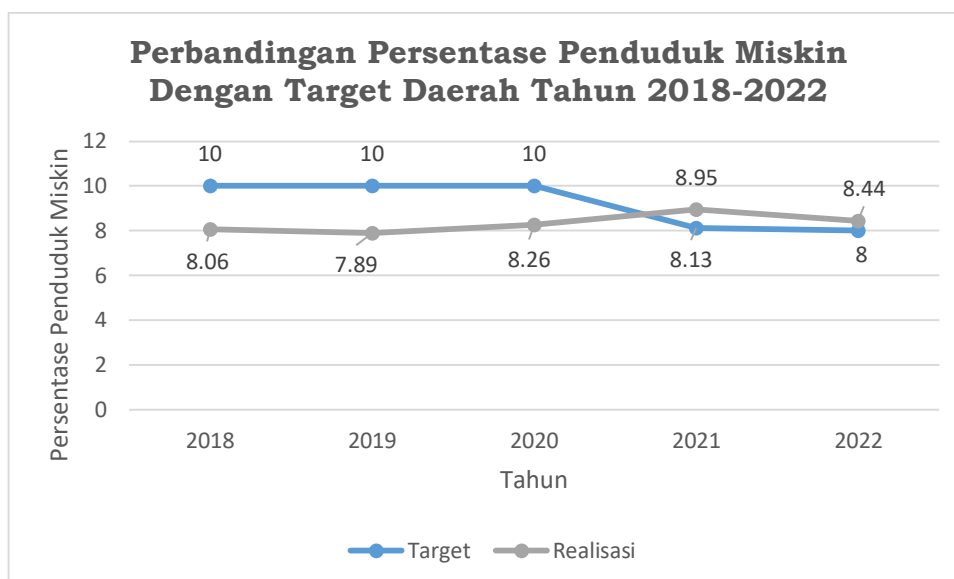
**Gambar 2.31 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Karawang Tahun 2018-2022 (%)**

Tabel 2.38 dan Gambar 2.32 menyajikan perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Karawang Tahun 2018-2022 dengan target daerah pada tahun yang bersangkutan. Berdasarkan Gambar 2.17, selama tahun 2018-2020 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Karawang berada di bawah target daerah atau berhasil terealisasi lebih baik dari target daerah. Sedangkan pada tahun 2021-2022, Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Karawang berada di atas target daerah atau terealisasi lebih buruk dari target daerah.

**Tabel 2.38  
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin  
Dengan Target Daerah Tahun 2018-2022**

Tahun	Angka kemiskinan (%)	
	Target	Realisasi
2018	10	8,06
2019	10	7,89
2020	10	8,26
2021	8,13	8,95
2022	8	8,44

Sumber: Target: Angka Proyeksi, Capaian: BPS Tahun 2023



Sumber: BPS Tahun 2023

**Gambar 2.32 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Dengan Target Daerah Tahun 2018-2022**

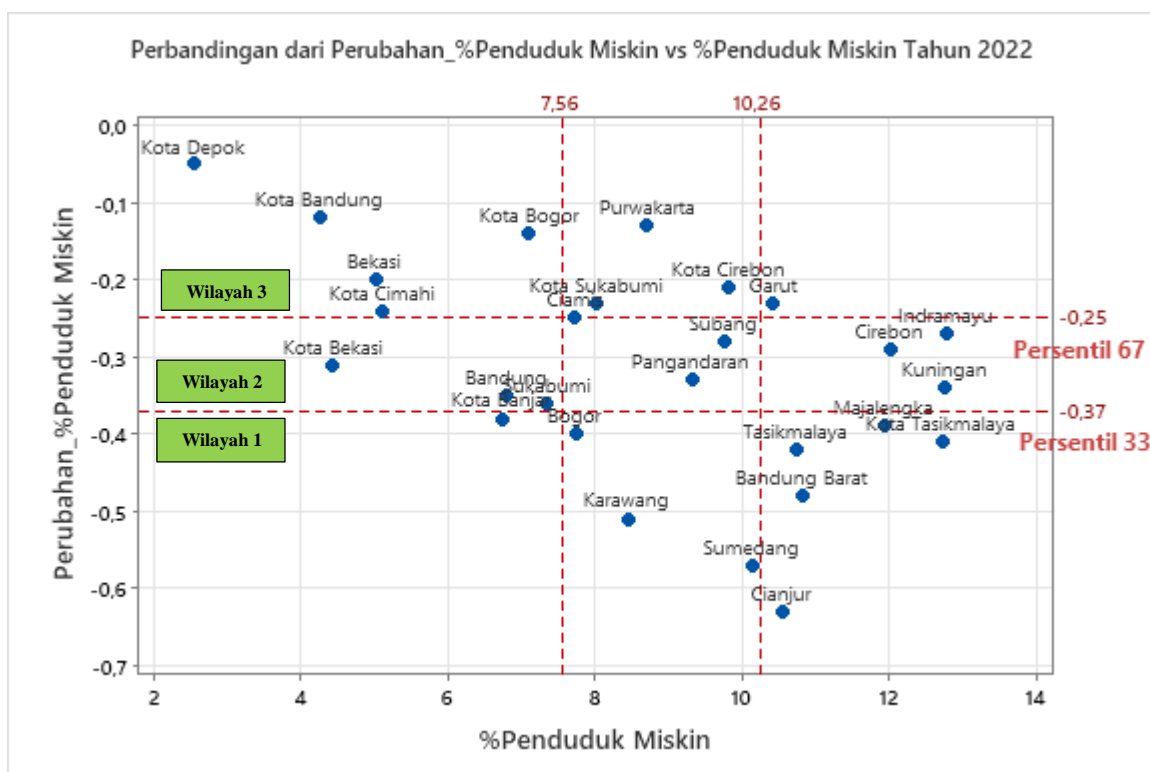
Berdasarkan Tabel 2.39, tahun 2020 akibat terdampak pandemi COVID-19, terjadi kenaikan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Karawang sebesar 0,37%. Kenaikan Persentase Penduduk Miskin tertinggi terjadi pada tahun 2021 hingga 0,69%. Dampak pandemi mulai tertangani pada tahun 2022 sehingga terjadi penurunan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Karawang sebesar 0,51%. Dengan kata lain, tingkat perubahan persentase penduduk miskin sebesar -0,51 kurang dari nol.

**Tabel 2.39  
Tingkat Perubahan Persentase Penduduk Miskin  
Kabupaten Karawang Tahun 2019-2022**

Wilayah	2019	2020	2021	2022
Karawang	-0,17	0,37	0,69	-0,51

Sumber: BPS Tahun 2023

Dengan melihat Gambar 2.33 yaitu perbandingan perubahan persentase penduduk miskin Kabupaten Karawang dengan rata-rata capaian wilayah yang setara, Kabupaten Karawang termasuk ke dalam Wilayah 1. Rincian capaian wilayah yang setara dengan Kabupaten Karawang terdapat pada Tabel 2.40 dengan rata-rata perubahan persentase penduduk miskin sebesar -0,47%. Hal ini berarti perubahan persentase penduduk miskin Kabupaten Karawang Tahun 2022 sebesar -0,51% lebih baik dari rata-rata capaian wilayah yang setara sebesar -0,47%.



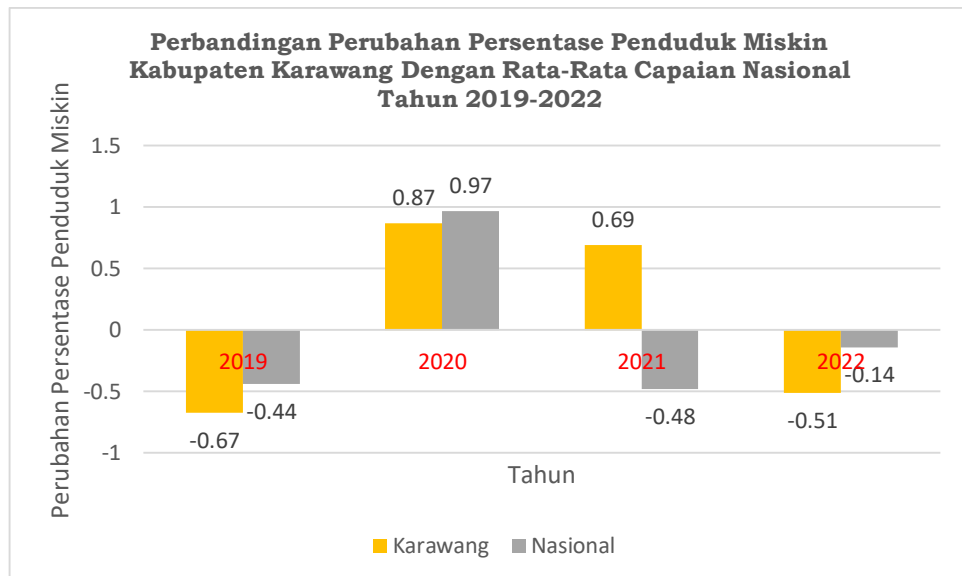
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

**Gambar 2.33 Perbandingan Perubahan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Karawang dengan Rata-Rata Capaian Wilayah yang Setara Tahun 2022**

**Tabel 2.40 Perbandingan Perubahan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Karawang dengan Rata-Rata Capaian Wilayah yang Setara**

No	Kab/Kota	Persentase Penduduk Miskin		Perubahan Persentase Penduduk Miskin 2022
		2021	2022	
1	Kota Banjar	7,11	6,73	- 0,38
2	Majalengka	12,33	11,94	- 0,39
3	Bogor	8,13	7,73	- 0,40
4	Kota Tasikmalaya	13,13	12,72	- 0,41
5	Tasikmalaya	11,15	10,73	- 0,42
6	Bandung Barat	11,3	10,82	- 0,48
<b>7</b>	<b>Karawang</b>	<b>8,95</b>	<b>8,44</b>	<b>- 0,51</b>
8	Sumedang	10,71	10,14	- 0,57
9	Cianjur	11,18	10,55	- 0,63
<b>Rata-Rata Capaian Persentase Penduduk Miskin Wilayah yang Setara</b>				<b>-0,47</b>

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

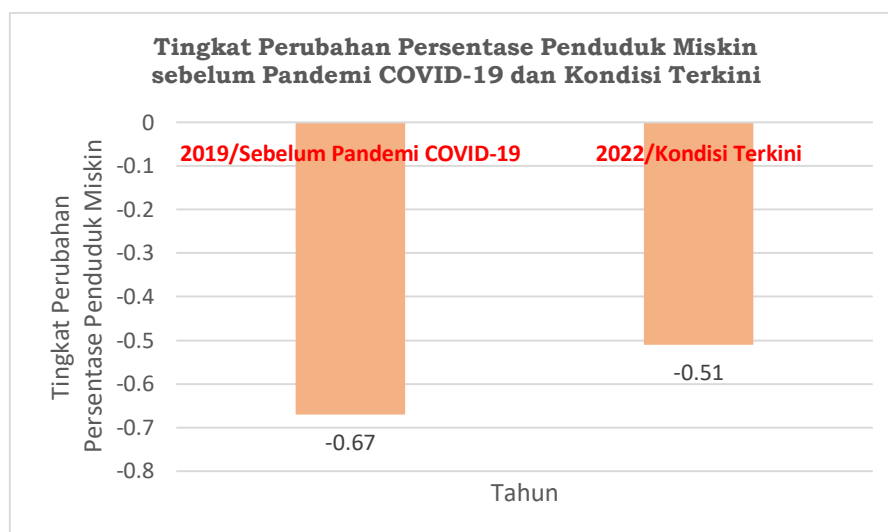


Sumber: BPS Tahun 2023

**Gambar 2.34 Perbandingan Perubahan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Karawang Dengan Rata-Rata Capaian Nasional Tahun 2019-2022**

Berdasarkan Gambar 2.34, pada tahun 2019 dan 2020, perubahan persentase penduduk miskin Kabupaten Karawang lebih baik dari rata-rata capaian nasional. Sedangkan pada tahun 2021, Kabupaten Karawang mengalami peningkatan pada persentase penduduk miskin dan nasional mengalami penurunan. Hal ini berarti pada tahun 2021 perubahan persentase penduduk miskin Kabupaten Karawang lebih buruk dari rata-rata capaian nasional. Lalu, pada tahun 2022, perubahan persentase penduduk miskin Kabupaten Karawang kembali lebih baik dari rata-rata capaian nasional.

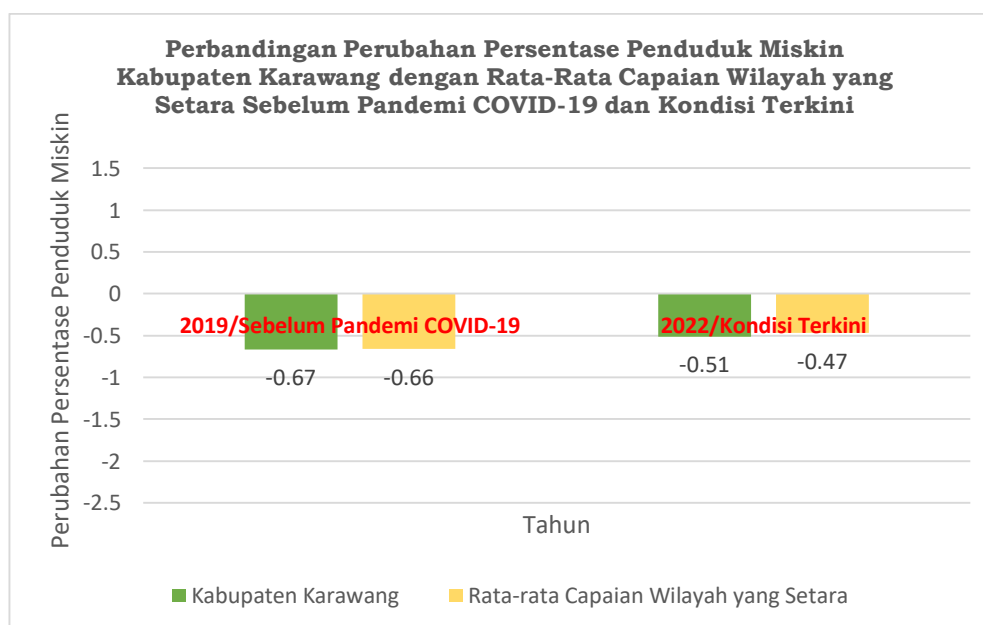
Tingkat perubahan persentase penduduk miskin sebelum Pandemi COVID-19 dan kondisi terkini disajikan pada Gambar 2.35. Berdasarkan gambar tersebut, perubahan persentase penduduk miskin sebelum pandemi COVID-19 bernilai negatif atau kurang dari nol. Hal ini berarti terjadi penurunan persentase penduduk miskin pada tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2022 atau kondisi terkini perubahan persentase penduduk miskin bernilai negatif atau kurang dari nol. Hal ini berarti setelah pandemi COVID-19 atau pada tahun 2022 terjadi penurunan persentase penduduk miskin pada Kabupaten Karawang.



Sumber: BPS Kabupaten Karawang Tahun 2023, diolah

**Gambar 2.35 Tingkat Perubahan Persentase Penduduk Miskin Sebelum Pandemi COVID-19 dan Kondisi Terkini**

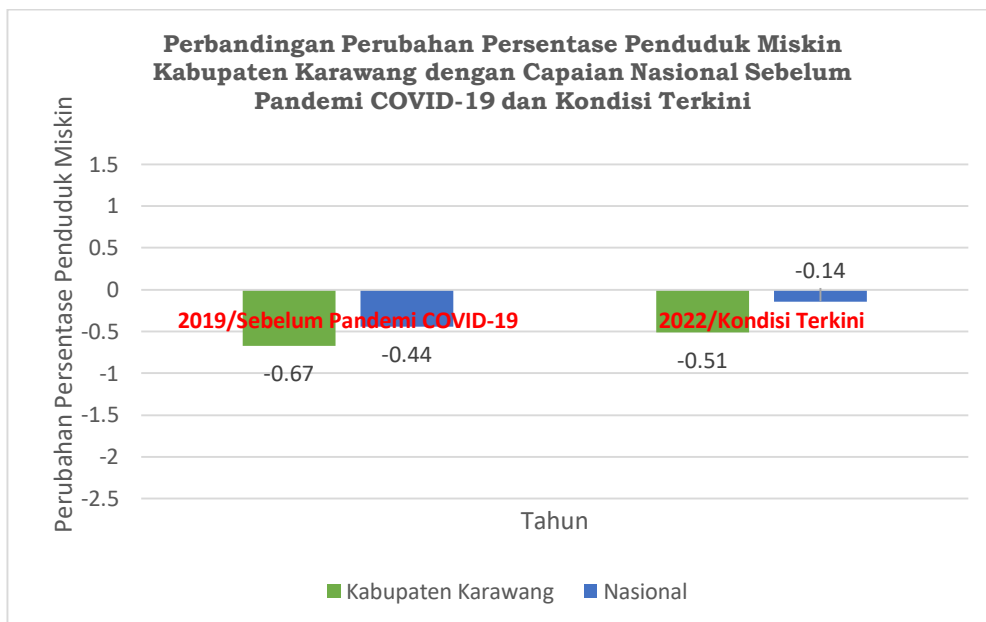
Berdasarkan Gambar 2.36, perubahan persentase penduduk miskin sebelum pandemi COVID-19 Kabupaten Karawang sebesar -0,67 dan rata-rata capaian wilayah setara sebesar -0,66. Sementara itu, perubahan persentase penduduk miskin kondisi terkini Kabupaten Karawang sebesar -0,51 dan rata-rata capaian wilayah yang setara sebesar -0,47. Dapat disimpulkan, baik sebelum pandemi COVID-19 maupun kondisi terkini perubahan persentase penduduk miskin Kabupaten Karawang lebih baik dari rata-rata capaian wilayah yang setara.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2023, diolah

**Gambar 2.36 Perbandingan Perubahan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Karawang dengan Rata-Rata Capaian Wilayah yang Setara Sebelum Pandemi COVID-19 dan Kondisi Terkini**

Dengan melihat Gambar 2.37, perubahan persentase penduduk miskin sebelum pandemi COVID-19 Kabupaten Karawang sebesar -0,67 dan capaian nasional sebesar -0,44. Sementara itu, perubahan persentase penduduk miskin kondisi terkini Kabupaten Karawang sebesar -0,51 dan capaian nasional sebesar -0,14. Hal ini berarti, baik sebelum pandemi COVID-19 maupun kondisi terkini perubahan persentase penduduk miskin Kabupaten Karawang lebih baik dari capaian nasional.



Sumber: BPS Tahun 2023, diolah

**Gambar 2.37 Perbandingan Perubahan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Karawang dengan Capaian Nasional Sebelum Pandemi COVID-19 dan Kondisi Terkini**

Tabel 2.41 menyajikan perbandingan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Karawang dengan capaian wilayah kab/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2022. Berdasarkan tabel tersebut, tahun 2018 dan 2021 Karawang menempati peringkat Persentase Penduduk Miskin tertinggi ke 14 se-kab/kota di Jawa Barat. Tahun 2019, 2020, dan 2022, peringkat Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Karawang menurun menjadi peringkat 15. Hal ini berarti semakin menurunnya Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Karawang dibandingkan dengan kab/kota lain.

**Tabel 2.41**  
**Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Daerah dengan Rata-Rata Capaian Wilayah Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022**

No	Kab/Kota	2018	No	Kab/Kota	2019	No	Kab/Kota	2020	No	Kab/Kota	2021	No	Kab/Kota	2022
1	Kota Tasikmalaya	12,71	1	Kota Tasikmalaya	11,6	1	Kota Tasikmalaya	12,97	1	Kota Tasikmalaya	13,13	1	Indramayu	12,77
2	Kuningan	12,22	2	Kuningan	11,41	2	Kuningan	12,82	2	Kuningan	13,1	2	Kuningan	12,76
3	Indramayu	11,89	3	Indramayu	11,11	3	Indramayu	12,7	3	Indramayu	13,04	3	Kota Tasikmalaya	12,72
4	Majalengka	10,79	4	Majalengka	10,06	4	Majalengka	11,43	4	Majalengka	12,33	4	Cirebon	12,01
5	Cirebon	10,7	5	Cirebon	9,94	5	Cirebon	11,24	5	Cirebon	12,3	5	Majalengka	11,94
6	Bandung Barat	10,06	6	Bandung Barat	9,38	6	Bandung Barat	10,49	6	Bandung Barat	11,3	6	Bandung Barat	10,82
7	Tasikmalaya	9,85	7	Cianjur	9,15	7	Cianjur	10,36	7	Cianjur	11,18	7	Tasikmalaya	10,73
8	Cianjur	9,81	8	Tasikmalaya	9,12	8	Tasikmalaya	10,34	8	Tasikmalaya	11,15	8	Cianjur	10,55
9	Sumedang	9,76	9	Sumedang	9,05	9	Sumedang	10,26	9	Sumedang	10,71	9	Garut	10,42
10	Garut	9,27	10	Garut	8,98	10	Garut	9,98	10	Garut	10,65	10	Sumedang	10,14
11	Kota Cirebon	8,88	11	Kota Cirebon	8,41	11	Kota Cirebon	9,52	11	Subang	10,03	11	Kota Cirebon	9,82
12	Subang	8,67	12	Subang	8,12	12	Subang	9,31	12	Kota Cirebon	10,03	12	Subang	9,75
13	Pangandaran	8,12	13	Pangandaran	7,71	13	Pangandaran	8,99	13	Pangandaran	9,65	13	Pangandaran	9,32
14	Karawang	8,06	14	Purwakarta	7,48	14	Purwakarta	8,27	14	Karawang	8,95	14	Purwakarta	8,7
15	Purwakarta	7,99	15	Karawang	7,39	15	Karawang	8,26	15	Purwakarta	8,83	15	Karawang	8,44
16	Ciamis	7,22	16	Kota Sukabumi	6,67	16	Kota Sukabumi	7,7	16	Kota Sukabumi	8,25	16	Kota Sukabumi	8,02
17	Bogor	7,14	17	Bogor	6,66	17	Bogor	7,69	17	Bogor	8,13	17	Bogor	7,73
18	Kota Sukabumi	7,12	18	Ciamis	6,65	18	Ciamis	7,62	18	Ciamis	7,97	18	Ciamis	7,72
19	Sukabumi	6,76	19	Sukabumi	6,22	19	Sukabumi	7,09	19	Sukabumi	7,7	19	Sukabumi	7,34
20	Bandung	6,65	20	Bandung	5,94	20	Bandung	6,91	20	Kota Bogor	7,24	20	Kota Bogor	7,1
21	Kota Bogor	5,93	21	Kota Bogor	5,77	21	Kota Bogor	6,68	21	Bandung	7,15	21	Bandung	6,8
22	Kota Banjar	5,7	22	Kota Banjar	5,5	22	Kota Banjar	6,09	22	Kota Banjar	7,11	22	Kota Banjar	6,73
23	Kota Cimahi	4,94	23	Kota Cimahi	4,39	23	Kota Cimahi	5,11	23	Kota Cimahi	5,35	23	Kota Cimahi	5,11

<b>No</b>	<b>Kab/Kota</b>	<b>2018</b>	<b>No</b>	<b>Kab/Kota</b>	<b>2019</b>	<b>No</b>	<b>Kab/Kota</b>	<b>2020</b>	<b>No</b>	<b>Kab/Kota</b>	<b>2021</b>	<b>No</b>	<b>Kab/Kota</b>	<b>2022</b>
24	Bekasi	4,37	24	Bekasi	4,01	24	Bekasi	4,82	24	Bekasi	5,21	24	Bekasi	5,01
25	Kota Bekasi	4,11	25	Kota Bekasi	3,81	25	Kota Bekasi	4,38	25	Kota Bekasi	4,74	25	Kota Bekasi	4,43
26	Kota Bandung	3,57	26	Kota Bandung	3,38	26	Kota Bandung	3,99	26	Kota Bandung	4,37	26	Kota Bandung	4,25
27	Kota Depok	2,14	27	Kota Depok	2,07	27	Kota Depok	2,45	27	Kota Depok	2,58	27	Kota Depok	2,53

*Sumber: BPS Tahun 2023*



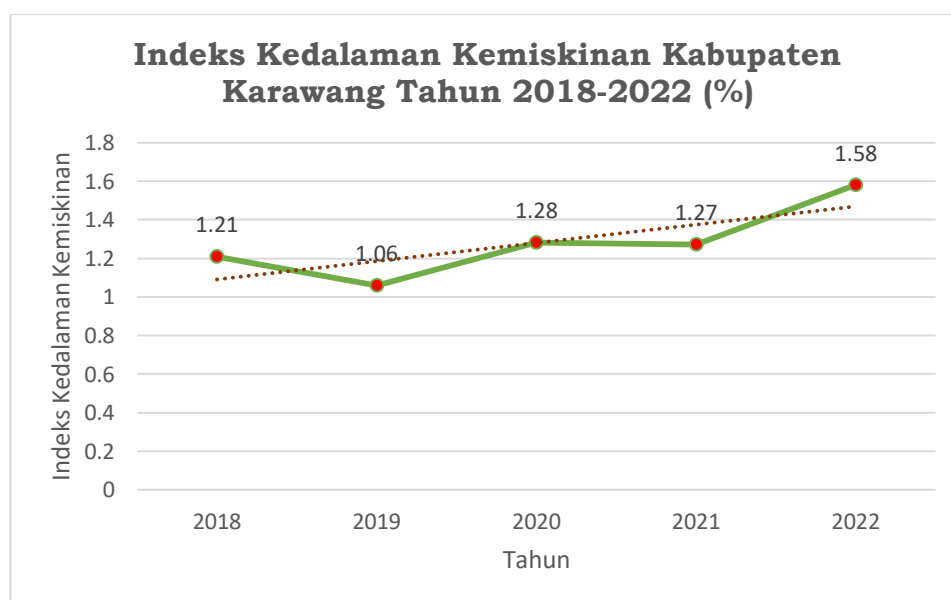
Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin melebar. Berdasarkan Tabel 2.42, Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Karawang mengalami penurunan dari 1,21 pada tahun 2018 menjadi 1,06 pada tahun 2019. Akibat pandemi COVID-19 Indeks Kedalaman Kemiskinan pada tahun 2020 meningkat menjadi 1,28. Sedangkan, Indeks Kedalaman Kemiskinan pada tahun 2021 kembali menurun menjadi 1,27. Pada tahun 2022 meningkat 0,31% menjadi 1,58. Dengan kata lain, tingkat perubahan Indeks Kedalaman Kemiskinan lebih dari nol.

**Tabel 2.42**  
**Tingkat Perubahan Indeks Kedalaman Kemiskinan (%) Tahun 2018-2022**

Wilayah	2018	2019	2020	2021	2022
Karawang	1,21	1,06	1,28	1,27	1,58
Tingkat Perubahan		-0,15	0,22	-0,01	0,31

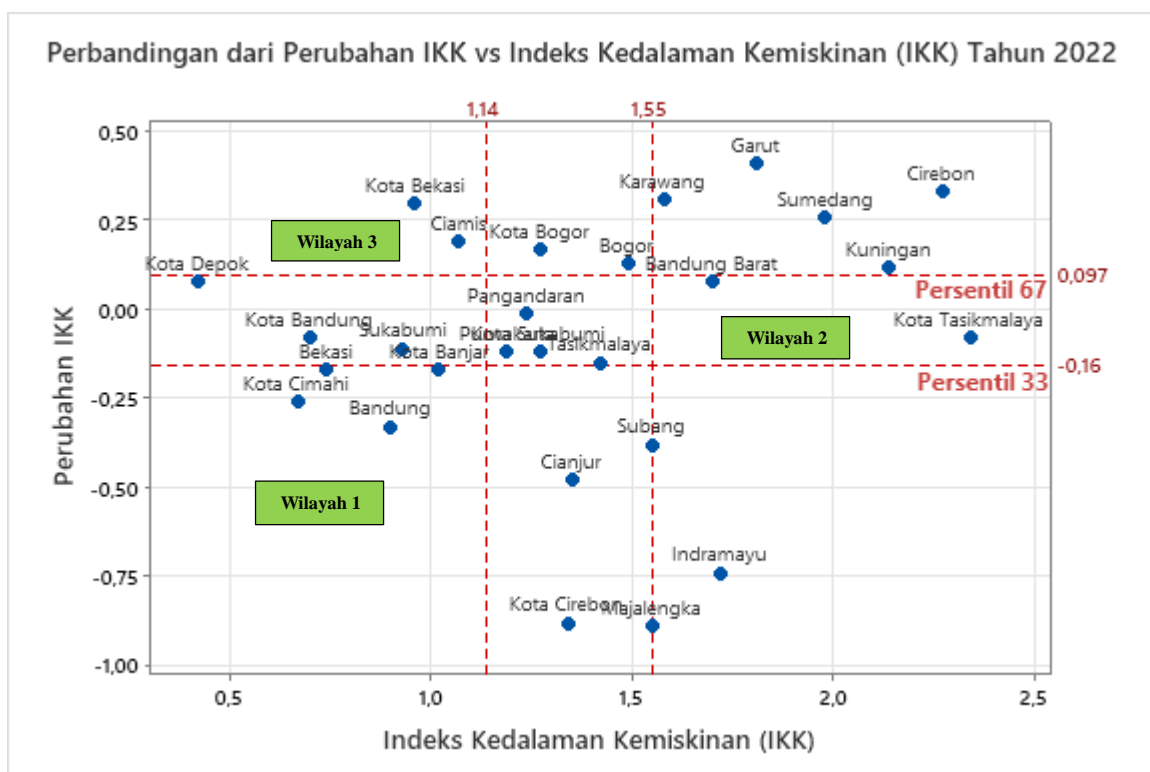
Sumber: BPS Tahun 2023

Berdasarkan Gambar 2.38, Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Karawang selama periode 2018-2022 cenderung mengalami trend kenaikan.



Sumber: BPS Tahun 2023

**Gambar 2.38 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Karawang Tahun 2018-2022 (%)**



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

**Gambar 2.39 Perbandingan Perubahan Pencapaian Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Karawang dengan Rata-Rata Capaian Wilayah yang Setara Tahun 2022**

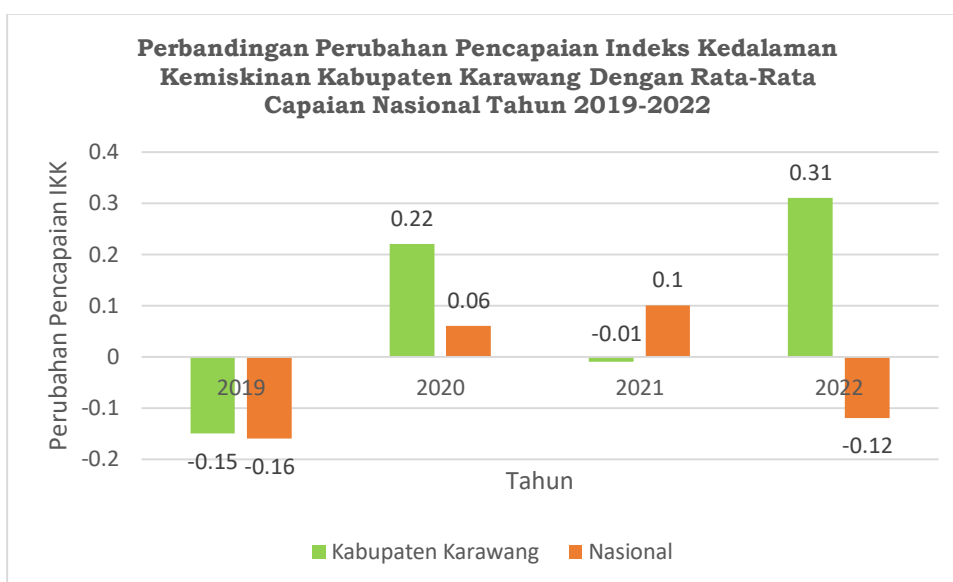
Dengan melihat Gambar 2.39 yaitu perbandingan perubahan pencapaian Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Karawang dengan rata-rata capaian wilayah yang setara, Kabupaten Karawang termasuk ke dalam Wilayah 3.

**Tabel 2.43 Perbandingan Perubahan Pencapaian Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Karawang dengan Rata-Rata Capaian Wilayah yang Setara**

No	Kab/Kota	Indeks Kedalaman Kemiskinan		Perubahan Persentase Penduduk Miskin 2022
		2021	2022	
1	Kota Banjar	1,4	1,81	0,41
2	Majalengka	1,94	2,27	0,33
3	Bogor	1,27	1,58	0,31
4	Kota Tasikmalaya	0,66	0,96	0,30
5	Tasikmalaya	1,72	1,98	0,26
6	Bandung Barat	0,88	1,07	0,19
<b>7</b>	<b>Karawang</b>	<b>1,1</b>	<b>1,27</b>	<b>0,17</b>
8	Sumedang	1,36	1,49	0,13
9	Cianjur	2,02	2,14	0,12
<b>Rata-Rata Capaian Perubahan Indeks Kedalaman Kemiskinan Wilayah yang Setara</b>				<b>0,25</b>

Sumber: BPS Tahun 2023

Rincian capaian wilayah yang setara dengan Kabupaten Karawang terdapat pada Tabel 2.43 dengan rata-rata perubahan pencapaian Indeks Kedalaman Kemiskinan sebesar 0,25. Hal ini berarti perubahan pencapaian Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Karawang Tahun 2022 sebesar 0,17 lebih baik dari rata-rata capaian wilayah yang setara sebesar 0,25%.



Sumber: BPS Tahun 2023

**Gambar 2.40 Perbandingan Perubahan Pencapaian Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Karawang Dengan Rata-Rata Capaian Nasional Tahun 2019-2022**

Berdasarkan Gambar 2.40, perubahan pencapaian Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Karawang pada tahun 2022 lebih buruk daripada perubahan pencapaian Indeks Kedalaman Kemiskinan nasional. Kabupaten Karawang mengalami perubahan pencapaian Indeks Kedalaman Kemiskinan dari tahun sebelumnya berupa kenaikan Indeks Kedalaman Kemiskinan sebesar 0,31. Sedangkan perubahan pencapaian Indeks Kedalaman Kemiskinan nasional dari tahun sebelumnya berupa penurunan pencapaian Indeks Kedalaman Kemiskinan sebesar 0,12.

Berdasarkan Tabel 2.44 di bawah ini, pada tahun 2018 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Karawang menempati peringkat tertinggi ke-12 se-kabupaten/kota di Jawa Barat. Tahun 2021 meningkat menjadi peringkat ke-11. Tahun 2020 kembali ke peringkat ke-12. Tahun 2021 mengalami penurunan peringkat menjadi peringkat 16 tertinggi dari 27 kabupaten/kota. Penurunan peringkat yang dialami berarti baik karena semakin tinggi nilai Indeks

Kedalaman Kemiskinan, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Begitupun sebaliknya, semakin kecil nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan maka semakin rata-rata pengeluaran penduduk mendekati garis kemiskinan. Namun sayang, tahun 2022 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Karawang Kembali ke peringkat 8 tertinggi dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat.

**Tabel 2.44**  
**Perbandingan Pencapaian Indeks Kedalaman Kemiskinan Daerah dengan Rata-Rata Capaian Wilayah Kab/Kota**  
**Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022**

No	Kab/Kota	2018	No	Kab/Kota	2019	No	Kab/Kota	2020	No	Kab/Kota	2021	No	Kab/Kota	2022
1	Indramayu	2,23	1	Kota Tasikmalaya	1,98	1	Kuningan	2,41	1	Indramayu	2,46	1	Kota Tasikmalaya	2,34
2	Cirebon	2,04	2	Indramayu	1,66	2	Indramayu	2,18	2	Majalengka	2,44	2	Cirebon	2,27
3	Majalengka	1,96	3	Bandung Barat	1,54	3	Kota Tasikmalaya	1,75	3	Kota Tasikmalaya	2,42	3	Kuningan	2,14
4	Kuningan	1,73	4	Majalengka	1,39	4	Sumedang	1,72	4	Kota Cirebon	2,22	4	Sumedang	1,98
5	Sumedang	1,72	5	Subang	1,39	5	Kota Cirebon	1,68	5	Kuningan	2,02	5	Garut	1,81
6	Subang	1,7	6	Cirebon	1,29	6	Majalengka	1,41	6	Cirebon	1,94	6	Indramayu	1,72
7	Kota Tasikmalaya	1,52	7	Kuningan	1,24	7	Bandung Barat	1,4	7	Subang	1,93	7	Bandung Barat	1,7
8	Garut	1,49	8	Purwakarta	1,24	8	Cianjur	1,38	8	Cianjur	1,83	8	Karawang	1,58
9	Bandung Barat	1,45	9	Kota Cirebon	1,23	9	Pangandaran	1,32	9	Sumedang	1,72	9	Majalengka	1,55
10	Cianjur	1,34	10	Kota Sukabumi	1,08	10	Cirebon	1,3	10	Bandung Barat	1,62	10	Subang	1,55
11	Pangandaran	1,24	11	Karawang	1,06	11	Subang	1,29	11	Tasikmalaya	1,57	11	Bogor	1,49
12	Karawang	1,21	12	Sumedang	1,05	12	Karawang	1,28	12	Garut	1,4	12	Tasikmalaya	1,42
13	Tasikmalaya	1,19	13	Bandung	1,04	13	Kota Sukabumi	1,17	13	Kota Sukabumi	1,39	13	Cianjur	1,35
14	Ciamis	1,18	14	Pangandaran	0,9	14	Kota Bogor	1,08	14	Bogor	1,36	14	Kota Cirebon	1,34
15	Bogor	1,12	15	Garut	0,87	15	Purwakarta	1,04	15	Purwakarta	1,31	15	Kota Bogor	1,27
16	Kota Sukabumi	1,09	16	Tasikmalaya	0,84	16	Garut	0,97	16	Karawang	1,27	16	Kota Sukabumi	1,27
17	Kota Cirebon	0,99	17	Bogor	0,83	17	Bandung	0,92	17	Pangandaran	1,25	17	Pangandaran	1,24
18	Bandung	0,87	18	Ciamis	0,76	18	Ciamis	0,92	18	Bandung	1,23	18	Purwakarta	1,19
19	Purwakarta	0,87	19	Cianjur	0,74	19	Bogor	0,83	19	Kota Banjar	1,19	19	Ciamis	1,07
20	Sukabumi	0,86	20	Kota Bogor	0,72	20	Tasikmalaya	0,83	20	Kota Bogor	1,1	20	Kota Banjar	1,02
21	Kota Cimahi	0,84	21	Sukabumi	0,66	21	Sukabumi	0,8	21	Sukabumi	1,04	21	Kota Bekasi	0,96
22	Kota Banjar	0,79	22	Bekasi	0,6	22	Kota Cimahi	0,75	22	Kota Cimahi	0,93	22	Sukabumi	0,93
23	Kota Bogor	0,77	23	Kota Cimahi	0,6	23	Bekasi	0,72	23	Bekasi	0,91	23	Bandung	0,9

No	Kab/Kota	2018	No	Kab/Kota	2019	No	Kab/Kota	2020	No	Kab/Kota	2021	No	Kab/Kota	2022
24	Kota Bekasi	0,72	24	Kota Banjar	0,57	24	Kota Banjar	0,7	24	Ciamis	0,88	24	Bekasi	0,74
25	Bekasi	0,65	25	Kota Bandung	0,53	25	Kota Bandung	0,61	25	Kota Bandung	0,78	25	Kota Bandung	0,7
26	Kota Bandung	0,48	26	Kota Bekasi	0,47	26	Kota Bekasi	0,6	26	Kota Bekasi	0,66	26	Kota Cimahi	0,67
27	Kota Depok	0,31	27	Kota Depok	0,24	27	Kota Depok	0,29	27	Kota Depok	0,34	27	Kota Depok	0,42

Sumber: BPS Tahun 2023

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Berdasarkan Tabel. 2.45, Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Karawang mengalami penurunan dari tahun 2018 sebesar 0,30 menjadi 0,24 pada tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020 meningkat menjadi 0,25 akibat terdampak pandemi COVID-19. Pada tahun 2021 dan 2022 kembali meningkat menjadi 0,29 dan 0,41. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin semakin menurun.

**Tabel 2.45**  
**Indikator Kemiskinan Kabupaten Karawang Tahun 2018-2022**

<b>Uraian</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Persentase Penduduk Miskin (%)	8,06	7,39	8,26	8,95	8,44
Garis Kemiskinan (Rp)/bulan	433.972	440.347	466.152	494.201	521.158
Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	188,0	173,70	195,40	210,80	199,9
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,21	1,06	1,28	1,27	1,58
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,30	0,24	0,25	0,29	0,41

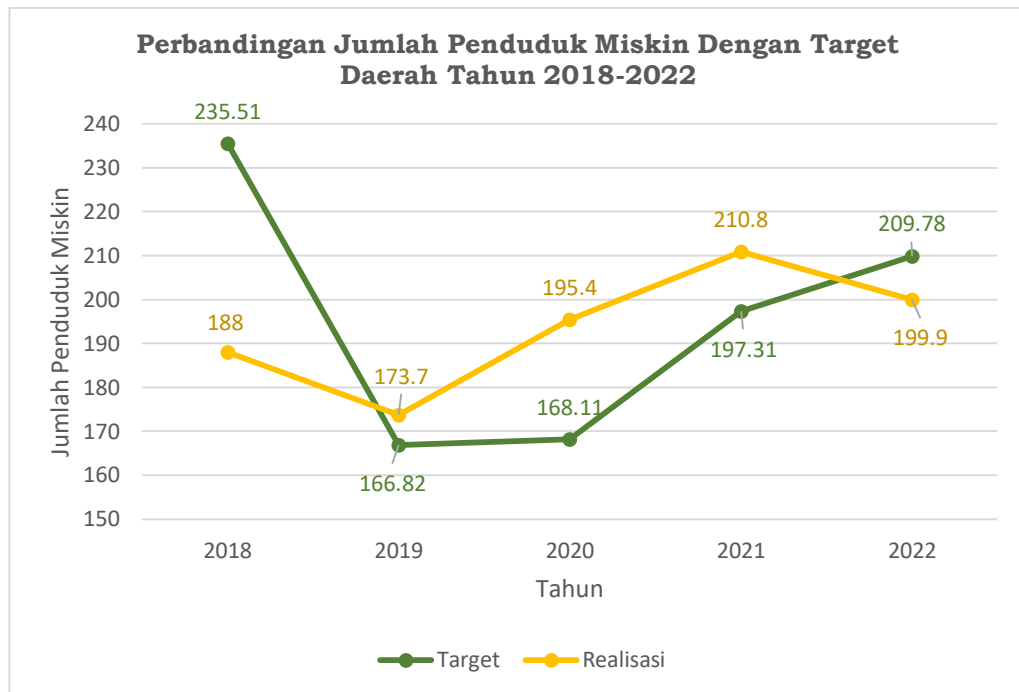
Sumber : BPS Kabupaten Karawang Tahun 2023

Tabel 2.46 dan Gambar 2.41 menginformasikan perbandingan jumlah penduduk miskin dengan target daerah tahun 2018-2022. Pada tahun 2018 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Karawang terealisasi di bawah target. Selama tahun 2019-2021 jumlah penduduk miskin meningkat, tidak bisa mencapai target. Namun, pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin Kabupaten Karawang mengalami penurunan dan berada di bawah target daerah. Dengan kata lain, jumlah penduduk miskin lebih baik dari target daerah.

**Tabel 2.46**  
**Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Dengan Target Daerah**  
**Tahun 2018-2022**

<b>Uraian</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Target	235,51	166,82	168,11	197,31	209,78
Realisasi	188,0	173,70	195,40	210,80	199,9

Sumber : Target: Angka Proyeksi, Capaian: BPS Tahun 2023



Sumber : Target: Angka Proyeksi, Capaian: BPS Tahun 2023

**Gambar 2.41 Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Dengan Target Daerah Tahun 2018-2022**

Berdasarkan Tabel 2.47, tingkat pertumbuhan tertinggi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Karawang terjadi pada tahun 2020 sebesar 12,49% yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Tahun 2021 pun pertumbuhannya masih cukup tinggi sebesar 7,88%. Sedangkan, penurunan jumlah penduduk miskin tertinggi di Kabupaten Karawang terjadi pada tahun 2019 sebesar 7,59. Penurunan jumlah penduduk miskin yang terjadi pada tahun 2022 tidak sebesar penurunan pada tahun 2019, hanya mencapai 5,17%.

**Tabel 2.47**  
**Tingkat Pertumbuhan Jumlah Penduduk Miskin**  
**Tahun 2019-2022 (%)**

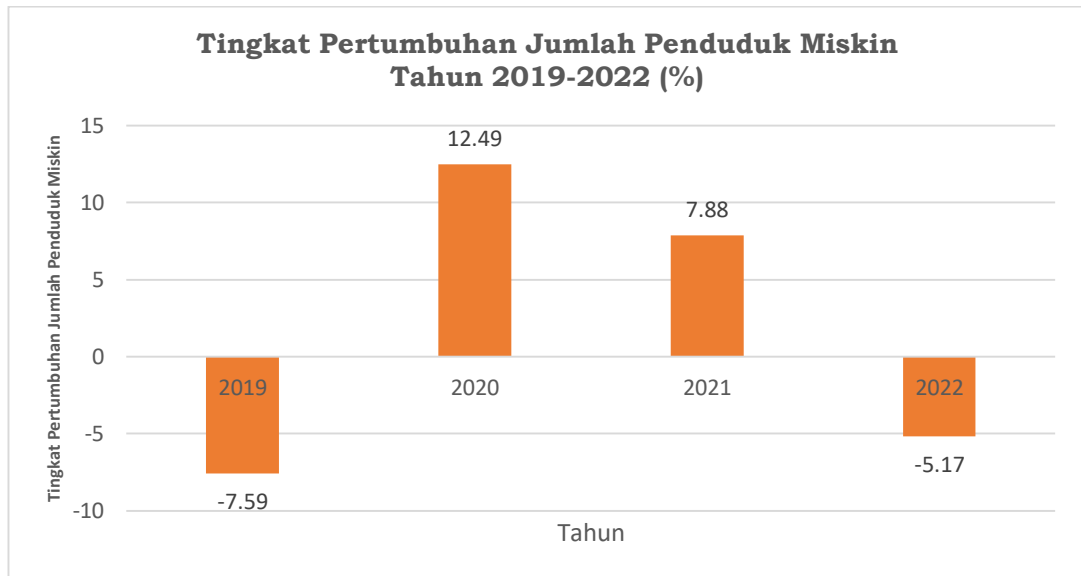
Uraian	2019	2020	2021	2022
Tingkat Pertumbuhan (%)	-7,59	12,49	7,88	-5,17

Sumber : BPS Tahun 2023, diolah

Berdasarkan Gambar 2.42, tahun 2019 dan 2022 terjadi penurunan jumlah penduduk miskin ditandai dengan grafik batang yang menjulang ke bawah, di bawah sumbu nol. Dengan kata lain, pada tahun 2022 tingkat pertumbuhan jumlah penduduk miskin kurang dari nol. Sedangkan pada tahun 2020 dan 2021 terjadi kenaikan



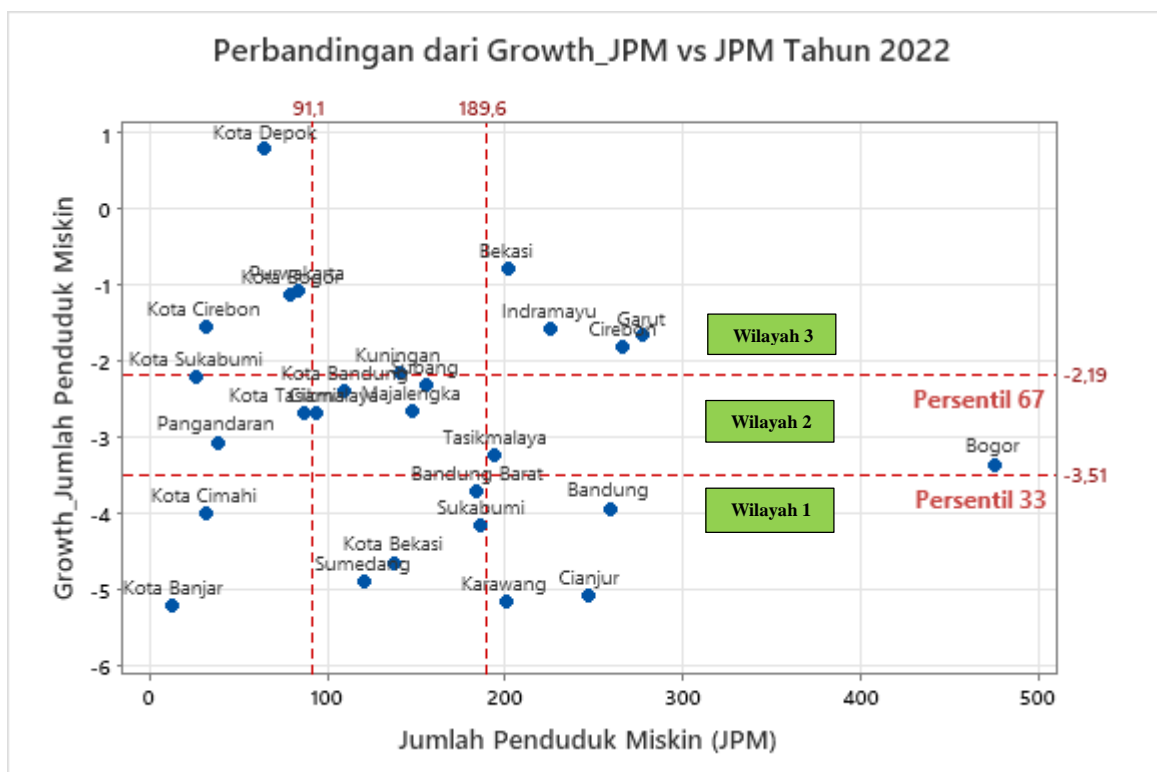
jumlah penduduk miskin ditandai dengan grafik batang yang menjulang ke atas, di atas sumbu nol.



Sumber : BPS Tahun 2022, diolah

**Gambar 2.42 Tingkat Pertumbuhan Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2019-2022 (%)**

Dengan melihat Gambar 2.43 yaitu perbandingan pertumbuhan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Karawang dengan rata-rata capaian wilayah yang setara, Kabupaten Karawang termasuk ke dalam Wilayah 1.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2023, diolah

**Gambar 2.43 Perbandingan Pertumbuhan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Karawang dengan Rata-Rata Capaian Wilayah yang Setara Tahun 2022**

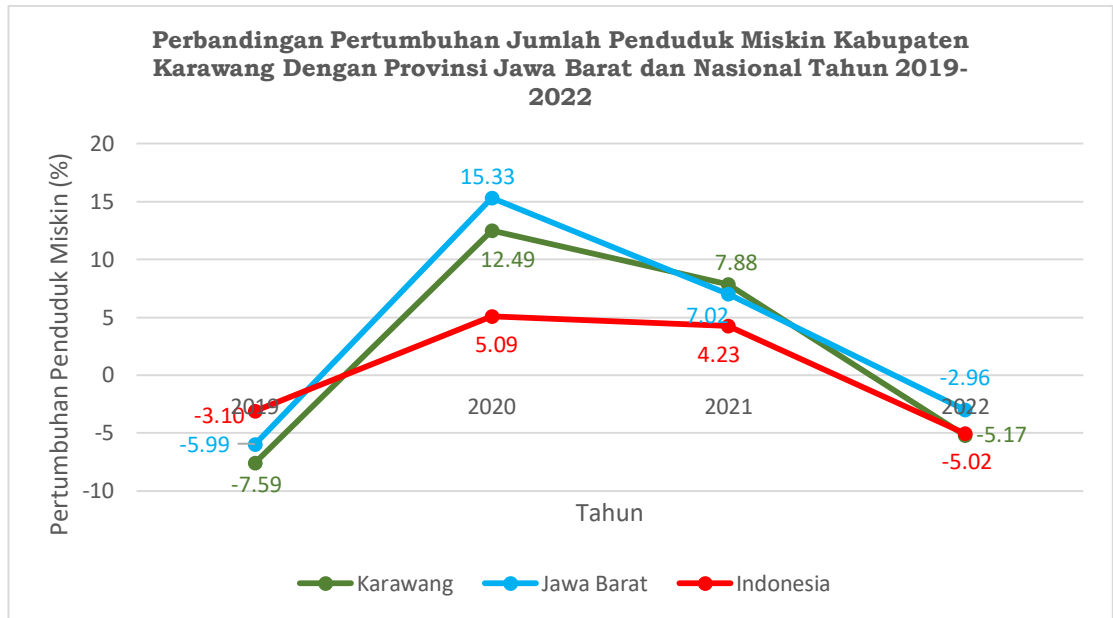
Rincian capaian wilayah yang setara dengan Kabupaten Karawang terdapat pada Tabel 2.48 dengan rata-rata pertumbuhan jumlah penduduk miskin sebesar -4,54%. Hal ini berarti pertumbuhan jumlah penduduk miskin Kabupaten Karawang Tahun 2022 sebesar -5,17% lebih baik dari rata-rata capaian wilayah yang setara sebesar -4,54%.

**Tabel. 2.48**  
**Perbandingan Pertumbuhan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Karawang dengan Rata-Rata Capaian Wilayah yang Setara**

No	Kab/Kota	Jumlah Penduduk Miskin		Pertumbuhan Jumlah Penduduk Miskin 2022
		2021	2022	
1	Bandung Barat	190,8	183,7	- 3,72
2	Bandung	269,2	258,6	- 3,94
3	Kota Cimahi	32,5	31,2	- 4,00
4	Sukabumi	194,4	186,3	- 4,17
5	Kota Bekasi	144,1	137,4	- 4,65
6	Sumedang	126,3	120,1	- 4,91
7	Cianjur	260	246,8	- 5,08
<b>8</b>	<b>Karawang</b>	<b>210,8</b>	<b>199,9</b>	<b>- 5,17</b>
9	Kota Banjar	13,4	12,7	- 5,22
<b>Rata-Rata Capaian Pertumbuhan Jumlah Penduduk Miskin Wilayah yang Setara</b>				<b>- 4,54</b>

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2023, diolah

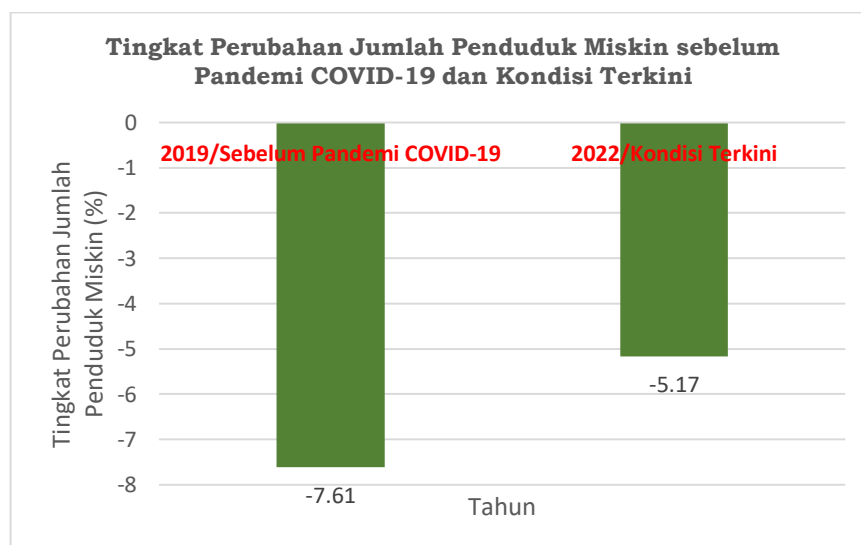
Berdasarkan Gambar 2.44, pada tahun 2019 Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, dan Indonesia mengalami penurunan jumlah penduduk miskin. Persentase penurunan terbesar terjadi di Kabupaten Karawang sebesar 7,59%, lalu Provinsi Jawa Barat sebesar -5,99, dan Indonesia sebesar -3,10%. Tahun 2020 dan 2021, akibat dari pandemi COVID-19, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, dan Indonesia mengalami kenaikan jumlah penduduk miskin. Penanganan akibat pandemi COVID-19 mulai terasa pada tahun 2022, dapat dilihat dengan penurunan jumlah penduduk miskin pada Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, dan Indonesia. Pada tahun 2022, pertumbuhan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Karawang sebesar -5,17, sedangkan nasional sebesar -5,02. Dapat disimpulkan, pertumbuhan jumlah penduduk miskin Kabupaten Karawang lebih baik dari rata-rata capaian nasional.



Sumber : BPS Tahun 2023, diolah

**Gambar 2.44 Perbandingan Pertumbuhan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Karawang Dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2022**

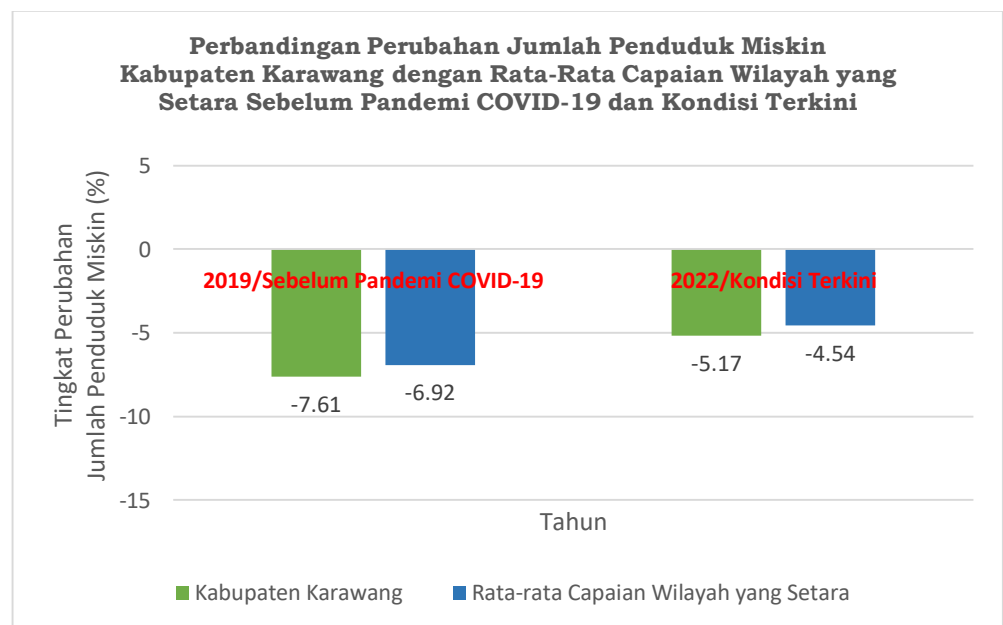
Tingkat perubahan jumlah penduduk miskin sebelum Pandemi COVID-19 dan kondisi terkini disajikan pada Gambar 2.45. Berdasarkan gambar tersebut, perubahan jumlah penduduk miskin sebelum pandemi COVID-19 bernilai negatif atau kurang dari nol. Hal ini berarti terjadi penurunan jumlah penduduk miskin pada tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2022 atau kondisi terkini perubahan jumlah penduduk miskin bernilai negatif atau kurang dari nol. Hal ini berarti setelah pandemi COVID-19 atau pada tahun 2022 terjadi penurunan jumlah penduduk miskin pada Kabupaten Karawang.



Sumber: BPS Kabupaten Karawang Tahun 2023

**Gambar 2.45 Tingkat Perubahan Jumlah Penduduk Miskin Sebelum Pandemi COVID-19 dan Kondisi Terkini**

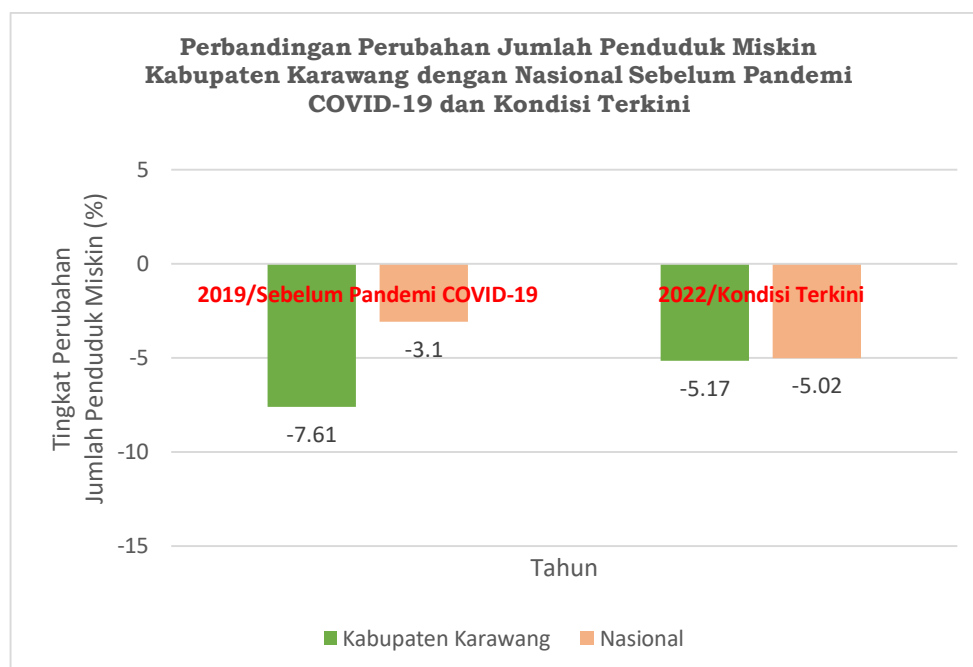
Berdasarkan Gambar 2.46, perubahan jumlah penduduk miskin sebelum pandemi COVID-19 Kabupaten Karawang sebesar -7,61 dan rata-rata capaian wilayah setara sebesar -6,92. Sementara itu, perubahan jumlah penduduk miskin kondisi terkini Kabupaten Karawang sebesar -5,17 dan rata-rata capaian wilayah yang setara sebesar -4,54. Dapat disimpulkan, baik sebelum pandemi COVID-19 maupun kondisi terkini perubahan jumlah penduduk miskin Kabupaten Karawang lebih baik dari rata-rata capaian wilayah yang setara.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

**Gambar 2.46 Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Karawang dengan Rata-Rata Capaian Wilayah yang Setara Sebelum Pandemi COVID-19 dan Kondisi Terkini**

Dengan melihat Gambar 2.47, perubahan jumlah penduduk miskin sebelum pandemi COVID-19 Kabupaten Karawang sebesar -7,61 dan capaian nasional sebesar -3,1. Sementara itu, perubahan jumlah penduduk miskin kondisi terkini Kabupaten Karawang sebesar -5,17 dan capaian nasional sebesar -5,02. Hal ini berarti, baik sebelum pandemi COVID-19 maupun kondisi terkini perubahan jumlah penduduk miskin Kabupaten Karawang lebih baik dari capaian nasional.



Sumber: BPS Kabupaten Karawang Tahun 2023

**Gambar 2.47 Perbandingan Perubahan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Karawang dengan Capaian Nasional Sebelum Pandemi COVID-19 dan Kondisi Terkini**

Tabel 2.49 menyajikan perbandingan pertumbuhan jumlah penduduk miskin Kabupaten Karawang dengan kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat. Selama tahun 2018-2021, jumlah penduduk miskin Kabupaten Karawang menempati peringkat ke-7, tertinggi dari 27 kabupaten/kota. Hal ini berarti Kabupaten Karawang memiliki jumlah penduduk miskin lebih banyak dibandingkan kabupaten/kota lainnya yang ada di Provinsi Jawa Barat. Tahun 2022 penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Karawang juga menurunkan peringkatnya menjadi peringkat 8 dari 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

**Tabel 2.49**  
**Perbandingan Pertumbuhan Jumlah Penduduk Miskin Daerah Dengan Rata-Rata Capaian Wilayah Kab/Kota**  
**Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022 (Ribuan Jiwa)**

No	Kab/Kota	2018	No	Kab/Kota	2019	No	Kab/Kota	2020	No	Kab/Kota	2021	No	Kab/Kota	2022
1	Bogor	415	1	Bogor	395	1	Bogor	465,7	1	Bogor	491,2	1	Bogor	474,7
2	Bandung	246,1	2	Garut	235,2	2	Bandung	263,6	2	Garut	281,4	2	Garut	276,7
3	Garut	241,3	3	Bandung	223,2	3	Garut	262,8	3	Cirebon	271	3	Cirebon	266,1
4	Cirebon	232,4	4	Cirebon	217,6	4	Cirebon	247,9	4	Bandung	269,2	4	Bandung	258,6
5	Cianjur	221,6	5	Cianjur	207,1	5	Cianjur	234,5	5	Cianjur	260	5	Cianjur	246,8
6	Indramayu	204,2	6	Indramayu	191,9	6	Indramayu	220,3	6	Indramayu	228,6	6	Indramayu	225
7	Karawang	188,0	7	Karawang	173,7	7	Karawang	195,4	7	Karawang	210,8	7	Bekasi	201,1
8	Tasikmalaya	172,4	8	Tasikmalaya	159,9	8	Bekasi	186,3	8	Bekasi	202,7	8	Karawang	199,9
9	Bandung Barat	169	9	Bandung Barat	159	9	Tasikmalaya	181,5	9	Tasikmalaya	200,6	9	Tasikmalaya	194,1
10	Sukabumi	166,3	10	Sukabumi	153,3	10	Bandung Barat	179,5	10	Sukabumi	194,4	10	Sukabumi	186,3
11	Bekasi	157,2	11	Bekasi	149,4	11	Sukabumi	175,1	11	Bandung Barat	190,8	11	Bandung Barat	183,7
12	Subang	136,6	12	Subang	129,2	12	Subang	149,8	12	Subang	159	12	Subang	155,3
13	Kuningan	131,2	13	Kuningan	123,2	13	Kuningan	139,2	13	Majalengka	151,1	13	Majalengka	147,1
14	Majalengka	129,3	14	Majalengka	121,1	14	Majalengka	138,2	14	Kota Bekasi	144,1	14	Kuningan	140,3
15	Kota Bekasi	119,8	15	Kota Bekasi	113,7	15	Kota Bekasi	134	15	Kuningan	143,4	15	Kota Bekasi	137,4
16	Sumedang	112,1	16	Sumedang	104,2	16	Sumedang	118,4	16	Sumedang	126,3	16	Sumedang	120,1
17	Kota Bandung	89,4	17	Kota Bandung	84,7	17	Kota Bandung	100	17	Kota Bandung	112,5	17	Kota Bandung	109,8
18	Ciamis	85,7	18	Ciamis	79,4	18	Ciamis	91,4	18	Ciamis	96,6	18	Ciamis	94
19	Kota Tasikmalaya	84,2	19	Kota Tasikmalaya	77	19	Kota Tasikmalaya	86,1	19	Kota Tasikmalaya	89,5	19	Kota Tasikmalaya	87,1
20	Purwakarta	75,9	20	Purwakarta	71,9	20	Purwakarta	80,2	20	Purwakarta	84,3	20	Purwakarta	83,4
21	Kota Bogor	64,9	21	Kota Bogor	64	21	Kota Bogor	75	21	Kota Bogor	80,1	21	Kota Bogor	79,2
22	Kota Depok	49,4	22	Kota Depok	49,4	22	Kota Depok	60,4	22	Kota Depok	63,9	22	Kota Depok	64,4

No	Kab/Kota	2018	No	Kab/Kota	2019	No	Kab/Kota	2020	No	Kab/Kota	2021	No	Kab/Kota	2022
23	Pangandaran	32,2	23	Pangandaran	30,7	23	Pangandaran	36,1	23	Pangandaran	39,1	23	Pangandaran	37,9
24	Kota Cimahi	29,9	24	Kota Cimahi	26,9	24	Kota Cimahi	31,6	24	Kota Cimahi	32,5	24	Kota Cirebon	31,5
25	Kota Cirebon	28	25	Kota Cirebon	26,8	25	Kota Cirebon	30,6	25	Kota Cirebon	32	25	Kota Cimahi	31,2
26	Kota Sukabumi	23,2	26	Kota Sukabumi	21,9	26	Kota Sukabumi	25,4	26	Kota Sukabumi	27,2	26	Kota Sukabumi	26,6
27	Kota Banjar	10,4	27	Kota Banjar	10,1	27	Kota Banjar	11,2	27	Kota Banjar	13,4	27	Kota Banjar	12,7

Sumber : BPS Tahun 2023

#### **2.1.2.4 Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Kondisi umum kesejahteraan masyarakat Karawang dapat dilihat dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai barometer indikasi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup.

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*) dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar Hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli.

IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan dengan melakukan standarisasi dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk



melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian. Untuk melihat capaian IPM antar wilayah dapat dilihat melalui pengelompokan IPM ke dalam beberapa kategori yang meliputi:

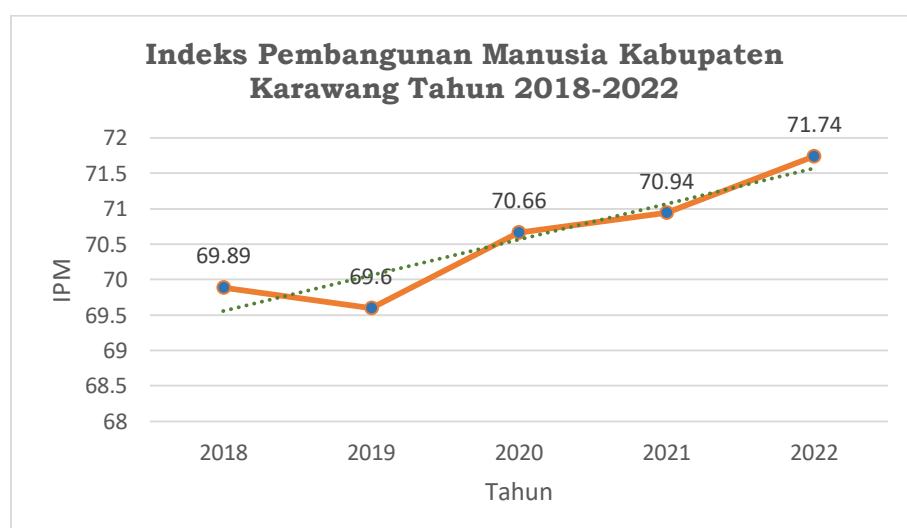
- IPM Rendah : IPM < 60,
- IPM Sedang :  $60 \leq \text{IPM} < 70$ ,
- IPM Tinggi :  $70 \leq \text{IPM} < 80$ ,
- IPM Sangat Tinggi : IPM  $\geq 80$ .

**Tabel. 2.50**  
**IPM dan Komponen IPM Kabupaten Karawang**  
**Tahun 2021 - 2024**

NO	URAIAN	2021		2022		Target 2023
		T	R	T	R	
1	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA	70,6	70,94	71,33	71,74	71,67
2	UMUR HARAPAN HIDUP	71,98	72,33	72,51	72,62	72,69
3	HARAPAN LAMA SEKOLAH	12,14	12,10	12,17	12,19	12,20
4	RATA RATA LAMA SEKOLAH	7,83	7,78	8,04	7,96	8,10
5	PENGELUARAN PERKAPITA	11.725	11.522	11.739	11.927	11.911

Sumber : RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2021-2026 dan LRA Kabupaten Karawang Tahun 2022

Pada Tabel 2.50, menginformasikan IPM dan Komponen IPM di Kabupaten Karawang Tahun 2021-2024. Pada tabel tersebut terdapat target dan capaian pada tahun 2021 dan 2022 serta proyeksi untuk tahun 2023 dan 2024.



Sumber: BPS Kabupaten Karawang Tahun 2023

**Gambar 2.48** Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Karawang Tahun 2018-2022

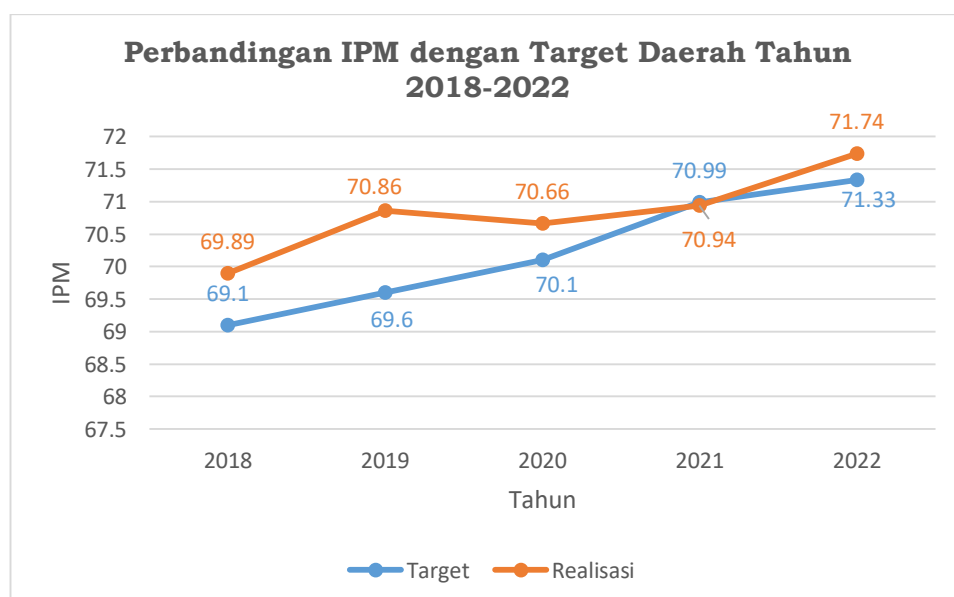
Berdasarkan Gambar 2.48, pembangunan manusia di Kabupaten Karawang terus mengalami peningkatan selama periode tahun 2018 hingga 2022. Namun, pada tahun 2019 IPM Kabupaten Karawang sempat mengalami penurunan sebesar 0,29 persen. Pada tahun-tahun berikutnya IPM Kabupaten Karawang mengalami kenaikan, seperti pada tahun 2020 IPM Kabupaten Karawang mengalami kenaikan sebesar 1,06 persen. Pada tahun 2020, IPM Kabupaten Karawang untuk pertama kalinya termasuk pada kategori “Tinggi”, karena telah mencapai 70,66.

**Tabel 2.51**  
**Perbandingan IPM dengan Target Daerah Tahun 2018-2022**

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Target	69,1	69,60	70,10	70,99	71,33
Realisasi	69,89	70,86	70,66	70,94	71,74

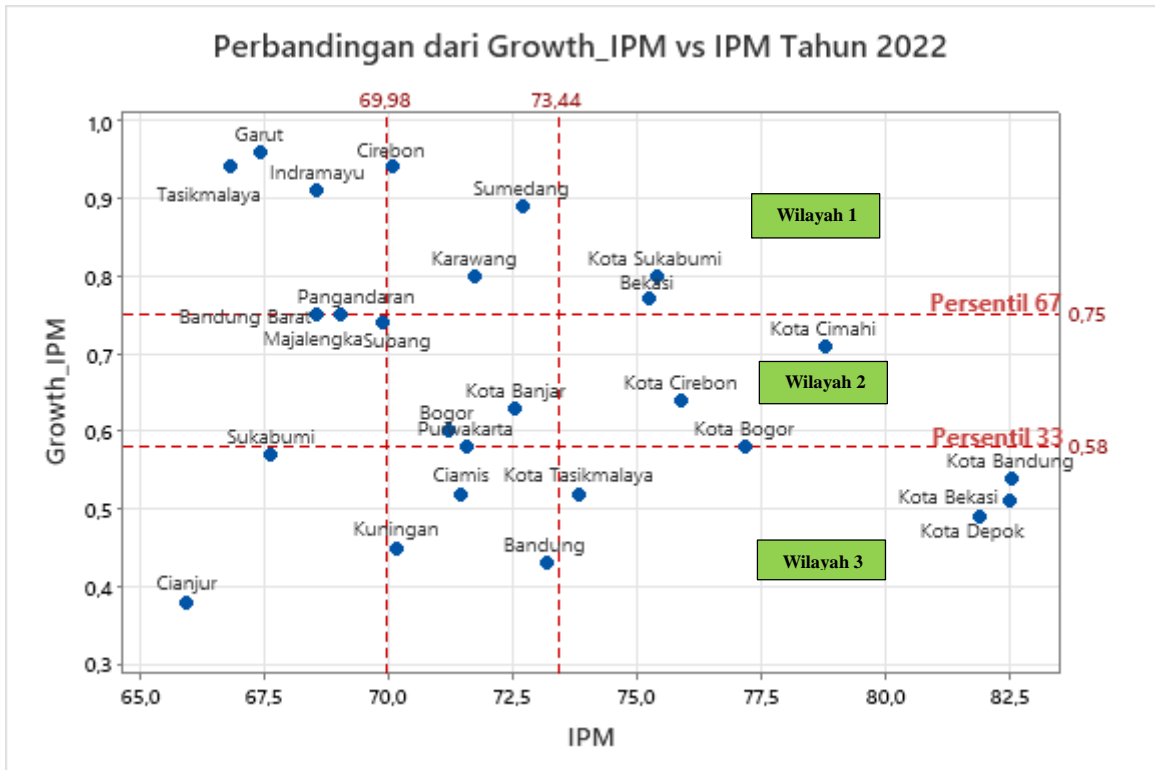
Sumber: Target: angka estimasi, Capaian: BPS Kabupaten Karawang Tahun 2023

Tabel 2.51 dan Gambar 2.49 menyajikan perbandingan Capaian IPM Kabupaten Karawang Tahun 2018-2022 dengan target daerah pada tahun yang bersangkutan. Berdasarkan Gambar 2.25, pada tahun 2021 IPM di Kabupaten Karawang tidak mencapai target. Sedangkan pada tahun lainnya, IPM di Kabupaten Karawang melebihi target Kabupaten Karawang yang ditentukan.



Sumber: Target: angka estimasi, Capaian: BPS Kabupaten Karawang Tahun 2023

**Gambar 2.49 Perbandingan IPM Kabupaten Karawang dengan Target Daerah Tahun 2018-2022**



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2023, diolah

**Gambar 2.50 Perbandingan Pertumbuhan IPM Kabupaten Karawang dengan Rata-Rata Capaian Wilayah yang Setara Tahun 2022**

Dengan melihat Gambar 2.50 yaitu perbandingan pertumbuhan IPM Kabupaten Karawang dengan rata-rata capaian wilayah yang setara, Kabupaten Karawang termasuk ke dalam Wilayah 1. Rincian capaian wilayah yang setara dengan Kabupaten Karawang terdapat pada Tabel 2.52 dengan rata-rata pertumbuhan IPM sebesar 0,8%. Hal ini berarti pertumbuhan IPM Kabupaten Karawang Tahun 2022 sebesar 0,8% lebih buruk dari rata-rata capaian wilayah yang setara sebesar 0,88%.

**Tabel 2.52**  
**Perbandingan Pertumbuhan IPM Kabupaten Karawang dengan Rata-Rata Capaian Wilayah yang Setara**

No	Kab/Kota	IPM		Pertumbuhan IPM 2022
		2021	2022	
1	Garut	66,45	67,41	0,96
2	Tasikmalaya	65,9	66,84	0,94
3	Cirebon	69,12	70,06	0,94
4	Indramayu	67,64	68,55	0,91
5	Sumedang	71,8	72,69	0,89
<b>6</b>	<b>Karawang</b>	<b>70,94</b>	<b>71,74</b>	<b>0,8</b>
7	Kota Sukabumi	74,6	75,4	0,8
8	Bekasi	74,45	75,22	0,77
<b>Rata-Rata Capaian Pertumbuhan IPM Wilayah yang Setara</b>				<b>0,88</b>

Sumber: Target: angka estimasi, Capaian: BPS Kabupaten Karawang Tahun 2023

Kondisi IPM Kabupaten Karawang Tahun 2022 dibandingkan dengan Kabupaten Kota Lainnya di Jawa Barat masih termasuk dalam 18 Kabupaten/Kota dengan capaian kategori IPM “Tinggi”. Secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 2.53.

**Tabel 2.53**  
**Kategori Indeks Pembangunan Manusia Tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2022**

<b>RENDAH</b>	<b>SEDANG</b>
-	Subang, Bandung Barat, Pangandaran, Majalengka, Indramayu, Sukabumi, Garut, Tasikmalaya, Cianjur
<b>TINGGI</b>	<b>SANGAT TINGGI</b>
Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Bogor, Kota Cirebon, Kota Sukabumi Bekasi, Kota Tasikmalaya, Bandung, Sumedang, Kota Banjar, Karawang, Purwakarta, Ciamis, Bogor, Kuningan, Cirebon	-

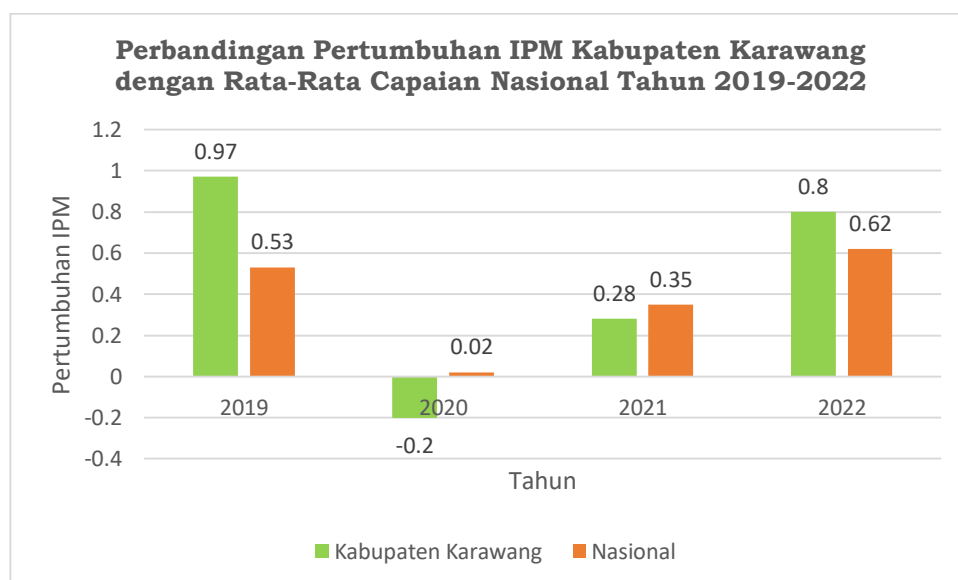
**Tabel 2.54**  
**Perbandingan Pertumbuhan IPM Daerah dengan Rata-Rata Capaian Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat**  
**Tahun 2018-2022**

No	Kab/Kota	2018	No	Kab/Kota	2019	No	Kab/Kota	2020	No	Kab/Kota	2021	No	Kab/Kota	2022
1	Kota Bandung	81,06	1	Kota Bandung	81,62	1	Kota Bandung	81,51	1	Kota Bandung	81,96	1	Kota Bandung	82,5
2	Kota Bekasi	81,04	2	Kota Bekasi	81,59	2	Kota Bekasi	81,5	2	Kota Bekasi	81,95	2	Kota Bekasi	82,46
3	Kota Depok	80,29	3	Kota Depok	80,82	3	Kota Depok	80,97	3	Kota Depok	81,37	3	Kota Depok	81,86
4	Kota Cimahi	77,56	4	Kota Cimahi	78,11	4	Kota Cimahi	77,83	4	Kota Cimahi	78,06	4	Kota Cimahi	78,77
5	Kota Bogor	75,66	5	Kota Bogor	76,23	5	Kota Bogor	76,11	5	Kota Bogor	76,59	5	Kota Bogor	77,17
6	Kota Cirebon	74,35	6	Kota Cirebon	74,92	6	Kota Cirebon	74,89	6	Kota Cirebon	75,25	6	Kota Cirebon	75,89
7	Kota Sukabumi	73,55	7	Kota Sukabumi	74,31	7	Kota Sukabumi	74,21	7	Kota Sukabumi	74,6	7	Kota Sukabumi	75,4
8	Bekasi	73,49	8	Bekasi	73,99	8	Bekasi	74,07	8	Bekasi	74,45	8	Bekasi	75,22
9	Kota Tasikmalaya	72,03	9	Kota Tasikmalaya	72,84	9	Kota Tasikmalaya	73,04	9	Kota Tasikmalaya	73,31	9	Kota Tasikmalaya	73,83
10	Bandung	71,75	10	Bandung	72,41	10	Bandung	72,39	10	Bandung	72,73	10	Bandung	73,16
11	Kota Banjar	71,25	11	Kota Banjar	71,75	11	Kota Banjar	71,7	11	Kota Banjar	71,92	11	Sumedang	72,69
12	Sumedang	70,99	12	Sumedang	71,46	12	Sumedang	71,64	12	Sumedang	71,8	12	Kota Banjar	72,55
13	Purwakarta	69,98	13	Karawang	70,86	13	Purwakarta	70,82	13	Purwakarta	70,98	13	Karawang	71,74
14	Karawang	69,89	14	Purwakarta	70,67	14	Karawang	70,66	14	Karawang	70,94	14	Purwakarta	71,56
15	Bogor	69,69	15	Bogor	70,65	15	Ciamis	70,49	15	Ciamis	70,93	15	Ciamis	71,45
16	Ciamis	69,63	16	Ciamis	70,39	16	Bogor	70,4	16	Bogor	70,6	16	Bogor	71,2
17	Kuningan	68,55	17	Kuningan	69,12	17	Kuningan	69,38	17	Kuningan	69,71	17	Kuningan	70,16
18	Subang	68,31	18	Cirebon	68,69	18	Subang	68,95	18	Subang	69,13	18	Cirebon	70,06
19	Cirebon	68,05	19	Subang	68,69	19	Cirebon	68,75	19	Cirebon	69,12	19	Subang	69,87
20	Bandung Barat	67,46	20	Bandung Barat	68,27	20	Bandung Barat	68,08	20	Bandung Barat	68,29	20	Bandung Barat	69,04
21	Pangandaran	67,44	21	Pangandaran	68,21	21	Pangandaran	68,06	21	Pangandaran	68,28	21	Pangandaran	69,03
22	Majalengka	66,72	22	Majalengka	67,52	22	Majalengka	67,59	22	Majalengka	67,81	22	Majalengka	68,56
23	Indramayu	66,36	23	Indramayu	66,97	23	Indramayu	67,29	23	Indramayu	67,64	23	Indramayu	68,55

No	Kab/Kota	2018	No	Kab/Kota	2019	No	Kab/Kota	2020	No	Kab/Kota	2021	No	Kab/Kota	2022
24	Sukabumi	66,05	24	Sukabumi	66,87	24	Sukabumi	66,88	24	Sukabumi	67,07	24	Sukabumi	67,64
25	Garut	65,42	25	Garut	66,22	25	Garut	66,12	25	Garut	66,45	25	Garut	67,41
26	Tasikmalaya	65	26	Tasikmalaya	65,64	26	Tasikmalaya	65,67	26	Tasikmalaya	65,9	26	Tasikmalaya	66,84
27	Cianjur	64,62	27	Cianjur	65,38	27	Cianjur	65,36	27	Cianjur	65,56	27	Cianjur	65,94

Sumber: BPS Kabupaten Karawang Tahun 2023

Peningkatan IPM di tingkat Provinsi Jawa Barat juga tercermin pada level kabupaten/kota. Pada tahun 2022, seluruh Kabupaten/Kota mengalami peningkatan IPM jika dibandingkan dengan tahun 2021. Berdasarkan Tabel 2.54, pada Tahun 2022, Kabupaten Karawang menempati posisi 13 dari 27 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Barat. Hal ini berarti Kabupaten Karawang mengalami peningkatan satu peringkat jika dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu menempati posisi 14 dari 27 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Barat.



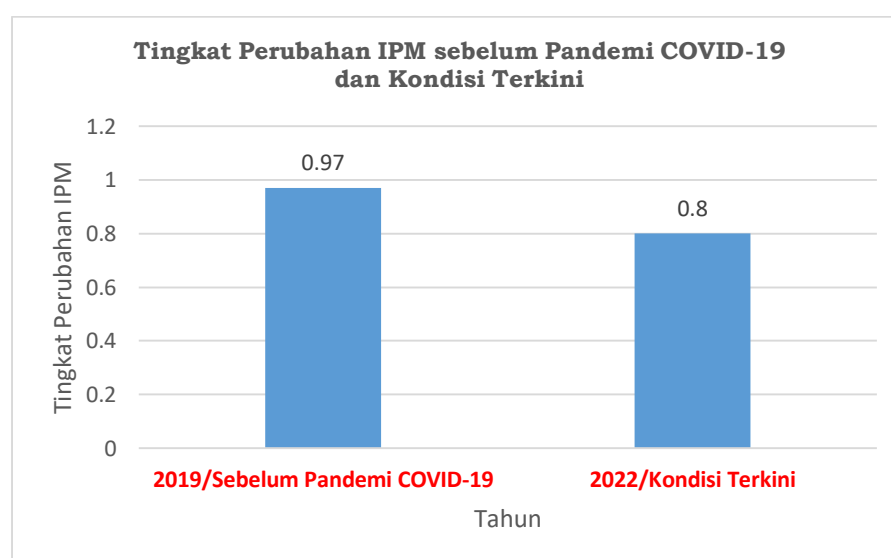
Sumber: BPS Tahun 2023

**Gambar 2.51 Perbandingan Pertumbuhan IPM Kabupaten Karawang dengan Rata-Rata Capaian Nasional Tahun 2019-2022**

Berdasarkan Gambar 2.51, pertumbuhan IPM pada tahun 2022 lebih baik daripada pertumbuhan IPM Nasional. Kabupaten Karawang mengalami pertumbuhan IPM dari tahun sebelumnya berupa kenaikan IPM sebesar 0,8. Sedangkan pertumbuhan IPM nasional dari tahun sebelumnya berupa kenaikan IPM yang hanya mencapai 0,62. Hal ini berarti pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Karawang tidak lebih baik dari Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Untuk itu, Kabupaten Karawang perlu meningkatkan IPM melalui tiga dimensi dasarnya, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*) dan standar hidup layak (*decent standard of living*).

Tingkat perubahan IPM sebelum Pandemi COVID-19 dan kondisi terkini disajikan pada Gambar 2.52. Berdasarkan gambar

tersebut, perubahan IPM sebelum pandemi COVID-19 bernilai positif atau lebih dari nol. Hal ini berarti terjadi kenaikan IPM pada tahun 2019 sebesar 0,97. Sedangkan pada tahun 2022 atau kondisi terkini perubahan IPM bernilai positif atau lebih dari nol. Hal ini berarti setelah pandemi COVID-19 atau pada tahun 2022 terjadi kenaikan IPM pada Kabupaten Karawang sebesar 0,8.

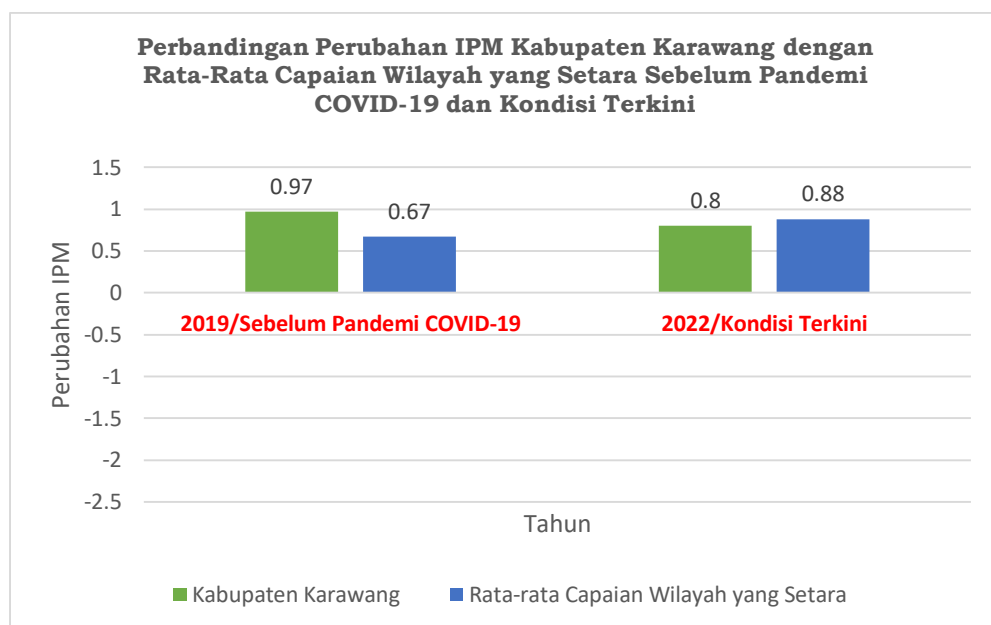


Sumber: BPS Kabupaten Karawang Tahun 2023

**Gambar 2.52 Tingkat Perubahan IPM Sebelum Pandemi COVID-19 dan Kondisi Terkini**

Berdasarkan Gambar 2.53, perubahan IPM sebelum pandemi COVID-19 Kabupaten Karawang sebesar 0,97 dan rata-rata capaian wilayah setara sebesar 0,67. Sementara itu, perubahan IPM kondisi terkini Kabupaten Karawang sebesar 0,80 dan rata-rata capaian wilayah yang setara sebesar 0,88. Dapat disimpulkan, sebelum pandemi COVID-19 perubahan IPM Kabupaten Karawang lebih baik dari rata-rata capaian wilayah yang setara. Sedangkan, kondisi terkini perubahan IPM Kabupaten Karawang lebih buruk dari rata-rata capaian wilayah yang setara.

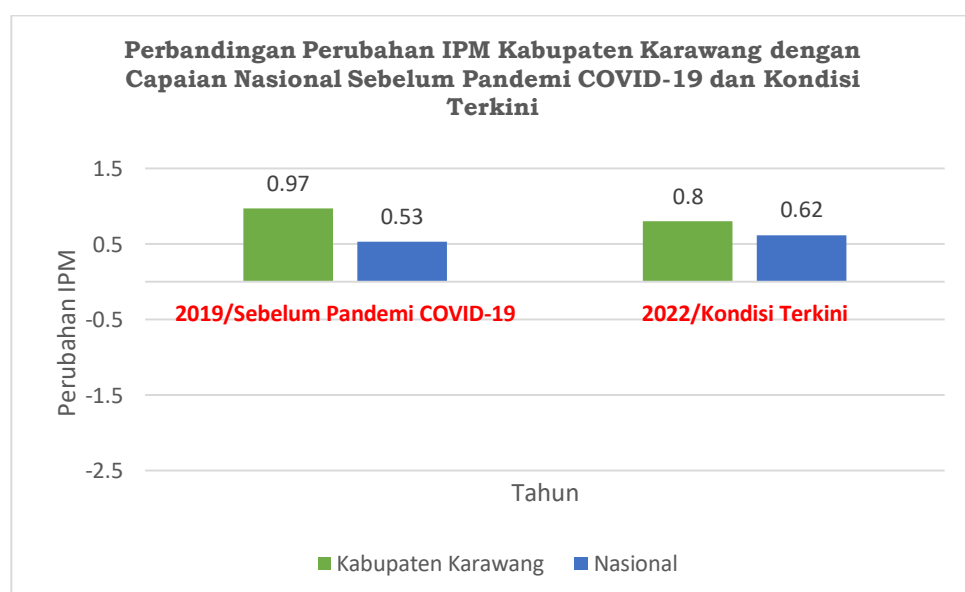




Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

**Gambar 2.53 Perbandingan Perubahan IPM Kabupaten Karawang dengan Rata-Rata Capaian Wilayah yang Setara Sebelum Pandemi COVID-19 dan Kondisi Terkini**

Dengan melihat Gambar 2.54, perubahan IPM sebelum pandemi COVID-19 Kabupaten Karawang sebesar 0,97 dan capaian nasional sebesar 0,53. Sementara itu, perubahan IPM kondisi terkini Kabupaten Karawang sebesar 0,80 dan capaian nasional sebesar 0,62. Hal ini berarti, baik sebelum pandemi COVID-19 maupun kondisi terkini perubahan IPM Kabupaten Karawang lebih baik dari capaian nasional.



Sumber: BPS Tahun 2023

**Gambar 2.54 Perbandingan Perubahan IPM Kabupaten Karawang dengan Capaian Nasional Sebelum Pandemi COVID-19 dan Kondisi Terkini**

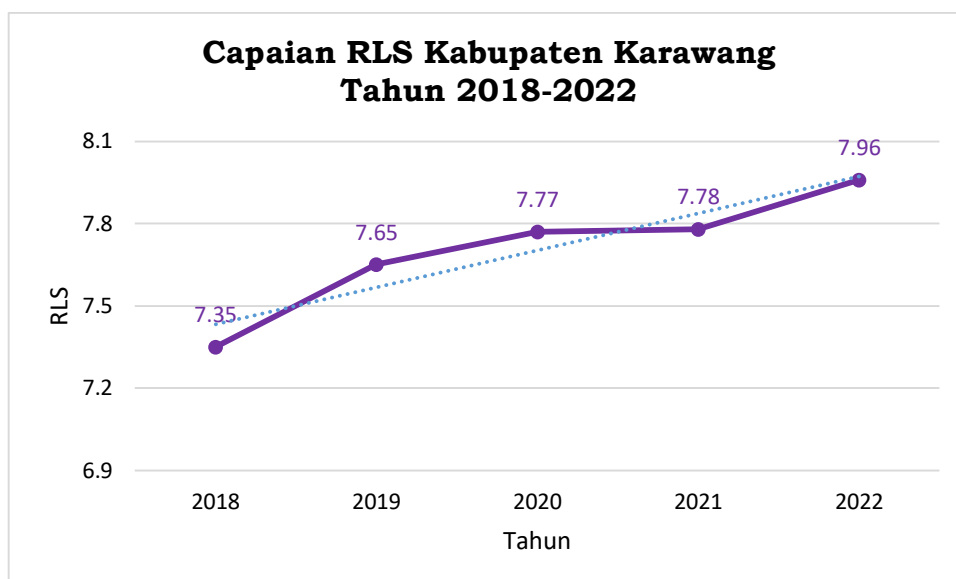
Dimensi Pengetahuan/Pendidikan pada IPM dibentuk oleh dua indikator yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Rata-rata lama sekolah adalah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah dari masuk sekolah dasar sampai sampai dengan tingkat pendidikan terakhir yang ditempuh. Namun jumlah tahun bersekolah ini tidak mengindahkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, dan masuk sekolah dasar di usia yang lebih muda atau lebih tua. Cara menghitung angka rata-rata lama sekolah dapat dikonversikan langsung dari jenjang pendidikan dan kelas tertinggi yang pernah diduduki seseorang.

**Tabel 2.55**  
**Capaian RLS Kabupaten Karawang**  
**Tahun 2018-2022**

<b>Indikator</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
RLS (tahun)	7,35	7,65	7,77	7,78	7,96

*Sumber: BPS Kabupaten Karawang Tahun 2023*

Gambar 2.55 menginformasikan RLS yang terus mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2018-2022. Berdasarkan Tabel 2.55, selama periode 2018 hingga 2022, Rata-rata Lama Sekolah meningkat 0,61 tahun. Pertumbuhan RLS yang positif ini adalah modal penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia Kabupaten Karawang yang lebih baik lagi. Pada tahun 2022, secara rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas telah bersekolah selama 7,96 tahun, atau telah menyelesaikan Pendidikan hingga kelas VII (atau setara SMP kelas 1).



Sumber: BPS Kabupaten Karawang Tahun 2023

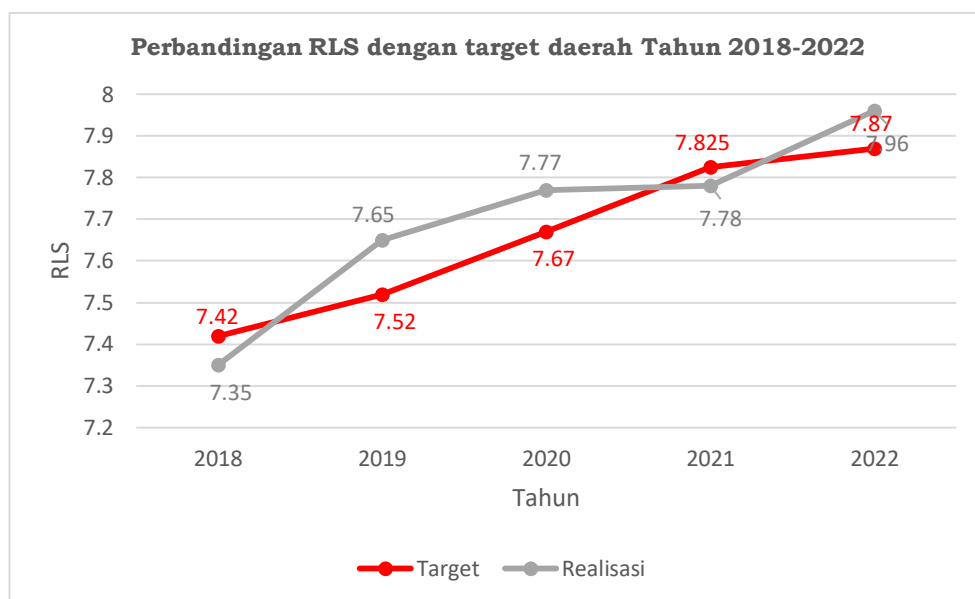
**Gambar 2.55 Capaian RLS Kabupaten Karawang Tahun 2018-2022**

Tabel 2.56 dan Gambar 2.56 menyajikan perbandingan Capaian RLS Kabupaten Karawang Tahun 2018-2022 dengan target daerah pada tahun yang bersangkutan. Berdasarkan Gambar 2.56, pada tahun 2018 dan 2021, RLS di Kabupaten Karawang tidak mencapai target. Sedangkan pada tahun 2019, 2020, dan 2022, RLS di Kabupaten Karawang mencapai target, bahkan melebihi target Kabupaten Karawang yang ditentukan. Meskipun dilanda COVID-19 pada tahun 2020, RLS tetap melebihi target. Dengan kata lain, pada tahun 2022 RLS Kabupaten Karawang lebih baik dari target daerah.

**Tabel 2.56**  
**Perbandingan RLS Dengan Target Daerah**  
**Tahun 2018-2022**

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Target	7,42	7,52	7,67	7,825	7,87
Realisasi	7,35	7,65	7,77	7,78	7,96

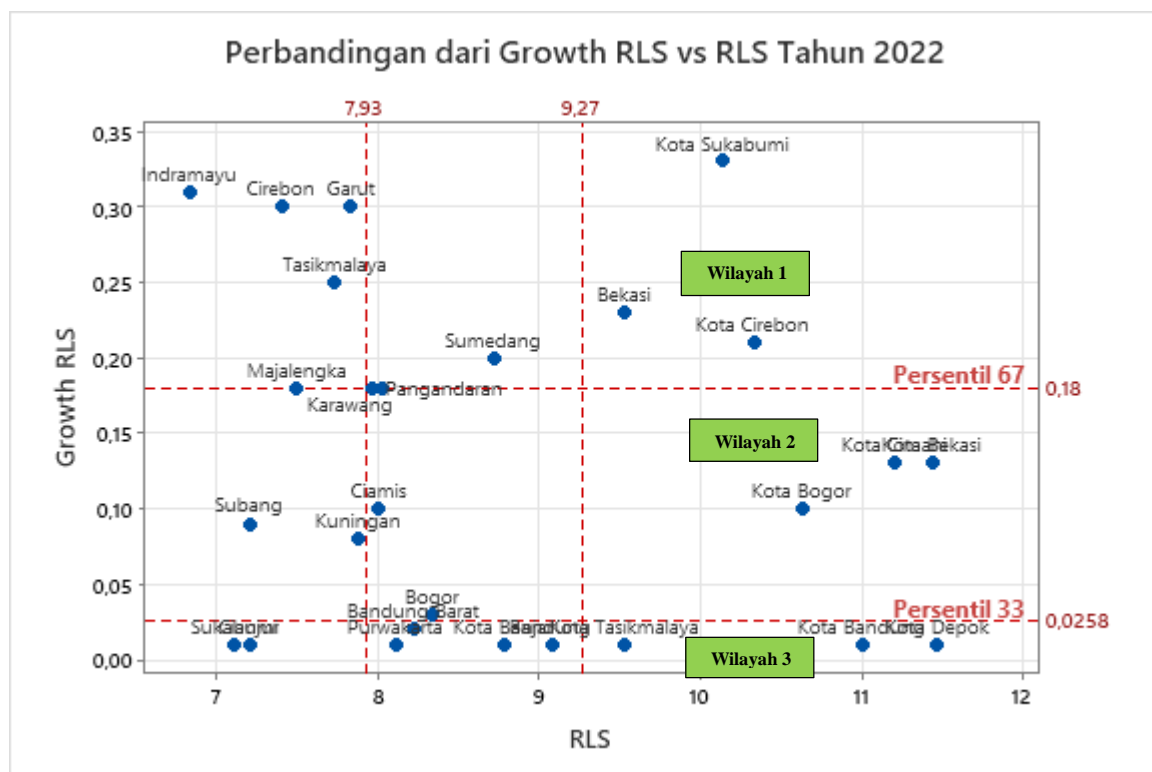
Sumber: Target: angka estimasi dan Renstra Disdikpora 2021-2026, Realisasi: BPS Tahun 2023



Sumber: Target: angka estimasi dan Renstra Disdikpora 2021-2026, Realisasi: BPS Tahun 2023

**Gambar 2.56 Perbandingan RLS dengan Target Daerah Tahun 2018-2022**

Dengan melihat Gambar 2.57 yaitu perbandingan pertumbuhan RLS Kabupaten Karawang dengan rata-rata capaian wilayah yang setara, Kabupaten Karawang termasuk ke dalam Wilayah 1.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

**Gambar 2.57 Perbandingan Pertumbuhan RLS Kabupaten Karawang dengan Rata-Rata Capaian Wilayah yang Setara Tahun 2022**

Rincian capaian wilayah yang setara dengan Kabupaten Karawang terdapat pada Tabel 2.57 dengan rata-rata pertumbuhan RLS sebesar 0,18%. Hal ini

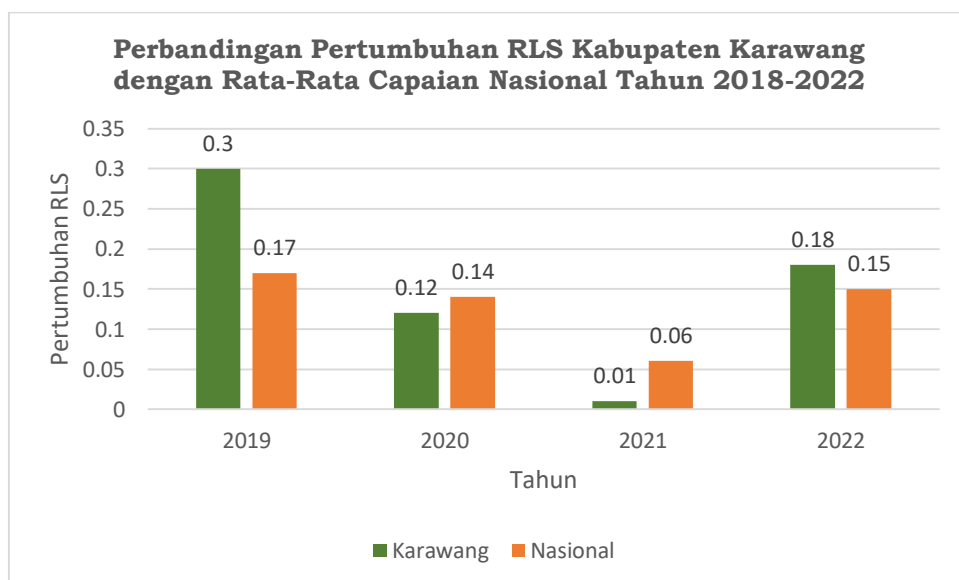
berarti pertumbuhan RLS Kabupaten Karawang Tahun 2022 sebesar 0,18% lebih baik dari rata-rata capaian wilayah yang setara sebesar 0,14%.

**Tabel 2.57**  
**Perbandingan RLS Dengan Target Daerah**  
**Tahun 2018-2022**

No	Kab/Kota	RLS		Pertumbuhan RLS 2022
		2021	2022	
1	Majalengka	7,31	7,49	0,18
<b>2</b>	<b>Karawang</b>	<b>7,78</b>	<b>7,96</b>	<b>0,18</b>
3	Pangandaran	7,85	8,03	0,18
4	Kota Cimahi	11,08	11,21	0,13
5	Kota Bekasi	11,31	11,44	0,13
6	Kota Bogor	10,53	10,63	0,10
7	Ciamis	7,90	8,00	0,10
8	Subang	7,11	7,20	0,09
9	Kuningan	7,80	7,88	0,08
10	Bogor	8,31	8,34	0,03
<b>Rata-Rata Capaian Pertumbuhan RLS Wilayah yang Setara</b>				<b>0,14</b>

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

Berdasarkan Gambar 2.58, pertumbuhan RLS Kabupaten Karawang pada tahun 2022 lebih baik daripada pertumbuhan RLS Nasional. Kabupaten Karawang mengalami pertumbuhan RLS dari tahun sebelumnya berupa kenaikan RLS sebesar 0,18. Sedangkan pertumbuhan RLS nasional dari tahun sebelumnya berupa kenaikan RLS yang hanya mencapai 0,15.



Sumber: BPS Tahun 2023

**Gambar 2.58 Perbandingan Pertumbuhan RLS Kabupaten Karawang dengan Rata-Rata Capaian Nasional Tahun 2018-2022**

Berdasarkan Tabel 2.58, selama periode 2018-2021, Kabupaten Karawang terus mengalami peningkatan peringkat dari Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Barat. Peringkat RLS Kabupaten Karawang tertinggi terjadi pada tahun 2020 dan 2021 yaitu peringkat 16 dari 27 Kabupaten/Kota. Namun, pada tahun 2022 Kabupaten Karawang kembali ke peringkat 18. Peningkatan RLS pada Kabupaten Karawang tidak setinggi peningkatan RLS pada 27 kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Barat sehingga Kabupaten Karawang kembali ke peringkat 18.

**Tabel 2.58**  
**Perbandingan Pertumbuhan RLS daerah dengan Rata-Rata Capaian Wilayah Kab/Kota**  
**di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022**

No	Kab/Kota	2018	No	Kab/Kota	2019	No	Kab/Kota	2020	No	Kab/Kota	2021	No	Kab/Kota	2022
1	Kota Bekasi	11,1	1	Kota Bekasi	11,1	1	Kota Depok	11,3	1	Kota Depok	11,3	1	Kota Depok	11,5
2	Kota Cimahi	10,9	2	Kota Depok	11	2	Kota Bekasi	11,2	2	Kota Bekasi	11,2	2	Kota Bekasi	11,4
3	Kota Depok	10,9	3	Kota Cimahi	11	3	Kota Cimahi	11	3	Kota Cimahi	11	3	Kota Cimahi	11,2
4	Kota Bandung	10,6	4	Kota Bandung	10,7	4	Kota Bandung	10,8	4	Kota Bandung	10,8	4	Kota Bandung	11
5	Kota Bogor	10,3	5	Kota Bogor	10,3	5	Kota Bogor	10,3	5	Kota Bogor	10,3	5	Kota Bogor	10,6
6	Kota Cirebon	9,89	6	Kota Cirebon	9,9	6	Kota Cirebon	9,91	6	Kota Cirebon	9,91	6	Kota Cirebon	10,3
7	Kota Sukabumi	9,53	7	Kota Sukabumi	9,58	7	Kota Sukabumi	9,59	7	Kota Sukabumi	9,59	7	Kota Sukabumi	10,1
8	Kota Tasikmalaya	9,04	8	Kota Tasikmalaya	9,13	8	Kota Tasikmalaya	9,33	8	Kota Tasikmalaya	9,33	8	Bekasi	9,53
9	Bekasi	8,84	9	Bekasi	8,84	9	Bekasi	9,12	9	Bekasi	9,12	9	Kota Tasikmalaya	9,53
10	Kota Banjar	8,6	10	Bandung	8,79	10	Bandung	8,96	10	Bandung	8,96	10	Bandung	9,08
11	Bandung	8,58	11	Kota Banjar	8,62	11	Kota Banjar	8,63	11	Kota Banjar	8,63	11	Kota Banjar	8,78
12	Sumedang	8,17	12	Bogor	8,29	12	Sumedang	8,51	12	Sumedang	8,51	12	Sumedang	8,72
13	Bandung Barat	7,97	13	Sumedang	8,27	13	Bogor	8,3	13	Bogor	8,3	13	Bogor	8,34
14	Bogor	7,88	14	Bandung Barat	8,18	14	Bandung Barat	8,19	14	Bandung Barat	8,19	14	Bandung Barat	8,22
15	Purwakarta	7,75	15	Purwakarta	7,92	15	Purwakarta	8,09	15	Purwakarta	8,09	15	Purwakarta	8,11
16	Ciamis	7,6	16	Ciamis	7,69	16	Karawang	7,77	16	Karawang	7,77	16	Pangandaran	8,03
17	Pangandaran	7,58	17	Pangandaran	7,67	17	Pangandaran	7,74	17	Pangandaran	7,74	17	Ciamis	8
18	Garut	7,5	18	Karawang	7,65	18	Ciamis	7,7	18	Ciamis	7,7	18	Karawang	7,96
19	Kuningan	7,36	19	Garut	7,51	19	Kuningan	7,57	19	Kuningan	7,57	19	Kuningan	7,88
20	Karawang	7,35	20	Kuningan	7,38	20	Garut	7,52	20	Garut	7,52	20	Garut	7,83
21	Tasikmalaya	7,13	21	Tasikmalaya	7,17	21	Tasikmalaya	7,35	21	Tasikmalaya	7,35	21	Tasikmalaya	7,73
22	Cianjur	6,93	22	Majalengka	7,09	22	Majalengka	7,27	22	Majalengka	7,27	22	Majalengka	7,49
23	Majalengka	6,91	23	Sukabumi	7,02	23	Cianjur	7,18	23	Cianjur	7,18	23	Cirebon	7,4
24	Subang	6,84	24	Cianjur	6,97	24	Subang	7,1	24	Subang	7,1	24	Cianjur	7,2

<b>No</b>	<b>Kab/Kota</b>	<b>2018</b>	<b>No</b>	<b>Kab/Kota</b>	<b>2019</b>	<b>No</b>	<b>Kab/Kota</b>	<b>2020</b>	<b>No</b>	<b>Kab/Kota</b>	<b>2021</b>	<b>No</b>	<b>Kab/Kota</b>	<b>2022</b>
25	Sukabumi	6,8	25	Subang	6,85	25	Sukabumi	7,07	25	Sukabumi	7,07	25	Subang	7,2
26	Cirebon	6,62	26	Cirebon	6,71	26	Cirebon	6,92	26	Cirebon	6,92	26	Sukabumi	7,11
27	Indramayu	5,98	27	Indramayu	5,99	27	Indramayu	6,3	27	Indramayu	6,3	27	Indramayu	6,83

Sumber: BPS Tahun 2023



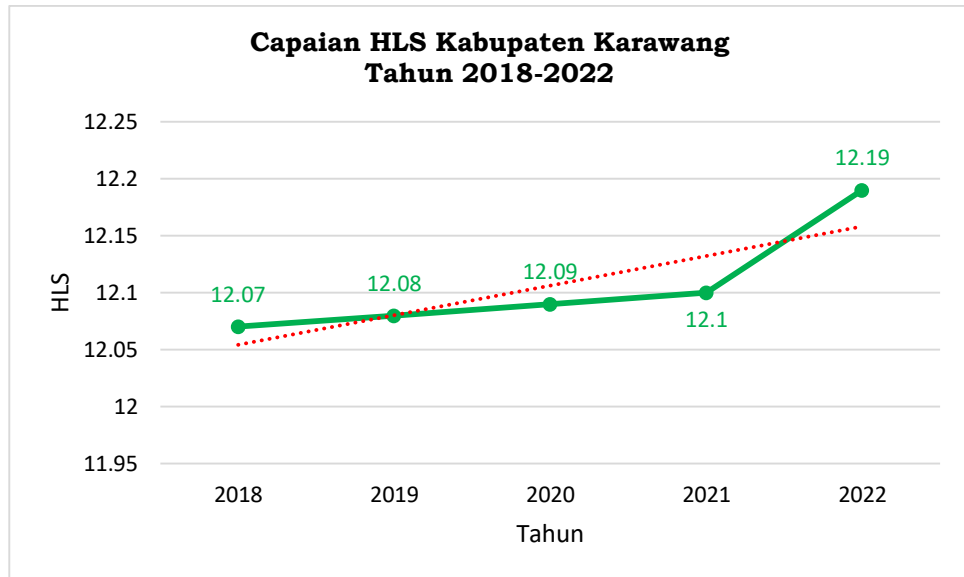
Semenjak tahun 2015, penghitungan IPM di Indonesia mengalami perubahan metodologi, dengan beberapa keunggulan dibandingkan IPM metode lama, yaitu mampu digunakan sebagai indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif). Beberapa komponen IPM berubah, diantaranya angka melek huruf pada metode lama diganti dengan angka harapan lama sekolah (*expected years of schooling/EYS*) dan metode agregasi IPM diubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

**Tabel 2.59**  
**Capaian HLS Kabupaten Karawang Tahun 2018-2022**

<b>Indikator</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
HLS (tahun)	12,07	12,08	12,09	12,10	12,19

*Sumber: BPS Kabupaten Karawang Tahun 2023*

HLS menunjukkan peningkatan tahun bersekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak usia tujuh tahun di masa mendatang. Berdasarkan Tabel 2.59, pada tahun 2022, HLS di Kabupaten Karawang telah mencapai 12,19 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia tujuh tahun memiliki peluang untuk menambahkan pendidikan hingga lulus SMA atau hingga menempuh jenjang Diploma I. Selama periode 2018 hingga 2022, HLS di Kabupaten Karawang telah meningkat sebesar 0,12 tahun. Peningkatan HLS Kabupaten Karawang dapat dilihat pada Gambar 2.59.



Sumber: BPS Kabupaten Karawang Tahun 2023

**Gambar 2.59 Capaian Harapan Lama Sekolah Kabupaten Karawang Tahun 2018-2022**

Tabel 2.60 dan Gambar 2.60 menyajikan perbandingan Capaian HLS Kabupaten Karawang Tahun 2018-2022 dengan target daerah pada tahun yang bersangkutan. Berdasarkan Gambar 2.60, pada tahun 2018 dan 2019 RLS di Kabupaten Karawang mencapai target, bahkan di melebihi target Kabupaten Karawang yang ditentukan. Sedangkan, pada tahun 2020, 2021, dan 2022 RLS Kabupaten Karawang belum bisa mencapai target. HLS ikut terdampak pandemi COVID-19. Dengan kata lain, pada tahun 2022, HLS Kabupaten Karawang lebih buruk dari target daerah.

**Tabel 2.60 Perbandingan HLS dengan Target Daerah Tahun 2018-2022**

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Target	12,01	12,07	12,11	12,24	12,40
Realisasi	12,07	12,08	12,09	12,10	12,19

Sumber: Target: angka estimasi dan Renstra Disdikpora 2021-2026, Realisasi: BPS Tahun 2023

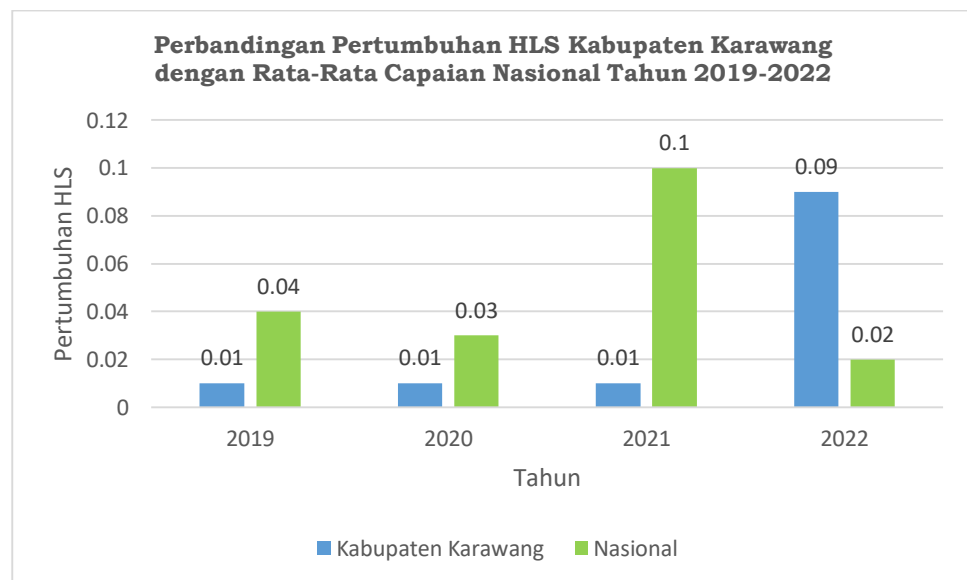


2022 sebesar 0,09 lebih baik dari rata-rata capaian wilayah yang setara sebesar 0,07.

**Tabel 2.61**  
**Perbandingan Pertumbuhan HLS dengan Rata-Rata Capaian Wilayah yang Setara**

No	Kab/Kota	HLS		Pertumbuhan HLS 2022
		2021	2022	
1	Garut	12,03	12,15	0,12
<b>2</b>	<b>Karawang</b>	<b>12,10</b>	<b>12,19</b>	<b>0,09</b>
3	Ciamis	14,20	14,28	0,08
4	Subang	11,71	11,78	0,07
5	Tasikmalaya	12,54	12,59	0,05
6	Pangandaran	12,08	12,11	0,03
7	Kota Bandung	14,21	14,23	0,02
<b>Rata-Rata Capaian Pertumbuhan HLS Wilayah yang Setara</b>				<b>0,07</b>

Berdasarkan Gambar 2.62, pertumbuhan HLS Kabupaten Karawang pada tahun 2022 lebih baik daripada pertumbuhan HLS Nasional. Kabupaten Karawang mengalami pertumbuhan HLS dari tahun sebelumnya berupa kenaikan HLS sebesar 0,09. Sedangkan pertumbuhan HLS nasional dari tahun sebelumnya berupa kenaikan HLS yang hanya mencapai 0,02.



Sumber: BPS Tahun 2023

**Gambar 2.62 Perbandingan Pertumbuhan HLS Kabupaten Karawang dengan Rata-Rata Capaian Nasional Tahun 2019-2022**

Berdasarkan Tabel 2.62, selama periode 2018-2021, Kabupaten Karawang tetap dalam peringkat 22 dari 27 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Barat, walaupun HLS Kabupaten Karawang

mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2022, peringkat RLS Kabupaten Karawang mengalami peningkatan 1 peringkat, semula peringkat 22 menjadi peringkat 21 dari 27 kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Barat. HLS Kabupaten Karawang berada di atas Kabupaten Garut, Purwakarta, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Subang.

**Tabel 2.62**  
**Perbandingan Pertumbuhan HLS Kabupaten Karawang dengan Rata-Rata Capaian Wilayah Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022**

No	Kab/Kota	2018	No	Kab/Kota	2019	No	Kab/Kota	2020	No	Kab/Kota	2021	No	Kab/Kota	2022
1	Kota Bandung	14,18	1	Kota Bandung	14,19	1	Kota Bandung	14,2	1	Kota Bandung	14,21	1	Ciamis	14,28
2	Kota Depok	13,9	2	Kota Bekasi	13,99	2	Ciamis	14,06	2	Ciamis	14,2	2	Kota Bandung	14,23
3	Kota Cimahi	13,77	3	Kota Depok	13,91	3	Kota Bekasi	14	3	Kota Bekasi	14,1	3	Kota Bekasi	14,11
4	Kota Bekasi	13,76	4	Ciamis	13,79	4	Kota Depok	13,92	4	Kota Depok	13,93	4	Kota Depok	13,94
5	Ciamis	13,67	5	Kota Cimahi	13,79	5	Kota Cimahi	13,8	5	Kota Cimahi	13,81	5	Kota Cimahi	13,82
6	Kota Tasikmalaya	13,42	6	Kota Sukabumi	13,46	6	Kota Sukabumi	13,47	6	Kota Sukabumi	13,58	6	Kota Sukabumi	13,59
7	Kota Sukabumi	13,4	7	Kota Tasikmalaya	13,44	7	Kota Tasikmalaya	13,45	7	Kota Tasikmalaya	13,46	7	Kota Tasikmalaya	13,47
8	Kota Bogor	13,38	8	Kota Bogor	13,4	8	Kota Bogor	13,41	8	Kota Bogor	13,42	8	Kota Bogor	13,43
9	Kota Banjar	13,2	9	Kota Banjar	13,22	9	Kota Banjar	13,23	9	Kota Banjar	13,24	9	Kota Banjar	13,25
10	Kota Cirebon	13,09	10	Kota Cirebon	13,11	10	Kota Cirebon	13,12	10	Kota Cirebon	13,13	10	Kota Cirebon	13,14
11	Bekasi	13,05	11	Bekasi	13,08	11	Bekasi	13,09	11	Bekasi	13,1	11	Bekasi	13,11
12	Sumedang	12,94	12	Sumedang	12,96	12	Sumedang	12,97	12	Sumedang	12,98	12	Sumedang	12,99
13	Bandung	12,64	13	Bandung	12,68	13	Bandung	12,69	13	Bandung	12,7	13	Bandung	12,71
14	Tasikmalaya	12,48	14	Tasikmalaya	12,52	14	Tasikmalaya	12,53	14	Tasikmalaya	12,54	14	Tasikmalaya	12,59
15	Bogor	12,44	15	Bogor	12,47	15	Bogor	12,48	15	Bogor	12,49	15	Bogor	12,5
16	Cirebon	12,22	16	Cirebon	12,24	16	Cirebon	12,25	16	Cirebon	12,27	16	Cirebon	12,28
17	Indramayu	12,22	17	Indramayu	12,24	17	Indramayu	12,25	17	Indramayu	12,26	17	Indramayu	12,27
18	Sukabumi	12,2	18	Sukabumi	12,22	18	Sukabumi	12,23	18	Sukabumi	12,24	18	Sukabumi	12,25
19	Majalengka	12,19	19	Majalengka	12,21	19	Kuningan	12,22	19	Kuningan	12,23	19	Kuningan	12,24
20	Purwakarta	12,09	20	Kuningan	12,1	20	Majalengka	12,22	20	Majalengka	12,23	20	Majalengka	12,24
21	Kuningan	12,07	21	Purwakarta	12,1	21	Purwakarta	12,11	21	Purwakarta	12,12	21	<b>Karawang</b>	<b>12,19</b>
22	<b>Karawang</b>	<b>12,07</b>	22	<b>Karawang</b>	<b>12,08</b>	22	<b>Karawang</b>	<b>12,09</b>	22	<b>Karawang</b>	<b>12,1</b>	22	Garut	12,15
23	Pangandaran	12,04	23	Pangandaran	12,06	23	Pangandaran	12,07	23	Pangandaran	12,08	23	Purwakarta	12,13
24	Cianjur	11,9	24	Cianjur	11,98	24	Cianjur	11,99	24	Garut	12,03	24	Pangandaran	12,11

No	Kab/Kota	2018	No	Kab/Kota	2019	No	Kab/Kota	2020	No	Kab/Kota	2021	No	Kab/Kota	2022
25	Bandung Barat	11,83	25	Bandung Barat	11,86	25	Garut	11,91	25	Cianjur	12	25	Cianjur	12,01
26	Garut	11,8	26	Garut	11,82	26	Bandung Barat	11,87	26	Bandung Barat	11,88	26	Bandung Barat	11,89
27	Subang	11,68	27	Subang	11,69	27	Subang	11,7	27	Subang	11,71	27	Subang	11,78

Sumber: BPS Kabupaten Karawang Tahun 2023

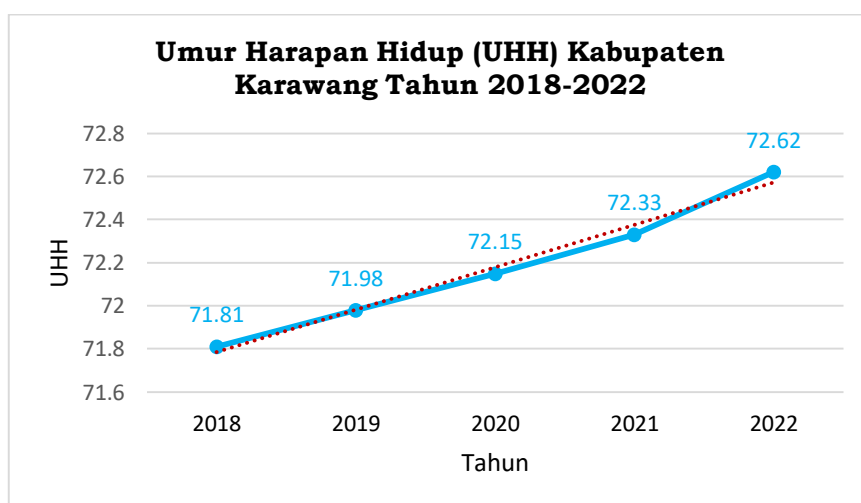
Dimensi umur panjang dan hidup sehat direpresentasikan oleh indikator Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir yang dapat mencerminkan derajat Kesehatan suatu wilayah, baik dari sarana prasarana, aksesibilitas, SDM Kesehatan hingga kualitas pelayanan Kesehatan. Salah satu indikasi meningkatnya derajat kesehatan suatu wilayah adalah rata-rata UHH yang lebih lama. Selain itu, UHH juga mengindikasikan peluang bayi yang baru lahir akan mencapai UHH hingga tahun tertentu. Tingkat kesehatan di suatu negara salah satunya dapat dilihat dari besarnya UHH penduduknya.

**Tabel 2.63**  
**Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Karawang**  
**Tahun 2018 – 2022**

<b>Uraian</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Umur Harapan Hidup (tahun)	71,81	71,98	72,15	72,33	72,62

Sumber: BPS Kabupaten Karawang Tahun 2023

UHH saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan Tabel 2.63, selama periode 2018 hingga 2022, Kabupaten Karawang telah berhasil meningkatkan UHH saat lahir sebesar 0,81 tahun. Pada tahun 2018, UHH saat lahir di Kabupaten Karawang hanya sebesar 71,81 tahun dan pada tahun 2022 telah mencapai 72,62 tahun. Selama periode 2018-2021, secara rata-rata UHH tumbuh sebesar 0,17 persen pertahun. Sedangkan, pada tahun 2022, UHH Kabupaten Karawang meningkat 0,29 tahun dari tahun sebelumnya.



Sumber: BPS Kabupaten Karawang Tahun 2023

**Gambar 2.63 Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Karawang Tahun 2018-2022**



Membaiknya kondisi kesehatan masyarakat Karawang telah diiringi dengan peningkatan UHH. UHH Kabupaten Karawang dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan 2022 semakin lama semakin meningkat hingga mencapai 72,62 tahun seperti yang digambarkan pada Gambar 2.63. Angka ini berarti bahwa setiap bayi yang lahir pada tahun 2022 memiliki harapan untuk hidup hingga usia mencapai 72,62 tahun. Peningkatan UHH di Kabupaten Karawang ini sangat dipengaruhi beberapa faktor, antara lain semakin baiknya akses pelayanan kesehatan bagi semua kelompok masyarakat, perilaku hidup sehat oleh masyarakat luas dan disertai semakin baiknya kondisi sosial ekonomi masyarakat disertai dukungan peningkatan kesehatan lingkungan.

Derajat kesehatan masyarakat Karawang terus membaik seiring meningkatnya UHH selama periode 2018-2022. Derajat kesehatan yang cukup tinggi ini menyebabkan peningkatannya relatif melambat setiap tahunnya, walaupun demikian tantangan besar yang masih dihadapi di masa-masa mendatang adalah mendorong perbaikan sanitasi dasar yang menyeluruh di wilayah Kabupaten Karawang.

**Tabel 2.64**  
**Perbandingan UHH Dengan Target Daerah Tahun 2018-2022**

<b>Uraian</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Target	71,59	71,61	71,64	72,96	73,00
Realisasi	71,81	71,98	72,15	72,33	72,62

*Sumber: Target: RPJMD Kabupaten Karawang, Realisasi: BPS Tahun 2023*

Gambar 2.64 menyajikan perbandingan Capaian UHH Kabupaten Karawang Tahun 2018-2022 dengan target daerah pada tahun yang bersangkutan. Berdasarkan Gambar 2.34, pada periode 2018-2020 UHH di Kabupaten Karawang telah mencapai target, bahkan melebihi target Kabupaten Karawang yang telah ditentukan. Sedangkan pada tahun 2021 dan 2022, capaian UHH Kabupaten Karawang lebih buruk dari target daerah atau tidak dapat mencapai target.



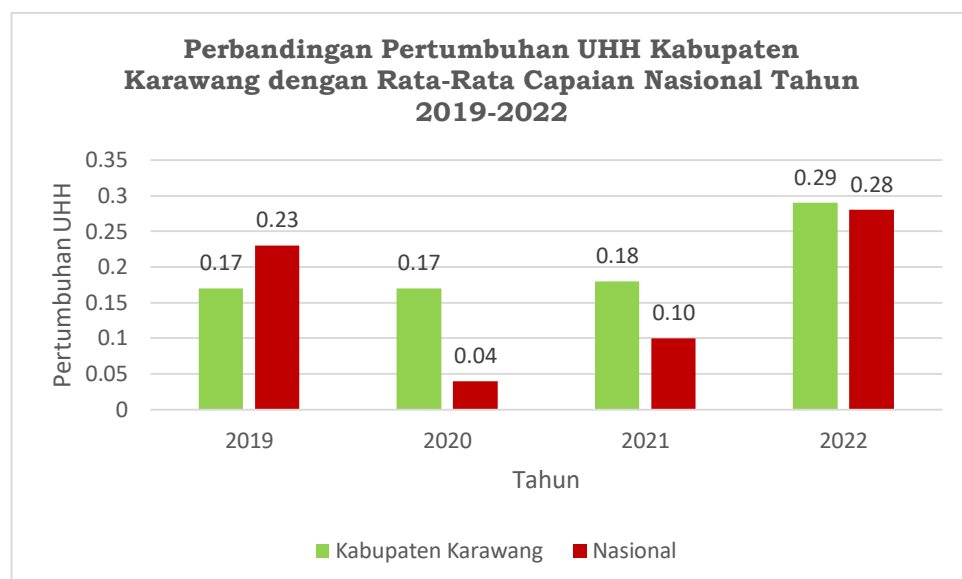
Rincian capaian wilayah yang setara dengan Kabupaten Karawang terdapat pada Tabel 2.65 dengan rata-rata pertumbuhan UHH sebesar 0,29. Hal ini berarti pertumbuhan UHH Kabupaten Karawang Tahun 2022 sebesar 0,29 sama dengan dari rata-rata capaian wilayah yang setara sebesar 0,29.

**Tabel 2.65**  
**Perbandingan Pertumbuhan UHH Kabupaten Karawang dengan Rata-Rata Capaian Wilayah yang Setara**

No	Kab/Kota	UHH		Pertumbuhan UHH 2022
		2021	2022	
1	Kota Bekasi	75,19	75,48	0,29
2	Kota Bandung	74,46	74,75	0,29
3	Kota Cimahi	74,21	74,5	0,29
4	Bandung	73,72	74,01	0,29
5	Sumedang	72,62	72,91	0,29
6	Kota Tasikmalaya	72,34	72,63	0,29
<b>7</b>	<b>Karawang</b>	<b>72,33</b>	<b>72,62</b>	<b>0,29</b>
8	Cirebon	72,18	72,47	0,29
9	Pangandaran	71,6	71,89	0,29
10	Bogor	71,36	71,65	0,29
11	Purwakarta	71,18	71,47	0,29
<b>Rata-Rata Capaian Pertumbuhan UHH Wilayah yang Setara</b>				<b>0,29</b>

*Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2023*

Berdasarkan Gambar 2.66, pertumbuhan UHH Kabupaten Karawang pada tahun 2022 lebih baik daripada pertumbuhan UHH Nasional. Kabupaten Karawang mengalami pertumbuhan UHH dari tahun sebelumnya berupa kenaikan UHH sebesar 0,29. Sedangkan pertumbuhan UHH nasional dari tahun sebelumnya berupa kenaikan UHH yang hanya mencapai 0,28.



Sumber: BPS Tahun 2023

**Gambar 2.66 Perbandingan Pertumbuhan UHH Kabupaten Karawang dengan Rata-Rata Capaian Nasional Tahun 2019-2022**

Berdasarkan Tabel 2.66, Tahun 2018 UHH Kabupaten Karawang menempati peringkat 15 dari 27 Kabupaten/Kota. Pada Tahun 2019, UHH Kabupaten Karawang meningkat menjadi peringkat 14 dan tetap pada peringkat 14 pada tahun 2020. Namun, pada tahun 2021, UHH Kabupaten Karawang Kembali turun ke peringkat 15 dan tetap pada peringkat 15 pada tahun 2022. Peningkatan UHH pada Kabupaten Karawang pada tahun 2022 tidak membuat peringkat Kabupaten Karawang meningkat. Hal ini berarti kabupaten/kota lainnya juga mengalami peningkatan UHH yang signifikan dan peningkatan UHH Kabupaten Karawang tidak setinggi peningkatan UHH pada 27 kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Barat sehingga Kabupaten Karawang kembali ke peringkat 15.

**Tabel 2.66**  
**Perbandingan Pertumbuhan UHH Daerah dengan Rata-Rata Capaian Wilayah Kab/Kota**  
**di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022**

No	Kab/Kota	2018	No	Kab/Kota	2019	No	Kab/Kota	2020	No	Kab/Kota	2021	No	Kab/Kota	2022
1	Bogor	74,17	1	Kota Bekasi	74,89	1	Kota Bekasi	75,01	1	Kota Bekasi	75,19	1	Kota Bekasi	75,48
2	Sukabumi	74,00	2	Kota Depok	74,31	2	Kota Depok	74,44	2	Kota Depok	74,62	2	Kota Depok	74,92
3	Cianjur	73,75	3	Kota Bandung	74,14	3	Kota Bandung	74,28	3	Kota Bandung	74,46	3	Kota Bandung	74,75
4	Bandung	73,43	4	Kota Cimahi	73,89	4	Kota Cimahi	74,03	4	Kota Cimahi	74,21	4	Kota Cimahi	74,50
5	Garut	73,26	5	Bekasi	73,56	5	Bekasi	73,68	5	Kota Bogor	73,82	5	Kota Bogor	74,13
6	Tasikmalaya	73,21	6	Kota Bogor	73,41	6	Kota Bogor	73,61	6	Bekasi	73,81	6	Bekasi	74,04
7	Ciamis	73,11	7	Bandung	73,40	7	Kuningan	73,59	7	Kuningan	73,78	7	Kuningan	74,03
8	Kuningan	72,66	8	Kuningan	73,35	8	Bandung	73,53	8	Bandung	73,72	8	Bandung	74,01
9	Cirebon	72,14	9	Sumedang	72,29	9	Sumedang	72,43	9	Sumedang	72,62	9	Subang	72,92
10	Majalengka	72,11	10	Kota Sukabumi	72,26	10	Kota Sukabumi	72,42	10	Subang	72,58	10	Sumedang	72,91
11	Sumedang	72,03	11	Bandung Barat	72,18	11	Subang	72,35	11	Kota Sukabumi	72,58	11	Kota Sukabumi	72,85
12	Indramayu	71,99	12	Subang	72,13	12	Bandung Barat	72,34	12	Bandung Barat	72,52	12	Bandung Barat	72,79
13	Subang	71,92	13	Kota Cirebon	72,13	13	Kota Cirebon	72,26	13	Kota Cirebon	72,44	13	Kota Cirebon	72,74
14	Purwakarta	71,81	14	Karawang	71,98	14	Karawang	72,15	14	Kota Tasikmalaya	72,34	14	Kota Tasikmalaya	72,63
15	Karawang	71,70	15	Kota Tasikmalaya	71,93	15	Kota Tasikmalaya	72,15	15	Karawang	72,33	15	Karawang	72,62
16	Bekasi	71,66	16	Cirebon	71,82	16	Cirebon	71,99	16	Cirebon	72,18	16	Cirebon	72,47
17	Bandung Barat	71,32	17	Ciamis	71,57	17	Ciamis	71,83	17	Ciamis	72,02	17	Ciamis	72,30
18	Pangandaran	71,11	18	Indramayu	71,37	18	Indramayu	71,63	18	Indramayu	71,84	18	Indramayu	72,15
19	Kota Bogor	71,03	19	Garut	71,22	19	Garut	71,41	19	Pangandaran	71,60	19	Pangandaran	71,89
20	Kota Sukabumi	70,86	20	Pangandaran	71,12	20	Pangandaran	71,40	20	Garut	71,59	20	Garut	71,85
21	Kota Bandung	70,84	21	Bogor	71,01	21	Bogor	71,17	21	Bogor	71,36	21	Bogor	71,65
22	Kota Cirebon	70,61	22	Purwakarta	70,80	22	Purwakarta	70,99	22	Sukabumi	71,21	22	Sukabumi	71,54

No	Kab/Kota	2018	No	Kab/Kota	2019	No	Kab/Kota	2020	No	Kab/Kota	2021	No	Kab/Kota	2022
23	Kota Bekasi	70,59	23	Kota Banjar	70,79	23	Kota Banjar	70,99	23	Kota Banjar	71,19	23	Kota Banjar	71,49
24	Kota Depok	70,49	24	Sukabumi	70,73	24	Sukabumi	70,97	24	Purwakarta	71,18	24	Purwakarta	71,47
25	Kota Cimahi	69,70	25	Majalengka	69,97	25	Majalengka	70,27	25	Majalengka	70,46	25	Majalengka	70,76
26	Kota Tasikmalaya	69,68	26	Cianjur	69,91	26	Cianjur	70,13	26	Cianjur	70,32	26	Cianjur	70,58
27	Kota Banjar	68,96	27	Tasikmalaya	69,21	27	Tasikmalaya	69,47	27	Tasikmalaya	69,67	27	Tasikmalaya	69,95

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

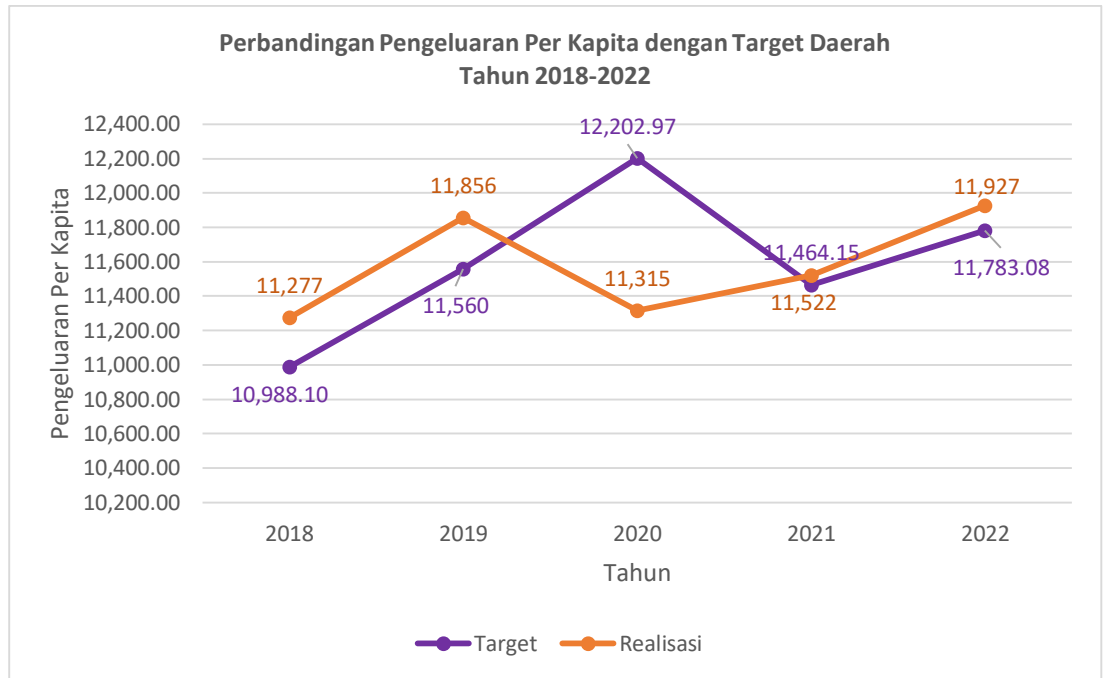
Kesejahteraan suatu kelompok masyarakat dapat diketahui dari tingkat pendapatan masyarakatnya. Namun, karena data pendapatan yang akurat sulit diperoleh, melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), tingkat kesejahteraan masyarakat diperoleh dengan pendekatan Pengeluaran Rumah Tangga. Dimensi lainnya dari IPM adalah standar hidup layak yang diukur dengan Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan.

**Tabel 2.67**  
**Perbandingan Pengeluaran Per Kapita dengan Target Daerah Tahun 2018-2022 (Ribu Rupiah)**

<b>Uraian</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Target	10.988,10	11.560	12.202,97	11.464,15	11.783,08
Realisasi	11.277	11.856	11.315	11.522	11.927

*Sumber: Target: angka estimasi, Realisasi: BPS Tahun 2023*

Berdasarkan Tabel 2.67, dalam kurun waktu Tahun 2018-2022 pengeluaran per kapita masyarakat Kabupaten Karawang meningkat sebesar Rp650.000,-. Semula pada tahun 2018 sebesar Rp11.277.000,- menjadi pada tahun 2022 sebesar Rp11.927.000,-. Pandemi COVID-19 telah berimbas pada pengeluaran per kapita tahun 2020 sebesar Rp11.315.00 yang mengalami penurunan sebesar Rp541.000,- dibandingkan tahun 2019. Penurunan pengeluaran per kapita mengindikasikan penurunan daya beli masyarakat secara umum. Meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2020, Kabupaten Karawang berhasil meningkatkan kembali pengeluaran per kapita selama dua tahun terakhir ini.

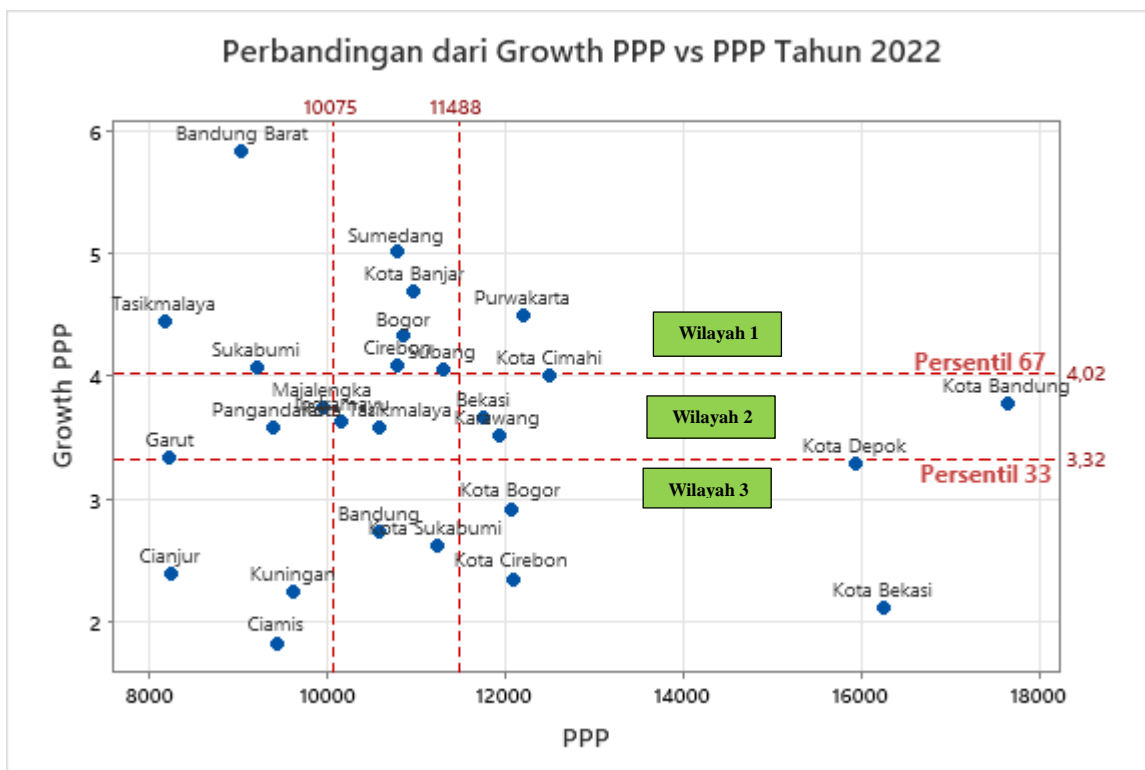


Sumber: Target: angka Proyeksi, Capaian: BPS Tahun 2023

**Gambar 2.67 Perbandingan Pengeluaran Per Kapita dengan Target Daerah Tahun 2018-2022 (Ribu Rupiah)**

Gambar 2.67 menginformasikan perbandingan capaian pengeluaran per kapita Kabupaten Karawang dengan target daerah yang sudah ditetapkan. Tahun 2018 dan 2019 capaian Kabupaten Karawang sudah melebihi target yang ditetapkan. Namun, tahun 2020 dan 2021 pengeluaran per kapita Kabupaten Karawang tidak mampu mencapai target daerah dikarenakan dampak dari COVID-19. Tahun 2022, pengeluaran per kapita Kabupaten Karawang kembali mencapai target daerah atau lebih baik dari target daerah.





Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

**Gambar 2.68 Perbandingan Pertumbuhan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Karawang dengan Rata-Rata Capaian Wilayah yang Setara Tahun 2022**

Dengan melihat Gambar 2.68 yaitu perbandingan pertumbuhan pengeluaran per kapita Kabupaten Karawang dengan rata-rata capaian wilayah yang setara, Kabupaten Karawang termasuk ke dalam Wilayah 2.

**Tabel 2.68 Perbandingan Pertumbuhan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Karawang dengan Rata-Rata Capaian Wilayah yang Setara**

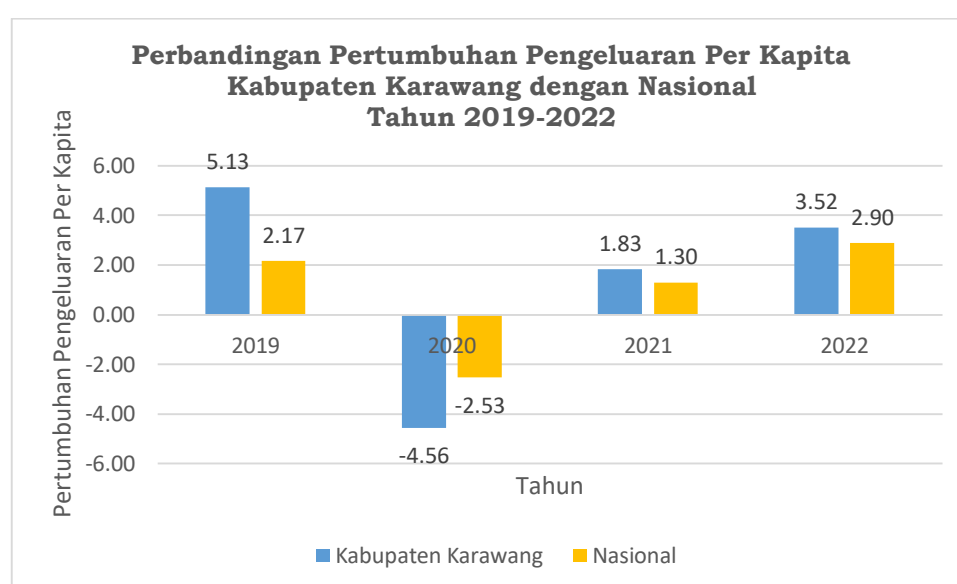
No	Kab/Kota	Pengeluaran Per Kapita		Pertumbuhan Pengeluaran Per Kapita 2022
		2021	2022	
1	Kota Cimahi	12.019	12.500	4,00
2	Kota Bandung	16.996	17.639	3,78
3	Majalengka	9.591	9.950	3,74
4	Bekasi	11.341	11.757	3,67
5	Indramayu	9.810	10.166	3,63
6	Pangandaran	9.065	9.389	3,57
7	Kota Tasikmalaya	10.213	10.578	3,57
<b>8</b>	<b>Karawang</b>	<b>11.522</b>	<b>11.927</b>	<b>3,52</b>
9	Garut	7.961	8.227	3,34
<b>Rata-Rata Capaian Pertumbuhan Pengeluaran Per Kapita Wilayah yang Setara</b>				<b>3,65</b>

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

Rincian capaian wilayah yang setara dengan Kabupaten Karawang terdapat pada Tabel 2.68 dengan rata-rata pertumbuhan pengeluaran

per kapita sebesar 3,65%. Hal ini berarti pertumbuhan pengeluaran per kapita Kabupaten Karawang Tahun 2022 sebesar 3,52% lebih buruk dari rata-rata capaian wilayah yang setara sebesar 3,65%.

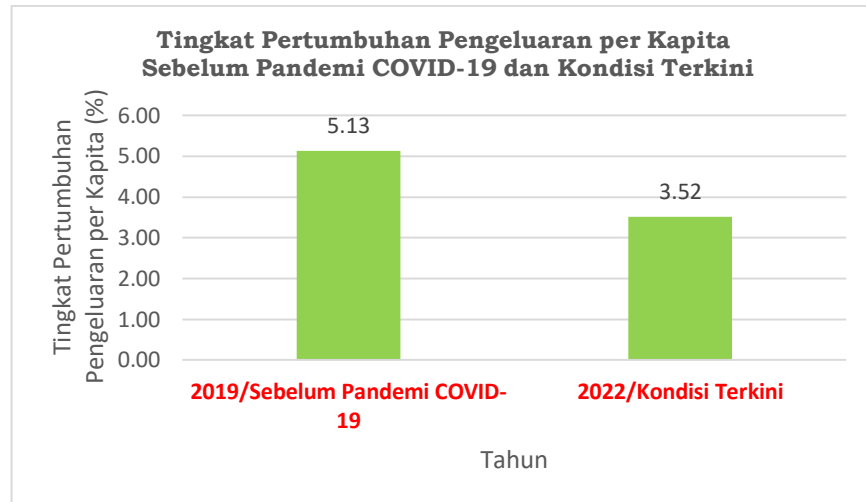
Berdasarkan Gambar 2.69, pertumbuhan pengeluaran per kapita pada tahun 2022 lebih baik daripada pertumbuhan pengeluaran per kapita Nasional. Kabupaten Karawang mengalami pertumbuhan pengeluaran per kapita dari tahun sebelumnya berupa kenaikan pengeluaran per kapita sebesar 3,5%. Sedangkan pertumbuhan pengeluaran per kapita nasional dari tahun sebelumnya berupa kenaikan pengeluaran per kapita yang hanya mencapai 2,9%.



Sumber: BPS Tahun 2023

**Gambar 2.69 Perbandingan Pertumbuhan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Karawang dengan Nasional Tahun 2019-2022**

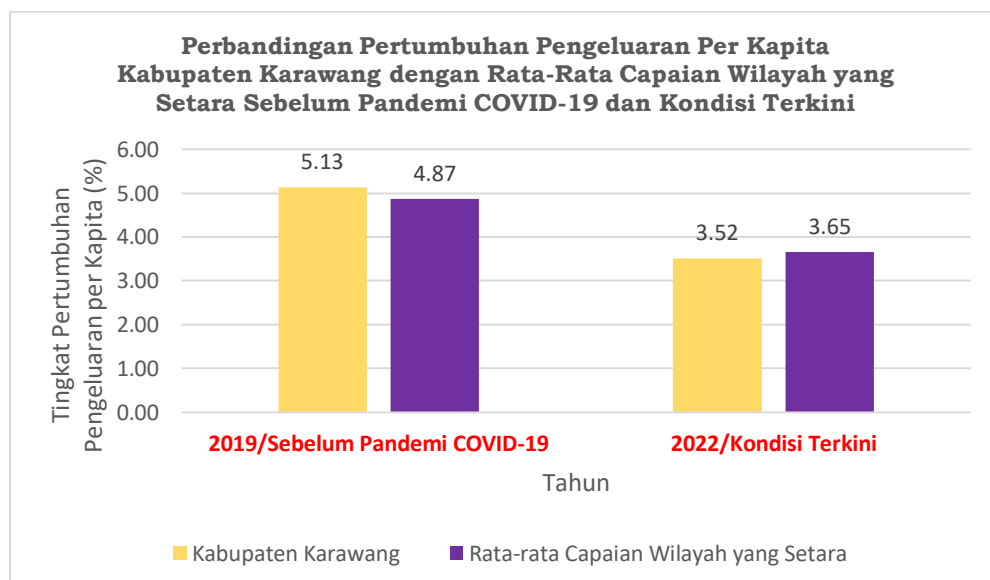
Tingkat pertumbuhan pengeluaran per kapita sebelum Pandemi COVID-19 dan kondisi terkini disajikan pada Gambar 2.70. Berdasarkan gambar tersebut, pertumbuhan pengeluaran per kapita sebelum pandemi COVID-19 bernilai positif atau lebih dari nol. Hal ini berarti terjadi kenaikan pengeluaran per kapita pada tahun 2019 sebesar 5,13. Sedangkan pada tahun 2022 atau kondisi terkini pertumbuhan pengeluaran per kapita bernilai positif atau lebih dari nol. Hal ini berarti setelah pandemi COVID-19 atau pada tahun 2022 juga terjadi kenaikan pengeluaran per kapita pada Kabupaten Karawang sebesar 3,52.



Sumber: BPS Kabupaten Karawang Tahun 2023

**Gambar 2.70 Tingkat Pertumbuhan Pengeluaran Per Kapita Sebelum Pandemi COVID-19 dan Kondisi Terkini**

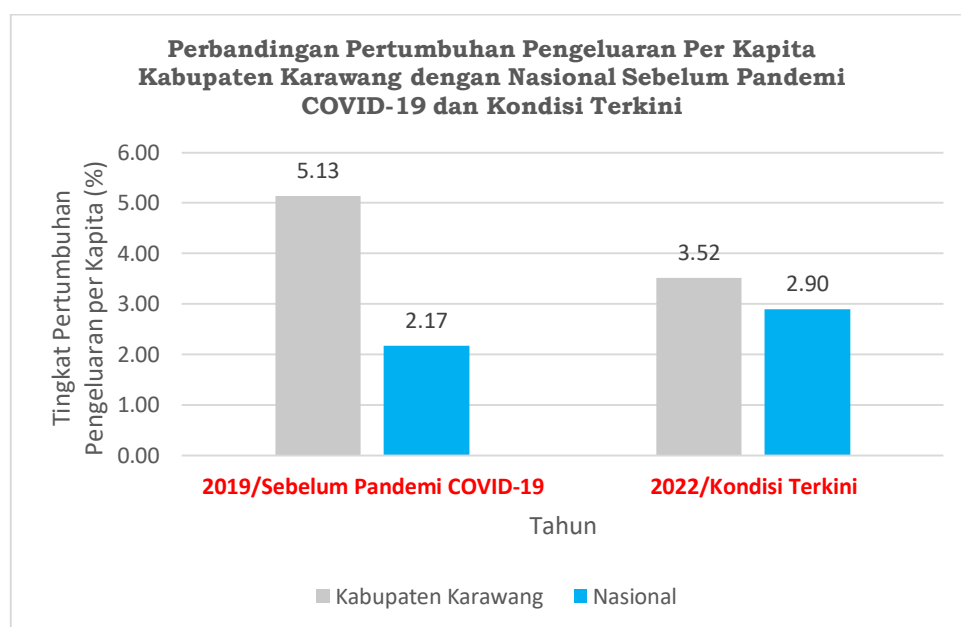
Berdasarkan Gambar 2.71, pertumbuhan pengeluaran per kapita sebelum pandemi COVID-19 Kabupaten Karawang sebesar 5,13 dan rata-rata capaian wilayah setara sebesar 4,87. Sementara itu, pertumbuhan pengeluaran per kapita kondisi terkini Kabupaten Karawang sebesar 3,52 dan rata-rata capaian wilayah yang setara sebesar 3,65. Dapat disimpulkan, sebelum pandemi COVID-19 pertumbuhan pengeluaran per kapita Kabupaten Karawang lebih baik dari rata-rata capaian wilayah yang setara. Sedangkan, kondisi terkini pertumbuhan pengeluaran per kapita Kabupaten Karawang lebih buruk dari rata-rata capaian wilayah yang setara.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

**Gambar 2.71 Perbandingan Pertumbuhan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Karawang dengan Rata-Rata Capaian Wilayah yang Setara Sebelum Pandemi COVID-19 dan Kondisi Terkini**

Dengan melihat Gambar 2.72, pertumbuhan pengeluaran per kapita sebelum pandemi COVID-19 Kabupaten Karawang sebesar 5,13 dan capaian nasional sebesar 2,17. Sementara itu, pertumbuhan pengeluaran per kapita kondisi terkini Kabupaten Karawang sebesar 3,52 dan capaian nasional sebesar 2,90. Hal ini berarti, baik sebelum pandemi COVID-19 maupun kondisi terkini pertumbuhan pengeluaran per kapita Kabupaten Karawang lebih baik dari capaian nasional.



Sumber: BPS Tahun 2023

**Gambar 2.72 Perbandingan Pertumbuhan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Karawang dengan Capaian Nasional Sebelum Pandemi COVID-19 dan Kondisi Terkini**

Berdasarkan Tabel 2.69, pada tahun 2018 pengeluaran per kapita Kabupaten Karawang sudah menempati peringkat 8 dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat. Bahkan tahun 2019 meningkat menjadi peringkat 6. Namun, karena dampak COVID-19 tahun 2020 pengeluaran per kapita Kabupaten Karawang kembali ke peringkat 8 hingga tahun 2022. Peningkatan pengeluaran per kapita Kabupaten Karawang selama tahun 2021-2022 tidak setinggi kabupaten/kota lainnya sehingga Kabupaten Karawang tetap di peringkat 8.

**Tabel 2.69**  
**Perbandingan pertumbuhan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Karawang dengan Capaian Wilayah Kab/Kota**  
**di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022 (Ribu Rupiah)**

No	Kab/Kota	2018	No	Kab/Kota	2019	No	Kab/Kota	2020	No	Kab/Kota	2021	No	Kab/Kota	2022
1	Kota Bandung	16.630	1	Kota Bandung	17.254	1	Kota Bandung	16.887	1	Kota Bandung	16.996	1	Kota Bandung	17.639
2	Kota Bekasi	15.755	2	Kota Bekasi	16.157	2	Kota Bekasi	15.776	2	Kota Bekasi	15.903	2	Kota Bekasi	16.239
3	Kota Depok	15.262	3	Kota Depok	15.696	3	Kota Depok	15.281	3	Kota Depok	15.420	3	Kota Depok	15.926
4	Kota Cimahi	11.921	4	Kota Cimahi	12.448	4	Kota Cimahi	12.025	4	Kota Cimahi	12.019	4	Kota Cimahi	12.500
5	Kota Cirebon	11.397	5	Kota Cirebon	11.930	5	Kota Cirebon	11.800	5	Kota Cirebon	11.810	5	Purwakarta	12.193
6	Purwakarta	11.372	6	Karawang	11.856	6	Purwakarta	11.614	6	Kota Bogor	11.716	6	Kota Cirebon	12.087
7	Kota Bogor	11.348	7	Kota Bogor	11.825	7	Kota Bogor	11.564	7	Purwakarta	11.669	7	Kota Bogor	12.058
8	Karawang	11.277	8	Purwakarta	11.819	8	Karawang	11.315	8	Karawang	11.522	8	Karawang	11.927
9	Bekasi	11.155	9	Bekasi	11.610	9	Bekasi	11.241	9	Bekasi	11.341	9	Bekasi	11.757
10	Subang	10.715	10	Kota Sukabumi	11.204	10	Kota Sukabumi	10.999	10	Kota Sukabumi	10.942	10	Subang	11.294
11	Kota Sukabumi	10.609	11	Subang	11.012	11	Subang	10.790	11	Subang	10.854	11	Kota Sukabumi	11.229
12	Kota Banjar	10.329	12	Kota Banjar	10.705	12	Kota Banjar	10.535	12	Kota Banjar	10.476	12	Kota Banjar	10.967
13	Bogor	10.323	13	Bogor	10.683	13	Cirebon	10.342	13	Bogor	10.410	13	Bogor	10.860
14	Cirebon	10.212	14	Cirebon	10.670	14	Bogor	10.317	14	Cirebon	10.368	14	Cirebon	10.791
15	Bandung	10.203	15	Bandung	10.502	15	Kota Tasikmalaya	10.263	15	Bandung	10.307	15	Sumedang	10.776
16	Sumedang	10.153	16	Kota Tasikmalaya	10.414	16	Sumedang	10.217	16	Sumedang	10.262	16	Bandung	10.588
17	Kota Tasikmalaya	9.855	17	Sumedang	10.406	17	Bandung	10.201	17	Kota Tasikmalaya	10.213	17	Kota Tasikmalaya	10.578
18	Indramayu	9.633	18	Indramayu	10.090	18	Indramayu	9.859	18	Indramayu	9.810	18	Indramayu	10.166
19	Majalengka	9.416	19	Majalengka	9.822	19	Majalengka	9.521	19	Majalengka	9.591	19	Majalengka	9.950
20	Kuningan	9.297	20	Kuningan	9.673	20	Kuningan	9.459	20	Kuningan	9.409	20	Kuningan	9.620
21	Ciamis	9.190	21	Ciamis	9.557	21	Ciamis	9.288	21	Ciamis	9.259	21	Ciamis	9.428
22	Pangandaran	8.968	22	Pangandaran	9.423	22	Pangandaran	9.084	22	Pangandaran	9.065	22	Pangandaran	9.389

No	Kab/Kota	2018	No	Kab/Kota	2019	No	Kab/Kota	2020	No	Kab/Kota	2021	No	Kab/Kota	2022
23	Sukabumi	8.618	23	Sukabumi	8.973	23	Sukabumi	8.823	23	Sukabumi	8.850	23	Sukabumi	9.210
24	Bandung Barat	8.329	24	Bandung Barat	8.684	24	Bandung Barat	8.455	24	Bandung Barat	8.546	24	Bandung Barat	9.044
25	Cianjur	7.874	25	Cianjur	8.290	25	Cianjur	7.980	25	Cianjur	8.052	25	Cianjur	8.244
26	Tasikmalaya	7.761	26	Garut	8.099	26	Garut	7.876	26	Garut	7.961	26	Garut	8.227
27	Garut	7.597	27	Tasikmalaya	8.092	27	Tasikmalaya	7.852	27	Tasikmalaya	7.829	27	Tasikmalaya	8.177

Sumber: BPS Tahun 2023

### 2.1.2.5 Indikator Ketimpangan (Rasio gini)

Rasio gini merupakan satu ukuran untuk melihat ketimpangan pendapatan antar masyarakat. Apabila koefisien gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar terjadi. Angka ini memperkuat fenomena yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya terkait pendapatan per kapita.

**Tabel 2.70**  
**Target dan Realisasi Rasio gini**  
**Tahun 2021 - 2024**

NO	URAIAN	2021		2022		Target 2023
		T	R	T	R	
1	RASIO GINI	0,345	0,374	0,355	0,353	0,334

Sumber : BPS Kabupaten Karawang Tahun 2023 dan RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2021-2026

Tabel 2.70 menyajikan target dan realisasi rasio gini tahun 2021-2024. Berdasarkan tabel tersebut, akibat dampak dari pandemi COVID-19, rasio gini Kabupaten Karawang tahun 2021 melebihi target daerah sebesar 0,374. Sedangkan, tahun 2022 rasio gini Kabupaten Karawang berhasil terealisasi di bawah target daerah sebesar 0,353.

Berdasarkan Tabel 2.71, selama periode tahun 2018-2022 Rasio gini di Kabupaten Karawang cenderung menunjukkan angka yang berfluktuasi.

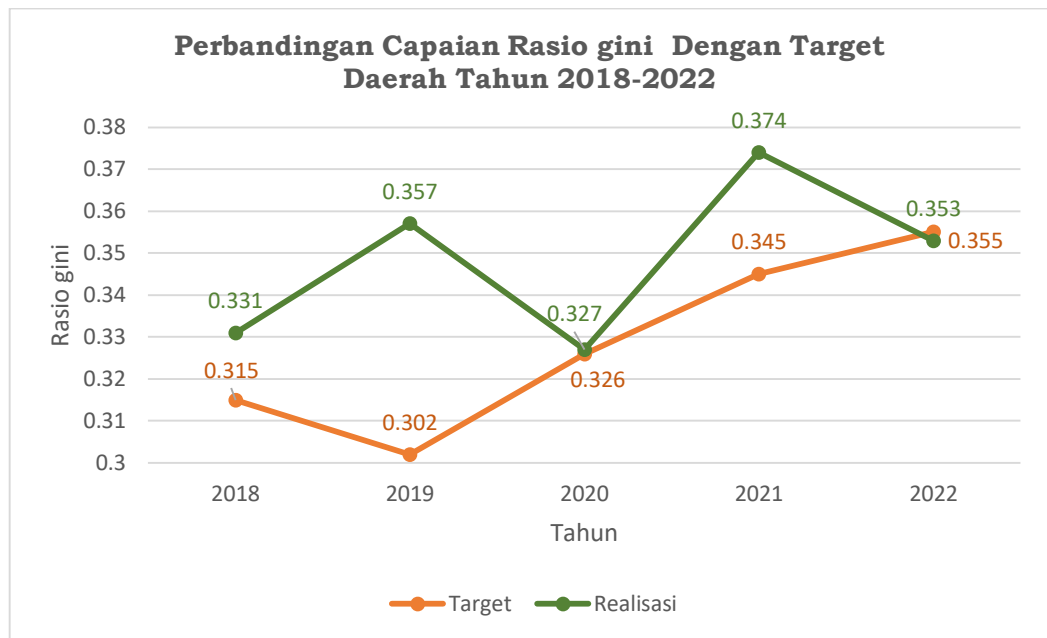
**Tabel 2.71**  
**Perbandingan Capaian Rasio gini Dengan Target Daerah**  
**Tahun 2018-2022**

Uraian	Rasio gini				
	2018	2019	2020	2021	2022
Target	0,315	0,302	0,326	0,345	0,355
Realisasi	0,331	0,357	0,327	0,374	0,353

Sumber: Target: angka estimasi, Capaian: BPS Tahun 2023

Gambar 2.73 menyajikan perbandingan capaian rasio gini dengan target daerah tahun 2018-2022. Dengan melihat gambar tersebut, selama tahun 2018-2020 rasio gini Kabupaten Karawang tidak kurang dari target atau minimal mencapai target. Sedangkan pada tahun 2022, rasio gini Kabupaten Karawang berhasil terealisasi dibawah target walaupun terjadi kenaikan rasio gini dari tahun 2021. Dengan

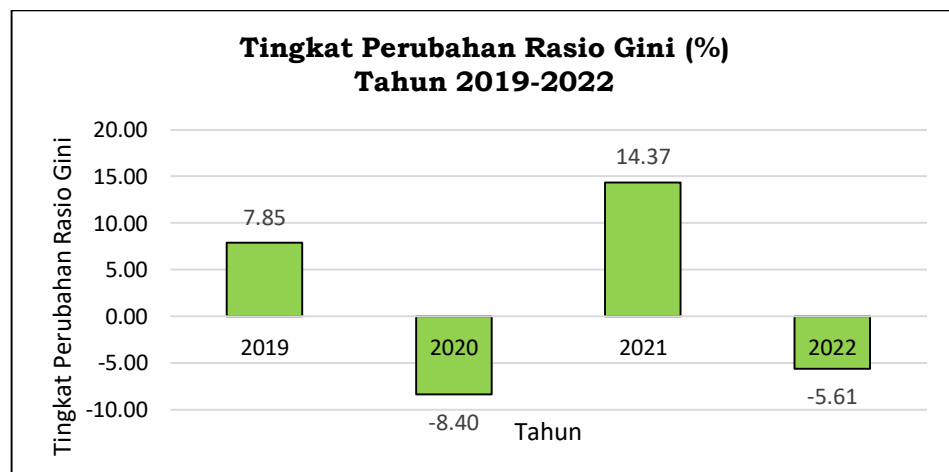
kata lain, pada tahun 2022 capaian rasio gini Kabupaten Karawang lebih baik dari target daerah.



Sumber: Target: angka estimasi , Capaian: BPS Tahun 2023

**Gambar 2.73 Perbandingan Capaian Rasio gini Dengan Target Daerah Tahun 2018-2022**

Berdasarkan Gambar 2.74, pada tahun 2019 rasio gini Kabupaten Karawang mengalami kenaikan hingga 7,85%. Selanjutnya, tahun 2020 rasio gini Kabupaten Karawang mengalami penurunan sebesar 8,40% dan kembali naik sebesar 14,37% pada tahun 2021. Pada tahun 2022 rasio gini Kabupaten Karawang mengalami penurunan kembali sebesar 5,61. Dengan kata lain, pada tahun 2022 rasio gini Kabupaten Karawang kurang dari nol. Selama periode tahun 2019-2022, kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2021 dan penurunan tertinggi terjadi pada tahun 2020.

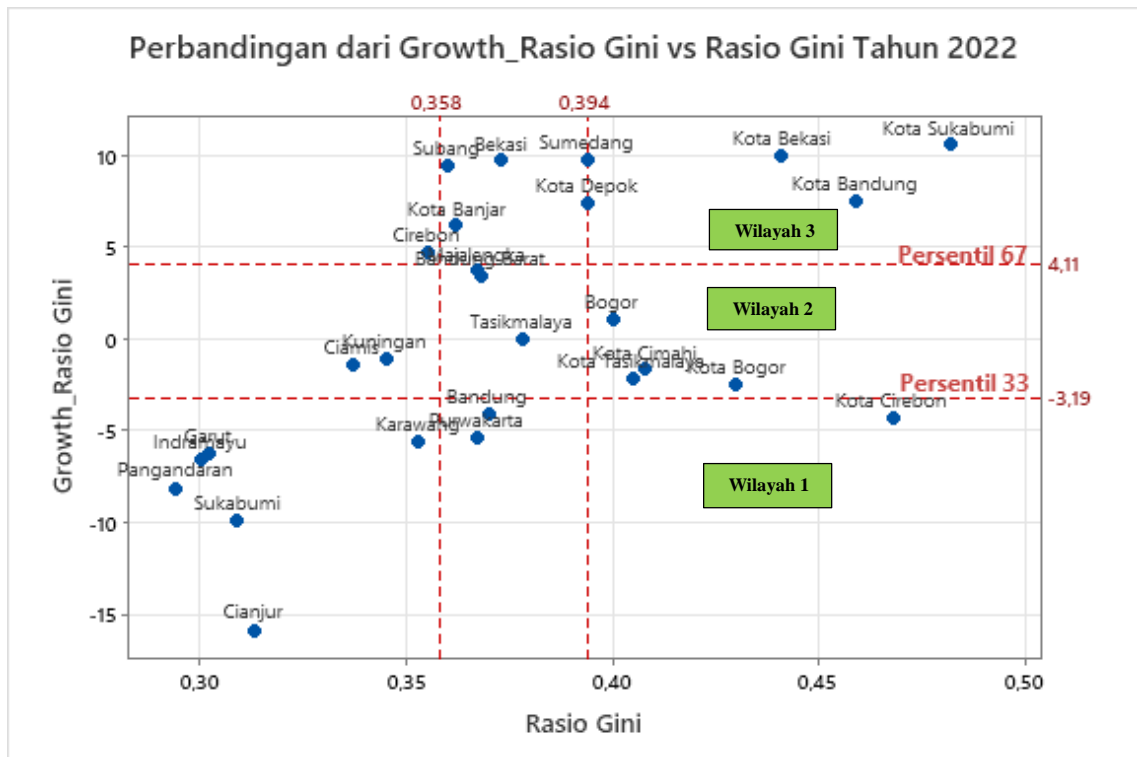


Sumber: BPS Tahun 2023, diolah

**Gambar 2.74 Tingkat Perubahan Rasio Gini (%) Tahun 2019-2022**



Dengan melihat Gambar 2.75 yaitu perbandingan perubahan rasio gini Kabupaten Karawang dengan rata-rata capaian wilayah yang setara, Kabupaten Karawang termasuk ke dalam Wilayah 1. Rincian capaian wilayah yang setara dengan Kabupaten Karawang terdapat pada Tabel 2.72 dengan rata-rata perubahan rasio gini sebesar -7,35%. Hal ini berarti perubahan rasio gini Kabupaten Karawang Tahun 2022 sebesar -5,61% lebih buruk dari rata-rata capaian wilayah yang setara sebesar -7,35%.



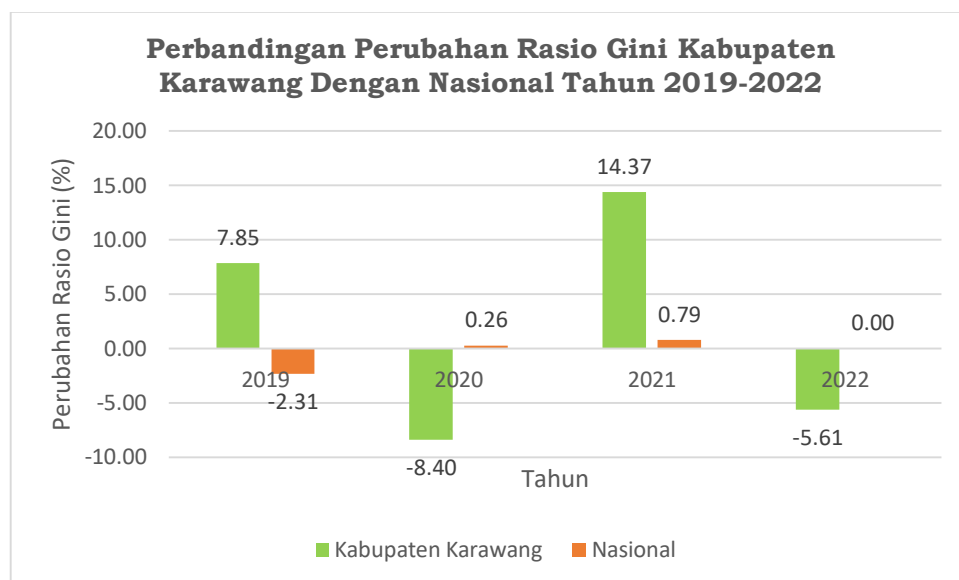
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

**Gambar 2.75 Perbandingan Perubahan Rasio Gini Daerah dengan Wilayah yang Setara Tahun 2022**

**Tabel 2.72**  
**Perbandingan Perubahan Rasio Gini Daerah dengan Wilayah yang Setara**

No	Kab/Kota	Rasio Gini		Perubahan Rasio Gini 2022
		2021	2022	
1	Bandung	0,386	0,37	-4,15
2	Kota Cirebon	0,489	0,468	-4,29
3	Purwakarta	0,388	0,367	-5,41
<b>4</b>	<b>Karawang</b>	<b>0,374</b>	<b>0,353</b>	<b>-5,61</b>
5	Garut	0,322	0,302	-6,21
6	Indramayu	0,321	0,3	-6,54
7	Pangandaran	0,32	0,294	-8,13
8	Sukabumi	0,343	0,309	-9,91
9	Cianjur	0,372	0,313	-15,86
<b>Rata-Rata Capaian Perubahan Rasio Gini Wilayah yang Setara</b>				<b>- 7,35</b>

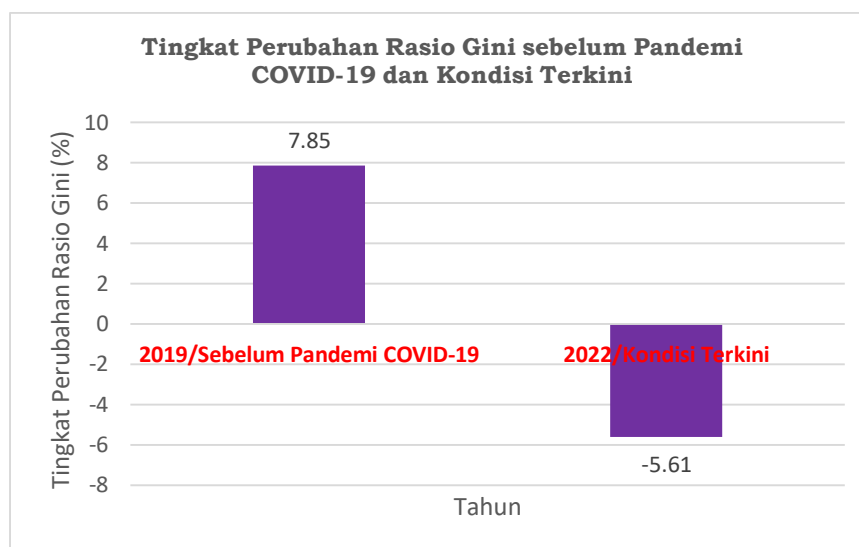
Berdasarkan Gambar 2.76, perubahan rasio gini pada tahun 2022 lebih baik daripada perubahan rasio gini nasional. Kabupaten Karawang mengalami perubahan rasio gini dari tahun sebelumnya berupa penurunan rasio gini sebesar 5,61%. Sedangkan perubahan rasio gini nasional dari tahun sebelumnya tidak mengalami perubahan atau bernilai nol.



Sumber: BPS Tahun 2023

**Gambar 2.76 Perbandingan Perubahan Rasio Gini Kabupaten Karawang Dengan Nasional Tahun 2019-2022**

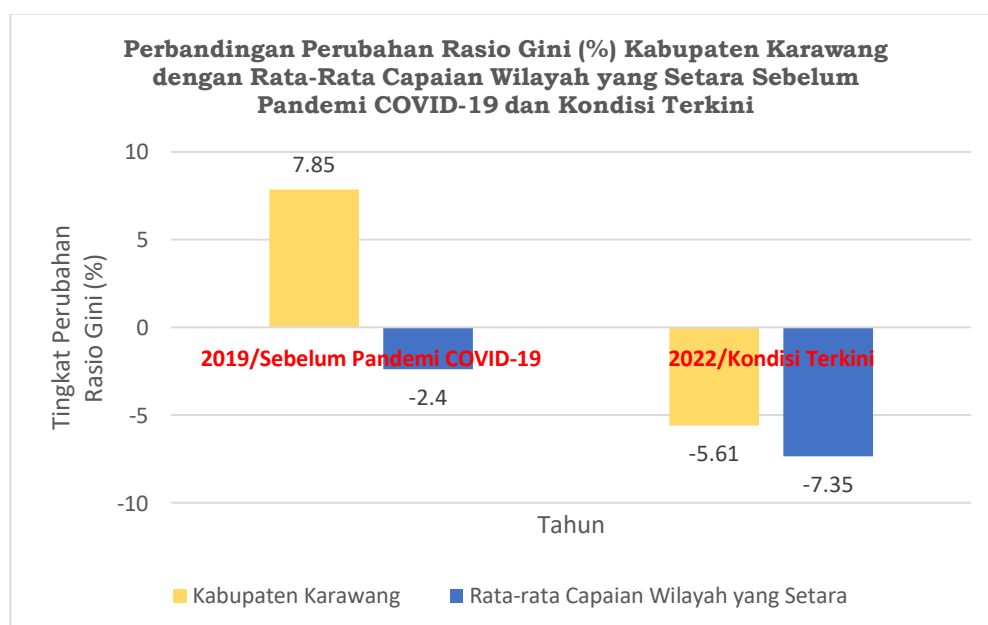
Tingkat perubahan rasio gini sebelum Pandemi COVID-19 dan kondisi terkini disajikan pada Gambar 2.77. Berdasarkan gambar tersebut, perubahan rasio gini sebelum pandemi COVID-19 bernilai positif atau lebih dari nol. Hal ini berarti terjadi kenaikan rasio gini pada tahun 2019 sebesar 7,85. Sedangkan pada tahun 2022 atau kondisi terkini pertumbuhan pengeluaran per kapita bernilai negatif atau kurang dari nol. Hal ini berarti setelah pandemi COVID-19 atau pada tahun 2022 terjadi penurunan rasio gini Kabupaten Karawang sebesar 5,61.



Sumber: BPS Kabupaten Karawang Tahun 2023

**Gambar 2.77 Perbandingan Perubahan Rasio Gini Sebelum Pandemi COVID-19 dan Kondisi Terkini**

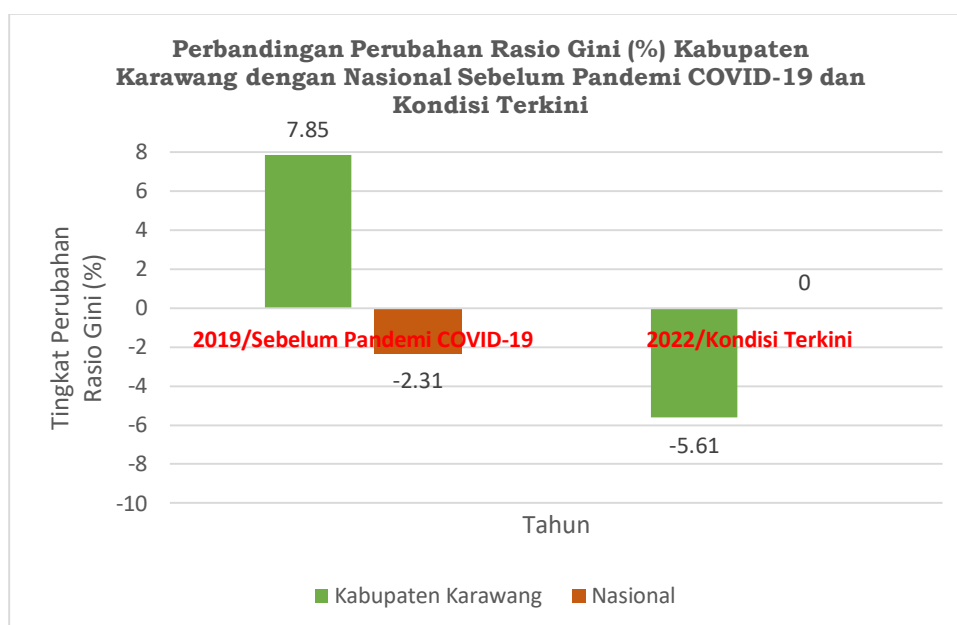
Berdasarkan Gambar 2.78, perubahan rasio gini sebelum pandemi COVID-19 Kabupaten Karawang sebesar 7,85 dan rata-rata capaian wilayah setara sebesar -2,4. Sementara itu, perubahan rasio gini kondisi terkini Kabupaten Karawang sebesar -5,61 dan rata-rata capaian wilayah yang setara sebesar -7,35. Dapat disimpulkan, baik sebelum pandemi COVID-19 maupun kondisi terkini perubahan rasio gini Kabupaten Karawang lebih buruk dari rata-rata capaian wilayah yang setara.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

**Gambar 2.78 Perbandingan Perubahan Rasio Gini Kabupaten Karawang dengan Rata-Rata Capaian Wilayah yang Setara Sebelum Pandemi COVID-19 dan Kondisi Terkini**

Dengan melihat Gambar 2.79, perubahan rasio gini sebelum pandemi COVID-19 Kabupaten Karawang sebesar 7,85 dan capaian nasional sebesar -2,13. Sementara itu, perubahan rasio gini kondisi terkini Kabupaten Karawang sebesar -5,61 dan capaian nasional sebesar 0. Hal ini berarti, sebelum pandemi COVID-19 perubahan rasio gini Kabupaten Karawang lebih buruk dari capaian nasional. Sedangkan, kondisi terkini perubahan rasio gini Kabupaten Karawang lebih baik dari capaian nasional.



Sumber: BPS Tahun 2023

**Gambar 2.79 Perbandingan Perubahan Rasio Gini Kabupaten Karawang dengan Nasional Sebelum Pandemi COVID-19 dan Kondisi Terkini**

Berdasarkan Tabel 2.73, pada tahun 2018, 2020, dan 2022 rasio gini Kabupaten Karawang berturut-turut berada pada peringkat ke-22, 25 dan 20 dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat. Sedangkan pada tahun 2019 dan 2021 peringkat rasio gini Kabupaten Karawang meningkat menjadi peringkat tertinggi ke-12. Hal ini berarti terjadi kenaikan pada rasio gini Kabupaten Karawang.

**Tabel 2.73****Perbandingan Perubahan Rasio Gini antar Kabupaten/Kota, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2018-2022**

No	Kab/Kota	2018	No	Kab/Kota	2019	No	Kab/Kota	2020	No	Kab/Kota	2021	No	Kab/Kota	2022
1	Kota Cirebon	0,432	1	Kota Bandung	0,442	1	Kota Cirebon	0,421	1	Kota Cirebon	0,489	1	Kota Sukabumi	0,482
2	Kota Bandung	0,423	2	Kota Cimahi	0,437	2	Bandung	0,414	2	Kota Bogor	0,441	2	Kota Cirebon	0,468
3	Sumedang	0,42	3	Kuningan	0,435	3	Purwakarta	0,414	3	Kota Sukabumi	0,436	3	Kota Bandung	0,459
4	Bandung	0,418	4	Kota Sukabumi	0,419	4	Kota Bogor	0,412	4	Kota Bandung	0,427	4	Kota Bekasi	0,441
5	Bogor	0,416	5	Kota Cirebon	0,408	5	Kota Bandung	0,402	5	Kota Cimahi	0,415	5	Kota Bogor	0,43
6	Kota Sukabumi	0,41	6	Bogor	0,404	6	Kota Sukabumi	0,397	6	Kota Tasikmalaya	0,414	6	Kota Cimahi	0,408
7	Kuningan	0,397	7	Purwakarta	0,399	7	Sumedang	0,384	7	Kota Bekasi	0,401	7	Kota Tasikmalaya	0,405
8	Purwakarta	0,397	8	Kota Bogor	0,386	8	Bogor	0,381	8	Bogor	0,396	8	Bogor	0,4
9	Bandung Barat	0,394	9	Cianjur	0,363	9	Kota Cimahi	0,38	9	Purwakarta	0,388	9	Sumedang	0,394
10	Kota Tasikmalaya	0,39	10	Bandung Barat	0,362	10	Bandung Barat	0,376	10	Bandung	0,386	10	Kota Depok	0,394
11	Kota Bogor	0,389	11	Kota Tasikmalaya	0,36	11	Bekasi	0,372	11	Tasikmalaya	0,378	11	Tasikmalaya	0,378
12	Garut	0,371	12	Karawang	0,357	12	Kota Tasikmalaya	0,366	12	Karawang	0,374	12	Bekasi	0,373
13	Cianjur	0,37	13	Bandung	0,355	13	Kuningan	0,361	13	Cianjur	0,372	13	Bandung	0,37
14	Majalengka	0,365	14	Ciamis	0,354	14	Garut	0,352	14	Kota Depok	0,367	14	Bandung Barat	0,368
15	Kota Depok	0,365	15	Bekasi	0,354	15	Kota Bekasi	0,352	15	Sumedang	0,359	15	Majalengka	0,367
16	Cirebon	0,364	16	Garut	0,352	16	Cianjur	0,35	16	Bandung Barat	0,356	16	Purwakarta	0,367
17	Kota Cimahi	0,364	17	Kota Bekasi	0,352	17	Subang	0,35	17	Majalengka	0,354	17	Kota Banjar	0,362
18	Bekasi	0,356	18	Sukabumi	0,347	18	Kota Depok	0,344	18	Kuningan	0,349	18	Subang	0,36
19	Tasikmalaya	0,353	19	Majalengka	0,347	19	Tasikmalaya	0,343	19	Sukabumi	0,343	19	Cirebon	0,355
20	Kota Bekasi	0,336	20	Cirebon	0,344	20	Cirebon	0,338	20	Ciamis	0,342	20	Karawang	0,353
21	Subang	0,334	21	Sumedang	0,344	21	Ciamis	0,336	21	Kota Banjar	0,341	21	Kuningan	0,345
22	Karawang	0,331	22	Kota Depok	0,344	22	Majalengka	0,336	22	Bekasi	0,34	22	Ciamis	0,337
23	Sukabumi	0,329	23	Subang	0,333	23	Pangandaran	0,335	23	Cirebon	0,339	23	Cianjur	0,313
24	Kota Banjar	0,322	24	Tasikmalaya	0,322	24	Sukabumi	0,334	24	Subang	0,329	24	Sukabumi	0,309

No	Kab/Kota	2018	No	Kab/Kota	2019	No	Kab/Kota	2020	No	Kab/Kota	2021	No	Kab/Kota	2022
25	Indramayu	0,316	25	Pangandaran	0,31	25	Karawang	0,327	25	Garut	0,322	25	Garut	0,302
26	Ciamis	0,309	26	Kota Banjar	0,302	26	Indramayu	0,319	26	Indramayu	0,321	26	Indramayu	0,3
27	Pangandaran	0,303	27	Indramayu	0,284	27	Kota Banjar	0,312	27	Pangandaran	0,32	27	Pangandaran	0,294

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

## **2.1.2.6 Pelayanan Publik dan Pengelolaan Keuangan**

### **2.1.2.6.1 Ketepatan waktu dalam pengesahan APBD T.A. Berjalan**

Penetapan APBD tepat waktu sangat berpengaruh terhadap kinerja realisasi APBD tahun berikutnya, agar anggaran daerah dapat segera disalurkan untuk pelayanan masyarakat dan pembangunan di daerah. Apabila APBD tidak ditetapkan tepat waktu padahal APBN sudah bergerak, ekonomi tidak bisa bergerak sesuai dengan mesin yang seharusnya bergerak bersama.

APBD Kabupaten Karawang Tahun 2023 ditetapkan tepat waktu melalui Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 93 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

### **2.1.2.6.2 Penggunaan *E-Procurement***

Pengadaan barang/jasa secara elektronik (*E-Procurement*) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang sudah dilaksanakan dimulai sejak Tahun Anggaran 2011 sampai dengan saat ini penggunaan *E-Procurement* masih berlangsung. Pada saat awal pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (*eprocurement*) Pemerintah Kabupaten Karawang menggunakan aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) milik Provinsi Jawa Barat dengan alamat website [lpse.jabarprov.go.id](http://lpse.jabarprov.go.id) aplikasi ini adalah aplikasi *E-Procurement* yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk digunakan oleh LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) di seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, sejak Tahun Anggaran 2017 Pemerintah Kabupaten Karawang menggunakan aplikasi SPSE secara mandiri dengan alamat website [lpse.karawangkab.go.id](http://lpse.karawangkab.go.id).

### **2.1.2.6.3 Penggunaan *E-Budgeting***

Berdasarkan Permendagri Nomor 90 tahun 2018 telah diluncurkan dan ditetapkan penggunaan Informasi Sistem pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai sistem yang digunakan di dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran di seluruh Indonesia.

Sejak tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Karawang telah memanfaatkan SIPD dalam melaksanakan tahapan perencanaan dan penganggaran Pembangunan Daerah Tahun 2020. Sampai saat ini penyusunan RKPD dan APBD Tahun 2023 masih memanfaatkan SIPD.

#### 2.1.2.6.4 Proporsi besaran SILPA

SILPA adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan, yaitu selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2022 terdapat SILPA Rp 600.583.833.766,00,-. Lebih rincinya sebagaimana Tabel 2.74 berikut :

**Tabel 2.74**  
**Proporsi Besaran SILPA Tahun Anggaran 2022**

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)
4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	4.802.913.411.541,00	4.802.598.262.500,00	99,99
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	1.621.685.295.499,00	1.617.783.012.031,00	99,76
4.1.1	Pajak Daerah	1.179.597.671.000,00	1.230.158.739.173,00	104,29
4.1.2	Retribusi Daerah	44.759.564.436,00	41.279.502.137,00	92,22
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.869.005.662,00	10.181.332.281,00	148,22
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	390.459.054.401,00	336.163.438.440,00	86,09
4.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	3.165.428.116.042,00	3.171.144.250.469,00	100,18
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.590.665.878.656,00	2.600.956.177.660,00	100,18
4.2.1.1	Dana Perimbangan	2.234.722.487.656,00	2.245.012.786.660,00	99,54
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	-	0,00	-
4.2.1.5	Dana Desa	355.943.391.000,00	355.943.391.000,00	100,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	574.762.237.386,00	570.188.072.809,00	99,20
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	503.847.535.386,00	499.687.087.499,00	99,17
4.2.2.2	Bantuan Keuangan	70.914.702.000,00	70.500.985.310,00	99,42
4.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	15.800.000.000,00	13.671.000.000,00	86,53
4.3.1	Pendapatan Hibah	15.800.000.000,00	13.671.000.000,00	86,53
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	0,00	-
5	<b>BELANJA DAERAH</b>	5.407.159.745.413,00	4.806.740.763.915,00	88,90
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	3.641.121.735.834,00	3.177.822.614.519,00	87,28
5.1.1	Belanja Pegawai	1.704.596.340.767,00	1.505.483.233.383,00	88,32
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.657.490.631.998,00	1.398.924.929.547,00	84,40
5.1.5	Belanja Hibah	107.347.442.688,00	107.060.471.148,00	99,73
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	171.687.320.381,00	166.353.980.441,00	96,89
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	1.110.525.559.679,00	993.705.467.696,00	89,48
5.2.1	Belanja Modal Tanah	13.045.795.400,00	10.914.420.850,00	83,66



NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	224.695.946.456,00	147.683.304.657,00	65,73
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	221.097.672.456,00	199.229.394.669,00	90,11
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	650.388.025.617,00	634.580.287.770,00	97,57
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.298.119.750,00	1.298.059.750,00	100,00
5.3	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	22.380.000.000,00	2.110.231.800,00	9,43
5.3.1	Belanja Tidak terduga	22.380.000.000,00	2.110.231.800,00	9,43
5.4	<b>BELANJA TRANSFER</b>	633.132.449.900,00	633.102.449.900,00	100,00
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	122.435.760.000,00	122.435.760.000,00	100,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	510.696.689.900,00	510.666.689.900,00	99,99
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	-604.246.333.872,00	-4.142.501.415,00	0,69
6	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>			-
6.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	626.581.853.586,00	626.581.853.586,00	100,00
6.1.1	Bisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	626.581.853.586,00	626.581.853.586,00	100,00
6.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	22.335.519.714,00	21.855.518.405,00	-
6.2.2	Pernyataan Modal Daerah	22.335.519.714,00	21.855.518.405,00	97,85
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	604.246.333.872,00	604.726.335.181,00	97,85
	<b>PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	0,00	600.583.833.766,00	100,08

Sumber: BPKAD Kabupaten Karawang Tahun 2023

#### 2.1.2.6.5 Penghitungan IKM untuk Institusi Pelayanan Kesehatan

Berdasarkan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 yang disusun oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang, hasil pengolahan data SKM untuk institusi pelayanan Kesehatan disajikan pada Tabel 2.75. Pada tahun 2022 IKM RSUD sebesar 83,16 dan IKM Dinas Kesehatan Sebesar 83,823 dengan masing-masing mutu layanan B.

**Tabel 2.75**  
**Penghitungan IKM untuk Institusi Pelayanan Kesehatan Tahun 2022**

	PD / UPP	IKM	Mutu Layanan	Skala Linkert
<b>A</b>	<b>RSUD</b>	<b>83,16</b>	<b>B</b>	<b>3,33</b>
	1. Pelayanan Rawat Jalan	76,67		
	2. Pelayanan Rawat Inap	87,13		
	3. Pelayanan IGD	81,85		
	4. Pelayanan Kespro	82,22		
	5. Pelayanan Perawatan Kritis	87,96		
<b>B</b>	<b>Dinas Kesehatan</b>	<b>83,823</b>	<b>B</b>	<b>3,35</b>
	1. Pelayanan Dinkes	83,82		
	2. Pelayanan Puskesmas	79,40		

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023

#### 2.1.2.6.6 Penghitungan IKM untuk Institusi Pelayanan Investasi

Berdasarkan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 yang disusun oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang, hasil pengolahan data SKM untuk institusi pelayanan investasi dijelaskan pada tabel 2.76. Berdasarkan tabel tersebut IKM Dinas PMPTSP pada tahun 2022 sebesar 82,70 dengan mutu layanan B.

**Tabel 2.76**  
**Penghitungan IKM untuk Institusi Pelayanan Investasi Tahun 2022**

SKPD / UPP	IKM	Mutu Layanan	Skala Linkert
Dinas PMPTSP	82,70	B	3,31

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023

#### 2.1.2.6.7 Penghitungan IKM Untuk Institusi Pelayanan Kependudukan

Berdasarkan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 yang disusun oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang, hasil pengolahan data SKM untuk institusi pelayanan kependudukan tercantum dalam Tabel 2.77. Pada tahun 2022, IKM Dinas Dukcatpil sebesar 82,01 dengan mutu layanan B.

**Tabel 2.77**  
**Penghitungan IKM untuk Institusi Pelayanan Kependudukan Tahun 2022**

SKPD / UPP	IKM	Mutu Layanan	Skala Linkert
<b>Disdukcatpil</b>	<b>82,01</b>	<b>B</b>	<b>3,28</b>
1. Pelayanan Adminduk (KTP/KK)	86,09		
2. Pelayanan Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran)	88,37		
3. Pelayanan e-dukatpil	73,50		
4. Pelayanan Konsolidasi Data	79,48		
5. Pelayanan Whatsapp	82,37		
6. Pelayanan Jemput Bola	87,68		
7. Pelayanan DAU (Disdukcatpil Ada Untukmu)	77,08		

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023

#### 2.1.2.6.8 Penghitungan IKM untuk Institusi Pelayanan Publik Lainnya

Berdasarkan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 yang disusun oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang, Penghitungan IKM untuk institusi pelayanan publik lainnya sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 2.78.

**Tabel 2.78**  
**Perhitungan IKM untuk Institusi Pelayanan Publik Tahun 2022**

No	SKPD / UPP	IKM	Mutu Layanan
	<b>IKM institusi pelayanan publik lainnya</b>	<b>82,44</b>	<b>B</b>
1	Bapenda	76,73	
2	Disdikpora	85,73	
3	Dinas PRKP	83,14	
4	Dinas PPKB	78,44	
5	Disnakertrans	83,31	
	a. Pelayanan Kartu Kuning	84,90	
	b. Pelayanan Hubungan Industrial	81,72	
6	Dinas Sosial	88,20	
	a. Pelayanan Sistem Layanan Rujukan Terpadu	88,98	
	b. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	87,41	
7	Disparbud	84,25	
8	Disperindag	86,80	
	a. Pelayanan Surat Keterangan Asli	87,41	
	b. Pelayanan Tera/Kemetrologian	86,47	
9	Dinas LHK	81,86	
10	Dinas Perikanan	79,35	
11	Dinas PUPR	79,30	
12	BPBD	76,73	
13	Satpol PP	88,02	
14	Dinas Perhubungan	82,81	
15	Disperpusip	86,03	
16	BPKAD	82,35	
17	Dinas KUKM	89,19	
	a. Pelayanan Koperasi	89,58	
	b. Pelayanan KUKM	88,80	
18	Sekretariat Daerah	77,63	
19	Sekretariat DPRD	76,50	
20	Inspektorat	80,66	
21	Bappeda	80,55	
22	BKPSDM	78,41	
23	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	85,10	
24	Dinas PMD	81,68	
25	Badan Kesbangpol	85,91	
26	Dinas Kominfo	83,53	
27	Dinas PPPA	83,61	

*Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023*

#### **2.1.2.6.9 Nilai mutu pelayanan berdasarkan rata-rata nilai IKM**

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat yang beberapa tahun terakhir diganti menjadi Survei Kepuasan Masyarakat oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran

atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Kabupaten Karawang disajikan pada Tabel 2.79.

**Tabel 2.79**  
**Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah di Kabupaten Karawang Tahun 2018-2022**

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	Skala Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Pemerintahan (skala 1-4)	3,14 (18 Jenis layanan)	3,19 (22 Jenis layanan)	3,22 (31 PD)	3,29 (31 PD)	3,30 (31 PD)

*Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023*

Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan hasil pengolahan data Survei Kepuasan Masyarakat di 31 PD/UPP mendapatkan tingkat mutu layanan B (Baik), dengan mempunyai nilai layanan SKM dengan interval skala likert antara 3,07 – 3,40 atau indeks kepuasan masyarakat antara 76,68 – 85,01. Rata-rata Nilai IKM untuk Kabupaten Karawang Tahun 2022 adalah **82,38** dengan predikat mutu layanan **B (Baik)** yang dalam skala likert memperoleh angka skala 3,30 dari skala 4.

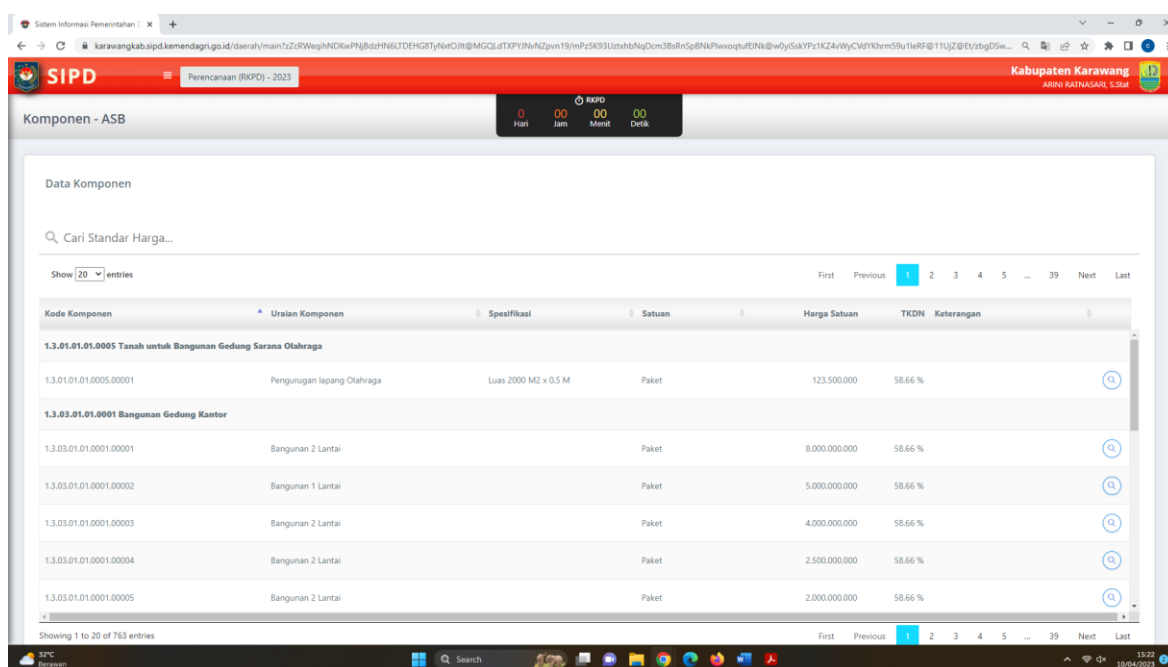
#### **2.1.2.7 Penggunaan e-ASB (Analisis Standar Belanja)**

e-Analisis Standar Belanja (ASB) merupakan salah satu komponen yang harus dikembangkan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan dalam penyusunan APBD dengan pendekatan kinerja. Analisis Standar Belanja dapat menjadi pedoman untuk melaksanakan setiap aktivitas dan kegiatan yang direncanakan sebagai upaya mewujudkan pemerintah daerah yang akuntabel dan transparan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yaitu pasal 57 ayat (5) Analisis Standar Belanja merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan SSH, SBU dan SBK menjadi acuan dalam penyusunan ASB. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan daerah semakin meningkat. Untuk dapat memenuhi tuntutan tersebut terutama atas tuntutan akuntabilitas dapat dilakukan dengan cara pengelolaan keuangan daerah secara

ekonomis, efisien, dan efektif dengan Menyusun standar biaya yaitu Analisis Standar Belanja. (ASB) yang merupakan standar untuk menganalisa anggaran belanja yang digunakan dalam suatu program atau kegiatan sehingga menghasilkan tingkat pelayanan tertentu dan kewajaran biaya di unit kerja dalam satu tahun anggaran. Pentingnya dilakukan penyusunan ASB ini karena adanya ketidakwajaran anggaran belanja dalam satu program atau kegiatan antar perangkat daerah. ASB dapat menjadi pedoman untuk melaksanakan setiap aktivitas dan kegiatan yang direncanakan sebagai upaya mewujudkan pemerintah di daerah yang akuntabel dan transparan. ASB sebenarnya sudah diperkenalkan kepada Pemerintah Daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Daerah yang dikenal dengan istilah Standar Analisa Belanja (SAB). SAB tersebut mempunyai makna sebagai salah satu instrumen untuk penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan.

PP ini diimplementasikan di Pemerintah Kabupaten Karawang pada tahun 2021 berupa penyusunan ASB non fisik ASB non fisik ini diintegrasikan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan menjadi besaran harga standar yang harus dipedomani oleh seluruh perangkat daerah dalam menyusun perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.



**Gambar 2.80 Screenshot penggunaan e-ASB**

### 2.1.2.8 Transparansi dan Akuntabilitas

Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

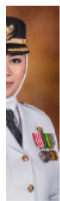

Berkenaan dengan hal tersebut, dibentuklah Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) di Kabupaten Karawang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 14) serta Keputusan Bupati Karawang Nomor 478/Kep.182-Huk/2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Karawang.

Dalam menerapkan prinsip pemerintahan yang transparan dan akuntabel, Pemerintah Kabupaten Karawang telah mempublikasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) beserta Laporan Keuangan Pemerintah Daerah melalui website [karawangkab.go.id](http://karawangkab.go.id) serta website [ppid.karawangkab.go.id](http://ppid.karawangkab.go.id) sebagaimana Gambar 2.81.



**Gambar 2.81 Informasi APBD Kabupaten Karawang TA 2022**

EMERINTAH DAERAH  
BUPATEN KARAWANG

RACHADIANA  
Karawang

H. AEP SYARIFUDDIN, S.E.  
Bupati Karawang

A. Yani No. 1 Karawang  
Telp. 0267-429800  
Fax : 0267-411923  
Jawa Barat - Indonesia

DATA DOKUMEN

**LIHAT**

NO	DOKUMEN
1	Opini WTP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2021
2	Laporan Neraca (Audited) Pemkab Karawang Tahun 2020 dan 2021
3	Laporan Realisasi Anggaran (Audited) Pemkab Karawang Tahun Anggaran 2020 dan 2021
4	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Audited) Pemkab Karawang Tahun 2020 dan 2021
5	Laporan Perubahan Ekuitas (Audited) Pemerintah Kab. Karawang Tahun 2020 dan 2021
6	Laporan Operasional (Audited) Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2020 dan 2021
7	Laporan Arus Kas (Audited) Tahun 2020 dan 2021
8	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) PPKD Pemkab Karawang Tahun Anggaran 2020 dan 2021
9	Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Pemerintah Kabupaten Karawang TA 2021
10	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SKPD Pemkab Karawang Tahun Anggaran 2020 dan 2021

**Gambar 2.82 Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021**

PPID sebagai garda terdepan pelayanan informasi publik juga melayani pengaduan dan menerima aspirasi masyarakat, yaitu Tanggap Karawang sebagai portal resmi pengaduan pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Karawang. Masyarakat bisa mengakses Tangkar melalui website [tangkar.karawangkab.go.id](http://tangkar.karawangkab.go.id), whatsapp 081295199315, aplikasi android Tangkar, serta media sosial instagram dan facebook.

Berikut ini data jumlah pengaduan selama tahun 2022 sebagaimana Tabel 2.80 berikut ini:

**Tabel 2.80**  
**Data Pengaduan Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Karawang per 1 Januari 2022 sd 31 Desember 2022**

No	OPD	Total	Menunggu	Proses	Selesai
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	29	0	0	29
2	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	76	0	0	76
3	BADAN PENDAPATAN DAERAH	16	0	0	16
4	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	8	0	0	8

No	OPD	Total	Menunggu	Proses	Selesai
5	BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN KARAWANG	26	0	1	25
6	BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN KARAWANG	8	0	0	8
7	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	16	1	0	15
8	BADAN PERTANAHAN NASIONAL KARAWANG	30	0	0	30
9	BNNK KARAWANG	5	0	0	5
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	147	0	0	147
11	DINAS KESEHATAN	65	0	0	65
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	64	0	0	64
13	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	7	0	0	7
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	189	0	9	180
15	DINAS PANGAN	2	0	0	2
16	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	11	0	0	11
17	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	512	0	0	512
18	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	28	0	0	28
19	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	32	0	0	32
20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	16	0	0	16
21	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	102	0	0	102
22	DINAS PERHUBUNGAN	299	1	31	267
23	DINAS PERIKANAN	8	0	0	8
24	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	40	0	0	40
25	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1	0	0	1
26	DINAS PERTANIAN	25	0	0	25
27	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	203	0	0	203
28	DINAS SOSIAL	185	1	15	169
29	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	82	0	0	82



No	OPD	Total	Menunggu	Proses	Selesai
30	INSPEKTORAT	29	0	0	29
31	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	19	0	0	19
32	KECAMATAN BANYUSARI	3	0	0	3
33	KECAMATAN BATUJAYA	7	0	0	7
34	KECAMATAN CIAMPEL	3	0	0	3
35	KECAMATAN CIBUAYA	4	0	0	4
36	KECAMATAN CIKAMPEK	7	0	0	7
37	KECAMATAN CILAMAYA KULON	1	0	0	1
38	KECAMATAN CILAMAYA WETAN	3	0	0	3
39	KECAMATAN CILEBAR	1	0	0	1
40	KECAMATAN JATISARI	3	0	0	3
41	KECAMATAN JAYAKERTA	3	0	0	3
42	KECAMATAN KARAWANG BARAT	25	0	0	25
43	KECAMATAN KARAWANG TIMUR	7	0	0	7
44	KECAMATAN KLARI	8	0	0	8
45	KECAMATAN KOTA BARU	6	0	0	6
46	KECAMATAN KUTAWALUYA	6	0	0	6
47	KECAMATAN LEMAHABANG	3	0	0	3
48	KECAMATAN MAJALAYA	5	0	0	5
49	KECAMATAN PAKISJAYA	3	0	0	3
50	KECAMATAN PANGKALAN	5	0	0	5
51	KECAMATAN PEDES	4	0	0	4
52	KECAMATAN PURWASARI	4	0	0	4
53	KECAMATAN RAWAMERTA	1	0	0	1
54	KECAMATAN RENGASDENGKLOK	12	0	0	12
55	KECAMATAN TEGALWARU	2	0	0	2
56	KECAMATAN TELAGASARI	5	0	0	5

No	OPD	Total	Menunggu	Proses	Selesai
57	KECAMATAN TELUKJAMBE BARAT	7	0	0	7
58	KECAMATAN TELUKJAMBE TIMUR	14	0	0	14
59	KECAMATAN TEMPURAN	1	0	0	1
60	KECAMATAN TIRTAJAYA	11	0	0	11
61	KECAMATAN TIRTAMULYA	5	0	0	5
62	KEMENTERIAN AGAMA KARAWANG	11	0	0	11
63	PDAM KARAWANG	58	0	0	58
64	PLN KARAWANG	71	0	0	71
65	POLRES KARAWANG	116	2	3	111
66	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	11	0	0	11
67	SAMSAT KARAWANG	4	0	0	4
68	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	74	0	0	74
69	SEKRETARIAT DAERAH	31	0	3	28
70	SEKRETARIAT DPRD	9	0	0	9
71	TELKOM KARAWANG	47	0	0	47
<b>JUMLAH</b>		<b>2.881</b>	<b>5</b>	<b>62</b>	<b>2.814</b>

Berdasarkan Tabel 2.80, Tingkat Pengaduan Kepada PPID yang telah diselesaikan sebanyak 2.814 pengaduan dari 2.881 pengaduan yang masuk atau sebanyak 97,67% pengaduan yang masuk telah diselesaikan dan 62 pengaduan dalam status proses, dan 5 pengaduan menunggu.

Terkait Penggunaan *e-planning* dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah, sejak tahun 2019 Kabupaten Karawang telah memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagaimana ditetapkan dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai sistem yang digunakan di dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran di seluruh Indonesia. Sampai saat ini penyusunan RKPD dan APBD Tahun 2023 masih memanfaatkan SIPD.

### **2.1.3 Aspek Pelayanan Umum**

Pelayanan umum atau pelayanan publik merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Indikator aspek pelayanan umum terdiri dari fokus layanan urusan wajib dan fokus layanan urusan pilihan.

Urusan wajib yaitu di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, sosial, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, perpustakaan, kearsipan, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, perencanaan pembangunan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

#### **2.1.3.1 Pendidikan**

##### **2.1.3.1.1 Angka Partisipasi Sekolah**

Angka partisipasi dibagi dalam APK (Angka Partisipasi Kasar) dan APM (Angka Partisipasi Murni). APK dan APM menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi, jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah dilihat dari partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah, sehingga naiknya persentase jumlah murid cenderung diartikan semakin meningkatnya partisipasi sekolah.

Akan tetapi kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan bertambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah, sehingga angka partisipasi sekolah bisa tidak berubah atau menurun.

Angka partisipasi murni adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Angka partisipasi murni fungsinya hampir sama dengan APK, hanya saja APM merupakan indikator yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

Tabel 2.81 menyajikan perkembangan angka partisipasi pendidikan selama periode 2018-2022. Selama periode tersebut, hanya APM SD/Sederajat yang terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. APM SMP/Sederajat, APK SD/Sederajat, dan APK SMP/Sederajat mengalami penurunan pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Namun, setelah tahun 2020 kembali mengalami kenaikan.

**Tabel 2.81**  
**Perkembangan Angka Partisipasi Pendidikan Tahun 2018-2022 (%)**

No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	APM SD/Sederajat	95,73	97,88	98,61	98,99	99,11
2	APM SMP/Sederajat	77,18	91,55	78,41	79,20	79,52
3	APK SD/Sederajat	106,27	107,83	102,43	102,75	102,96
4	APK SMP/Sederajat	98,61	114,44	96,23	98,98	99,41

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang Tahun 2022

### 2.1.3.1.2 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Dasar dan Menengah

Pembangunan pendidikan merupakan prioritas pembangunan nasional sehingga dalam implementasinya juga menjadi prioritas pembangunan di daerah. Pemenuhan atas hak dasar yaitu pendidikan menjadi kewajiban pemerintah. Pendidikan merupakan salah satu gerbang penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas sumber daya manusia mengandung makna, bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan faktor penentu bagi pemantapan kesiapan menyongsong tantangan kedepan yang semakin berat dan kompleks. Dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, setiap warga negara berhak mendapatkan layanan pendidikan.

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar dan menengah per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar dan menengah.

Semakin rendah rasio ketersediaan sekolah, semakin baik pelayanan pendidikan suatu daerah. Hal ini dikarenakan peningkatan jumlah murid di imbangi dengan peningkatan jumlah sekolah. Sebaliknya, semakin tinggi rasio ketersediaan sekolah semakin buruk pelayanan pendidikan suatu daerah, karena jumlah sekolah menjadi kurang serta tidak seimbang dengan jumlah murid yang ada.

Tabel 2.82 menggambarkan hasil persentase SD/MI dan SMP/MTs yang terakreditasi di Kabupaten Karawang pada tahun 2018-2022. Tahun 2020 persentase SD/MI dan SMP/MTs yang terakreditasi mengalami penurunan. Namun kembali naik di tahun 2021. Tahun 2022 persentase SD/MI yang terakreditasi mengalami penurunan dan persentase SMP/MTs tetap mengalami kenaikan.

**Tabel 2.82**  
**Persentase SD dan SMP yang Terakreditasi Tahun 2018-2022 (%)**

No.	Jenjang Sekolah	2018	2019	2020	2021	2022
1.	SD/MI	98,86	99,56	97,23	96,07	95,59
2.	SMP/MTs	95,21	97,63	87,31	85,34	91,70

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang Tahun 2022

Sistem pendidikan yang baik dan bermutu di samping harus dibangun di atas prinsip-prinsip yang kokoh dengan paradigma yang jelas, juga harus berusaha diletakkan sesuai tuntutan dan perubahan zaman. Peningkatan mutu tentu membutuhkan biaya terutama untuk memenuhi mutu sarana dan prasarana dan memenuhi biaya pengelolaan sekolah. Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah jelas menyebutkan bahwa tugas pengelolaan sekolah adalah pada pemerintah daerah, artinya pemenuhan sarana dan prasarana serta pembiayaan seharusnya menjadi beban daerah. Beberapa daerah dengan kemampuan fiskal yang rendah terbukti memiliki APK rendah pula, artinya daerah tersebut sudah jelas tidak mampu menyediakan sarana-prasarana pendidikan sesuai kebutuhan dan sangat membutuhkan intervensi pemerintah pusat.

Dalam rangka meningkatkan daya tampung sekolah dan sarana prasarana sekolah telah diupayakan melalui pembangunan unit sekolah, rehabilitasi ruang kelas, ruang laboratorium dan perpustakaan untuk SD/MI dan SMP/MTs dengan sumber dana yang berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN (DAK), Dana Dekonsentrasi dan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

**Tabel 2.83**  
**Pembangunan Unit Sekolah dan Rehabilitasi Ruang Kelas**  
**SD dan SMP Tahun 2018-2022**

Jenjang Sekolah	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
SD	143	425	151	74	162
SMP	83	143	26	57	66

*Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang 2022*

Dari Tabel 2.83 terlihat bahwa pembangunan unit sekolah dan rehabilitasi ruang kelas pada tahun 2022 untuk Sekolah Dasar sebanyak 162 dan untuk Sekolah Menengah Pertama sebanyak 66.

**Tabel 2.84**  
**Jumlah Siswa di Kabupaten Karawang Tahun 2018-2022**

No	Jenjang Sekolah	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	SD/MI	255.356	260.323	264.852	268.017	279.330
2	SMP/MTs	109.818	113.885	114.399	115.144	119.178

*Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang 2022*

Pada Tabel 2.84 secara umum jumlah siswa pada semua jenjang sekolah di Kabupaten Karawang selama periode 2018-2022 mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 jumlah siswa SD/MI sebanyak 279.330 siswa dan jumlah siswa SMP/MTs sebanyak 119.178 siswa.

**Tabel 2.85**  
**Rasio Murid Terhadap Sekolah Tahun 2018-2022**

No.	Tingkat Pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022
1	SD/MI	244:1	247:1	245:1	245:1	251:1
2	SMP/MTs	486:1	485:1	440:1	433:1	430:1

*Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang 2022*

Manajemen pelayanan pendidikan pada jenjang SD dan SMP di Kabupaten Karawang salah satunya digambarkan melalui rasio murid terhadap sekolah, dan rasio murid terhadap ruang kelas. Pada tahun 2022 rasio murid terhadap sekolah untuk tingkat SD 251:1 dan tingkat SMP/MTs 430:1.

Pelaksanaan pembangunan pendidikan perlu didukung ketersediaan sarana dan prasarana fisik pendidikan yang memadai, khususnya kecukupan fasilitas pendidikan dalam melayani masyarakat serta jumlah tenaga pengelola kependidikan.

Perkembangan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan bidang pendidikan, melalui peningkatan kualitas tenaga pendidikan dan siswa didik, pembangunan unit sekolah baru, rehabilitasi ruang kelas, pembangunan ruang kelas baru dan pembangunan SD-SMP satu atap akan terus dilakukan, termasuk dalam hal pemeliharannya. Sarana dan prasarana penunjang di bidang

pendidikan termasuk diantaranya sanitasi, seperti WC guru dan siswa, kecepatan akses informasi dalam bidang informasi dan teknologi dilengkapi dengan keberadaan *ICT Center* yang terhubung dengan jaringan Pendidikan Nasional dan bagi pemberdayaan tenaga pendidikan pun telah tersedia *Teacher Learning Center (TLC)*.

**Tabel 2.86**  
**Rasio Murid terhadap Ruang Kelas Tahun 2018-2022**

No.	Tingkat Pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022
1	SD/MI	38:1	41:1	29:1	29:1	29:1
2	SMP/MTs	40:1	40:1	36:1	36:1	34:1

*Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang 2022*

Dari Tabel 2.86 dapat diketahui bahwa rasio murid terhadap ruang kelas tahun 2022 sama dengan tahun 2021 yaitu untuk tingkat SD sebesar 29:1. Sedangkan pada tahun 2022 rasio murid terhadap ruang kelas tingkat SMP sebesar 36:1.

#### **2.1.3.1.3 Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Dasar dan Menengah**

Masalah Manajemen pendidikan adalah masalah yang sangat berperan dalam proses penyelenggaraan pendidikan baik sebagai sarana maupun alat penataan bagi komponen pendidikan lainnya. Manajemen pelayanan pendidikan di Kabupaten Karawang diantaranya digambarkan oleh rasio guru terhadap sekolah dan rasio murid terhadap guru. Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar/menengah dan sederajat terhadap jumlah murid pendidikan dasar/menengah dan sederajat, rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar serta untuk mengukur jumlah ideal murid per satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Angka Rasio Guru Terhadap Murid di Sekolah Dasar dan Menengah di Kabupaten Karawang Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada Tabel 2.87 berikut ini. Berdasarkan Tabel 2.87, rasio murid terhadap guru tahun 2018-2022 cenderung sama dari tahun ke tahun.



**Tabel 2.87**  
**Rasio Murid Terhadap Guru Tahun 2018-2022**

No	Tingkat Pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022
1	SD/MI	25 : 1	26:1	25:1	26:1	26:1
2	SMP/MTs	24 : 1	26:1	25:1	24:1	24:1

Sumber: *Disdikpora Kabupaten Karawang 2022*

Sedangkan rasio guru terhadap sekolah tahun 2018-2022 dapat dilihat pada Tabel 2.88. Berdasarkan tabel tersebut, rasio guru terhadap sekolah selama tahun 2018-2022 cenderung sama dari tahun ke tahun.

**Tabel 2.88**  
**Rasio Guru Terhadap Sekolah Tahun 2018-2022**

No	Tingkat Pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022
1	SD/MI	10 : 1	10:1	10:1	10:1	10:1
2	SMP/MTs	20 : 1	19:1	18:1	18:1	18:1

Sumber: *Disdikpora Kabupaten Karawang 2022*

#### 2.1.3.1.4 Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah merupakan proporsi anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Persentase Angka putus sekolah di Kabupaten Karawang pada jenjang pendidikan SD dan SLTP pada tahun 2018 sampai dengan 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.89**  
**Persentase Angka Putus Sekolah Tingkat SD dan SMP Tahun 2018-2022**

No.	Jenjang Sekolah	2018	2019	2020	2021	2022
1	SD/MI	0,01	0,07	0,09	0,08	0,08
2	SMP/MTs	0,28	0,06	0,07	0,06	0,06

Sumber: *Disdikpora dan Kemenag Kabupaten Karawang 2022*

Dengan semakin berkurangnya persentase angka putus sekolah menunjukkan upaya untuk mewujudkan wajib belajar sembilan tahun semakin baik dan terus diupayakannya peningkatan pelayanan pendidikan di berbagai pelosok Kabupaten Karawang.

#### 2.1.3.1.5 Angka Kelulusan

Angka kelulusan adalah persentase kelulusan yang dicapai setiap tahunnya pada setiap jenjang pendidikan, angka kelulusan dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di sekolah serta kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan daerah. Semakin meningkatnya persentase kelulusan di jenjang pendidikan SD dan SMP menggambarkan proses pembelajaran yang semakin baik dalam mempersiapkan anak didik dalam menghadapi ujian. Sementara lulusan SMP/MTs pada tahun 2022 sebanyak 34.671 siswa dan lulusan SMP/MTs sebanyak 41.571. Untuk data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.90 berikut:

**Tabel 2.90**  
**Angka Lulus Sekolah Tahun 2018-2022**

No.	Jenjang Sekolah	2018	2019	2020	2021	2022
1	SD/MI	39.874	40.973	41.549	44.142	41.571
2	SMP/MTs	37.348	34.955	34.686	38.133	34.671

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang 2022

#### 2.1.3.1.6 Angka Melanjutkan Pendidikan

Angka melanjutkan pendidikan adalah persentase siswa yang melanjutkan pendidikan setiap tahunnya pada setiap jenjang pendidikan. Angka melanjutkan pendidikan dapat digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Adapun persentase kelulusan di Sekolah Dasar sebaiknya memiliki angka kelulusan yang sama atau mendekati dengan angka kelulusan di SMP tiga tahun berikutnya dengan asumsi bahwa lulusan SD melanjutkan ke SMP.

Tahun 2022 untuk SD/MI angka kelulusan sebesar 96,97% dan kelulusan di SMP tahun 2022 diharapkan mendekati atau sama dengan 96,97%. Hal ini menunjukkan bahwa siswa yang melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs sederajat mendekati 100% artinya lulusan SD/MI hampir seluruhnya melanjutkan ke tingkat SMP/MTs. Dengan demikian program wajib belajar sembilan tahun terlaksana dengan baik. Tabel 2.91 menggambarkan hasil persentase kelulusan pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs yang melanjutkan sekolahnya.

**Tabel 2.91**  
**Persentase Lulusan SD dan SMP yang Melanjutkan Sekolahnya**  
**Tahun 2018-2022**

No.	Jenjang Sekolah	2018	2019	2020	2021	2022
1.	SD/MI	98,00	95,37	96,41	96,86	96,97
2.	SMP/MTs	89,57	92,34	94,15	94,73	94,85

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang 2022

Pencapaian SPM Pendidikan terdiri dari 3 indikator yaitu 1) Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini; 2) Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam Pendidikan dasar; 3) Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan. Beberapa yang harus menjadi perhatian yaitu ketercapaian Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan pada tahun 2022 hanya mencapai 26,10%.

Adapun data capaian Indikator SPM Bidang Pendidikan sebagaimana tercantum pada Laporan SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Karawang tahun 2022 belum dilakukan penyesuaian pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 tahun 2022 tentang SPM Pendidikan yang mencakup 15 Indikator SPM Bidang Pendidikan. Laporan SPM Bidang Pendidikan tahun 2022 masih mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, begitu pula pada penyusunan RKPD 2022 maupun Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

Hasil pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2022 Kabupaten Karawang tercantum pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.92**  
**Capaian Standar Pelayanan Pendidikan di Kabupaten Karawang Tahun**  
**2018-2022**

No.	Indikator SPM	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	%	91,33	96,03	92,24	92,89	99,11
2.	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	8,05	8,23	19,93	20,24	26,10
3	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	52,34	52,52	55,14	61,22	61,94

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang 2022

### 2.1.3.2 Kesehatan

Pelaksanaan pembangunan kesehatan ditujukan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi tingginya dan mencapai Umur Harapan Hidup dan sehat. Derajat kesehatan yang baik diukur dengan beberapa indikator kesehatan yang terbagi kedalam 4 sub urusan pembangunan kesehatan. Berdasarkan UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terutama pada sub urusan (1) Pembangunan kesehatan dalam upaya kesehatan yang dibedakan ke dalam upaya kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat; (2) Sumber daya manusia; (3) Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman dan (4) Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

Tabel 2.93 menyajikan capaian kinerja pelayanan urusan kesehatan Kabupaten Karawang tahun 2018 hingga 2022. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sampai tahun 2021 hanya mencapai “73,86”, lebih rendah daripada tahun 2020. Hal ini mengandung arti bahwa masih ada anak usia pendidikan dasar yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Karawang. Sarana dan prasarana rumah sakit dan puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Karawang. Namun, pada tahun 2022 persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar mengalami kenaikan menjadi 85,12%. Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi pada tahun 2022 mencapai 100%.

**Tabel 2.93**  
**Capaian Kinerja Pelayanan Urusan Kesehatan Kabupaten Karawang**  
**Tahun 2018-2022**

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Rasio Posyandu	per 100 balita	70,56	69,19	67,80	75,70	75,70
2	Rasio Puskesmas dan Pustu Per Satuan Penduduk	per 30.000 penduduk	1:46.720,18	1:47.078,3	1:47.409,76	1:47.181,57	1:50.104,94
3	Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk	per 100.000 penduduk	1:116.800,45	1:112.091,19	1:98.770,33	1:94.363,14	1:100.209,88

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
4	Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah penduduk	per 1000 penduduk	1:910,72	1:905,70	1:834,68	1:787,67	1:814
5	Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	100	100	87,5	83,34	100
6	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	95,98	95,36	98,43	73,86	85,12
7	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar	%	6,31	3,99	6,21	59,44	23,26
8	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	88,71	50,89	35,58	53,44	71,03

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang Tahun 2022

Untuk penyakit menular prioritas ditujukan untuk dapat mengendalikan penyakit *Tuberculosis* (TB), *HIV/AIDS*, *Filariasis*, PD3I (Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi) dan penyakit potensial kejadian luar biasa (KLB). Penyakit menular yang masuk ke dalam standar pelayanan minimal kabupaten/kota adalah *Tuberculosis* (TB) dan *HIV/AIDS*. Tabel 2.95 menyajikan hasil cakupan program P2M pada tahun 2018 hingga 2022. Kecenderungan jumlah penemuan BTA Kasus (kasus baru) di Kabupaten Karawang mengalami kenaikan dari tahun 2018 sebanyak 1.306 kasus menjadi 3.743 kasus pada tahun 2022 dan sempat menurun di tahun 2020 menjadi sebesar 978. Penderita *HIV* pada tahun 2018 sebanyak 243 menjadi 414 pada tahun 2022. Penyakit berpotensi KLB yang harus diwaspadai antara lain penyakit DBD, Diare, keracunan makanan, campak, difteri.

**Tabel 2.94**  
**Hasil Cakupan Program P2M Tahun 2018-2022**

No	Program	2018	2019	2020	2021	2022
1	P2 TBC :					
	- Penemuan BTA Kasus	1.306	1.398	978	2.023	3.743
2	P2 kusta :					
	- Prevalensi / 10.000 Penduduk	1,66	1,2	1,1	0,8	0,8
3	P2 PMS/HIV-AIDS :					
	- Penemuan HIV	243	255	315	244	414
	- Penemuan AIDS	20	45	87	32	36
4	P2 DIARE :					
	- Penemuan Kasus Diare	46.320	61.521	39.035	16.777	11.902
5	P2 ISPA					
	- Penemuan Penderita Pneumonia	10.514	5.724	5.006	1.837	4.046
6	P2 DBD					
	- Penemuan Kasus	52	199	1329	929	1.320
	- Kematian 4 (CFR)	0	0	1	0,97	1
	- Insiden rate (IR) 100.000 Penduduk	2	8	56,1	39,38	52,7
7	P2 FILARIASIS					
	- Penemuan Kasus	52	0	0	0	22

*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang 2022*

Cakupan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang Tahun 2021 sebagian besar mengalami penurunan. Namun ada beberapa yang mengalami peningkatan dari tahun 2020. Hal ini dapat disebabkan karena semakin gesitnya tenaga kesehatan untuk menyusur masyarakat yang terduga sakit sehingga semakin banyaknya kasus yang dapat ditemukan. Selain itu, semakin meningkatnya kesadaran serta pengetahuan masyarakat tentang kesehatan pribadinya sehingga mereka bisa membantu petugas kesehatan mempermudah dalam mendeteksi salah satu penyakit yaitu dengan kesadaran diri mereka sendiri untuk segera memeriksakan diri jika sudah merasa ada beberapa gejala tubuh yang dirasakan sakit. Namun, tahun 2022 Cakupan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang sebagian besar mengalami kenaikan, kecuali penemuan kasus diare yang mengalami penurunan.

Adapun, sejak tahun 2019 Kabupaten sudah mulai menunjukkan bahwa Kabupaten Karawang sebagai Kabupaten Bebas

Filariasis atau bebas kecacingan hal ini ditandai dengan tidak ditemukannya kasus kecacingan baru selama tahun 2019, dan sampai tahun 2021 tidak ditemukan kembali kasus filariasis. Namun dengan adanya 0 kasus ini tetap harus waspada dan selalu menjaga diri dengan rutin mengkonsumsi Obat Cacing sesuai anjuran tenaga kesehatan. Maka pada tahun 2021 pada bulan vitamin A khususnya balita diberikan obat cacing guna mencegah terjadinya kecacingan. Namun sayang, kasus kecacingan kembali ditemukan pada tahun 2022 sebanyak 22 kasus.

**Tabel 2.95**  
**Imunisasi, Surveilans dan KLB Penyakit Tahun 2018-2022**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Kasus KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi) yang ditangani	677	162	53	193	59
2	Persentase Desa UCI ( <i>Universal Child Immunization</i> ) (%)	87,7	97,08	73,14	75,1%	75,1%
3	Jumlah Penemuan Kasus non Polio AFP ( <i>Acute Flaccid Paralysis</i> ) per 100.000 anak di bawah umur 15 tahun	15	12	13	14	14
4	Jumlah Desa terkena KLB yang ditangani < 24 jam	5	4	4	2	2
5	Pandemi COVID-19 : Jumlah kasus terinfeksi	0	0	6.070	37.392	12.208

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang 2022

Berdasarkan Tabel 2.95, jumlah kasus Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) pada tahun 2018 meningkat drastis hal ini karena adanya *Drop Out Follow Up* (DOFU) kejadian Pneumonia yang dilakukan untuk mencegah KLB penyakit. Selain itu, jumlah sasaran yang dilakukan imunisasi juga sangat banyak mulai 6 bulan sampai 19 tahun. Tahun 2019 mengalami penurunan karena memang tidak banyak yang dilakukan imunisasi hanya imunisasi rutin ditambah dengan pelaksanaan BIAS Campak dengan sasaran anak kelas 1-3 SD. Dan pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan Desa UCI sebesar 24,66% yang banyak disebabkan karena pembatasan aktivitas di masa pandemi dan pelaksanaan imunisasi rutin harus

dilaksanakan di Puskesmas, sehingga banyak masyarakat yang tidak melakukan imunisasi pada anaknya yang terkendala dengan jarak tempat tinggal ke puskesmas yang jauh dan kesadaran dari masyarakat tersebut. Persentase desa UCI pada tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebanyak 2% dan pada tahun 2022 tetap sebesar 75,1%.

Penanggulangan KLB Penyakit dan keracunan yang ditangani <24 jam pada tahun 2021 telah mencapai target, dengan capaian sebesar 100%. Kecepatan upaya penanggulangan KLB penyakit dan keracunan yang ditangani <24 jam merupakan hal yang penting untuk secara dini mencegah meluasnya KLB dan mencegah terjadinya keparahan ataupun kematian akibat kejadian KLB. Tidak ada kasus/korban KLB yang mengalami kematian ataupun kecacatan. Capaian ini menunjukkan kinerja surveilans yang cukup baik. Upaya yang perlu diperbaiki dan dikembangkan, diantaranya yaitu : meningkatkan respon cepat pelaporan dan penanganan pada kasus-kasus KLB.

Pada tahun 2020 terjadi wabah COVID-19 di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Wabah COVID-19 di Kabupaten Karawang terjadi ketika penemuan kasus pertama pada tanggal 24 Maret 2020, dimana selanjutnya jumlah kasus terus meningkat setiap harinya dan pada akhir Desember 2020 jumlah orang terinfeksi COVID-19 sebanyak 6.070 kasus. Jumlah ini terus meningkat dan mencapai puncaknya di tahun 2021 dengan jumlah kasus terinfeksi sebanyak 37.392 kasus. Pemerintah Kabupaten Karawang telah melakukan banyak upaya untuk menekan penambahan kasus baru COVID-19, diantaranya dengan pembatasan aktivitas masyarakat di tempat umum, pengaturan jam buka tutup pertokoan dan tempat perbelanjaan, penutupan sekolah (belajar online), dan dukungan anggaran untuk pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Karawang membuahkan hasil. Pada tahun 2022, terjadi penurunan jumlah kasus yang terinfeksi COVID-19 menjadi 12.208 kasus.



**Tabel 2.96**  
**Cakupan Imunisasi Tahun 2018-2022 (%)**

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	BCG	107,4	101,88	97,03	104,3	103,5
2	DPT. 3	105,7	99,67	96,14	93,9	106,4
3	POLIO. 3	106,4	90,96	96,68	100,7	106,6
4	CAMPAK	101,4	98,58	94,97	104,9	105,6
5	HEPATITIS B.3	96	99,67	96,14	104,3	106,4
6	TT. 2	85,8	97,1	79,90	90,5	95,3

*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang Tahun 2022*

Imunisasi adalah proses untuk membuat seseorang imun atau kebal terhadap suatu penyakit. Secara umum kegiatan imunisasi di Kabupaten Karawang sudah mencapai target dan mengalami peningkatan jumlahnya. Hal ini dapat dipengaruhi oleh meningkatnya keterampilan petugas kesehatan dan sarana kesehatan yang memadai serta meningkatnya pengetahuan serta kesadaran masyarakat tentang kesehatan. Semakin meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan akan semakin baik status kesehatan masyarakatnya jika dibarengi dengan kesadaran masyarakat untuk membuat tubuh sehat.

Tabel 2.97 menyajikan cakupan imunisasi tahun 2018 hingga 2022. Cakupan imunisasi pada tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya disebabkan karena pembatasan aktivitas di masa Pandemi COVID-19 dan pelaksanaan imunisasi rutin harus dilaksanakan di Puskesmas, sehingga banyak masyarakat yang tidak melakukan imunisasi pada anaknya karena khawatir tertular COVID-19. Namun, pada tahun 2022 cakupan imunisasi kembali meningkat.

**Tabel 2.97**  
**Bayi Usia 0-9 Bulan yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap Tahun 2018-2022**

No	Jenis Imunisasi	2018	2019	2020	2021	2022
1	HB 0-7 bulan	44.283	44.001	41.918	38.898	37.489
2	BCG	44.185	45.128	41.818	33.271	39.908
3	DPT HB 3	44.085	44.148	41.434	35.020	41.009
4	Campak	42.294	43.667	40.927	39.090	40.687
5	POLIO 4	43.543	40.533	40.852	36.856	41.223

*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang 2022*

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengubah konsep imunisasi dasar lengkap menjadi imunisasi rutin lengkap. Imunisasi

rutin lengkap itu terdiri dari imunisasi dasar dan lanjutan. Imunisasi dasar saja tidak cukup, diperlukan imunisasi lanjutan untuk mempertahankan tingkat kekebalan yang optimal.

Pemberian imunisasi disesuaikan dengan usia anak. Untuk imunisasi dasar lengkap, bayi berusia kurang dari 24 jam diberikan imunisasi Hepatitis B (HB-0), usia 1 bulan diberikan (BCG dan Polio 1), usia 2 bulan diberikan (DPT-HB-Hib 1 dan Polio 2), usia 3 bulan diberikan (DPT-HB-Hib 2 dan Polio 3), usia 4 bulan diberikan (DPT-HB-Hib 3, Polio 4 dan IPV atau Polio suntik), dan usia 9 bulan diberikan (Campak atau MR). Untuk imunisasi lanjutan, bayi bawah dua tahun (Baduta) usia 18 bulan diberikan imunisasi (DPT-HB-Hib dan Campak/MR), kelas 1 SD/madrasah/sederajat diberikan (DT dan Campak/MR), kelas 2 dan 5 SD/madrasah/sederajat diberikan (Td).

**Tabel 2.98**  
**Hasil Cakupan Program Penanggulangan Penyakit Tidak Menular**  
**Tahun 2018-2022 (%)**

No	Penyakit	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Hipertensi/ Tekanan Darah Tinggi	8,30	19,2	28,3	54,2	42
2.	Obesitas	44,04	40,35	12,4	2,1	10,35
3.	IVA Positif	0,39	0,28	3,9	0,041	0,16
4.	Tumor/ Benjolan	0,41	0,34	11,6	0,041	0,6

*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang 2022*

Kecenderungan penyakit tidak menular juga terus meningkat dan menjadi penyebab tingginya angka kematian serta meningkatnya biaya perawatan yang menyebabkan beban berat pada BPJS dan Rumah Sakit. Beberapa penyakit tidak menular yang harus diwaspadai karena berkontribusi terhadap angka kematian antara lain penyakit hipertensi, obesitas, IVA Positif dan tumor/benjolan. Penyakit tidak menular yang menjadi standar pelayanan minimal adalah hipertensi, diabetes melitus, dan kesehatan jiwa. Berdasarkan Tabel 2.98, pada tahun 2022 cakupan penanggulangan penyakit hipertensi, obesitas, IVA positif, tumor/benjolan masing-masing secara berurutan sebesar 42%; 10,35%; 0,16%; dan 0,6%.

Dalam lima tahun terakhir permasalahan kesehatan jiwa cenderung meningkat dan memerlukan peningkatan upaya pelayanan kesehatan jiwa untuk mengatasinya. Kondisi kesehatan lingkungan merupakan penyebab tidak langsung terhadap tingginya angka kesakitan penyakit menular maupun tidak menular. Pemeriksaan kualitas air minum /air bersih harus terus ditingkatkan, termasuk meningkatkan sarana prasarana sanitasi di dalam rumah tangga dan di fasilitas tempat tempat umum. Meningkatkan pemecuan kepada masyarakat untuk secara mandiri merubah perilaku tidak melakukan buang air besar di tempat terbuka melalui kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan kerjasama dengan lintas sektor untuk mencapai desa *Open Defecation Free* (ODF), Kecamatan ODF, Kabupaten ODF dan Provinsi.

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal untuk kesehatan Daerah Kabupaten terdapat 12 yaitu:

1. Pelayanan Kesehatan ibu hamil;
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
4. Pelayanan kesehatan balita;
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
11. Pelayanan kesehatan orang terduga *tuberculosis*; dan
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi *HIV*.

Tabel 2.99 menyajikan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan di Kabupaten Karawang. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan pada tahun 2022 ada yang meningkat, tetap, dan ada yang menurun.

**Tabel 2.99**  
**Capaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan di Kabupaten**  
**Karawang Tahun 2018-2022 (%)**

No.	Indikator SPM	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan Kesehatan	96,74	98,9	95,94	92,42	89,19
2.	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan layanan Kesehatan	101,2 2	102,22	99,94	99,17	94,81
3.	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan layanan Kesehatan	106,5 3	106,35	105,40	100	100
4.	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan Kesehatan	77,18	83,19	77,9	81,68	89,49
5.	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan Kesehatan	95,98	96,33	98,43	73,86	85,12
6.	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan Kesehatan	6,31	22,56	12,26	59,4	23,36
7.	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan Kesehatan	88,71	50,89	53,44	63,34	71,03
8.	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	12,38	43,51	24,94	54,2	31,61
9.	Jumlah Warga Negara penderita <i>diabetes mellitus</i> yang mendapatkan layanan Kesehatan	17,37	62,44	37,86	65,4	42,82
10.	Jumlah Warga Negara dengan Gangguan jiwa berat yang terlayani Kesehatan	78,57	47,34	69,54	60,01	73,55
11.	Jumlah Warga Negara terduga <i>tuberculosis</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	63,07	42,31	39,87	62,36	100
12.	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> ) yang mendapatkan layanan Kesehatan	20,18	37,26	48,20	55,89	88,97

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang 2022

Jumlah pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya pada tahun anggaran 2018-2022 disajikan pada Tabel 2.100. Berdasarkan tabel tersebut, pada tahun 2022 terjadi pembangunan gedung puskesmas sebanyak tiga unit.

**Tabel 2.100**  
**Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana**  
**Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya**  
**Tahun Anggaran 2018-2022**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Puskesmas yang berprestasi dan terakreditasi	14	16	0	0	0
2.	Pembangunan Gedung PONED (unit)	0	0	0	0	0
3.	Pembangunan Gedung Puskesmas (unit)	2	5	0	6	3
4.	Pembangunan Rumah Dinas Dokter	0	0	0	0	0
5.	Perbaikan Rumah Dinas Jabatan	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang 2022

Dari Tabel 2.101 di bawah ini, dapat dilihat bahwa sarana Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Karawang cukup mampu memenuhi kebutuhan akan pelayanan kesehatan dasar. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah sarana kesehatan pemerintah maupun upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat baik itu dalam bentuk poskesdes maupun polindes.

**Tabel 2.101**  
**Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Karawang**  
**Tahun 2018-2022**

NO	SARANA	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	RSUD Kabupaten	1	1	1	1	1
2	RS Swasta	20	20	22	23	23
3	RS Khusus	0	1	1	1	1
4	Puskesmas	50	50	50	50	50
5	Pustu	73	68	68	73	50
6	Pusling+ kend. Operasional	445	127	127	132	136
7	PONED	27	27	27	27	29
8	Posyandu	2.283	2.301	2.311	2.334	1.803
10	Apotek	288	123	183	220	316

NO	SARANA	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
11	Balai Pengobatan Mata	1	1	1	1	1
13	Balai Pengobatan Umum (Klinik Pratama)	268	309	334	421	270
15	Gudang Farmasi	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang 2022

Pada tahun 2022, dapat terlihat jumlah Puskesmas sebanyak 50 puskesmas, Puskesmas Pembantu (pustu) sebanyak 50 pustu, Klinik Umum (Balai Pengobatan Umum/Klinik Pratama) sebanyak 270 sarana, Balai Pengobatan Mata sebanyak 1 sarana. Selain klinik, sarana yang ada di Kabupaten Karawang adalah apotek dengan jumlah 316 apotek yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Karawang.

Puskesmas merupakan ujung tombak dalam mengatasi tantangan masalah kesehatan. Dengan demikian keberadaan Puskesmas menjadi sangat penting sehingga perlu dipastikan bahwa puskesmas memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan standar. Untuk memenuhi pelayanan sesuai standar penyelenggaraan puskesmas yang bermutu, mudah di akses dan terjangkau oleh masyarakat, penyelenggaraan pelayanan puskesmas harus memenuhi standar input dan standar proses. Penilaian puskesmas sesuai standar mengacu pada Permenkes No.75 Tahun 2014 tentang Puskesmas, aspek yang ditentukan sebagai standar adalah : 1. Lokasi, 2. Bangunan, 3. Prasarana, 4 Peralatan, 5. Ketenagaan, 6. Perizinan dan registrasi, 7. Penyelenggaraan. Idealnya rasio puskesmas dengan jumlah penduduk 1 puskesmas : 30.000 penduduk.

**Tabel 2.102**  
**Rasio Puskesmas di Kabupaten Karawang Tahun 2018-2022**

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Puskesmas	50	50	50	50	50
2	Jumlah Penduduk	2.336.009	2.353.915	2.370.488	2.359.078	2.370.819
3	Rasio Puskesmas	46.720	47.078	47.410	47.182	47.416

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang 2022

Pada Tabel 2.102, terlihat bahwa rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk dari tahun 2018 sampai dengan 2022 menunjukkan angka belum ideal, karena idealnya rasio puskesmas dengan jumlah penduduk adalah 1 puskesmas : 30.000 penduduk. Sedangkan pada tahun 2022 rasio puskesmas adalah 1 puskesmas : 47.416 penduduk.

**Tabel 2.103**  
**Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Karawang**  
**Tahun 2018-2022**

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	RSUD Kabupaten	1	1	1	1	1
2	RS Swasta	20	20	22	23	22
3	RS Khusus	0	1	1	3	2
4	Total Jumlah Rumah Sakit	21	22	24	25	25
5	Jumlah Penduduk	2.336.009	2.353.915	2.370.488	2.359.078	2.370.819
6	Rasio Rumah Sakit	111.239	106.996	98.770	94.363	94.832

*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang 2022*

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Pelayanan kesehatan perorangan paripurna yaitu pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah jumlah rumah sakit dibagi dengan jumlah penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan fasilitas rumah sakit berdasarkan jumlah penduduk. Dengan merujuk Tabel 2.103, di Kabupaten Karawang sampai dengan tahun 2022 rasio Rumah Sakit adalah 1 Rumah Sakit : 94.832 penduduk. Ketersediaan rumah sakit di Kabupaten Karawang sudah memadai dimana nilai rasio ideal rumah sakit adalah 1 : 100.000 penduduk.

Sumber daya manusia Kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas maupun di Rumah sakit

diperlukan jumlah tenaga medis yang cukup dan mempunyai kompetensi layak. Rasio dokter umum menurut WHO adalah 10 orang dokter umum untuk 10.000 penduduk. Selain itu masih diperlukan juga tenaga dokter spesialis, sub spesialis dan tenaga spesialis penunjang medis (tenaga radiografis dan elektromedis) dirumah sakit. Untuk tenaga dokter, tenaga kesehatan tertentu seperti tenaga apoteker, analis kesehatan, nutrisisionis, sanitarian, promkes, dan tenaga non kesehatan seperti tenaga akuntansi di Puskesmas/FKTP juga masih diperlukan.

Tenaga di bidang kesehatan terdiri atas : tenaga kesehatan dan asisten tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud harus memiliki kualifikasi minimum Diploma Tiga, kecuali tenaga medis. Asisten Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan bidang kesehatan di bawah jenjang Diploma Tiga. Asisten Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud harus memiliki kualifikasi minimum pendidikan menengah di bidang kesehatan. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan)

Tenaga Kesehatan dikelompokkan ke dalam:

- a. tenaga medis;
- b. tenaga psikologi klinis;
- c. tenaga keperawatan;
- d. tenaga kebidanan;
- e. tenaga kefarmasian;
- f. tenaga kesehatan masyarakat;
- g. tenaga kesehatan lingkungan;
- h. tenaga gizi;
- i. tenaga keterampilan fisik;
- j. tenaga keteknisian medis;
- k. tenaga teknik biomedika;



- l. tenaga kesehatan tradisional; dan
- m. tenaga kesehatan lain.

Ada beberapa jenis tenaga kesehatan yang naik jumlahnya dan ada yang menurun jumlahnya, salah satu faktor naiknya jumlah tenaga dikarenakan adanya fasilitas pendidikan yang ada di Karawang diantaranya adalah jumlah bidan, perawat dan farmasi hal ini karena adanya fasilitas pendidikan yang mendukung tenaga kesehatan tersebut. Begitu juga dengan tenaga dokter, karena banyaknya peluang kerja di Karawang yang disebabkan meningkatnya jumlah industri yang secara tidak langsung akan menambah jumlah penduduk di Karawang yang akan berdatangan dari berbagai daerah karena mereka bekerja di sektor industri di Karawang.

**Tabel 2.104**  
**Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Karawang**  
**Tahun 2018-2022**

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Dokter Umum	298	327	725	414	570
2	Dokter Spesialis	290	278	306	564	530
3	Dokter Gigi	68	64	120	89	107
4	Perawat	2.212	2.340	3.261	3.181	3.272
5	Sanitasi	46	38	52	48	49
6	Perawat Gigi	38	39	39	39	39
7	Bidan	1.368	1437	1.829	1.523	1.489
8	FARMASI	287	364	459	478	450

*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang, 2022*

Berdasarkan Tabel 2.104 jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Karawang sebagian besar meningkat. Jumlah tenaga kesehatan yang mengalami penurunan hanya Dokter Spesialis, Bidan, dan Farmasi.

Ketersediaan Farmasi pelayanan kesehatan sangat ditentukan oleh aksesibilitas dan ketersediaan obat dan vaksin. Untuk itu perlu manajemen pendistribusian obat dan vaksin yang lebih baik dan efisien. Pemerintah Provinsi mendorong pemerintah kabupaten kota untuk pemanfaatan aplikasi *e-logistic* diharapkan mampu memantau ketersediaan obat dan vaksin secara *real time* dan memudahkan dalam pendistribusian.

**Tabel 2.105**  
**Pemakaian Obat dan Perbekalan Kesehatan di Puskesmas**  
**Tahun 2018-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Obat dan Perbekalan Kesehatan (Rp)</b>
2018	15.139.661.913
2019	12.816.246.000
2020	10.725.949.500
2021	19.789.844.798
2022	12.737.580.009

*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang 2022*

Pada tahun 2021 pemakaian obat dan perbekalan kesehatan sebesar Rp 19.789.844.798,-. Jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya disebabkan penyediaan obat-obatan untuk pasien COVID-19 di Kabupaten Karawang. Sedangkan pada tahun 2022, terjadi penurunan pemakaian obat dan perbekalan kesehatan menjadi sebesar Rp 12.737.580.009,-.

Kegiatan distribusi obat di Kabupaten Karawang Tahun merupakan program rutin yang harus dipenuhi untuk kebutuhan pelayanan kesehatan, yaitu:

- a) Kegiatan distribusi rutin, mencakup distribusi untuk kebutuhan pelayanan umum di unit pelayanan kesehatan pemerintah.
- b) Kegiatan distribusi khusus, mencakup distribusi obat untuk :
  - 1) Program kesehatan (program Gizi, Imunisasi, dll)
  - 2) Kejadian Luar Biasa
  - 3) Bencana (alam dan sosial) (pelayanan kesehatan gratis di lokasi bencana)

Pembiayaan pembangunan kesehatan di Karawang yaitu melalui APBN (DAK), APBD Provinsi dan APBD Kabupaten, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota) masing-masing dapat mengalokasikan minimal 10% dari APBD nya.

Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial guna menjamin kepastian perlindungan dalam memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak. Pemerintah Pusat telah menerapkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Sebagai Jalan untuk mencapai *Universal*

*Health Coverage* (UHC) dengan menjamin seluruh warga Indonesia pada JKN/KIS pada Tahun 2020.

Tabel 2.106 menyajikan jaminan pelayanan kesehatan masyarakat miskin pada tahun 2018-2022. Berdasarkan tabel tersebut, data peserta Jamkesmas (PBI APBN) yang ada saat ini diambil berdasarkan data BPJS Kesehatan tahun 2021 mengalami penurunan dikarenakan adanya peserta PBI APBN yang dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial karena tidak masuk dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Jumlah kepesertaan jaminan kesehatan daerah Kabupaten Karawang (PBI APBD) pada tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun 2020, karena banyak kepesertaan jamkesda yang dimasukkan masuk ke dalam Jaminan kesehatan masyarakat nasional yang dibiayai oleh Pemerintah pusat. Pada tahun 2022 jumlah peserta Jamkesmas mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 938.536 peserta. Sedangkan, jumlah peserta Jamkesda mengalami kenaikan menjadi 114.516 peserta. Adapun jumlah masyarakat yang memanfaatkan sistem jaminan kesehatan sebanyak 2.220.183 orang.

**Tabel 2.106**  
**Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin**  
**pada Tahun 2018-2022**

NO	INDIKATOR	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah peserta Jamkesmas yang mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan sesuai aturan berlaku	917.518	1.066.636	960.123	942.972	938.536
2.	Jumlah peserta Jamkesda mendapat jaminan pelayanan kesehatan sesuai aturan berlaku*	473.791	253.067	93.953	93.502	114.516
3.	Jumlah pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	50	50	50	50	50
4.	Jumlah pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	25	23	25	25	25
5.	Jumlah masyarakat memanfaatkan sistem jaminan kesehatan	13.337	11.235	8.326	2.088.667	2.220.183

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang 2022

Ket.: Jamkesmas tidak dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.

Jumlah kunjungan pasien yang ada dalam Tabel 2.107 berdasarkan dari jumlah klaim dari Rumah Sakit yang masuk ke Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang selama Tahun 2018-2022.

Dibandingkan dengan tahun 2020, jumlah kunjungan pasien Jamkesda di tahun 2021 mengalami penurunan jumlah kunjungan dari 9.924 kunjungan menjadi 9.124 kunjungan. Sedangkan jumlah dana klaim yang dibayarkan mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp. 2.064.626.703,-. Hal ini disebabkan karena masyarakat sudah banyak yang terdaftar dalam Jaminan Kesehatan di BPJS dan juga karena masa pandemi COVID-19 maka banyak masyarakat yang menunda untuk berobat ke rumah sakit karena adanya ketakutan tertular virus COVID-19. Data peserta Jamkesmas yang ada saat ini berdasarkan data penerimaan pembayaran yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan terhadap Puskesmas di wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.

**Tabel 2.107**

**Rekapitulasi Pelayanan Pasien Miskin Sumber Dana Jamkesda (APBD Provinsi dan Kabupaten) Tahun 2018-2022**

NO.	RUMAH SAKIT	2018		2019		2020		2021		2022	
		Jumlah Kunjungan Pasien	Total Biaya Rp	Jumlah Kunjungan Pasien	Total Biaya Rp	Jumlah Kunjungan Pasien	Total Biaya Rp	Jumlah Kunjungan Pasien	Total Biaya Rp	Jumlah Kunjungan Pasien	Total Biaya Rp
1.	RSUD Karawang	4.749	8.178.198.400	4747	11.048.927.869	3.857	8.739.524.200	3.117	8.188.330.600	3.466	7.888.192.163
2.	RS Islam Karawang	586	455.018.350	534	392.840.700	312	324.237.200	355	461.972.500	880	1.312.907.400
3.	RS. Karya Husada	570	514.863.364	332	396.780.700	251	408.583.100	192	332.815.900	269	622.902.700
4.	RS. Fikri Medika	1.570	1.650.969.410	846	1.661.757.200	687	1.791.161.600	1.049	3.232.429.400	1.047	3.111.211.700
5.	RSIA Citra Sari Husada	1.466	1.156.728.429	1430	1.187.028.300	1120	1.582.039.400	1.395	2.587.399.500	1.453	2.259.878.900
6.	RS. Delima Asih	82	113.794.978	61	44.338.000	45	45.090.700	25	17.702.100	26	33.606.800
7.	RS. Bayukarta	268	344.382.800	284	429.335.600	248	343.980.100	282	329.100.800	194	229.269.900
8.	RSB. Dr. Joko Pramono	11	36.689.600	14	35.481.500	68	235.242.600	158	484.383.100	208	612.707.800
9.	RS. Proklamasi	1.869	2.014.856.528	1269	1.619.844.399	1432	2.127.900.400	1.153	1.916.295.200	1.025	1.619.791.055
10.	RS. Izza	1.060	960.037.175	783	943.940.800	902	1.022.333.900	553	720.418.000	1.008	1.594.467.100
11.	RS. Dewi Sri	7	17.008.450	190	96.121.999	104	133.205.450	115	104.892.800	290	330.247.350
12.	RS.Mandaya	36	19.394.912	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	RS. Lira Medika Center	135	185.405.000	129	132.886.316	168	126.925.900	111	67.430.400	73	26.786.600
14.	RS. PGI Cikini	5	39.933.979	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	RSUPN Cipto	128	236.060.000	77	104.398.300	15	71.794.938	17	369.769.520	20	438.898.972

NO.	RUMAH SAKIT	2018		2019		2020		2021		2022	
		Jumlah Kunjungan Pasien	Total Biaya Rp	Jumlah Kunjungan Pasien	Total Biaya Rp	Jumlah Kunjungan Pasien	Total Biaya Rp	Jumlah Kunjungan Pasien	Total Biaya Rp	Jumlah Kunjungan Pasien	Total Biaya Rp
16.	RSUP Hasan Sadikin	289	622.873.600	153	307.860.100	241	661.959.708	101	416.313.300	84	139.111.875
17.	RS. Marzoeki Mahdi	29	160.721.900	14	83.980.900	19	94.116.386	25	128.216.477	48	261.493.268
18.	RS. Jiwa Cimahi Bdg	4	11.900.900	1	5.460.700	0	0	0	0	0	0
19.	RS. Saraswati			0	0	3	7.025.200	1	1.818.800	13	17.440.600
20.	RS. Puri Asih	381	434.191.450	253	304.046.300	275	530.233.000	261	545.100.100	235	481.382.900
21.	RS. Kusta Sintanala			0	0	0	0	0	0	0	0
22.	RS. Cicendo	7	3.635.700	3	1.075.300	28	53.478.400	15	26.824.200	37	44.320.400
23.	RS. Mitra Family	9	79.347.700	7	26.147.900	12	77.150.300	7	27.605.700	17	95.709.600
24.	RS. Titian Bunda	67	80.585.394	94	115.352.300	88	104.532.700	25	52.568.400	46	104.322.100
25.	RS. Rosela	9	22.144.400	14	18.444.500	49	84.907.300	27	95.467.500	19	61.057.200
26.	RS Amanda	0	0	0	0	0	0	28	75.540.200	356	850.658.700
27.	RS Khusus Paru	0	0	0	0	0	0	6	48.159.400	352	806.858.400
28.	RS Sentral Medika	0	0	0	0	0	0	67	164.027.000	46	106.966.700
29.	RS Primaya	0	0	0	0	0	0	11	56.902.900	7	28.825.900
30.	RS Hermina Karawang	0	0	0	0	0	0	33	178.565.388	19	111.566.200
31.	RS Permata Keluarga	0	0	0	0	0	0	0	0	6	8.296.900
32.	Puskesmas Kota Baru	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.400.000
33.	RS dr Salamun	0	0	0	0	0	0	0	0	1	21.906.500

NO.	RUMAH SAKIT	2018		2019		2020		2021		2022	
		Jumlah Kunjungan Pasien	Total Biaya Rp	Jumlah Kunjungan Pasien	Total Biaya Rp	Jumlah Kunjungan Pasien	Total Biaya Rp	Jumlah Kunjungan Pasien	Total Biaya Rp	Jumlah Kunjungan Pasien	Total Biaya Rp
34	RSIA Bunda Fathia	0	0	0	0	0	0	0	0	5	10.529.700
	<b>Jumlah</b>	<b>13.337</b>	<b>17.338.742.419</b>	<b>11.235</b>	<b>18.956.049.683</b>	<b>9.924</b>	<b>18.565.422.482</b>	<b>9.129</b>	<b>20.630.049.185</b>	<b>11.251</b>	<b>23.232.715.383</b>

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang 2022

Sedangkan, pada tahun 2022 mengalami kenaikan jumlah kunjungan menjadi 11.251 dan kenaikan jumlah dana klaim yang dibayarkan untuk pembiayaannya sebesar Rp 23.232.715.383,-. Jumlah Peserta Jamkesda masih berdasarkan pada SK Bupati Nomor : 585/Kep.645-Huk/2010 tentang peserta program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Karawang, dan sampai dengan saat ini masih belum menggunakan SK yang terbaru. Dalam Tabel 2.107 juga terlihat bahwa jumlah masyarakat yang memanfaatkan sistem jaminan kesehatan yaitu seluruh masyarakat yang mendaftar kepesertaan Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan.

Pelayanan terhadap penduduk miskin ini selain dilaksanakan oleh RSUD Kabupaten Karawang juga melibatkan beberapa rumah sakit swasta di Kabupaten Karawang maupun di luar Kabupaten Karawang untuk menangani pasien miskin dengan tarif yang sama dan sesuai dengan tarif pelayanan masyarakat miskin yang dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Karawang.

Upaya promotif untuk meningkatkan derajat kesehatan adalah mengedukasi masyarakat melalui Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat melalui Posyandu, Poskesdes dan Posbindu. Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat dan bersama masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar, utamanya mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Pelayanan kesehatan dasar yang diberikan di Posyandu yaitu kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, pemberantasan penyakit menular dengan imunisasi, penanggulangan diare dan gizi yang dilakukan melalui penimbangan balita. Sasaran penduduk posyandu adalah ibu hamil, ibu menyusui, pasangan usia subur dan balita. Tempat pelaksanaan pelayanan program terpadu dilaksanakan di balai dusun, balai kelurahan, kantor RW.



**Tabel 2.108**  
**Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan**  
**pada Tahun 2018-2022**

NO	INDIKATOR	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Desa Siaga Aktif	309	309	309	309	309
2.	Persentase Rumah Tangga yang ber PHBS (%)	53,5	59.06	56,13	60,09	60,93
3.	Persentase Sekolah yang ber PHBS (%)	84,34	85.46	84,19	85,76	76,59
4.	Persentase Fasilitas Umum yang ber PHBS (%)	44,05	45.50	57,47	60,15	42,27
5.	Jumlah Poskesdes Aktif	89	89	89	102	102
6.	Jumlah Posyandu Purnama	776	972	1.177	1226	1335
7.	Jumlah Posyandu Mandiri	163	215	229	369	448

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang 2022

Target persentase cakupan desa siaga aktif di Kabupaten Karawang pada tahun 2022 adalah 100%. Untuk realisasinya 100%, sehingga capaiannya 100%. Dari 309 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Karawang seluruhnya sudah desa/kelurahan aktif. Untuk stratanya sebagai berikut:

- a. Strata pratama: 67 desa ( 21,68%);
- b. Strata madya: 203 desa (65,70%);
- c. Strata purnama: 35 desa (11,32%);
- d. Strata mandiri: 4 desa ( 1,30%).

Perencanaan kesehatan di Kabupaten Karawang masih perlu terus dioptimalkan, karena masih kurangnya regulasi baik di tingkat pusat/kementerian maupun di tingkat provinsi dan kabupaten untuk menjamin sinkronisasi atau keselarasan antara Prioritas Pusat, Prioritas Provinsi dan Kabupaten/kota. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sampai saat ini belum memiliki peraturan turunannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah terkait dengan kewenangan daerah provinsi dan kewenangan daerah kabupaten/kota di bidang kesehatan.

Ketersediaan data dan informasi yang cukup memadai dan *up to date* sangat dibutuhkan untuk masukan proses penyusunan perencanaan yang lebih baik sesuai kebutuhan agar tepat sasaran dan tepat waktu. Perencanaan, monitoring dan evaluasi dan pelaporan

diharapkan dapat lebih mudah dan efisien tepat waktu dengan menggunakan aplikasi pengelolaan data dan informasi yang handal.

### 2.1.3.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Peran dan fungsi jaringan jalan adalah sebagai sarana penghubung antar/lintas kota/kabupaten, serta kecamatan hingga desa yang ada di Kabupaten Karawang. Jaringan jalan penting untuk meningkatkan kegiatan perekonomian di daerah dan memperlancar distribusi perdagangan barang dan jasa angkutan darat, serta orang/penumpang. Mengingat pentingnya jalan ini, perlu diketahui proporsi panjang jalan dalam kondisi baik. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan baik nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Informasi mengenai proporsi panjang jalan dalam kondisi baik dapat digunakan untuk mengidentifikasi kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan.

Kondisi jalan dan jembatan di Kabupaten Karawang Tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel 2.109 sebagai berikut:

**Tabel 2.109**  
**Kondisi Jalan, Jembatan dan Pengairan/Jaringan Irigasi**  
**Kabupaten Karawang Tahun 2018-2022**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jalan Negara (Km)	73,14	73,14	73,14	51,79	2,47
2.	Jalan Provinsi (Km)	47,93	47,93	91,53	91,53	91,53
3.	Jalan Tol (Km)	37,49	37,49	37,49	40,49	40,49
4.	Jumlah total panjang jalan kabupaten (SK Bupati Karawang Nomor : 620/Kep.384-Huk/2016) (Km)	1.937,53	1.937,53	1.937,53	1.937,53	1.937,53
5.	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (Km)	837,89	835,89	835,89	1.500,209	1.319,082
6.	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi sedang (Km)	903,34	976,23	976,23	175,725	334,289
7.	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi Buruk (Km)	196,30	125,41	125,41	261,596	284,159

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
8.	Total Panjang Jalan Poros Desa (Km)	940,70	940,70	940,70	940,70	935,70
9.	Jalan Poros Desa dalam kondisi Baik (Km)	467,95	471,94	471,94	513,44	550,44
10.	Jalan Poros Desa dalam kondisi Sedang (Km)	272,87	292,96	292,96	292,96	220,96
11.	Jalan Poros Desa dalam kondisi Buruk (Km)	199,88	175,80	175,80	134,30	164,3
12.	Jumlah total jembatan kabupaten( SK Bupati Karawang Nomor : 630/Kep. 221-Huk/2018) (Bh)	541	541	541	541	541
13.	Jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik (Bh)	330	108	108	116	49
14.	Jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi sedang (Bh)	118	411	411	109	458
15.	Jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi buruk (Bh)	93	22	22	17	10
16.	Jumlah total panjang drainase kabupaten (SK Bupati Karawang Nomor : 620/Kep. 369-Huk/2016) (Km)	1.270,44	1.270,44	1.270,44	1.270,44	1.270,44
17.	Panjang drainase dalam kondisi baik (Km)	436,81	514,57	514,57	520,87	664,67
18.	Panjang drainase dalam kondisi sedang (Km)	279,14	279,14	279,14	279,14	332,20
19.	Panjang drainase dalam kondisi buruk (Km)	554,49	486,73	486,73	470,43	293,58
20.	Jumlah total panjang Saluran Pembuang Kabupaten (SK Bupati Karawang Nomor : 620/Kep. 369-Huk/2016) (Km)	1.027,68	1.027,68	1.027,68	1.027,68	1.027,68
21.	Panjang Saluran Pembuang dalam kondisi baik (Km)	671,73	880,72	880,72	947,71	1.010,55

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
22.	Panjang Saluran Pembuang dalam kondisi sedang (Km)	282,52	109,74	109,74	59,74	68,34
23.	Panjang Saluran Pembuang dalam kondisi buruk (Km)	73,44	37,23	37,23	20,23	12,83
24.	Penanganan Abrasi Pantai dan Muara (Km)	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00
25.	Penanganan Abrasi Pantai dan Muara dalam kondisi sedang (Km)	40,85	40,85	40,85	40,85	42,87

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang Tahun 2023

Panjang jaringan jalan Kabupaten Karawang berdasarkan Keputusan Bupati Karawang Nomor: 620/Kep.384-Huk/2016 adalah semula yang dalam kondisi baik pada tahun 2021 sepanjang 1.500,209 Km menjadi 1.319,082 Km pada tahun 2022. Adapun jumlah total jembatan di Kabupaten Karawang berdasarkan Keputusan Bupati Karawang Nomor 630/Kep.221-Huk/2018, pada tahun 2018 sampai tahun 2022 jumlah jembatan yaitu 541 buah. Jumlah total panjang drainase Kabupaten Karawang berdasarkan Keputusan Bupati Karawang Nomor 620/Kep.369-Huk/2016, yang dalam kondisi baik pada tahun 2021 adalah sepanjang 520,87 Km, menjadi 664,67 Km pada tahun 2022. Untuk jumlah total panjang saluran pembuang Kabupaten Karawang berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 620/Kep.369-Huk/2016, yang dalam kondisi baik pada tahun 2021 adalah sepanjang 947,71 Km dan pada tahun 2022 menjadi 1.010,55 Km.

Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum terdiri dari 2 layanan yaitu 1) Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan 2) Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik. Berikut capaian SPM Pekerjaan Umum.

**Tabel 2.110**  
**Capaian Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum di Kabupaten**  
**Karawang Tahun 2018-2022**

No.	Indikator SPM	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari (%)	22,87	24,87	26,93	84,47	85,61
2.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (%)	N/A	N/A	75,74	75,92	76,34

*Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Tahun 2022*

#### **2.1.3.4 Perumahan dan Kawasan Permukiman**

##### **2.1.3.4.1 Cakupan Pelayanan Air Minum**

Pencapaian terkait Cakupan Pelayanan Air Minum di Kabupaten Karawang dari tahun 2018 sampai tahun 2022 mengalami fluktuasi yang cenderung meningkat. Pada tahun 2022 cakupan pelayanan air minum (PDAM) di Kabupaten Karawang mencapai 21,61%.

**Tabel 2.111**  
**Cakupan Pelayanan Air Minum (PDAM) di Kabupaten Karawang**  
**Tahun 2018-2022 (%)**

No.	Uraian	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Cakupan Pelayanan Air Minum (PDAM)	22,87	24,87	26,93	21,60	21,61

*Sumber Data : PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang 2022*

##### **2.1.3.4.2 Cakupan Rumah Layak Huni**

Tabel 2.112 menyajikan rasio rumah layak huni Kabupaten Karawang tahun 2018-2022 dalam persentase. Selama tahun 2018-2021 rasio rumah layak huni Kabupaten Karawang mengalami kenaikan. Namun, pada tahun 2022 rasio rumah layak huni Kabupaten Karawang mengalami penurunan dari tahun 2021 semula 92,76% menjadi 92,09%.

**Tabel 2.112**  
**Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Karawang**  
**Tahun 2018-2022 (%)**

No.	Uraian	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Rasio Rumah Layak Huni	45,89	64,99	86,99	93,76	92,09

*Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten. Karawang 2022*

#### **2.1.3.4.3 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni**

Realisasi kinerja lingkungan sehat perumahan tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada Tabel 2.113. Berdasarkan tabel tersebut selama tahun 2018 hingga 2022 terjadi kenaikan jumlah pembangunan rumah layak huni. Tahun 2022 jumlah pembangunan rumah layak huni mencapai 1.977 unit. Sedangkan, pada tahun 2022 rehabilitasi rumah tidak layak huni (rusak ringan) bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat hanya mencapai 400 unit.

**Tabel 2.113**  
**Realisasi Kinerja Lingkungan Sehat Perumahan Tahun 2018-2022**

No.	Uraian	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah pembangunan rumah layak huni (rumah sederhana sehat) (unit)	1.062	1.237	1.425	1.619	1.977
2.	Rehabilitasi rumah tidak layak huni (rusak ringan) Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat (unit)	1.303	516	300	2.330	400

*Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karawang 2022*

Tabel 2.114 berisi informasi realisasi kinerja urusan perumahan permukiman di Kabupaten Karawang tahun 2018 hingga 2022. Tahun 2022, penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana mencapai 84 unit. Adapun, jumlah perumahan yang sudah dilengkapi dengan PSU pada tahun 2022 mencapai 23 perumahan.

Selanjutnya, pada tahun 2022 persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang ditangani mencapai 2,98%.

**Tabel 2.114**  
**Realisasi Kinerja Urusan Perumahan Permukiman di Kabupaten Karawang Tahun 2018-2022**

No.	Uraian	Satuan	Realisasi				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	unit	0	0	40	0	84
2.	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah	unit	0	0	0	9,01	0
3.	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	%	0	18,47	7,04	0	2,98
4.	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	unit	4.567	3.505	2.268	0	1.977
5.	Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Fasilitas Umum)	Perumahan	35	2	21	0	23

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karawang 2022

Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat terdiri dari 2 indikator yaitu 1) Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni dan 2) Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni, untuk indikator Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni tidak pernah dilaksanakan karena tidak ada warga yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah. Berikut Tabel 2.115 menyajikan capaian SPM perumahan rakyat. Berdasarkan tabel tersebut, pada tahun 2022 jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni mencapai 54%.

**Tabel 2.115**  
**Capaian Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat di**  
**Kabupaten Karawang Tahun 2018-2022**

No.	Indikator SPM	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	0	0 (pendataan RTLH baru dilaksanakan tahun 2019)	13,38	26,08	54
2.	Jumlah Warga Negara yang Terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (%)	0	0	0 (tidak ada program yang mengakibatkan relokasi)	0 (tidak ada program yang mengakibatkan relokasi)	0

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karawang 2022

### **2.1.3.5 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam urusan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah terbagi dalam 3 sub urusan. Ketiga sub urusan tersebut adalah ketentraman dan ketertiban umum, bencana, dan juga kebakaran. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Karawang melaksanakan 2 (dua) sub urusan, yaitu ketentraman dan ketertiban umum, dan kebakaran. Kewenangan Satpol PP Kabupaten Karawang untuk sub urusan ketentraman dan ketertiban umum, meliputi:

- 1) Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
- 2) Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/walikota.
- 3) Pembinaan PPNS kabupaten/kota.

Upaya menjaga ketentraman dan ketertiban salah satunya yaitu dengan mencukupi satuan linmas yang ada dalam masyarakat. Sampai dengan tahun 2022 rasio linmas per 10.000 penduduk



sebesar 12,51. Hal ini perlu mendapatkan perhatian karena rasio tersebut masih kecil. Penyelesaian terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban, akan memberikan rasa aman, nyaman dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Sampai dengan tahun 2022 Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan sebesar 100%. Kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karawang untuk sub urusan kebakaran, meliputi:

- 1) Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah kabupaten/kota.
- 2) Inspeksi peralatan proteksi kebakaran.
- 3) Investigasi kejadian kebakaran.
- 4) Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

**Tabel 2.116**  
**Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang**  
**Tahun 2018-2022**

No.	Uraian	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Linmas Inti	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090
2.	Jumlah Penduduk (jiwa)	2.336.009	2.353.915	2.353.915	2.468.576	2.462.492
3.	Rasio Linmas per 10.000 penduduk	13	13	13	12,51	12,54
4.	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	100	100	100	100
5.	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	0	0	0 (tidak ada warga yang terkena dampak akibat penegakan perda)	tidak ada warga yang terkena dampak akibat penegakan perda	tidak ada warga yang terkena dampak akibat penegakan perda

Sumber: Kantor Satpol PP dan BPBD Kabupaten Karawang 2022

Sub urusan kedua dalam urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat adalah kebencanaan. Adapun kewenangannya adalah Penanggulangan bencana kabupaten/kota.

Selain itu, sub urusan kebencanaan ini juga memiliki target yang harus dipenuhi dalam standar pelayanan minimal kebencanaan. Terdapat 3 (tiga) indikator yang harus dicapai targetnya, yaitu (1) Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana; (2) Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan (3) Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Target yang dicanangkan untuk ketiga indikator SPM ini tiap tahunnya adalah 100%. Tabel 2.117 menyajikan capaian kinerja BPBD di Kabupaten Karawang tahun 2018 hingga tahun 2022. Selama periode tahun tersebut capaian kinerja BPBD di Kabupaten Karawang selalu mencapai 100%.

**Tabel 2.117**  
**Capaian Kinerja BPBD di Kabupaten Karawang**  
**Tahun 2018-2022**

No.	Uraian	Satuan	Realisasi				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	100
2.	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100	100
3.	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100
4.	Persentase Korban Bencana yang mendapatkan logistik tanggap darurat	%	100	100	100	100	100
5.	Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Pasca Bencana Lingkup Kabupaten	%	100	100	100	100	100

No.	Uraian	Satuan	Realisasi				
			2018	2019	2020	2021	2022
6.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPBD Kabupaten Karawang 2022

### 2.1.3.6 Sosial

Urusan sosial menurut Undang-Undang nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah terbagi atas 6 sub urusan, yaitu Pemberdayaan Sosial, Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Penanganan Bencana, dan Taman Makam Pahlawan. Sub urusan pemberdayaan sosial mencakup 1) kewenangan Pemberdayaan sosial KAT; 2) Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah kabupaten/kota; 3) Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah kabupaten/kota; dan 4) Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah kabupaten/kota. Indikator yang menjawab kewenangan ini antara lain Persentase PSKS yang diberdayakan, sampai dengan tahun 2021 baru sebesar 95% PSKS yang diberdayakan.

Sub urusan kedua yakni Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dengan kewenangan pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke Desa/kelurahan asal. Indikator untuk kewenangan yaitu Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani. Capaian sampai dengan tahun 2021-2022 capaiannya sebesar 100%, capaian tersebut merupakan yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir.

Sub urusan ketiga adalah terkait Rehabilitasi Sosial, dengan kewenangan Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum. Implementasi dari kewenangan ini adalah diterbitkannya Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang

Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota. Dalam peraturan tersebut jelas indikator yang perlu dicapai targetnya adalah terkait dengan pelayanan rehabilitasi sosial di luar panti. Adapun indikator yaitu Persentase PPKS anak terlantar memperoleh rehabilitasi sosial dasar di luar panti dengan capaian pada tahun 2022 sebesar 99,97%; Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti dengan capaian pada tahun 2022 sebesar 93%; Persentase Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti dengan capaian pada tahun 2022 sebesar 100%; Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti dengan capaian pada tahun 2022 sebesar 100%.

Sub kewenangan keempat yaitu Perlindungan dan Jaminan Sosial. Adapun kewenangan untuk sub urusan ini yaitu pemeliharaan anak-anak terlantar, dan Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah kabupaten/kota. Salah satu indikator yang menjawab kewenangan ini adalah persentase data fakir miskin yang terupdate, sampai dengan tahun 2022 sebesar 59,87%.

Sub kewenangan kelima yakni Penanganan Bencana. Penanganan bencana di urusan sosial ini berbeda dengan penanganan bencana pada urusan ketentraman dan ketertiban umum. Penanganan bencana di urusan sosial lebih diarahkan pada penanganan kondisi psikososial korban bencana. Capaian indikator Persentase penduduk korban bencana yang mendapat perlindungan sosial sampai dengan tahun 2022 sebesar 100%. Capaian untuk indikator Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah sampai dengan tahun 2022 sebesar 100%.

Sub kewenangan terakhir dari urusan sosial adalah pengelolaan Taman Makam Pahlawan, meliputi segala bentuk pemeliharaan, pembangunan dan pelayanan pemakaman bagi pahlawan. Sampai dengan tahun 2022, Persentase Taman Makam Pahlawan memenuhi standar sebesar 100%.

**Tabel 2.118**  
**Capaian Kinerja Urusan Sosial di Kabupaten Karawang**  
**Tahun 2018-2022**

No.	Uraian	Satuan	Realisasi				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase PPKS anak terlantar memperoleh rehabilitasi sosial dasar di luar panti	%	23,38	19	58,01	100	99,97
2.	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	2,82	7,19	18,76	99,47	93
3	Persentase Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	%	25,86	10,78	4,87	68,37	100
4	Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	0,92	0,89	6,4	84,82	100
5	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani	%	39,47	46,05	52,77	100	100
6	Persentase data fakir miskin terupdate	%	50	50	60	100	59,87

No.	Uraian	Satuan	Realisasi				
			2018	2019	2020	2021	2022
7	Persentase penduduk korban bencana yang mendapat perlindungan sosial	%	100	100	100	100	100
8	Persentase Taman Makam Pahlawan memenuhi standar	%	100	100	100	100	100
9	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Karawang 2022

### 2.1.3.7 Tenaga Kerja

Terdapat 4 sub urusan dalam urusan ketenagakerjaan yang termuat dalam undang-undang 23 tahun 2014. Keempat sub urusan tersebut adalah Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Penempatan Tenaga Kerja, Hubungan Industrial, dan Pengawasan Ketenagakerjaan. Namun untuk sub urusan Pengawasan Ketenagakerjaan tidak menjadi kewenangan kabupaten/kota. Sub urusan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja memiliki kewenangan:

- 1) Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi.
- 2) Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta.
- 3) Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja.
- 4) Konsultansi produktivitas pada perusahaan kecil.
- 5) Pengukuran produktivitas tingkat Daerah kabupaten/kota.

Sub urusan kedua yaitu penempatan tenaga kerja. Kewenangan dari sub urusan ini meliputi:

- 1) Pelayanan antar kerja di Daerah kabupaten/kota
- 2) Penerbitan izin LPTKS dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota.
- 3) Pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah kabupaten/ kota.
- 4) Perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah kabupaten/ kota.
- 5) Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota.

Sub urusan ketiga adalah hubungan ketenagakerjaan, dengan 2 (dua) kewenangan, yaitu:

- 1) Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota, dan
- 2) Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah kabupaten/kota

**Tabel 2.119**  
**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Karawang**  
**Tahun 2018-2022**

No.	Uraian	Satuan	Realisasi				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	%	64,77	63,62	64,9	64,19	65,51
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	9,05	9,61	11,52	11,83	9,87
3.	Pencari Kerja yang Ditempatkan	Orang	31.125	36.380	35.610	12.863	9.717
4.	Pencari Kerja terdaftar	Orang	40.898	42.558	42.125	36.934	27.400

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang 2022

Selama periode tahun 2018 hingga 2022, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mengalami fluktuasi, tahun 2021 sebesar 64,19% pada tahun 2022 meningkat menjadi 65,51%. Jumlah pencari kerja

yang ditempatkan pada tahun 2022 hanya mencapai 9.717 orang. Sedangkan pencari kerja terdaftar pada tahun 2022 mencapai 27.400.

#### **2.1.3.8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Pemberdayaan perempuan dalam pembangunan memegang peranan penting dan strategis seperti bidang parlemen, tenaga manajer, profesi, administrasi, teknis dan mendapat kesempatan dalam berbagai lapangan pekerjaan. Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender. Untuk mengetahui peran aktif perempuan dapat diukur dari indeks pemberdayaan gender, partisipasi perempuan di lembaga pemerintah maupun swasta, besarnya angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Sedangkan untuk pembangunan di bidang anak diukur melalui Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

##### **2.1.3.8.1 Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan**

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Kabupaten Karawang diwakili dengan persentase Pegawai Negeri Sipil perempuan yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang. Berdasarkan data tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 diketahui bahwa Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan mengalami fluktuasi dan cenderung turun. Pada tahun 2018 sebesar 1,72%, lalu mengalami penurunan menjadi 0,54% pada tahun 2022. Jumlah perempuan di lembaga pemerintah tahun 2022 mencapai 5.115 orang. Sedangkan jumlah pekerja perempuan tahun 2022 sebanyak 368.701 orang. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.120 berikut.



**Tabel 2.120**  
**Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah**  
**Kabupaten Karawang Tahun 2018-2022**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Perempuan di Lembaga Pemerintah (orang)	5.489	5.500	5.500	5.239	5.115
2	Perempuan di Lembaga Pemerintah (persen)	1,72	0,48	N/A	1,05	0,54
3	Jumlah Pekerja Perempuan	319.391	333.935	333.017	344.079	368.701

Sumber: DP3A Kabupaten Karawang Tahun 2022

#### **2.1.3.8.2 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan**

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan adalah jumlah angkatan kerja perempuan dibagi dengan jumlah penduduk usia kerja perempuan dikalikan 100 persen. Berdasarkan data pada Tabel 2.122, dapat diketahui bahwa Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan mengalami fluktuasi dan cenderung konstan. Pada tahun 2018, Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan sebesar 86,03%. Lalu, Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 20,71%. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Karawang disajikan pada Tabel 2.121 di bawah ini.

**Tabel 2.121**  
**Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di**  
**Kabupaten Karawang Tahun 2018-2022 (%)**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	43,51	43,29	44,29	44,47	20,71

Sumber: DP3A Kabupaten Karawang Tahun 2022

#### **2.1.3.8.3 Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)**

Pemerintah Indonesia mengapresiasi pembangunan di bidang anak dalam wujud Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) merupakan kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat,

dunia usaha dan media, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak. Pada tahun 2019 Kabupaten Karawang memperoleh penghargaan Kabupaten Layak Anak dengan Predikat Pratama. Sedangkan untuk tahun 2020 tidak diselenggarakan karena pandemi COVID-19. Untuk Capaian Nilai Evaluasi Kota Layak Anak Kabupaten Karawang Tahun 2022 sebesar 652,2 dan Persentase Nilai Indikator KLA yang terpenuhi tahun 2022 sebesar 65,22.

**Tabel 2.122**  
**Nilai Evaluasi Kota Layak Anak di Kabupaten Karawang**  
**Tahun 2018-2022**

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Capaian Nilai Evaluasi Kota Layak Anak	605,45	729,86	Tidak diselenggarakan	702,34	652,2
2.	Persentase Nilai Indikator KLA yang terpenuhi	60,55	72,98	Tidak diselenggarakan	69,78	65,22

*Sumber: DP3A Kabupaten Karawang 2022*

#### **2.1.3.8.4 Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak**

Rasio Perempuan korban kekerasan dan TPPO (per 1.000 perempuan) yang dilaporkan masih sangat rendah. Hal tersebut dapat terjadi karena masih banyak masyarakat yang belum melaporkan kepada pihak yang berwajib jika ada kekerasan dalam rumah tangga yang dialami. Mungkin juga karena tidak tahu harus melapor kemana. Atau bisa juga persepsi masyarakat yang menganggap masalah KDRT ini sebagai masalah pribadi rumah tangga yang tidak perlu ikut campur dari orang lain apalagi dilaporkan. Sehingga kebanyakan korban KDRT tidak berani bicara secara terbuka dimungkinkan karena terbentur masalah aib, biaya dan waktu. Tabel 2.123 menyajikan persentase dan rasio perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Karawang tahun 2018 hingga tahun 2022.

Persentase perempuan dan anak korban kekerasan dan TPPO yang terlayani sesuai dengan standar pada tahun 2018, 2019-2022 mencapai 100 kecuali tahun 2019 hanya mencapai 97,72%. Rasio perempuan korban kekerasan dan TPPO (per 1000 perempuan) pada tahun 2022 sebesar 0,05.

**Tabel 2.123**  
**Persentase dan Rasio Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Karawang Tahun 2018-2022**

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan dan TPPO yang terlayani sesuai dengan standar	100	97,72	100	100	100
2.	Rasio Perempuan korban kekerasan dan TPPO (per 1000 perempuan)	0,02	0,06	0,05	0,06	0,05

*Sumber: DP3A Kabupaten Karawang 2022*

#### **2.1.3.9 Pangan**

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang No.7 Tahun 1996 yang kemudian direvisi melalui Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Dalam Undang-undang tersebut disebutkan bahwa Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, serta negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan.

### 2.1.3.9.1 Ketersediaan Pangan Utama

Urusan kewenangan bidang pangan bagi pemerintah Kabupaten Karawang menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari 4 sub uruan yaitu: (1) penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian; (2) penyelenggaraan ketahanan pangan; (3) penanganan kerawanan pangan dan (4) keamanan pangan. Pemerintah daerah berkewajiban menyelenggarakan ketersediaan pangan, peningkatan akses pangan dan pemenuhan pangan secara aman dan merata termasuk bagi masyarakat miskin/rentan. Penyelenggaraan urusan pangan adalah ketersediaan pangan, akses pangan dan pemanfaatan pangan serta pemenuhan pangan dan gizi secara merata dan berkelanjutan sesuai arah kebijakan pangan dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 dan pencapaian Agenda ke Dua dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Kabupaten Karawang merupakan salah satu daerah “surplus produksi beras”, maka peningkatan ketahanan pangan diketahui berdasarkan ketersediaan bahan pangan terutama beras tahun 2022 sebanyak 91,036 ton. Rata-rata ketersediaan pangan pokok per kapita/ per tahun sebesar 118,01 kg pada tahun 2022 termasuk cukup baik. Perincian ketersediaan pangan dari tahun 2018 hingga tahun 2022 dikemukakan pada Tabel 2.124 sebagai berikut:

**Tabel 2.124**  
**Ketersediaan Pangan Utama di**  
**Kabupaten Karawang Tahun 2018-2022 (kg)**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Ketersediaan pangan utama (kg/jiwa/tahun)	736,815	192,150	194,480	182,640	118,01

*Sumber: LPPD Kabupaten Karawang 2022*

Dalam rangka pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Karawang diketahui berdasarkan lima indikator yaitu energi bahan makanan, angka kecukupan gizi, jumlah cadangan pangan daerah, jumlah daerah rawan pangan (desa), dan daerah rawan pangan yang

ditangani. Berdasarkan Tabel 2.124, ketersediaan pangan utama di Kabupaten Karawang Tahun 2022 sebesar 118,01 kg. Pemenuhan kebutuhan pangan pokok (terutama beras) menunjukkan peningkatan yang baik dari 2018 sebesar 123,13% meningkat menjadi sebesar 133,5% pada tahun 2022. Angka kecukupan gizi (AKE) selama tiga tahun berturut-turut mengalami penurunan yaitu pada tahun 2018 hingga tahun 2020. Lalu, mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi 134,48% dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi sebesar 100,7%. Pada tahun 2022, jumlah daerah rawan pangan yang ditangani sebanyak 9 desa dari 20 desa yang termasuk ke dalam daerah rawan pangan. Gambaran capaian kinerja pengembangan ketahanan pangan dari tahun 2018 hingga tahun 2022 pada Tabel 2.125 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.125**  
**Pembangunan Ketahanan Pangan di Kabupaten Karawang**  
**Tahun 2018-2022**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Energi bahan makanan (AKG) *)	%	123,13	132,78	116,81*	-	133,5
2.	Angka kecukupan gizi (AKE) *)	%	141,42	138,39	119,20*	134,48	100,7
3.	Jumlah cadangan pangan	Ton	79,95	88,22	30,06	57,6	91,036
4.	Jumlah daerah rawan pangan yang ditangani	Desa	6	12	12	9	9
5.	Jumlah daerah rawan pangan	Desa	10	12	20	20	20

Sumber : Dinas Pangan Kabupaten Karawang Tahun 2022

Keterangan :\*) Berdasarkan Data NBM Tahun Sebelumnya (T-1)

### 2.1.3.10 Pertanian

Urusan Pertanian berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terbagi atas 6 sub urusan yaitu 1) izin lokasi); 2) sengketa tanah garapan; 3) Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan; 4) Subyek dan Obyek

Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee; 5) Tanah Ulayat; 6) Tanah Kosong; 7) izin membuka lahan; dan 8) penggunaan tanah. Berdasarkan Tabel 2.126 capaian persentase luas lahan bersertifikat di Kabupaten Karawang sebesar 39,39.

**Tabel 2.126**  
**Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kabupaten Karawang**  
**Tahun 2018-2022**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Luas Lahan Bersertifikat (persen)	11,63	11,96	Tidak menjadi indikator LPPD	Tidak menjadi indikator LPPD	39,39

*Sumber: LPPD 2022 Kabupaten Karawang*

#### **2.1.3.11 Lingkungan Hidup**

Capaian kinerja urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang diukur berdasarkan 10 indikator yang telah ditetapkan, yaitu: 1) Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terkait Izin Lingkungan dan Izin PPLH; 2) Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air; 3) Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara; 4) Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan dan Izin PPLH di Lokasi Dunia Usaha dan Dampaknya di Daerah; 5) Persentase Sekolah yang Mendapat Penghargaan ADIWIYATA (Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan); 6) Operasional TPA Terkelola dengan Baik Di Kabupaten Karawang; 7) Jumlah Kelompok Masyarakat yang Bersama PEMDA yang Terlibat Dalam Melaksanakan 3R (Reduce,Reuse,Recycle) dan Bank Sampah; 8) Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R dan Bank Sampah; 9) Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R dan Bank Sampah; 10) Tersusunnya Status Lingkungan Hidup Daerah ( SLHD )

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Dalam IKLH terdapat 3 komponen atau indikator pembentuk yaitu: 1) Indeks Kualitas Air (IKA); 2) Indeks Kualitas Udara (IKU); dan 3) Indeks Kualitas Lahan (IKL). IKLH Kabupaten Karawang selama kurun waktu

5 tahun (2018-2022) mengalami trend fluktuatif yang cenderung menurun. Pada tahun 2018 IKLH Kabupaten Karawang sebesar 53,65 mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 47,89 dan kembali menurun pada tahun 2021 menjadi 44,80. Sementara itu, capaian IKLH tahun 2022 sebesar 44,92. Untuk indeks kualitas air juga mengalami penurunan, dari 69,38 pada tahun 2018 menjadi 35,90 pada tahun 2022. Capaian indeks kualitas udara di Kabupaten Karawang cenderung mengalami peningkatan, dari 63,00 tahun 2018 menjadi 63,58 pada tahun 2022.

Setiap ada pengaduan terhadap permasalahan lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang selalu menangannya dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan dan Izin PPLH di Lokasi Dunia Usaha dan Dampaknya di Daerah dari tahun 2018 sampai tahun 2022 mencapai 100%.

Pencapaian indikator sekolah yang mendapat penghargaan ADIWIYATA (Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan) tahun 2018 sebesar 57,25 dan naik menjadi 66,67 tahun 2022. Untuk operasional TPA terkelola dengan baik cenderung konstan dari tahun 2018 sebesar 100% hingga tahun 2022. Peningkatan ini berbanding lurus dengan capaian indikator persentase Jumlah sampah yang terkurangi 3R, dari 10% pada tahun 2018 menjadi 20% pada tahun 2020. Namun kembali mengalami penurunan menjadi 2,5% pada tahun 2022. Selengkapnya capaian kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada Tabel 2.127 berikut:

**Tabel 2.127**  
**Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup di Kab. Karawang**  
**Tahun 2018-2022**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terkait Izin Lingkungan dan Izin PPLH	%	100	100	100	100	100
2.	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	Indeks	69,38	40,22	44,20	37,78	35,90

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
3.	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	Indeks	63,00	68,58	70,05	61,55	63,58
4.	Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan dan Izin PPLH di Lokasi Dunia Usaha dan Dampaknya di Daerah	%	100	100	100	100	100
5.	Persentase Sekolah yang Mendapat Penghargaan ADIWIYATA (Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan)	%	57,25	64,51	56,67	56,67	66,67
6.	Operasional TPA Terkelola dengan Baik Di Kabupaten Karawang	%	100	100	100	100	100
7.	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Bersama PEMDA yang Terlibat Dalam Melaksanakan 3 R ( <i>Reduce, Reuse, Recycle</i> ) dan Bank Sampah	Kelompok	27	36	55	92	102
8.	Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R dan Bank Sampah	%	10	18	20	9,6	2,5
9.	Tersusunnya RPPLH Kabupaten Karawang	Dokumen	0	0	0	0	0
10.	Tersusunnya Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD )	Dokumen	1	1	0	0	1
11.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	53,65	47,89	50,61	44,80	44,92
12.	Terlaksananya pengelolaan sampah	%	43,63	45,26	47,83	47,94	51,94

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang 2022

### 2.1.3.12 Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pemerintah Daerah dalam pembangunan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan kabupaten terbagi dalam 4 sub urusan, yaitu:



1. Pendaftaran Penduduk, dengan kewenangan pelayanan pendaftaran penduduk.
2. Pencatatan Sipil, dengan kewenangan pelayanan pencatatan sipil.
3. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dengan kewenangan:
  - a) Pengumpulan data kependudukan.
  - b) Pemanfaatan dan penyajian database kependudukan kabupaten/kota.
4. Profil Kependudukan, dengan kewenangan Penyusunan profil kependudukan kabupaten/kota.

Berdasarkan Tabel 2.128, selama periode tahun 2018 hingga 2022, Kabupaten Karawang memiliki database kependudukan skala Kabupaten.

**Tabel 2.128**  
**Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten di Kabupaten Karawang Tahun 2018-2022**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Ketersediaan database kependudukan skala Kabupaten	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang Tahun 2022*

Berikut ini tabel 2.129 menyajikan data dan informasi kependudukan di Kabupaten Karawang tahun 2018 hingga 2022. Tahun 2022 jumlah penduduk di Kabupaten Karawang mengalami kenaikan. Jumlah dokumen hasil administrasi kependudukan di Kabupaten Karawang pun bertambah.

**Tabel 2.129**  
**Data dan Informasi Kependudukan di Kabupaten Karawang Tahun 2018-2022**

No	Data Dan Informasi	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Penduduk	2.271.960	2.323.738	2.361.019	2.406.895	2.462.492
2.	Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran (Usia 0-18 Tahun)	1.379.780	1.482.333	1.503.126	1.578.900	702.589
3.	KTP-el	178.900	216.578	294.245	197.231	164.215

No	Data Dan Informasi	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
4.	Kartu Identitas Anak (KIA)	578	30.360	110.608	80.806	62.125
5.	Jumlah Penduduk Wajib KTP-el	1.651.880	1.701.741	1.685.951	1.774.505	1.778.248
6.	Kartu Keluarga	141.320	130.804	128.065	187.663	257.905
7.	Surat Ket. Tempat Tinggal (SKTT)	1.243	876	717	358	1.154
8.	Surat Ket. Pindah Luar Daerah (SKPWNI)	22.349	20.870	17.290	21.596	23.405
9.	Surat Ket. Datang Luar Daerah (SKDWNI)	27.050	27.510	17.053	29.102	33.945
10.	Surat Ket. Datang Luar Negeri (SKDLN)	179	198	93	70	111

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang Tahun 2022

### 2.1.3.13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Berdasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa terbagi menjadi 4 sub urusan, yaitu:

1. Penataan desa, dengan kewenangan penyelenggaraan penataan desa.
2. Kerjasama desa, dengan kewenangan fasilitasi kerja sama antar desa dalam 1 (satu) kabupaten.
3. Administrasi pemerintahan desa, dengan kewenangan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa.
4. Lembaga kemasyarakatan dengan kewenangan:
  - a. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa.

b. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat desa. Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karawang yaitu Persentase PKK Aktif. Berdasarkan Tabel 2.130, persentase PKK Aktif di Kabupaten Karawang tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mencapai 100%.

**Tabel 2.130**  
**Persentase PKK Aktif di Kabupaten Karawang**  
**Tahun 2018-2022**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase PKK Aktif (%)	99,20	100	100	100	100

*Sumber: DPMD Kabupaten Karawang Tahun 2022*

#### 2.1.3.13.1 Persentase Status Desa

Tabel 2.131 menyajikan persentase status desa di Kabupaten Karawang. Berdasarkan tabel tersebut, capaian persentase peningkatan status desa mandiri pada tahun 2022 mencapai 36,36% atau sebanyak 33 desa mandiri. Sementara persentase pengentasan desa tertinggal pada tahun 2022 sebesar 100% atau sebanyak nol desa tertinggal. Pada tahun 2022 ini, Kabupaten Karawang berhasil mengentas desa tertinggal.

**Tabel 2.131**  
**Persentase Status Desa di Kabupaten Karawang Tahun 2018-2022**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase pengentasan desa tertinggal	29,03	2,41	72,72 (24 Desa Tertinggal)	16,66 (4 Desa Tertinggal)	100 (0 desa tertinggal di karawang)
2	Persentase peningkatan status desa mandiri	50	0	200	300 (Tahun 2020 ada 4 Desa Mandiri sedangkan Tahun 2021 ada 12 Desa Mandiri)	36,36 (33 desa mandiri)

*Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Karawang, 2022*

#### 2.1.3.14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu strategi untuk mengurangi kematian ibu khususnya ibu dengan kondisi 4T; terlalu muda melahirkan (di bawah usia 20 tahun), terlalu sering melahirkan, terlalu dekat jarak melahirkan, dan terlalu tua melahirkan (di atas

usia 35 tahun). Selain itu, program KB juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Selain itu, KB juga merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan ketahanan keluarga, kesehatan, dan keselamatan ibu, anak, serta perempuan.

Sasaran pelaksanaan program KB yaitu Pasangan Usia Subur (PUS). PUS adalah pasangan suami-istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun. Peserta KB Aktif adalah PUS yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi tanpa diselingi kehamilan.

**Tabel 2.132**  
**Prevalensi Peserta KB Aktif di Kabupaten Karawang**  
**Tahun 2018-2022**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Prevalensi Peserta KB Aktif (%)	72,02	73,48	71,81	72,07	70,02
2.	Jumlah Peserta Program KB Aktif (orang)	354.735	378.050	387.644	396.531	301.049
3.	Jumlah Pasangan Usia Subur	492.518	514.526	539.815	551.621	430.811

*Sumber: Keluarga Berencana Kabupaten Karawang 2022*

Tabel 2.132 menjelaskan prevalensi peserta KB Aktif di Kabupaten Karawang. Prevalensi Peserta KB aktif di Kabupaten Karawang selama periode tahun 2018 sampai tahun 2022 mengalami fluktuasi dan cenderung menurun. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan prevalensi Peserta KB Aktif menjadi 73,48%. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 71,81% dan kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 72,07%. Capaian prevalensi peserta KB Aktif tahun 2022 mengalami penurunan kembali menjadi sebesar 70,02%.

### 2.1.3.15 Perhubungan

Tabel 2.133 menyajikan data dan informasi perhubungan di Kabupaten Karawang selama tahun 2018 hingga 2022. Untuk capaian persentase jaringan trayek dari 55 jaringan trayek sesuai dengan keputusan bupati nomor 551.21/KEP.510-HUK/2009 tentang jaringan trayek, pada tahun 2022 kendaraan angkutan penumpang umum di wilayah Kabupaten Karawang yang aktif ada 28 jaringan trayek sehingga capaiannya menjadi 50,91%. Capaiannya menurun dari tahun 2021 karena investor belum minat dengan jaringan trayek yang ada dan regulasi di atasnya memungkinkan untuk angkutan daring dapat beroperasi di jalan kabupaten. Persentase kepatuhan para pemilik kendaraan merupakan persentase kepatuhan pemilik kendaraan bermotor untuk uji berkala di UPTD Pengujian Kendaraan bermotor. Pada tahun 2022, persentase kepatuhan para pemilik kendaraan mencapai 103,8% meningkat dari tahun 2021 sebesar 98,9%.

Persentase penurunan kemacetan baru dilaksanakan pengukurannya di tahun 2019 dengan capaian 43%. Sedangkan pada tahun 2022, persentase penurunan kemacetan mencapai 43,5%. Ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan, diantaranya berupa rambu, paku jalan, delineator, RPPJ, cermin tikungan, marka jalan, halte, pagar pengaman jalan, APILL. Pada tahun 2018 persentase sarana dan prasarana perhubungan sebesar 45,45% meningkat menjadi 117,43% pada tahun 2022.

**Tabel 2.133**  
**Data dan Informasi Perhubungan di Kabupaten Karawang**  
**Tahun 2018-2022 (%)**

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Jaringan Trayek	60	63,63	63,63	63,63	50,91
2	Persentase Kepatuhan Para Pemilik Kendaraan	74,89	74	98,9	98,9	103,8
3	Persentase Penurunan Kemacetan	-	43	43	42,3	43,5

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
4	Persentase sarana dan prasarana Perhubungan	45,45	67	67,76	112,45	117,43

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang 2022

### 2.1.3.16 Komunikasi dan Informatika

Teknologi Informasi sangat berpengaruh dalam proses kehidupan sehari-hari. Semua aspek kehidupan itu tidak luput dari peranan dan pemanfaatan teknologi informasi. Semua bidang sangat membutuhkan manfaat dari teknologi informatika, baik untuk kepentingan pemerintah maupun swasta untuk melancarkan semua proses kegiatannya. Berkenaan dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengembangan *e-Government* terus bergulir dan berjalan sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*.

Memperhatikan meluasnya pengembangan dan penerapan teknologi informasi ini, pemerintah menaungi pengelolaannya dengan menjadikannya satu nomenklatur bidang urusan tersendiri, yaitu Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan dasar Bidang Komunikasi dan Informatika, yang mana tercantum dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah mengatur pembentukan Perangkat Daerah berupa Dinas yang menangani Urusan Komunikasi dan Informatika di Daerah, baik menjadi dinas tersendiri dengan satu urusan ataupun menjadi satu dinas yang mengampu beberapa urusan serumpun dengan Urusan Komunikasi dan Informatika, yaitu Urusan Statistik dan Urusan Persandian.

Keberadaan *website* milik pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan penyebaran informasi penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Untuk status *website* dan jumlah pameran/expo dapat dilihat pada Tabel 2.134 di bawah ini.

**Tabel 2.134**  
**Status Website Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang**  
**Tahun 2018-2022**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Website milik Pemerintah Daerah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Jumlah Pelaksanaan Pameran EXPO	1	n/a	n/a	-	1

Sumber: Diskominfo Kabupaten Karawang 2022

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa *website* milik pemerintah daerah mulai 2018 sampai 2022 dalam status “Ada”. Adapun, jumlah pelaksanaan pameran expo hanya terlaksana pada tahun 2018 dan tahun 2022. Data dan informasi komunikasi dan informatika Kabupaten Karawang tahun 2018 hingga tahun 2022 disajikan pada Tabel 2.135.

**Tabel 2.135**  
**Data dan Informasi Komunikasi dan Informatika**  
**Kabupaten Karawang Tahun 2018 - 2022**

No	Data Dan Informasi	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Nilai Setiap Indikator SPBE	2,22	3,59	3,59	3,39	3,08
	a. Kebijakan	2,12	4,00	4,00	4,10	3,2
	b. Tata Kelola	1,29	3,14	3,14	3,10	2,5
	c. Layanan	2,73	3,70	3,70	3,58	4,08
2.	Dokumen Perencanaan SPBE yang dimiliki	1	2	2	2	2
3.	Dokumen Perencanaan SPBE yang dibutuhkan	2	2	2	2	2
4.	Jumlah SKPD yang sudah memiliki website dan aplikasi online	14	20	29	29	28
5.	Jumlah SKPD	31	31	31	32	31
6.	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	75	70	60	66,62	72,65

Sumber: Diskominfo Kabupaten Karawang Tahun 2022

### 2.1.3.17 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi. Usaha kecil adalah peluang usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Sedangkan Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Sasaran Revitalisasi Koperasi menurut Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 25/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Revitalisasi Koperasi adalah mewujudkan kesadaran pengurus, pengelola dan anggota dalam mengembangkan Koperasi menjadi Koperasi Aktif; dan Koperasi yang lebih besar. Berdasarkan Tabel 2.136, pada tahun 2022 jumlah seluruh koperasi di Kabupaten Karawang sebanyak 1.719 unit koperasi dengan jumlah koperasi yang aktif sebesar 1.199 unit koperasi aktif.

**Tabel 2.136**  
**Jumlah dan Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Karawang**  
**Tahun 2018-2022**

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase Koperasi Aktif	68,08%	68,09%	65,00%	68,38%	68,90%
2.	Jumlah Koperasi Aktif	934	1.086	1.119	1.166	1.199



No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
3.	Jumlah seluruh Koperasi	1.635	1.672	1.709	1.705	1.719

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang 2022

Untuk membantu dan menjaga keberlangsungan usaha pelaku usaha mikro menghadapi tekanan akibat COVID-19, pemerintah memandang perlunya memberikan bantuan bagi pelaku usaha mikro. Istilah yang digunakan untuk menyebut bantuan ini adalah Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM). Dengan adanya BPUM pada tahun 2020 persentase UMKM sehat sebesar 98,96% meningkat 18,84% menjadi 117,80% pada tahun 2022. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.137.

**Tabel 2.137**  
**Persentase UMKM dan Koperasi Sehat di Kabupaten Karawang**  
**Tahun 2018-2022**

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase UMKM sehat	98,11	98,12	98,96	115,92	117,80
2.	Persentase koperasi sehat	68,08	68,09	76,00	68,38	68,90

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang 2022

Berdasarkan Tabel 2.138, pada tahun 2022 jumlah UMKM aktif di Kabupaten Karawang sebanyak 95.103 UMKM. UMKM tersebut terdiri dari UMKM Industri sebanyak 15.538 UMKM, UMKM Perdagangan sebanyak 59.931 UMKM, dan UMKM Jasa sebanyak 16.277 UMKM.

**Tabel 2.138**  
**Data dan Informasi UMKM di Kabupaten Karawang**  
**Tahun 2018-2022**

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah UMKM aktif	43.825	44.035	52.210	95.102	95.102
2.	Jumlah keseluruhan UMKM	44.668	44.878	52.210	95.102	95.102
	• UMKM Industri	6.071	6.281	6.469	12.562	15.538
	• UMKM Perdagangan	34.340	34.340	41.261	34.340	59.931
	• UMKM Jasa	4.257	4.275	4.471	4.257	16.277

*Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang Tahun 2022*

Pencetakan wirausaha baru merupakan salah satu usaha dalam mengembangkan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM. Tabel 2.139 menginformasikan jumlah pencetakan wirausaha baru di Kabupaten Karawang. Pada periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 jumlah pencetakan wirausaha baru menunjukkan kecenderungan yang cukup positif yaitu semakin meningkat. Kondisi ini sekaligus menurunkan tingkat pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja.

**Tabel 2.139**  
**Pencetakan Wirausaha Baru di Kabupaten Karawang**  
**Tahun 2018-2022**

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah wirausaha baru per tahun	315	457	578	698	848

*Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang 2022*

### **2.1.3.18 Penanaman Modal**

Penanaman Modal menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 memberikan pengertian penanaman modal sebagai segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia. Dengan penanaman modal dapat dicapai tujuan seperti mengembangkan industri substitusi impor untuk menghemat devisa, mendorong

ekspor non migas untuk menghasilkan devisa, alih teknologi, membangun prasarana dan pengembangan daerah tertinggal.

Nilai investasi Kabupaten Karawang pada tahun 2018 sebesar 20.023 triliun rupiah meningkat menjadi 37.194 triliun rupiah pada tahun 2022. Capaian jumlah pelayanan perizinan juga mengalami kenaikan dari 15.393 izin pada tahun 2018 naik menjadi 26.372 izin di tahun 2022. Dengan melihat capaian penanaman modal pada tahun 2022, terlihat para investor sudah mulai kembali berinvestasi semenjak terjadi pandemi COVID-19 di Indonesia. Perekonomian perlahan mulai pulih kembali. Data dan informasi penanaman modal di Kabupaten Karawang tahun 2018 hingga tahun 2022 disajikan pada Tabel 2.140.

**Tabel 2.140**  
**Data dan Informasi Penanaman Modal**  
**Di Kabupaten Karawang Tahun 2018 - 2022**

No	Data Dan Informasi	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Nilai Investasi (Triliyun Rupiah)	20.023	24.296	16.739	26.632	37.194
	a. Total realisasi investasi PMA (Rp Triliun)	11.635	21.324	14.239	18.625	28.854
	b. Total realisasi investasi PMDN (Rp Triliun)	8.388	2.972	2.500	8.007	8000
2.	Jumlah LKPM PMA dan PMDN	1.423	1.916	2.144	3.088	3.178
	a. Jumlah LKPM PMA	245	1.562	1.593	1.813	1.944
	b. Jumlah LKPM PMDN	1.178	354	551	1.275	1.234
3.	Penyerapan Tenaga Kerja PMA dan PMDN (orang)	14.543	11.319	12.524	10.839	10.549

No	Data Dan Informasi	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	a. Penyerapan tenaga kerja PMA (orang)	7.797	7.438	10.346	7.158	8.549
	b. Penyerapan tenaga kerja PMDN (orang)	6.746	3.881	2.178	3.681	2.000
4.	Jumlah Pelayanan Perizinan (izin)	15.393	5.898	5.489	6.169	26.372

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang Tahun 2022

Keterangan : Nilai Investasi tahun 2021 sampai dengan triwulan IV

### 2.1.3.19 Kepemudaan dan Olahraga

Prestasi olahraga merupakan gambaran dari keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Pasal 20 (Tentang Sistem Keolahragaan Nasional). Olahraga prestasi dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Selaras dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan peranan pemuda dan olahraga, Pemerintah Kabupaten Karawang terus melaksanakan pembinaan dan memperbaiki sarana dan prasarana keolahragaan. Tabel 2.141 menyajikan capaian kinerja peningkatan peran serta kepemudaan tahun 2018 hingga tahun 2022. Berdasarkan tabel tersebut, pada tahun 2022, jumlah organisasi pemuda yang dibina sebanyak 250 organisasi pemuda. Adapun, tahun 2024 jumlah kelompok pemuda yang dilatih sebanyak 803 kelompok pemuda dan 84 organisasi fungsional olahraga masyarakat.

**Tabel 2.141**  
**Capaian Kinerja Peningkatan Peran serta Kepemudaan**  
**Tahun 2018-2022**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Organisasi Pemuda yang dibina	N/A	237	237	245	250
2.	Jumlah Kelompok	N/A	790	790	798	803

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
	Pemuda yang dilatih					
3.	Jumlah Organisasi Fungsional Olahraga Masyarakat	N/A	80	80	82	84

Sumber: Badan Kesbangpol dan Disdikpora Kabupaten Karawang Tahun 2022

Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga tahun 2018 hingga tahun 2022 disajikan pada Tabel 2.142. Pada tahun 2022, jumlah cabang olahraga prestasi yang dibina sebanyak 52 cabang olahraga.

**Tabel 2.142**  
**Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**  
**Tahun 2018-2022**

No	Cabang Olah Raga	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah cabang olahraga prestasi yang dibina	48	49	50	52	52

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Karawang 2022

### 2.1.3.20 Kebudayaan

#### 2.1.3.20.1 Sarana Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Kabupaten Karawang mempunyai potensi kebudayaan yang cukup beragam. Hal ini ditandai dengan banyaknya jenis kesenian antara lain: seni jaipong, ketuk tilu, kliningan, calung, topeng banjet, wayang golek, egrang, barongsai, reog, ajeng/tari soja, kedok menyon dan budaya yang masih melekat dan berkembang di masyarakat Kabupaten Karawang, diantaranya: kaulinan urang lembur, babaritan, mapag cai, nadran/pesta laut, hajat bumi, nyalin, upacara ngarak pusaka, sasalimpetan, tardug, 1 Muharram/1 Suro. Namun demikian potensi tersebut masih belum terkelola dan termanfaatkan dengan baik. Padahal apabila potensi seni dan budaya ini berhasil dilestarikan, dikelola, serta dimanfaatkan dengan baik, akan berdampak kepada meningkatnya semangat masyarakat terutama generasi muda dan pelaku seni untuk lebih berperan aktif dalam melestarikan seni dan budaya asli Kabupaten Karawang.

Apabila potensi seni dan budaya ini berhasil dilestarikan, dikelola, serta dimanfaatkan dengan baik, akan berdampak kepada meningkatnya semangat masyarakat terutama generasi muda dan pelaku seni untuk lebih berperan aktif dalam melestarikan seni dan budaya asli Kabupaten Karawang. Berdasarkan Tabel 2.143, sarana penyelenggaraan seni dan budaya selama tahun 2018 hingga 2022 berjumlah 36. Jumlah penyelenggaraan pertunjukan kebudayaan tradisional lokal serta festival seni dan budaya pada tahun 2022 sebesar 22. Lalu, jumlah grup kesenian pada tahun 2022 sebesar 1.510 grup. Adapun, pada tahun 2022 jumlah sanggar budaya/seni sebanyak 56 sanggar. Capaian jumlah pelaku budaya pada tahun 2022 sebesar 2.630.

**Tabel 2.143**  
**Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya Tahun 2018-2022**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	36	36	36	36	36
2.	Jumlah penyelenggaraan pertunjukan kebudayaan tradisional lokal serta festival seni dan budaya	80	99	28	20	22
3.	Jumlah grup kesenian	900	1.138	1.368	1.408	1.510
4.	Jumlah Sanggar Budaya/Seni	23	39	56	56	56
5.	Jumlah Pelaku Budaya	13.845	13.845	14.500	14.500	2.630

*Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Karawang Tahun 2022*

Kesadaran masyarakat Kabupaten Karawang dalam mengelola kekayaan budaya cenderung meningkat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, terlihat dari bertambahnya jumlah pelaku budaya, jumlah grup kesenian dan jumlah sanggar budaya/seni. Upaya pelestarian budaya di Kabupaten Karawang diwujudkan dengan menyediakan sarana penyelenggaraan seni dan budaya, mengelola situs serta benda cagar budaya, menyelenggarakan pertunjukan kebudayaan tradisional lokal serta festival seni dan budaya, dan melakukan

pembinaan terhadap grup kesenian dan pelaku seni budaya. Kepedulian masyarakat Kabupaten Karawang terhadap pengembangan nilai budaya terlihat dari semakin meningkatnya penyelenggaraan pertunjukan kebudayaan tradisional lokal serta festival seni dan budaya dari tahun ke tahun. Hal ini didukung oleh sarana penyelenggaraan seni dan budaya yang juga bertambah jumlahnya.

### 2.1.3.20.2 Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya

Tabel 2.144 di bawah ini menunjukkan jumlah situs sejarah dan cagar budaya yang dilestarikan di Kabupaten Karawang. Berdasarkan tabel tersebut, jumlah situs sejarah dan cagar budaya yang terkelola dengan baik pada tahun 2018 sebanyak 29. Sedangkan, pada tahun 2019 hingga 2022 jumlahnya meningkat menjadi 33 situs sejarah dan cagar budaya.

**Tabel 2.144**  
**Jumlah Situs Sejarah dan Cagar Budaya di Kabupaten**  
**Tahun 2018 - 2022**

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah situs sejarah dan cagar budaya yang terkelola dengan baik	29	33	33	33	33

*Sumber: Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang 2022*

### 2.1.3.21 Statistik

Indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan urusan statistik daerah berdasarkan lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah ketersediaan dokumen perencanaan seperti Buku “Kabupaten Dalam Angka” dan Buku “PDRB Kabupaten”. Kedua dokumen di atas ada di Kabupaten Karawang, disusun oleh Badan Pusat Statistik. Penyusunan kedua buku tersebut penting kaitannya dengan keberadaan data yang digunakan sebagai rujukan dalam merancang kebijakan, dan penyusunan program kegiatan. Ketersediaan dokumen statistik tersebut selama tahun 2018 hingga tahun 2022 tercantum dalam Tabel 2.145. Selama periode tahun

tersebut, Buku Kabupaten Karawang Dalam Angka dan Buku PDRB Kabupaten Karawang selalu tersedia di Kabupaten Karawang.

**Tabel 2.145**  
**Ketersediaan Dokumen Statistik di Kabupaten Karawang**  
**Tahun 2018 - 2022**

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Buku Kabupaten Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Buku PDRB Kabupaten	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

*Sumber: BPS Kabupaten Karawang Tahun 2022*

### **2.1.3.22 Persandian**

Urusan Persandian dan Keamanan Informasi memiliki tujuan untuk mewujudkan keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik melalui tata kelola keamanan informasi yang komprehensif dan implementatif, peningkatan kesadaran keamanan informasi, peningkatan kompetensi dan kinerja SDM Keamanan informasi, terwujudnya layanan keamanan informasi yang berkualitas serta terwujudnya fungsi monitoring, evaluasi dan audit keamanan informasi yang andal dan profesional. Untuk mengukur kinerja dan urusan persandian dan keamanan informasi digunakan indeks Kematangan Keamanan Informasi yang ditetapkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Indeks Kematangan Keamanan Informasi (IKKI) yang memiliki ruang lingkup tata kelola. Pengelolaan risiko, kerangka kerja, pengelolaan asset, teknologi dan penanggulangan dan pemulihan merupakan ukuran atau nilai yang menggambarkan kesiapan, kelengkapan dan konsistensi pemerintah daerah dalam melaksanakan pengamanan informasi. Pemerintah Kabupaten Karawang menggunakan indeks Keamanan informasi (indeks KAMI) untuk mengukur indeks Kematangan Keamanan informasi (IKKI) pada tahun 2010 hingga 2018, Pemerintah Kabupaten Karawang belum memiliki capaian indeks Kematangan Keamanan Informasi



dimana hal ini disebabkan karena Dinas Komunikasi dan informatika khususnya seksi persandian dan keamanan informasi sebagai leading sektor baru berdiri pada tahun 2017. Pada tahun 2019 indeks Kematangan Keamanan informasi Kabupaten Karawang, dalam hal ini indeks KAMI berada pada Level I s/d I+ dengan Tingkat Keamanan informasi berada pada kategori Kondisi Awal. Sedangkan pada tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas Komunikasi dan informatika tidak melaksanakan assessment indeks KAMI dikarenakan kondisi pandemi COVID-19. Penjelasan Capaian indeks Kematangan Keamanan informasi (IKKI) Kabupaten Karawang tahun 2018-2022 dirinci dalam Tabel 2.146 berikut ini. Pada tahun 2022, Indeks Keamanan Informasi Kabupaten Karawang berada di Level II + s/d III. Sementara itu, tingkat keamanan informasi berada pada pemenuhan kerangka kerja dasar.

**Tabel 2.146**  
**Data Urusan Persandian di Kabupaten Karawang**  
**Tahun 2018 - 2022**

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Keamanan Informasi	NA	Is/d I+	NA	Level I + s/d III	Level II + s/d III
2	Tingkat Keamanan Informasi	NA	Kondisi Awal	NA	-	Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar

*Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang Tahun 2022*

### **2.1.3.23 Perpustakaan**

#### **2.1.3.23.1 Minat Baca Masyarakat**

Urusan bidang perpustakaan sesuai dengan kewenangan yang wajib dilaksanakan Kabupaten Karawang meliputi : (1) sub urusan pembinaan perpustakaan; (2) pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno serta (3) sertifikasi pustakawan dan (4) akreditasi pendidikan dan pelatihan perpustakaan. Capaian kinerja urusan perpustakaan dari tahun 2018 – 2022 diketahui berdasarkan indikator: persentase pengunjung perpustakaan dalam 1 tahun dibandingkan jumlah populasi yang dilayani; jumlah perpustakaan desa/kelurahan yang dibina; perpustakaan sekolah yang dibina; dan jumlah pengelolaan perpustakaan sekolah. Peningkatan jumlah pengelola perpustakaan

desa dan kelurahan meningkat sangat baik dari tahun 2018 sebanyak 50 unit menjadi 206 unit pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan peningkatan yang sangat besar. Demikian pula tentang jumlah perpustakaan sekolah yang dibina dari tahun 2018 sebanyak 50 unit meningkat sangat baik pada tahun 2022 menjadi sebanyak 326 perpustakaan sekolah. Adapun, jumlah pengelola perpustakaan desa/kelurahan ada peningkatan dari tahun 2020 sebanyak 309 unit meningkat pada tahun 2021 menjadi 311 dan jumlahnya tetap pada tahun 2022. Sedangkan jumlah pengelola perpustakaan sekolah dari tahun 2020 sebanyak 240 meningkat pada tahun 2021 menjadi 509 orang dan kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi 600 orang. Untuk lebih lengkapnya gambaran capaian kinerja urusan perpustakaan dapat dilihat pada Tabel 2.147 berikut ini.

**Tabel 2.147**  
**Data dan Informasi Perpustakaan di Kabupaten Karawang**  
**Tahun 2018- 2022**

No	Data Dan Informasi	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	NA	NA	7,56	13,34	20,51
2.	Jumlah pengelola perpustakaan desa/kelurahan yang dibina	50	200	200	203	206
3.	Jumlah pengelola perpustakaan desa/kelurahan	309	309	309	311	311
4.	Jumlah pengelola perpustakaan sekolah yang dibina	50	200	200	260	326
5.	Jumlah pengelola perpustakaan sekolah	240	240	240	509	600

*Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karawang 2022*

#### **2.1.3.23.2 Jumlah Pengunjung Perpustakaan per-Tahun**

Minat mengunjungi perpustakaan di Kabupaten Karawang secara umum jumlah pengunjung pemustaka yang berkunjung menggambarkan kecenderungan menurun dari tahun 2018 – 2020. Penurunan yang terjadi di tahun 2020 diakibatkan oleh pandemi

COVID-19. Masyarakat dibatasi untuk tidak keluar rumah. Sedangkan pada tahun 2021 hingga 2022 mengalami kenaikan. Tahun 2022 jumlah pengunjung pemustaka yang berkunjung mencapai 8.705 orang. Pada tahun 2022, jumlah pengunjung paling banyak adalah murid SD sebanyak 5.219 orang, mahasiswa sebanyak 1.242 orang dan masyarakat umum sebanyak 878 orang. Upaya promosi peningkatan pengunjung perpustakaan ditingkatkan agar persentase anak sekolah dan mahasiswa semakin banyak memanfaatkan perpustakaan. Perincian gambaran kinerja urusan perpustakaan berdasarkan indikator jumlah kunjungan pemustaka yang berkunjung dari tahun 2018 hingga tahun 2022 tercantum pada Tabel 2.148 sebagai berikut:

**Tabel 2.148**  
**Jumlah Pemustaka yang Berkunjung Tahun 2018 - 2022**

No	Data Dan Informasi	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Pemustaka yang Berkunjung	6.066	5.573	2.655	6.339	8.705
	a. SD	1.127	2082	2082	2.953	5.219
	b. SMP	765	498	498	242	480
	c. SMA	1.152	727	727	601	677
	d. Mahasiswa	1.939	1203	1203	1.695	1.242
	e. Karyawan	98	275	275	98	192
	f. Umum	898	682	682	117	878
	g. PNS	87	106	106	633	17

*Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karawang 2022*

### **2.1.3.23.3 Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah**

Upaya meningkatkan layanan perpustakaan di Perpustakaan Kabupaten Karawang antara lain dengan menambah jumlah koleksi judul buku, menambah jumlah buku, dan ketersediaan koleksi buku di perpustakaan. Peningkatan jumlah koleksi buku terdapat peningkatan yang cukup baik dari tahun 2018 sebanyak 11.658 judul buku meningkat menjadi sebanyak 18.999 judul buku pada tahun 2022. Sedangkan persentase buku yang tersedia meningkat dari 18.557 koleksi buku pada tahun 2018 meningkat cukup baik menjadi

38.100 koleksi buku pada tahun 2022. Hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah menurunnya jumlah koleksi buku dari tahun 2018 hingga tahun 2022 menunjukkan penurunan yang cukup banyak. Perincian kinerja koleksi buku perpustakaan, dikemukakan pada Tabel 2.149 sebagai berikut:

**Tabel 2.149**  
**Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah**  
**Tahun 2018 - 2022**

No	Data Dan Informasi	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah	11.658	12.498	13.856	14.455	18.999
2.	Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di perpustakaan daerah	18.557	21.637	25.846	27.913	38.100
3.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (%)	62,82	57,76	53,609	51,78	49,86

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karawang 2022

### **2.1.3.24 Kearsipan**

#### **2.1.3.24.1 Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku**

Urusan kearsipan sesuai dengan kewenangan yang diselenggarakan Kabupaten Karawang meliputi sub urusan: pengelolaan arsip, perlindungan dan penyelamatan arsip serta perizinan pemanfaatan arsip. Berdasarkan Tabel 2.148, capaian kinerja kearsipan dari tahun 2018 – 2022 berdasarkan indikator jumlah arsip yang menunjukkan perkembangan pengelolaan arsip yang di input ke Sistem Informasi Manajemen Arsip Daerah (SIM ARDA) menunjukkan capaian yang sama yaitu 1000 arsip dan indikator jumlah keseluruhan dokumen arsip sebanyak 7.800 arsip.

Untuk lebih lengkapnya gambaran capaian kinerja urusan kearsipan dapat dilihat pada Tabel 2.150 berikut ini.

**Tabel 2.150**  
**Data Kearsipan di Kabupaten Karawang Tahun 2018 - 2022**

No	Data Dan Informasi	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah dokumen arsip yang di Input ke Sistem Informasi Manajemen Arsip Daerah (SIM ARDA)	1000	1000	1000	1000	1000
2	Jumlah Keseluruhan Dokumen Arsip	7800	7800	7800	7800	7800

*Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karawang 2022*

#### **2.1.3.24.2 Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan**

Dalam pengelolaan arsip perlu ditangani oleh tenaga fungsional arsiparis. Tabel 2.151 menyajikan kondisi sumber daya kearsipan di Kabupaten Karawang selama tahun 2018 hingga tahun 2022. Pada periode tahun 2018 hingga tahun 2022 hanya terdapat satu tenaga fungsional arsiparis. Tahun 2021, tenaga fungsional arsiparis meningkat menjadi lima orang dan tahun 2022 meningkat Kembali menjadi delapan orang.

**Tabel 2.151**  
**Kondisi Sumber Daya Kearsipan di Kabupaten Karawang Tahun 2018 - 2022**

No	Data Dan Informasi	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Arsiparis	1	1	1	5	8

*Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karawang 2022*

#### **2.1.3.25 Kelautan dan Perikanan**

Dengan keluarnya UU Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, dimana terjadi perubahan kewenangan di bidang kelautan dan perikanan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten. Dampak dari dikeluarkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 di atas sangat berpengaruh terhadap Program dan Kegiatan Bidang Kelautan dan Perikanan yang ada di Kabupaten, baik dari sisi perencanaan maupun dari sisi pelaksanaannya. Jika dilihat dari perencanaan program kegiatan, masih tercantum program-program

dan kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi kewenangan Pusat maupun Provinsi, hal ini dikarenakan banyaknya kegiatan-kegiatan Pusat maupun Provinsi yang harus difasilitasi oleh Kabupaten karena Pusat maupun Provinsi belum siap dengan pelimpahan kewenangan tersebut. Dari segi pelaksanaan, banyak sekali peraturan-peraturan pemerintah yang keluar pada saat pelaksanaan kegiatan berjalan yang berdampak terhadap penyerapan anggaran.

Dinas Perikanan Kabupaten Karawang difokuskan kepada peningkatan produksi perikanan, baik perikanan budidaya maupun perikanan tangkap. Dengan meningkatnya produksi perikanan yang disertai dengan peningkatan kualitas mutunya serta didukung dengan sarana prasarana yang memadai, diharapkan pendapatan para pembudidaya ikan dan nelayan akan meningkat pula sehingga akan berdampak terhadap peningkatan daya saing produk-produk perikanan Kabupaten Karawang. Produksi perikanan budidaya memberikan sumbangan yang jauh lebih besar dibandingkan perikanan tangkap bagi produksi perikanan di Kabupaten Karawang. Berdasarkan Tabel 2.152, kenaikan produksi perikanan tangkap secara absolut lebih sedikit dibandingkan dengan kenaikan produksi perikanan budidaya selama periode tahun 2018–2022. Pada tahun 2022, garam tidak lagi menjadi kewenangan kabupaten tetapi menjadi kewenangan provinsi.

**Tabel 2.152**  
**Produksi Perikanan di Kabupaten Karawang**  
**Tahun 2018 -2022**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	44.024,95	44.477,89	44.739,98	45.246,92	45.740,75
2	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	8.871,39	8.981,98	9.062,38	9.164,27	9.266,51
3	Produksi Olahan Ikan (Ton)	36.525,08	37.049,50	53.914,00	54.624,58	51.390,55
4	Jumlah Produksi Garam Rakyat (Ton)	3.981,69	11.876,00	1.566,31	798,52	Kewenangan Provinsi

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Karawang 2022

Potensi perikanan budidaya ke depan menjadi salah satu hal yang perlu menjadi perhatian dalam pengembangan sub sektor perikanan di Jawa Barat. Peranan sub sektor perikanan terhadap perekonomian Kabupaten Karawang tidak hanya ditinjau dari aspek nilai produksi perikanan yang cenderung menggambarkan kondisi makro dari perekonomian. Namun demikian, peranan terhadap perekonomian perlu dilihat juga sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku yang terlibat dalam sub sektor perikanan.

Masyarakat perikanan merupakan ujung tombak yang terlibat dalam aktivitas perekonomian di sub sektor perikanan. Tingkat kesejahteraan masyarakat perikanan salah satunya diukur melalui pendapatan masyarakat perikanan yang menunjukkan kemampuan masyarakat perikanan untuk mengakses kebutuhan barang dan jasa yang dibutuhkan dibandingkan dengan nilai produksi yang dihasilkan. Berdasarkan rata-rata pendapatan masyarakat perikanan pada tahun 2022 terjadi kenaikan sebesar 1,70% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya program kegiatan dalam rangka pemulihan ekonomi pasca COVID-19.

**Tabel 2.153**  
**Pendapatan Masyarakat Perikanan Kabupaten Karawang**  
**Tahun 2018-2022**

<b>Uraian</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Pendapatan Masyarakat Perikanan (Rp/Tahun)	19.111.561	19.423.799	19.723.982	20.048.955	20.390.352
Persentase Rata-rata kenaikan (%)	1,62	1,63	1,52	1,65	1,70

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Karawang Tahun 2022

**Tabel 2.154**  
**Capaian Kinerja Urusan Perikanan di Kabupaten Karawang**  
**Tahun 2018-2022**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Rata-Rata Pendapatan Per Tahun (Rp)</b>				
		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
1.	Rata-rata pendapatan pembudidaya Ikan (Rp)	15.590.220	15.842.690	16.105.343	16.378.688	16.662.604

No	Uraian	Rata-Rata Pendapatan Per Tahun (Rp)				
		2018	2019	2020	2021	2022
2.	Rata-rata pendapatan nelayan (Rp)	21.520.430	21.871.730	22.226.008	22.586.500	22.951.491
3.	Rata-rata pendapatan Pengolah hasil perikanan (Rp)	20.095.400	20.427.060	20.822.187	21.161.279	21.525.760
4.	Rata-rata pendapatan petambak garam (Rp)	17.754.140	17.992.560	18.212.791	17.960.328	Kewenangan Provinsi
5.	Jumlah Konsumsi Ikan (kg)	29,35	29,66	29,86	30,06	30,48
6.	jumlah total produksi perikanan (Tangkap dan Budidaya)	52.896,34	53.459,87	53.801,00	54.411,19	55.007,24

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Karawang Tahun 2022

### 2.1.3.26 Pariwisata

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pariwisata merupakan industri jasa, berkaitan dengan transportasi, tempat tinggal, makanan, minuman, dan jasa lainnya seperti bank, asuransi, keamanan. Pariwisata menawarkan tempat istirahat, budaya, dan petualangan.

Kabupaten Karawang sebagai bagian dari keindahan alam Indonesia selalu berusaha menggali dan mengembangkan potensi wilayah dalam bidang pariwisata. Dalam rangka meningkatkan pendapatan nasional dan penciptaan lapangan kerja dan kesempatan usaha masyarakat, destinasi pariwisata dapat dikembangkan dengan seluas-luasnya. Selain itu, pariwisata juga berperan dalam pemerataan pendapatan dan mendukung perkembangan dan pelestarian seni budaya dan keindahan alam di Kabupaten Karawang. Untuk mewujudkan hal tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang telah berusaha mengeluarkan berbagai kebijakan di bidang Pariwisata untuk menarik wisatawan datang.



Kunjungan wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun nusantara merupakan barometer keberhasilan pariwisata di Kabupaten Karawang. Dengan kekayaan alam, seni dan budaya, serta ekonomi kreatif di berbagai wilayah di Kabupaten Karawang, menjadi daya tarik yang besar untuk industri pariwisata. Tabel 2.155 menyajikan data dan informasi kepariwisataan di Kabupaten Karawang tahun 2018 hingga tahun 2022.

**Tabel 2.155**  
**Data dan Informasi Kepariwisataan di Kabupaten Karawang**  
**Tahun 2018-2022**

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah kunjungan wisatawan	7.975.473	9.951.723	2.208.729	2.143.544	2.020.651
2.	Jumlah PAD sektor pariwisata (Rp)	121.486.692.046	146.906.661.373	95.781.829.648	110.048.796.385	157.517.751.005
3.	Jumlah jenis usaha kepariwisataan					
	a. Jumlah hotel (buah)	34	34	34	34	34
	b. Jumlah restoran (buah )	154	162	167	167	167
	c. Jumlah rumah makan (buah)	253	400	285	285	285
	d. Usaha pariwisata (buah)	15	15	15	15	15
4.	Jumlah ODTW unggulan yang akan dikembangkan	4	4	0	0	2
5.	Jumlah keikutsertaan pameran pariwisata	8	6	2	1	1
6.	Jumlah promosi pariwisata dan budaya melalui IT	6	8	8	8	8

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang Tahun 2022

Potensi wisata dan obyek wisata di Kabupaten Karawang diantaranya dijelaskan pada Tabel 2.156.

**Tabel 2.156**  
**Potensi Wisata di Kabupaten Karawang**

<b>Potensi Wisata</b>	<b>Objek Wisata</b>	<b>Lokasi</b>
Objek Wisata Budaya	a. Situs dikelola oleh BPCB (Balai Pelestarian Cagar Budaya) Karawang 1. Situs Batujaya, terdiri atas Situs Segaran 1 s/d 8 dan Situs Telagajaya 1 s/d 8 2. Kawasan Candi Batujaya 3. Situs Cibuaya, terdiri atas Situs Lanang dan Situs Wadon b. Kawasan Cagar Budaya 1. Makam Mantan para Bupati Karawang 2. Kawasan Kuta Tandingan 3. Patilasan Tubagus Rangin 4. Patilasan Joko Tingkir	Kec. Batujaya  Kec. Batujaya Kec. Cibuaya  Kec. Cilamaya Kulon  Kec. Ciampel Kec. Rawamerta Kec. Rawamerta
Objek Wisata Sejarah	1. Tugu Kebulatan Tekad Rengasdengklok 2. Rumah Djiouw Ki Siong 3. Monumen Rawa Gede 4. Monumen Suroto Kunto 5. Monumen Resimen V Cikampek 6. Taman Makam Pahlawan 7. Peristiwa Gunung Goong 8. Peristiwa Rawasikut 9. Peristiwa Karawang	Kec. Rengasdengklok Kec. Rengasdengklok Kec. Rawamerta Kec. Karawang Timur Kec. Cikampek Kec. Purwasari Kec. Pangkalan Kec. Telagasari Kec. Karawang Timur
Objek Wisata Tirta, berupa danau buatan dan kolam renang	1. Situ Kamojing 2. Kolam Renang Tirtasari 3. Bendungan Parisdo Walahar 4. Kolam Renang Sportif 5. Kolam Renang PD Prakasa 6. Kolam Renang Permata Rubi 7. Situ Cipule 8. Danau San Diego Hills 9. Kolam Renang PT.Bukit Muria Jaya Resinda 10. Kolam Renang Mutiara	Kec. Cikampek Kec. Kotabaru Kec. Klari Kec. Karawang Barat Kec. Karawang Barat Kec. Karawang Barat Kec. Ciampel Kec. Telukjambe Barat Kec. Telukjambe Timur  Kec. Karawang Timur Kec. Rengasdengklok Kec. Lemahabang

<b>Potensi Wisata</b>	<b>Objek Wisata</b>	<b>Lokasi</b>
	11. Kolam Renang DG'S Pool Waterboom 12. Kolam Renang PKPRI KGL 13. Kolam Renang Tirtakencana 14. Kolam Renang Tirta Ilani 15. Wahana Bermain Batu Tumpang Adventure Camp 16. Kampung Wisata Curug Cigentis 17. Waterpark Wondeland 18. Kampung Budaya Gerbang Karawang	Kec. Kotabaru Kec. Cilamaya Kulon Kec. Tegalwaru  Kec. Tegalwaru Kec. Telukjambe Timur Kec. Telukjambe Timur
Objek Wisata Alam, Berupa Alam Pegunungan dan Pantai	1. Curug Bandung 2. Curug Peuteuy 3. Curug Cigentis 4. Curug Lalay 5. Curug Cipanundaan 6. Curug Santri 7. Curug Cikoleangkak 8. Gunung Sanggabuana 9. Pantai Tanjungpakis 10. Pantai Samudra Baru 11. Pantai Tanjung Baru 12. Pantai Pasir Putih 13. Buana Wisata Cikeong 14. Green Canyon 15. Wisata Puncak Sempur 16. Wisata Pohon Pinus 17. Pantai Tangkolak dan Eko Wisata Mangrove 18. Kebon Kembang	Kec. Tegalwaru Kec. Tegalwaru Kec. Tegalwaru Kec. Tegalwaru Kec. Tegalwaru Kec. Tegalwaru Kec. Tegalwaru Kec. Tegalwaru Kec. Pakisjaya Kec. Pedes Kec. Cilamaya Kulon Kec. Cilamaya Kulon Kec. Cibuya Kec. Tegalwaru Kec. Tegalwaru Kec. Tegalwaru Kec. Cilamaya Kulon  Kec. Kotabaru
Objek Wisata Keagamaan, berupa tempat-tempat peribadatan	1. Mesjid Agung Karawang (tempat beribadah agama islam) 2. Vihara Sian Ji Kupo (tempat peribadatan agama Kong Hu Chu/Umat Budha) 3. Gereja Immanuel (tempat peribadatan agama Kristen Protestan) 4. Gereja Sion (Tempat Peribadatan agama Krsiten Katolik) 5. Candi Jiwa (tempat pemujaan agama Budha)	Kec. Karawang Barat  Kec. Karawang Barat  Kec. Karawang Barat  Kec. Karawang Barat  Kec. Batujaya  Kec. Lemahabang  Kec. Karawang Barat

Potensi Wisata	Objek Wisata	Lokasi
	6. Makam Syekh Quro (Tempat/Makam/Petilasan penyebaran agama islam) 7. Gereja Kristus Raja Karawang (tempat peribadatan agama Katholik)	
Objek Wisata Kuliner	1. Bolu Kijing 2. Opak Kawung, Nasi Tangkar, Telor Asin, Semprong Mondy 3. Pemancingan Rio 4. Kupat Tahu, Sangu Tahu/Sangtau 5. Pepes Jambal Walahar 6. Sorabi Hijau, Kerupuk Udang dan Kue Semprong 7. Saung Beureum 8. Pemancingan dan Restoran Saung Endah 9. Saung Kabayan 10. Resto Alam Sari Interchange 11. Pemancingan Ajo 12. Rumah Makan Cibiuk 13. Rumah Makan Sindang Reret 14. Restoran Lebaksari Indah 15. Telaga Resto 16. Restoran Danau Bukit Indah Alamsari 17. Opak Cibuaya	Kec. Kutawaluya Kec. Karawang Barat  Kec. Karawang Barat Kec. Karawang Barat Kec. Klari Kec. Klari Kec. Rengasdengklok Kec. Rengasdengklok Kec. Karawang Timur  Kec. Karawang Timur Kec. Telukjambe Timur Kec. Telukjambe Timur Kec. Telukjambe Timur Kec. Telukjambe Timur Kec. Telukjambe Timur Kec. Telukjambe Timur Kec. Cikampek Kecamatan Cibuaya

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang Tahun 2022

### 2.1.3.27 Pertanian

#### 2.1.3.27.1 Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan, Palawija dan Hortikultur

Kabupaten Karawang merupakan lumbung padi Jawa Barat dan salah satu daerah yang dapat memberikan kontribusi kebutuhan beras nasional, setiap tahunnya rata-rata mencapai ±1.411.330 ton GKP/tahun sampai tahun 2022. Sedangkan produktivitas padi pada tahun 2022 mencapai 72,82 Kw/Ha. Perkembangan produksi dan produktivitas padi sawah tahun 2018 hingga tahun 2022 disajikan pada Tabel 2.157.

**Tabel 2.157**  
**Perkembangan Produksi dan Produktivitas Padi Sawah**  
**Tahun 2018 - 2022**

No.	Tahun	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton GKP)	Produktivitas (Kw/Ha)
1	2018	195.353	1.531.567	78,40
2	2019	188.053	1.401.690	74,53
3	2020	184.588	1.370.802	74,26
4	2021	181.469	1.319.011	72,69
5	2022	193.816	1.411.330	72,82

*Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang 2022*

Tanaman palawija adalah tanaman lain yang ditanam untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk selain tanaman pangan. Sering disebut juga sebagai tanaman *secondary* atau tanaman kedua. Palawija sendiri menjadi pilihan bagi banyak petani untuk ditanam pada lahan persawahan atau di ladang. Dengan menanam palawija, maka masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik. Di Kabupaten Karawang, tanaman palawija yang utama adalah kedelai, kacang hijau, jagung pipilan kering, ketela pohon, dan ubi jalar.

**Tabel 2.158**  
**Produktivitas Tanaman Padi dan Palawija**  
**Tahun 2018-2022 (Kw/Ha)**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Padi Sawah	78,40	74,53	74,53	72,69	72,82
2	Kedelai	12,98	15,66	15,66	17,01	16,47
3	Kacang Hijau	10,13	9,67	9,67	-	-
4	Jagung Pipilan Kering	59,03	59,73	59,73	-	-
5	Ketela Pohon	178,05	145	145	-	-
6	Ubi Jalar	110	-	-	-	-

*Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang 2022*

Produktivitas tanaman padi dan palawija tahun 2018 hingga tahun 2022 tercantum dalam Tabel 2.158. Tahun 2022 terjadi kenaikan produktivitas padi sawah menjadi 72,82 Kw/Ha. Namun, untuk kacang kedelai mengalami penurunan menjadi 16,47 Kw/Ha. Semenjak tahun 2021 sudah tidak ada lagi produktivitas tanaman kacang hijau, jagung pipilan kering, dan ketela pohon di Kabupaten

Karawang. Sedangkan untuk ubi jalar sudah tidak ada produktivitas di Kabupaten Karawang sejak tahun 2019.

Tabel 2.159 berisikan perkembangan produksi ternak tahun 2018 hingga tahun 2022. Untuk jenis ternak populasi ternak besar tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 6.368 ekor semula tahun 2021 sebanyak 6.942 ekor. Populasi ternak kecil pun mengalami penurunan dari tahun 2021 menjadi 152.957 ekor pada tahun 2022. Sedangkan, populasi ternak unggas mengalami kenaikan menjadi 73.532.053 ekor pada tahun 2022.

**Tabel 2.159**  
**Perkembangan Produksi Ternak**  
**Tahun 2018 - 2022**

NO	Jenis Ternak	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1.	Populasi Ternak Besar (ekor)	7.136	6.878	6.907	6.942	6.368
2.	Populasi Ternak Kecil (ekor)	259.519	160.893	160.893	160.993	152.957
3.	Populasi Ternak Unggas (ekor)	14.009.315	15.273.445	72.794.756	73.152.894	73.532.053

Sumber : Dinas Pertanian dan Katahanan Pangan Kabupaten Karawang 2022

### 2.1.3.27.2 Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai tukar petani (NTP) adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase. Nilai tukar petani merupakan salah satu indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan petani. Pengumpulan data dan perhitungan NTP di Indonesia dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Secara umum NTP menghasilkan 3 pengertian:

1. NTP > 100 berarti NTP pada suatu periode tertentu lebih baik dibandingkan dengan NTP pada tahun dasar, dengan kata lain petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik dan menjadi lebih besar dari pengeluarannya.
2. NTP = 100 berarti NTP pada suatu periode tertentu sama dengan NTP pada tahun dasar, dengan kata lain petani mengalami impas.

Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya.

3.  $NTP < 100$  berarti NTP pada suatu periode tertentu menurun dibandingkan NTP pada tahun dasar, dengan kata lain petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun dan lebih kecil dari pengeluarannya.

NTP di Kabupaten Karawang mengalami penurunan semenjak tahun 2018 hingga tahun 2020. Pada tahun 2018, NTP Kabupaten Karawang sebesar 102,01. Lalu, tahun 2019 kembali menurun menjadi 94,91 dan pada tahun 2020 masih mengalami penurunan menjadi 91,76. NTP di Kabupaten Karawang pada tahun 2019 dan tahun 2020 kurang dari 100. Hal ini berarti NTP pada suatu periode tertentu menurun dibandingkan NTP pada tahun dasar, dengan kata lain petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun dan lebih kecil dari pengeluarannya. Pada tahun 2021 dan tahun 2022 Kabupaten Karawang tidak menghitung NTP. Selengkapnya NTP dikemukakan pada Tabel 2.160.

**Tabel 2.160**  
**Nilai Tukar Petani Kabupaten Karawang**  
**Tahun 2018-2022**

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Nilai Tukar Petani	102,01	94,91	91,76	NA	NA

*Sumber : BPS Kabupaten Karawang Tahun 2022*

### **2.1.3.28 Perdagangan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, definisi dari perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Sub urusan perdagangan sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari: perizinan dan pendaftaran perusahaan, sarana distribusi perdagangan, stabilisasi

harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor, standardisasi dan perlindungan konsumen. Realisasi Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tahun 2022 sebesar 23,05%, selengkapnya disajikan pada Tabel 2.161.

**Tabel 2.161**  
**Produk Domestik Regional Bruto Sektor Perdagangan**  
**Kabupaten Karawang Tahun 2018-2022**

No	Tahun	PDRB Sektor Perdagangan (Rp)	Jumlah Total PDRB (Rp)	Persentase Kontribusi (%)
1.	2018	39.872.800.000	197.883.435.000	20,24
2.	2019	44.071.426.000	217.404.171.000	20,27
3.	2020	49.232.433.700	230.985.928.900	21,31
4.	2021	56.978.819.700	243.713.200.600	23,38
5.	2022	61.828.770.000	268.228.780.000	23,05

*Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang Tahun 2022*

Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan dari negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik terdorong untuk memperluas pasar keluar daerah bahkan keluar negeri. Persentase Nilai ekspor Kabupaten Karawang selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat di Tabel 2.162 berikut ini. Berdasarkan tabel tersebut, persentase nilai ekspor perdagangan Kabupaten Karawang Tahun 2022 mencapai 10,50%.

**Tabel 2.162**  
**Persentase Nilai Ekspor Perdagangan Kabupaten Karawang**  
**Tahun 2018-2022**

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase nilai ekspor perdagangan Kabupaten Karawang	5,76	5,47	13,46	13,46	10,50

*Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang 2022*

Capaian indikator urusan perdagangan Kabupaten Karawang tahun 2018 hingga tahun 2022 disajikan pada Tabel 2.163. Selama periode waktu tersebut, persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan di Kabupaten Karawang mencapai 100%.



**Tabel 2.163**  
**Capaian Indikator Urusan Perdagangan Kabupaten Karawang**  
**Tahun 2018-2022**

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	100	100	100	100	100
2.	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	78,24	76,41	70,24	70,24	72,50
3.	Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu	0,53	0,67	0,79	0,39	0,41
4.	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	0	0	0	82,85	80,00
5.	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	15	15	15	15	15
6.	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	78,76	76,93	70,71	89,67	72,50

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang Tahun 2022

### 2.1.3.29 Perindustrian

Dalam rangka meningkatkan Kualitas Usaha Industri maka dilakukan Pembinaan dan Pengembangan Industri. Kontribusi sektor industri di Kabupaten Karawang terus menunjukkan peningkatan, seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut ini. Pada tahun 2022, PDRB sektor industri bernilai Rp 191.460.500.000 atau sekitar 71,38% dari PDRB total, selengkapnya disajikan pada Tabel 2.164.

**Tabel 2.164**  
**Produk Domestik Regional Bruto Sektor Industri**  
**Kabupaten Karawang Tahun 2018-2022**

No	Tahun	PDRB Sektor Industri (Rp)	Jumlah Total PDRB (Rp)	Persentase Kontribusi (%)
1.	2018	142.213.187.000	197.883.435.000	70,71
2.	2019	155.927.863.000	217.404.171.000	71,72

No	Tahun	PDRB Sektor Industri (Rp)	Jumlah Total PDRB (Rp)	Persentase Kontribusi (%)
3.	2020	163.361.829.600	230.985.928.900	70,72
4.	2021	172.568.728.200	243.713.200.600	70,81
5.	2022	191.460.500.000	268.228.780.000	71,38

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang 2022

Persentase pertumbuhan sektor industri kecil dan menengah Kabupaten Karawang tahun 2018 hingga tahun 2022 dijelaskan pada Tabel 2.165. Berdasarkan tabel tersebut, pada tahun 2022 persentase pertumbuhan sektor industri kecil dan menengah di Kabupaten Karawang mengalami penurunan menjadi 1,25%. Selama periode tahun 2018 hingga tahun 2022 di Kabupaten Karawang telah tersedia informasi industri secara lengkap dan terkini.

**Tabel 2.165**  
**Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Karawang Tahun 2018-2022**

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Karawang	2,0%	1,5%	2,00%	2,00%	1,25%
Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang 2022

### 2.1.3.30 Perencanaan

Perencanaan Pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Dokumen perencanaan daerah Kabupaten Karawang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berisi visi dan misi kepala daerah terpilih yang nanti akan dijabarkan dalam Kebijakan Rencana dan Program perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD). RPJMD akan dijabarkan dengan rencana tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

#### **2.1.3.30.1 Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda**

Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karawang telah tersedia atau ada dimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karawang Tahun 2005-2025.

#### **2.1.3.30.2 Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda**

Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Kabupaten Karawang telah tersedia atau ada. RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2021-2026 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karawang Tahun 2021-2026.

#### **2.1.3.30.3 Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati**

Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah, ditetapkan melalui Peraturan Bupati Karawang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

1. Peraturan Bupati Karawang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018.

2. Peraturan Bupati Karawang Nomor 56 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019.
3. Peraturan Bupati Karawang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2020.
4. Peraturan Bupati Karawang Nomor 47 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021.
5. Peraturan Bupati Karawang Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022.

#### **2.1.3.30.4 Persentase Keselarasan Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD**

Tabel 2.166 menyajikan persentase keselarasan penjabaran RPJMD ke dalam RKPD Kabupaten Karawang Tahun 2018-2022. Pada tahun 2022, penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD hanya mencapai 90,97%. Hal ini berarti terjadi penurunan penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD dari tahun sebelumnya.

**Tabel 2.166**  
**Persentase Keselarasan Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD Kabupaten Karawang Tahun 2018-2022**

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD (%)	100	97	100	100	90,97

*Sumber: Bappeda Kabupaten Karawang 2022*

#### **2.1.3.31 Keuangan**

##### **2.1.3.31.1 Penetapan APBD**

Tabel 2.167 menyajikan manajemen keuangan daerah yang akuntabel di Kabupaten Karawang tahun 2018 hingga tahun 2022. Dalam ketepatan waktu penyusunan APBD, Kabupaten Karawang selama periode tahun tersebut selalu menyelesaikan Raperda ke DPRD sebelum bulan Oktober pada tahun yang berkenaan. Persentase alokasi *mandatory spending* sesuai peraturan perundang-undangan mencapai 100% selama periode 2018-2022. Pemerintah daerah setiap tahun menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan

selanjutnya akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hasil opini BPK atas pengelolaan keuangan di Kabupaten Karawang. Hasil opini BPK atas pengelolaan keuangan di Kabupaten Karawang pada kurun waktu 2018-2021 secara berturut-turut menunjukkan prestasi yang baik yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pada tahun 2022 opini BPK belum terbit.

**Tabel 2.167**  
**Manajemen Keuangan Daerah yang Akuntabel**  
**di Kabupaten Karawang Tahun 2018-2022**

No	IKU	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Ketepatan waktu penyusunan APBD	Raperda Ke DPRD < Oktober 2018	Raperda Ke DPRD < Oktober 2019	Raperda Ke DPRD < Oktober 2020	Raperda Ke DPRD < Oktober 2021	Raperda Ke DPRD < Oktober 2022
2.	Persentase alokasi <i>mandatory spending</i> sesuai peraturan perundang-undangan	100	100	100	100	100
3.	Optimalnya Pengelolaan Kas Daerah	rasio kecukupan > 3 bulan gaji	rasio kecukupan > 3 bulan Gaji	rasio kecukupan > 3 bulan Gaji	rasio kecukupan > 3 bulan Gaji	rasio kecukupan > 3 bulan Gaji
4.	Ketepatan waktu pelayanan dukungan-dukungan penatausahaan keuangan	SP2D terbit < 2 hari stlh SPM terverifikasi	SP2D terbit < 2 hari stlh SPM terverifikasi	SP2D terbit < 2 hari stlh SPM terverifikasi	SP2D terbit < 2 hari stlh SPM terverifikasi	SP2D terbit < 2 hari stlh SPM terverifikasi
5.	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	18,98	19,49	20,96	16,43	18,54
6.	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum	4,84	3,92	4,35	61,29	60,425
7.	Rasio Belanja urusan pemerintah umum	4,84	3,92	4,35	15,01	18,54
8.	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	Menunggu hasil audit BPK

Sumber: BPKAD Kabupaten Karawang Tahun 2022

### 2.1.3.32 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Fungsi urusan penunjang kepegawaian dan pelatihan merupakan unsur strategis terkait dengan manajemen kepegawaian dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur di Kabupaten Karawang. Urusan penunjang kepegawaian berkaitan dengan manajemen kepegawaian dan diklat diketahui berdasarkan indikator sebagai berikut: data dan pelayanan kepegawaian, jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi, pelayanan administrasi kepegawaian berbasis teknologi informasi dan peningkatan disiplin pegawai.

Jumlah PNS Kabupaten Karawang pada tahun 2022 sebanyak 9.924 orang yang tersebar di seluruh perangkat daerah. Jumlah tersebut menunjukkan jumlah kenaikan daripada tahun 2021. Hal ini terjadi karena pada tahun 2022 terjadi pelantikan CPNS formasi tahun 2021. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian yang telah dapat dilayani dengan teknologi informatika (SIMPEG) sebanyak 17 jenis dari 21 jenis pelayanan administrasi kepegawaian dan akan semakin dilengkapi di tahun-tahun mendatang.

Dalam peningkatan kapasitas pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi setiap tahun dilaksanakan sesuai dengan penugasan dari Badan Kepegawaian Daerah pada tahun 2022 sebanyak 852 orang, lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 sebanyak 792 orang. Secara rinci capaian indikator urusan penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan (Diklat) dikemukakan pada Tabel 2.168, sebagai berikut:

**Tabel 2.168**  
**Informasi Kepegawaian di Kabupaten Karawang**  
**Tahun 2018-2022**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah keseluruhan PNS	11.184	10.942	10.192	9.859	9.924
2.	Jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi	205	548	325	792	852
3.	Kasus pelanggaran	1	3	3	4	0

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
	disiplin yang sudah diproses					
4.	Jumlah pelanggaran disiplin	1	3	3	4	0
5.	Jumlah pelayanan administrasi kepegawaian berbasis Teknologi Informasi	7	9	15	15	17
6.	jumlah pelayanan administrasi kepegawaian yang bisa di IT kan	18	21	21	21	21

Sumber : BKPSDM Kabupaten Karawang Tahun 2022

### 2.1.3.33 Penelitian dan Pengembangan

#### 2.1.3.33.1 Indeks Inovasi Daerah (IID)

Kegiatan penilaian inovasi daerah dimaksudkan agar dapat mendorong kompetisi positif antar pemerintah provinsi dan antar pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dapat diwujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pembangunan, guna terwujudnya kesejahteraan rakyat. Adapun tujuan kegiatan Penilaian dan Pemberian Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif (*Innovative Government Award*) adalah:

1. Memotivasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk meningkatkan inovasi dalam pelayanan masyarakat sesuai dengan kategori sangat inovatif, inovatif, serta memotivasi pemerintah daerah kurang inovatif dan tidak dapat dinilai;
2. Mendorong penerapan *good governance*;
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap proses-proses inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah; dan
4. Memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang berhasil menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dalam upaya peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

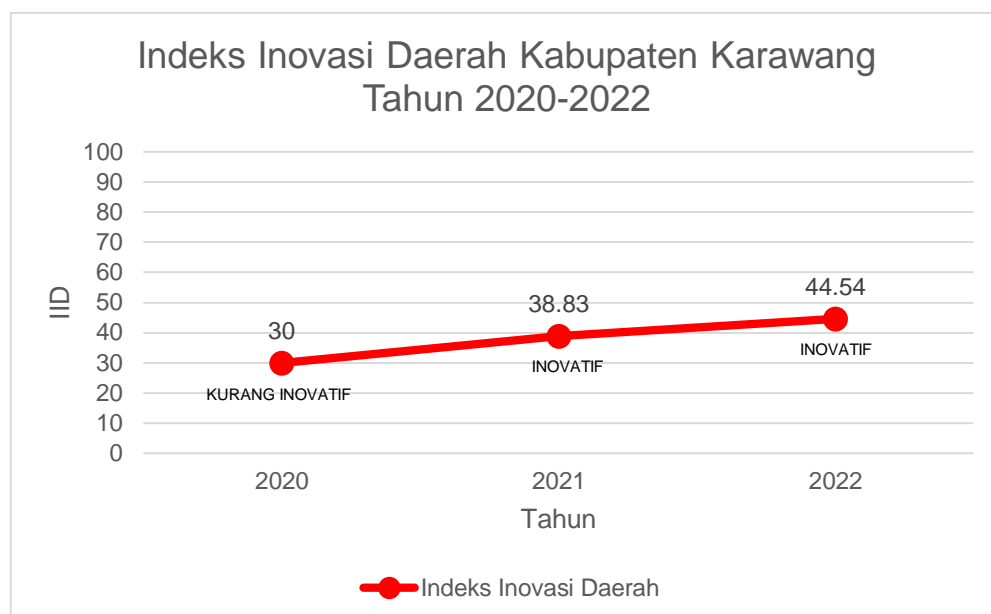
Penilaian Indeks Inovasi Daerah terdiri atas 2 (dua) indikator penilaian yaitu Indikator Satuan Pemerintahan Daerah (SPD) dan Satuan Inovasi Daerah (SID) yang memiliki skoring/parameter

penilaian berdasarkan Pedoman Umum IID. Indikator Satuan Pemerintahan Daerah (SPD) Wajib (mandatori) yang di input berjumlah 10 indikator terdiri atas indikator Visi dan Misi, Kualitas Peningkatan Perizinan, Jumlah Pendapatan Perkapita, Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka, Jumlah Peningkatan Investasi, Jumlah Peningkatan PAD, Opini BPK, Nilai Capaian Lakip, Penurunan Angka Kemiskinan, dan Nilai IPM. Sedangkan Indikator SID Wajib (mandatori) yang di input berjumlah 5 indikator terdiri atas indikator Regulasi Inovasi Daerah, Ketersediaan SDM terhadap Inovasi Daerah, Kecepatan Penciptaan Inovasi, Kemanfaatan Inovasi, dan Kualitas Inovasi Daerah.

Berdasarkan Surat Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Nomor 000.10/398/BSKDN. Menindaklanjuti Surat Mendagri Nomor 002.6/3857/SJ Tanggal 6 Juli 2022 serta Radiogram Nomor 080/3860/SJ Tanggal 6 Juli 2022 tentang Pengukuran dan Penilaian Indeks Inovasi Daerah serta Pemberian Penghargaan Innovation Government Award (IGA) Tahun 2022.

Pengukuran dan penilaian Inovasi Daerah Tahun 2022 telah dilakukan. Hasil penilaian inovasi daerah telah ditetapkan dalam Kepmendagri Nomor 400.10.116301.A tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2022. Berdasarkan Gambar 2.43, Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Karawang pada tahun 2022 mengalami peningkatan skor indeks dari Tahun 2021 dengan skor 38,83 menjadi 44,54 dengan kategori inovatif. Namun pada tahun 2022 Kabupaten Karawang mengalami penurunan peringkat dari ranking 196 menjadi 213.





Sumber: Keputusan Mendagri 2020-2022 tentang IID

**Gambar 2.83 Grafik Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2020-2022**

#### 2.1.3.33.2 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

IPKD merupakan satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. Penyusunan IPKD dilaksanakan guna mendapatkan gambaran kondisi pengelolaan keuangan daerah. Kegiatan pengukuran dilaksanakan sebagai simulasi pendukung rencana disusunnya Permendagri tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. Hasil IPKD diharapkan dapat dimanfaatkan untuk:

1. Mendorong pemda untuk berkompetisi guna memperbaiki kondisi pengelolaan keuangan daerah.
2. Mendukung pencapaian visi, misi, strategi, kebijakan dan program Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih.
3. Memberikan rekomendasi bagi Kemendagri dan K/L terkait dalam pembinaan dan upaya meningkatkan tata kelola, reformasi birokrasi dan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
4. Khusus bagi Gubernur selaku wakil pemerintah pusat, memberikan rekomendasi dalam melakukan pembinaan kualitas pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota di wilayahnya.
5. Memberikan 'penghargaan' bagi daerah yang memiliki indeks pengelolaan keuangan daerah yang terbaik dan terburuk.

Ada enam dimensi dalam pengukuran tersebut, yaitu:

1. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran.
2. Kualitas anggaran belanja dalam APBD.
3. Transparansi pengelolaan keuangan daerah.
4. Penyerapan anggaran.
5. Kondisi keuangan daerah
6. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Setiap dimensi dilengkapi sejumlah indikator turunan. Misalnya, dimensi kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran yang mencakup beberapa indikator di antaranya, kesesuaian nomenklatur program RPJMD dan RKPD; kesesuaian nomenklatur program RKPD dan KUA-PPAS; kesesuaian nomenklatur program KUA-PPAS dan APBD; kesesuaian pagu program RKPD dan KUA-PPAS; dan kesesuaian pagu program KUA-PPAS dan APBD. Baik dimensi maupun indikator, keduanya dibangun untuk mengukur pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, sampai dengan pengawasan keuangan. Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.714-BP2D/2022 tanggal 14 November 2022 tentang Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat Tahun Anggaran 2021. Kabupaten Karawang mendapat urutan pertama dari 17 (tujuh belas) Kabupaten Se-Jawa Barat Klaster/Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi. Kabupaten Karawang mendapat nilai A dengan skor indeks total 85,212 kategori Baik.

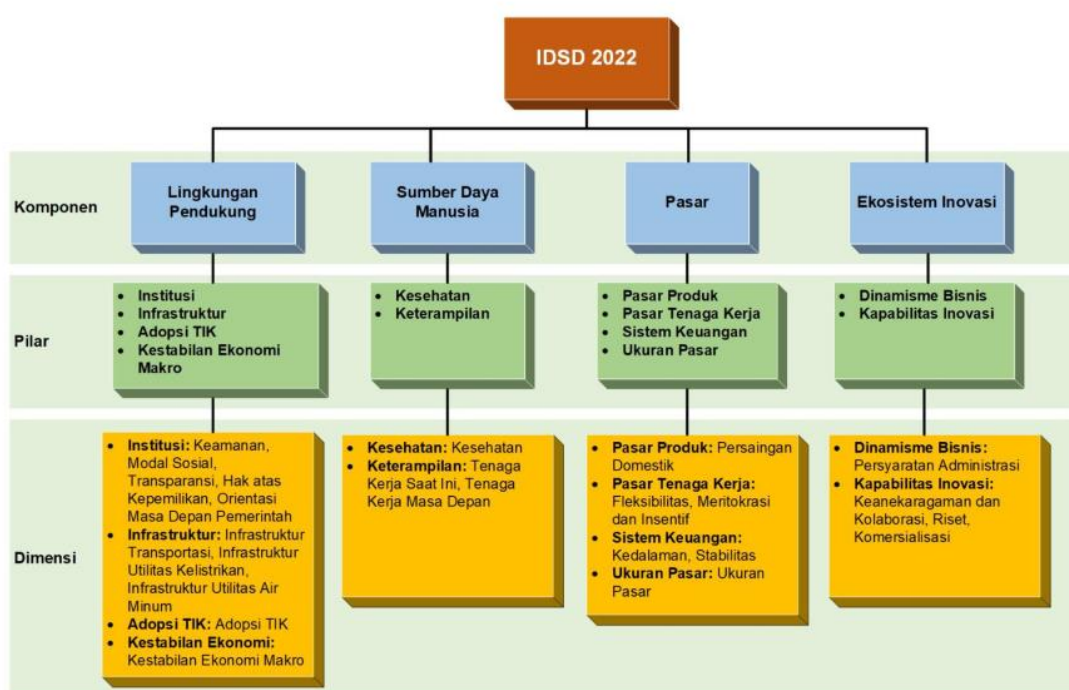
#### **2.1.3.33.3 Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)**

IDSD diarahkan menjadi data dasar yang dapat digunakan oleh berbagai pihak dalam melakukan riset dan menyusun kebijakan peningkatan daya saing daerah. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) memiliki asas: kebebasan akademik, partisipatif, keterbukaan, akuntabilitas, manfaat serta keberlanjutan. Dengan tujuan dari pengukuran Indeks Daya Saing daerah, antara lain adalah:

1. Mengukur pencapaian seluruh aktivitas di daerah dalam memanfaatkan segala potensi yang dimiliki dengan

mengoptimalkan ekosistem, potensi dan berbagai hasil iptek dan inovasi untuk menciptakan daya saing dan kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

2. Menjadi pendorong kepada seluruh stakeholder terutama para pelaku inovasi (seluruh lembaga, daerah, dunia usaha dan masyarakat) agar dapat terpacu dalam mewujudkan ide kreatif dalam penciptaan nilai tambah, baik sebagai individu maupun melalui kemitraan dan kerjasama antar unsur inovasi dalam rangka meningkatkan tingkat daya saing dan kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.
3. Sebagai upaya untuk mendukung kemandirian dan daya saing bangsa Indonesia.
4. Menjadikan dasar dalam perumusan, penetapan, evaluasi dan monitoring kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah.
5. Menjadi alat dalam proses harmonisasi berbagai kebijakan dan program pembangunan baik pada level nasional dan daerah.



Sumber: diadopsi dari *Global Competitiveness Index* (WEF, 2019)  
Keterangan: Komponen dan dimensi tidak masuk dalam penghitungan indeks dan hanya merupakan pengelompokan yang digunakan untuk tujuan analisis.

**Gambar 2.84** Komponen dan Pilar Daya Saing

Kerangka pengukuran IDSD 2022 terdiri dari empat komponen yang dielaborasi ke dalam 12 pilar daya saing yang tercantum pada Gambar 2.84. IDSD 2022 menggunakan data sekunder yang

bersumber dari kementerian/lembaga (K/L) produsen data indikator daya saing. Dengan memenuhi keempat komponen tersebut, IDSD Kabupaten Karawang pada Tahun 2022 berhasil menembus angka 3,17. Dari 27 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang menduduki urutan nomor 9.

### 2.1.3.34 Pengawasan

Tabel 2.169 menyajikan rata-rata nilai AKIP PD dan persentase rekomendasi reviu LKPD yang ditindaklanjuti di Kabupaten Karawang tahun 2018 hingga tahun 2022. Berdasarkan tabel tersebut, rata-rata nilai AKIP PD tahun 2018 hingga tahun 2022 bernilai B. Persentase rekomendasi reviu LKPD yang ditindaklanjuti selama periode tersebut mencapai 100%. Pada tahun 2022 maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Karawang berada pada Level 2. Sedangkan peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) pada tahun 2022 Kabupaten Karawang berada pada Level 2.

**Tabel 2.169**  
**Rata-rata Nilai AKIP PD dan Persentase Rekomendasi Reviu LKPD**  
**yang ditindaklanjuti di Kabupaten Karawang**  
**Tahun 2018-2022**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Rata-rata Nilai AKIP PD	B	B	B	B	B
2.	Persentase Rekomendasi Reviu LKPD yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	100	100
3.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 2	Level 3 DC	Level 2	Level 2	Level 2
4.	Peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP)	Level 3 DC	Level 3 DC	Level 3 DC	Level 3 DC	Level 2

*Sumber : Inspektorat Kabupaten Karawang Tahun 2022*

### 2.1.3.35 Sekretariat Daerah

#### 2.1.3.35.1 Nilai SAKIP

Selama tahun 2018 hingga tahun 2021 Skor nilai SAKIP Kabupaten Karawang mengalami peningkatan. Lalu, pada tahun

2022 skor nilai SAKIP meningkat menjadi 66,57. Predikat nilai SAKIP yang didapatkan selama tahun 2018 hingga tahun 2022 adalah B. Nilai SAKIP Kabupaten Karawang tahun 2018 hingga tahun 2022 diinformasikan pada Tabel 2.170.

**Tabel 2.170**  
**Nilai SAKIP Karawang Tahun 2018-2022**

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Nilai SAKIP	B	B	B	B	B
2.	Skor Nilai SAKIP	60,88	63,00	65,56	66,86	66,57

*Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022*

### 2.1.3.35.2 Peringkat, Skor dan Status Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Peringkat, skor, dan status kinerja LPPD Kabupaten Karawang Tahun 2018 hingga tahun 2020 terdapat pada Tabel 2.171. Pada tahun 2019 Skor LPPD Kabupaten Karawang sebesar 3,5744 dengan peringkat/skor/status LPPD **“Sangat Tinggi”**. Sedangkan selain tahun 2019, Kabupaten Karawang tidak menyelenggarakan perhitungan LPPD.

**Tabel 2.171**  
**Peringkat, Skor dan Status Kinerja LPPD Kabupaten Karawang Tahun 2018-2022**

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Peringkat/Skor/Status LPPD	N/A	Status Tinggi	N/A	N/A	N/A
2.	Skor LPPD	N/A	3,5744	N/A	N/A	N/A

*Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022*

### 2.1.3.35.3 Indeks Reformasi Birokrasi

Dengan melihat Tabel 2.172, Indeks Reformasi Birokrasi (RB) yang diperoleh Kabupaten Karawang pada tahun 2022 adalah 63,36 berarti berada pada predikat B, dimana interpretasinya adalah baik, namun masih perlu perbaikan yang tidak mendasar.

**Tabel 2.172**  
**Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Karawang Tahun 2018-2022**

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Nilai Indeks RB	56,19	60,08	62,2	60,16	63,36
2.	Predikat RB	CC	B	B	B	B

*Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022*

### 2.1.3.36 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Persentase Ormas/LSM aktif adalah jumlah Ormas/LSM aktif dibagi dengan jumlah Ormas/LSM dikalikan 100 persen. Berdasarkan Tabel 2.170 di bawah, pada tahun 2018 persentase Ormas/LSM aktif sebesar 49,25%. Capaian akhir pada tahun 2022 sebesar 67,2%. Persentase Ormas/LSM aktif di Kabupaten Karawang disajikan pada Tabel 2.173 di bawah ini.

**Tabel 2.173**  
**Jumlah Ormas Aktif di**  
**Kabupaten Karawang Tahun 2018-2022**

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Ormas Aktif dan Berbadan Hukum yang terdaftar di Kementerian Polhukam	98	134	134	182	256
2.	Jumlah Total Ormas	199	242	242	335	381
3.	Persentase ormas aktif yang terdaftar di Kementerian Polhukam	49,25	55,37	55,37	54,3	67,2

Sumber: Kantor Kesbangpol Kabupaten Karawang Tahun 2022

### 2.1.4 Aspek Daya Saing

#### 2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Nilai tukar petani adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase. Nilai tukar petani merupakan salah satu indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan petani. NTP di Kabupaten Karawang mengalami tren menurun sejak tahun 2018 sebesar 102,01 menjadi 91,76 pada tahun 2020.

**Tabel 2.174**  
**Nilai Tukar Petani Kabupaten Karawang**  
**Tahun 2018-2022**

No	Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	NTP	Nilai	102,01	94,91	91,76	N/A	N/A

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2022

Kemampuan ekonomi daerah Kabupaten Karawang tergambar dari pertumbuhan ekonomi Inflasi dan Pendapatan Asli Daerah.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karawang mengalami fluktuasi dalam periode tahun 2018 hingga tahun 2022. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan sampai dengan 3,59%. Hal ini terjadi karena adanya pandemi COVID-19 sehingga adanya pembatasan pergerakan masyarakat. Sedangkan pada tahun 2021 dan 2022, Kabupaten Karawang tidak melakukan perhitungan inflasi. Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebesar 1.166,47 Miliar rupiah menjadi 1.617,69 Miliar rupiah pada tahun 2022.

**Tabel 2.175**  
**Kemampuan Ekonomi Daerah Kabupaten Karawang**  
**Tahun 2018-2022**

No	Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%/Tahun	6,04	4,08	-3,59	5,85	6,31
2.	Inflasi	%	3,59	3,13	1,94	N/A	N/A
3.	Pendapatan Asli Daerah	Milyar rupiah	1.166,47	1.356,29	2.370,49	1.651,65	1.617,69

Sumber : BPS Kabupaten Karawang Tahun 2023

#### 2.1.4.2 Fokus Iklim Berinvestasi

Nilai investasi berkala nasional (PMA/PMDN) pada tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang sehat di Kabupaten Karawang. Tahun 2022 menjadi capaian nilai investasi berskala nasional tertinggi selama periode waktu 2018-2022 hingga mencapai 37,194 triliun rupiah. Meningkatnya jumlah investasi juga diikuti dengan meningkatnya jumlah penerbitan izin. Tahun 2022, izin yang diterbitkan menjadi 26.367 izin. Nilai investasi berskala nasional dan penerbitan izin di Kabupaten Karawang tahun 2018 hingga tahun 2022 disajikan pada Tabel 2.176.

**Tabel 2.176**  
**Nilai Investasi Berskala Nasional dan Penerbitan Izin**  
**di Kabupaten Karawang Tahun 2018-2022**

No	Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA/PMDN)	Triliun Rupiah	16,96	24,30	16,79	26,63	37,194

No	Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
2	Jumlah Penerbitan Izin	Izin	15.393	10.565	5.489	6.169	26.367

Sumber : DPMPSTSP Kabupaten Karawang Tahun 2022

### 2.1.4.3 Fokus Sumber Daya Manusia

Rasio ketergantungan (*Dependency Ratio*) penduduk Kabupaten Karawang dari tahun 2018 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan. Dari 46,23% pada tahun 2018 menjadi 46,28% pada tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2021 dan 2022 rasio ketergantungan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 rasio ketergantungan mencapai 40,95%. Dengan demikian dapat diketahui bahwa setiap 100 orang usia produktif di Kabupaten Karawang menanggung 40 orang usia non produktif, dan termasuk dalam kategori angka ketergantungan sedang. Tinggi rendahnya angka ketergantungan dapat dibedakan tiga golongan, yaitu angka ketergantungan rendah bila kurang dari 30, angka ketergantungan sedang bila 30-40, dan angka ketergantungan tinggi bila lebih dari 41.

**Tabel 2.177**  
**Angka Ketergantungan Kabupaten Karawang Tahun 2018-2022**

No	Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah penduduk usia < 15 tahun	Jiwa	630.788	635.581	640.016	589.912	590.844
2	Jumlah penduduk usia > 64 tahun	Jiwa	107.699	108.833	109.914	128.013	137.044
3	Jumlah penduduk usia tidak produktif	Jiwa	738.487	744.414	749.930	717.925	727.888
4	Jumlah penduduk usia 15-64 tahun	Jiwa	1.597.522	1.609.501	1.620.558	1.750.651	1.777.359
5	Rasio ketergantungan	Persen	46,23%	46,25%	46,28%	41,01%	40,95%

Sumber : BPS Kabupaten Karawang Tahun 2022 (terolah)

## 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Dalam penyusunan RKPD Tahun 2024, dilakukan telaahan terhadap hasil evaluasi pencapaian kinerja pembangunan daerah berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan



kegiatan RKPD Tahun 2022 dan tahun berjalan 2023, serta realisasi RPJMD.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Bupati Karawang Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 yang diperbaharui dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 46 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022. Keseluruhan rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Karawang. Dari evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2022, menunjukkan gambaran sebagai tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2021-2026.

### **2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun 2022**

Data Belanja pada APBD merupakan anggaran pergeseran perubahan tahun 2022 sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2022 tanggal 05 Desember 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 60 tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Data belanja tersebut terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja pergeseran perubahan APBD tahun 2022 sebesar Rp. 5.407.159.745.413,- dimana sampai dengan triwulan IV tahun anggaran 2022 telah terealisasi sebesar Rp. 4.515.465.375.517,- atau sekitar 83,51%. Laporan triwulan IV tahun anggaran 2022 menggunakan realisasi keuangan yang diambil dari FMIS BPKAD Kabupaten Karawang tertanggal 09 Januari 2023. Adapun rincian realisasi tersebut sebagaimana pada Tabel 2.178 berikut:

**Tabel 2.178**  
**Realisasi Belanja pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD)**  
**Kabupaten Karawang Periode Triwulan IV Tahun Anggaran 2022**

URUSAN/ BIDANG	PERANGKAT DAERAH	BELANJA PADA P-APBD TAHUN 2022		
		ANGGARAN	REALISASI S/D TRIWULAN IV	PERSENTASE (%)
<b>Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar</b>		<b>3.518.380.126.760</b>	<b>2.777.567.484.999</b>	<b>78,94%</b>
Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	1.303.849.940.510	1.033.000.266.875	79,23%
Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan	1.099.281.897.108	683.173.983.302	62,15%
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	850.055.058.638	821.414.185.586	96,63%
Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	160.336.324.432	155.969.852.775	97,28%
Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	63.656.107.333	50.068.433.619	78,65%
Bidang Sosial	Dinas Sosial	41.200.798.739	33.940.762.842	82,38%
<b>Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar</b>		<b>339.948.684.746</b>	<b>295.247.791.792</b>	<b>86,85%</b>
Bidang Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	28.160.046.800	23.035.203.325	81,80%
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9.537.455.000	8.190.691.110	85,88%
Bidang Pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	10.615.008.556	10.596.418.022	99,82%
Bidang Pertanahan	-	0	0	0

URUSAN/ BIDANG	PERANGKAT DAERAH	BELANJA PADA P-APBD TAHUN 2022		
		ANGGARAN	REALISASI S/D TRIWULAN IV	PERSENTASE (%)
Bidang Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	61.920.809.000	57.346.454.979	92,61%
Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	24.594.399.800	19.047.232.138	77,45%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	24.148.157.140	21.242.643.867	87,97%
Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	40.039.127.150	33.163.875.647	82,83%
Bidang Perhubungan	Dinas Perhubungan	32.520.540.000	29.625.618.648	91,10%
Bidang Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	17.773.886.400	15.234.584.510	85,71%
Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	14.325.350.200	13.329.394.330	93,05%
Bidang Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	15.878.424.000	13.101.385.673	82,51%
Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	34.485.151.500	28.374.222.600	82,28%
Bidang Statistik	Dinas Komunikasi dan Informatika	109.206.900	104.644.850	95,82%
Bidang Persandian	Dinas Komunikasi dan Informatika	268.643.700	260.173.847	96,85%
Bidang Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	14.545.300.600	13.317.224.261	91,56%
Bidang Perpustakaan	Dinas Arsip dan Perpustakaan	10.360.390.250	8.611.896.021	83,12%
Bidang Kearsipan	Dinas Arsip dan Perpustakaan	666.787.750	666.127.964	99,90%
<b>Urusan Pemerintahan Pilihan</b>		<b>118.563.723.094</b>	<b>97.556.362.309</b>	<b>82,28%</b>
Bidang Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan	23.943.658.500	20.280.566.830	84,70%
Bidang Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	2.977.203.100	2.953.783.710	99,21%

URUSAN/ BIDANG	PERANGKAT DAERAH	BELANJA PADA P-APBD TAHUN 2022		
		ANGGARAN	REALISASI S/D TRIWULAN IV	PERSENTASE (%)
Bidang Pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	69.892.069.294	54.078.129.850	77,37%
Bidang Kehutanan	-	0	0	0
Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	-	0	0	0
Bidang Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.721.919.000	3.701.768.950	99,46%
Bidang Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	17.872.886.000	16.392.450.069	91,72%
Bidang Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	155.987.200	149.662.900	95,95%
<b>Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan</b>		<b>1.430.267.210.813</b>	<b>1.345.093.836.414</b>	<b>94,04%</b>
Bidang Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	19.223.446.750	16.880.707.343	87,81%
Bidang Keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah	889.502.813.400	854.269.823.614	96,04%
Bidang Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	20.303.602.687	17.100.187.704	84,22%
Bidang Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	4.018.235.480	3.234.093.270	80,49%
Bidang Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	341.447.900	279.557.600	81,87%
Pengawasan	Inspektorat	26.859.505.000	23.177.719.423	86,29%
Pemerintahan Umum	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	14.486.255.852	12.928.159.994	89,24%
Pendukung	Sekretariat Daerah	190.148.692.386	181.911.544.733	95,67%
	Sekretariat DPRD	109.984.550.300	96.550.215.129	87,79%
Kecamatan	30 Kecamatan di Kabupaten Karawang	155.398.661.058	138.761.827.604	89,29%
<b>TOTAL</b>		<b>5.407.159.745.413</b>	<b>4.515.465.375.517</b>	<b>83,51%</b>

Sumber : BPKAD Kabupaten Karawang

### **2.2.2 Evaluasi Capaian RPJMD Tahun 2021 - 2022**

Visi (Tujuan) dan Misi (Sasaran Tahunan) Bupati-Wakil Bupati Karawang selama periode 5 (lima) tahun yang bersifat abstrak dijabarkan menjadi suatu yang konkrit melalui penetapan indikator kinerja utama (IKU). Indikator Kinerja Utama adalah hal utama yang akan diwujudkan oleh Kepala Daerah. Pencapaian Indikator Kinerja Utama merupakan sinergitas kinerja antara Pemerintah Kabupaten Karawang, masyarakat dan swasta dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Karawang.

Perencanaan pembangunan merupakan proses yang berkelanjutan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi. Hasil pembangunan yang disajikan dalam bentuk evaluasi pelaksanaan RPJMD merupakan informasi penting bagi proses perencanaan periode berikutnya.

Evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2021-2026 memberikan gambaran pelaksanaan pembangunan sekaligus penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diwakili oleh berbagai data dan informasi pembangunan daerah. Informasi capaian pembangunan yang diwakili oleh indikator kinerja sasaran RPJMD Kabupaten Karawang 2021-2026. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2021-2026 ditetapkan sejumlah 17 indikator kinerja sasaran yang selanjutnya disebut sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU).

Tahun 2021 terdapat 10 IKU (59%) belum mencapai target, 2 IKU (12%) belum memperoleh hasil pengukuran dari instansi yang berwenang, dan 5 IKU (29%) sudah mencapai target. Untuk tahun 2022, berikut ini predikat capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 (%).

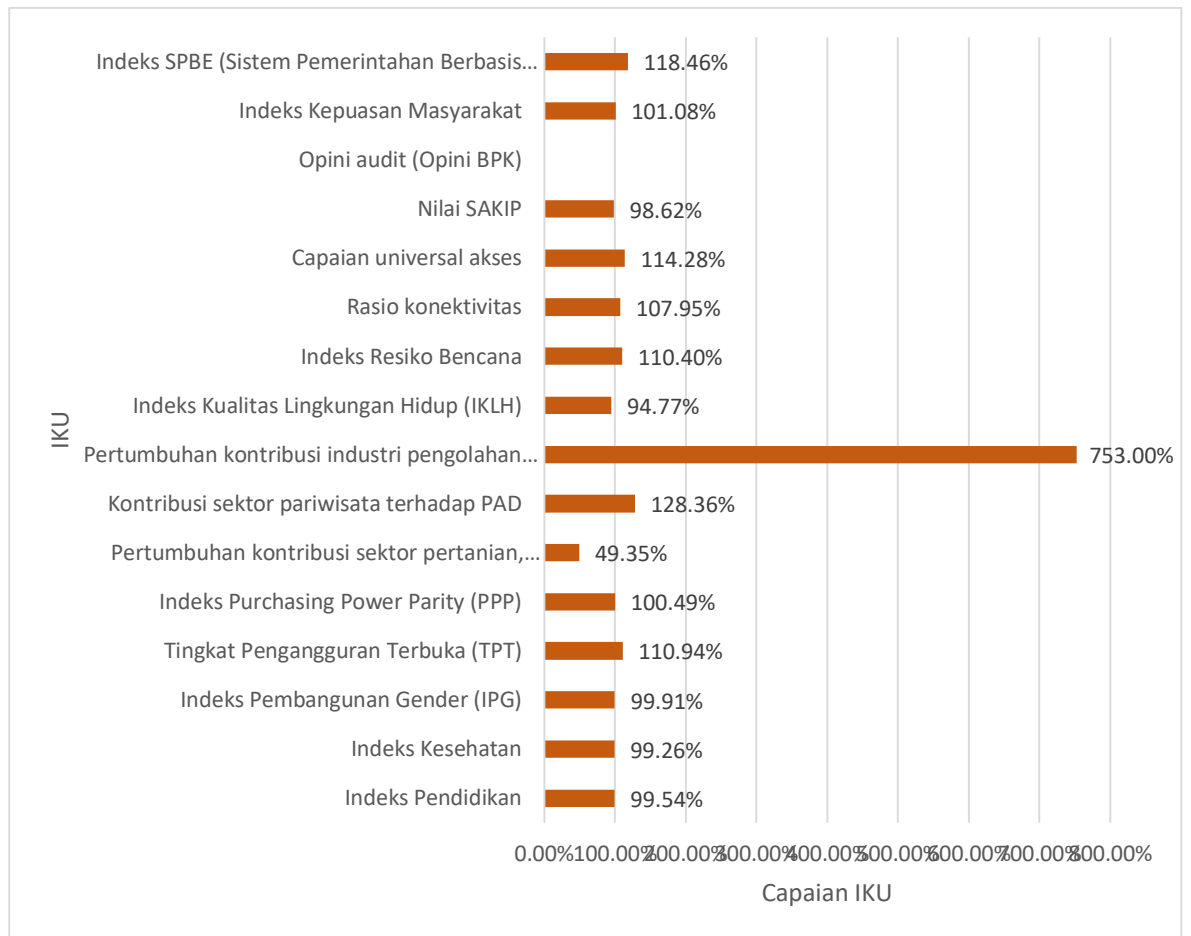
Berdasarkan Gambar 2.85, capaian kinerja IKU di atas 100% sebesar 53%, sangat tinggi sebesar 35%, sangat rendah sebesar 6%, dan belum ada data sebesar 6%. Utamanya untuk indikator kontribusi industri pengolahan meningkat sampai 753% dari yang ditargetkan yaitu sebesar 100%. Hal ini dapat disebabkan karena adanya perubahan situasi dan kondisi dari semula pandemi ke era *new normal*.

Era *new normal* merupakan awal dari kebangkitan perekonomian hampir di seluruh Indonesia salah satunya di Kabupaten Karawang. Masyarakat mulai beradaptasi hidup normal kembali setelah pandemi yang mana mulai beraktivitas ke luar rumah dan menyebabkan pergerakan manusia semakin tinggi, seiring dengan hal tersebut roda perekonomian pun kembali berputar dengan normal sedikit demi sedikit sampai akhirnya berdampak pada industri pengolahan dalam PDRB naik dengan sangat signifikan.



**Gambar 2.85 Predikat Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 (%)**

Berikut ini Gambar 2.86 adalah rincian target dan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) setiap Misi Tahun 2021-2026 yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2021-2026:



**Gambar 2.86 Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2022**

Dari 17 Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Karawang, terdapat enam IKU (35,29%) yang belum tercapai yaitu Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Indeks Pembangunan Gender (IPG), kontribusi sektor pertanian dan perikanan dalam PDRB, dan Nilai SAKIP. Satu IKU (5,88%) belum ada hasil evaluasi dari instansi yang berwenang yaitu Opini BPK terhadap LKPD dan sepuluh IKU (58,82%) sudah mencapai target. Berdasarkan Gambar 2.86, satu IKU yaitu pertumbuhan kontribusi industri pengolahan realisasi jauh diatas target yang ditetapkan dan 11 IKU mencapai kinerja yang tinggi. Untuk lima Indikator Kinerja Utama yang belum mencapai target sebagaimana Tabel 2.179 berikut ini:

**Tabel 2.179**

**Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Karawang Tahun 2021-2026 Dan Realisasi Capaian Tahun 2021-2022**

No	MISI	TUJUAN	SASARAN	No	IKU	Satuan	Urusan	Kinerja Tahun					
								2021			2022		
								Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Terwujudnya Sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berkarakter	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang pendidikan dan literasi	1	Indeks Pendidikan	Indeks	Pendidikan, Perpustakaan, Pemuda dan Olahraga	60,08	59,54	99,12%	60,67	60,39	99,54%
			Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang kesehatan	2	Indeks Kesehatan	Indeks	Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	81,48	80,51	98,81%	81,55	80,95	99,26%
			Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	90,35	90,29	99,93%	90,58	90,50	99,91%



No	MISI	TUJUAN	SASARAN	No	IKU	Satuan	Urusan	Kinerja Tahun					
								2021			2022		
								Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Meningkatnya kesejahteraan dan jaminan perlindungan masyarakat	Meningkatnya pendapatan masyarakat dan daya beli masyarakat serta pemberian jaminan dan perlindungan sosial	4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	Tenaga Kerja, Transmigrasi, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	11,24	11,83	95,01%	10,95	9,87	110,94%
				5	Indeks Purchasing Power Parity (PPP)	Indek	Koperasi UMKM, Sosial	74,53	74,47	99,92%	75,15	75,52	100,49%
2	Terwujudnya ekonomi kerakyatan yang kreatif, produktif dan berdaya saing serta berbasis pada potensi daerah	Terwujudnya ekonomi kerakyatan yang kreatif, inovatif dan berbasis pada potensi unggulan daerah	Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan	6	Pertumbuhan kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dalam PDRB	%	Pertanian, Pangan, Perikanan dan Kelautan	4,5	2,32	51,56%	4,6	2,27	49,35%

No	MISI	TUJUAN	SASARAN	No	IKU	Satuan	Urusan	Kinerja Tahun					
								2021			2022		
								Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul dan pengembangan ekonomi kreatif	7	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	Pariwisata, Koperasi UMKM, Kebudayaan, Perdagangan	7,36	6,66	90,49%	7,44	9,55	128,36%
			Meningkatnya kontribusi industri pengolahan dalam pertumbuhan ekonomi	8	Pertumbuhan kontribusi industri pengolahan dalam PDRB	%	Perindustrian, Penanaman Modal	0,39	7,09	1817,95 %	1,0	7,53	753,00%

No	MISI	TUJUAN	SASARAN	No	IKU	Satuan	Urusan	Kinerja Tahun					
								2021			2022		
								Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Terwujudnya tata kelola lingkungan hidup yang aman, nyaman dan mendukung proses pembangunan yang berkesinambungan	Terwujudnya prinsip pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berkesinambungan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Karawang	9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	Lingkungan Hidup	47,15	44,80	95,02%	47,4	44,92	94,77%
			Meningkatnya upaya pengurangan resiko bencana melalui adaptasi dan mitigasi	10	Indeks Resiko Bencana	Indeks	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	174,3	165,58	105,28%	174,2	157,81	110,40%
		Menurunnya kesenjangan antar wilayah khususnya dalam ketersediaan sarana dan prasarana	Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah	11	Rasio konektivitas	Rasio	Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,63	0,49	77,81%	0,63	0,68	107,95%

No	MISI	TUJUAN	SASARAN	No	IKU	Satuan	Urusan	Kinerja Tahun					
								2021			2022		
								Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Tercapainya universal akses (kumuh, air bersih, pengelolaan sampah dan limbah domestik)	12	Capaian universal akses	%	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	41,80	43,74	104,64%	43,97	50,25	114,28%
4	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, koordinatif dan akuntabel serta berorientasi kebutuhan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan kapabel	13	Nilai SAKIP	indeks	Unsur Penunjang Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, Setda, Setwan, Pengawasan Kepegawaian	66,50	66,86	100,54%	67,5	66,57	98,62%
				14	Opini audit (Opini BPK)	Opini	Keuangan dan pengawasan	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%

No	MISI	TUJUAN	SASARAN	No	IKU	Satuan	Urusan	Kinerja Tahun					
								2021			2022		
								Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Terwujudnya implementasi teknologi informasi dalam peningkatan pelayanan bagi masyarakat	15	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Penanaman Modal, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Unsur penunjang pemerintahan, unsur kewilayahan (Kecamatan)	81,00	82,54	101,90%	81,50	82,379	101,08%
				16	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Indeks	Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kearsipan	2,4	3,39	141,25%	2,6	3,08	118,46%
			Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat	17	Persentase penurunan gangguan keamanan ketenteraman dan ketertiban umum	%	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Kesbangpol	5	5	100,00%	5	5	100,00%

Sumber : Bappeda Kabupaten Karawang

### **2.2.3 Capaian Tujuan SDG's di Kabupaten Karawang**

Kabupaten Karawang turut serta berkontribusi dalam pencapaian tujuan SDG's dengan hasil capaian sebagaimana Tabel 2.186 berikut ini:

Tabel 2.180

## Target dan Capaian SDG's di Kabupaten Karawang

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2021)	Evaluasi		Keterangan
					2022 (Target)	2022 (Realisasi)	
<b>Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.</b>							
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS, (DINSOS)	Persen	8,13	8,00	8,44	Semua OPD
1.3.1. (a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	DINKES	Persen	85,00	89,00	89	Dinkes
<b>Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.</b>							
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.						
1.3.1. (d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	DINSOS	Jumlah	12,87		11,8	StatKesra Karawang 2021-2022
<b>Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.</b>							
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	DINKES	Persen	16	15	15	

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2021)	Evaluasi		Keterangan
					2022 (Target)	2022 (Realisasi)	
2.2.1.*	prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	DINKES	Persen	12,5	12	12	
<b>Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.</b>							
2.2.2*	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	DINKES	Persen	16	15	15	
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	DINKES	Persen	35	40	40	
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	DPKP	Skor PPH	90,3	92,2	92,3	
<b>Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.</b>							
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	DINKES	Rasio	294,86	119,05	136,5	
3.1.2*	(Persentase) Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	DINKES	Persen	99,17	100,00	94,81	
<b>Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.</b>							



Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2021)	Evaluasi		Keterangan
					2022 (Target)	2022 (Realisasi)	
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	BPS, DINKES	Rasio	5,23	2,98	4,69	
<b>Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.</b>							
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	DINKES	Kasus	244	315	300	
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	BPS, DINKES	Kasus		25800	26060	
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1.000 orang	BPS, DINKES	Kasus	3		4	Kasus Malaria Impor
<b>Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.</b>							
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	DINKES	Persen	623,205			
<b>Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.</b>							
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan: (b) Proporsi kasus kusta yang ditemukan dan diobati	DINKES	Kasus				
<b>Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.</b>							

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2021)	Evaluasi		Keterangan
					2022 (Target)	2022 (Realisasi)	
3.7.1(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	BPS, (DPPKB)	persen	72,39	66	77,02	
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	DPPKB	Persen	2,22	2,28	2,21	
<b>Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.</b>							
3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	DINKES					
3.8.2.*	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	DINKES	persen	85	89	89	
<b>Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.</b>							
3.a.1.*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	BPS	persen			32,65	Sumber : Statkesra Karawang 2022
<b>Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.</b>							
3.c.1.*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	DINKES	Persen	60	60	60	
<b>Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki- laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.</b>							
4.1.1(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	DISDIK	persen	66,7	70,04	70,04	
4.1.1(b)	Persentase SMP/MTS berakreditasi minimal B.	DISDIK	persen	#REF!	48,47	48,47	

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2021)	Evaluasi		Keterangan
					2022 (Target)	2022 (Realisasi)	
4.1.1(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	BPS, DISDIK	Persen	102,75	102,75	107,55	
4.1.1(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/sederajat.	BPS, DISDIK	Persen	98,98	98,98	98,98	
4.1.1(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	BPS, DISDIK	Tahun	7,78	7,96	7,96	
<b>Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, Pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.</b>							
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	BPS, DISDIK	Persen	74,87	74,87	74,87	
<b>Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.</b>							
4.5.1*	(ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat: (a) perempuan/laki-laki	BPS, DISDIK	Persen			100	
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat: (a) perempuan/laki-laki	BPS, DISDIK	Persen	98,99	99,11	99,11	
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat: (c) kuintil terbawah/teratas	BPS, DISDIK	Persen	98,99	99,11	99,11	
<b>Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.</b>							

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2021)	Evaluasi		Keterangan
					2022 (Target)	2022 (Realisasi)	
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	BPS, DISDIK	Persen	96,85	98,29	98,29	
<b>Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.</b>							
4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	BPS, DISDIK	Persen	43,47	43,84	43,84	
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	DP3A	Persen	82,88	100	90	
<b>Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.</b>							
5.3.1(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	DPPKB	Umur	20,7	20	20,77	
<b>Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.</b>							
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	BPS, DP3A	persen		20		
<b>Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen- dokumen hasil revidi dari konferensi- konferensi tersebut.</b>							

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2021)	Evaluasi		Keterangan
					2022 (Target)	2022 (Realisasi)	
5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	BPS, DPPKB	persen	14,38	10,22	9,72	
<b>Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.</b>							
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	PUPR, PRKP	Persen	84,36	86,12	85,61	
<b>Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.</b>							
6.2.1*	(a) Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Fasilitas Cuci Tangan dengan Air dan Sabun	PRKP	Persen				
6.2.1*	(b) Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak	PRKP	Persen		78,14232	78,14232	
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	DINKES	persen	47,57	91	91	
6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	PRKP	Persen	75,96	76,34	76,34	
<b>Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas sesuai kepantasan.</b>							
6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	PUPR	%	72,88	70	70	

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2021)	Evaluasi		Keterangan
					2022 (Target)	2022 (Realisasi)	
<b>Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.</b>							
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	BPS	persen	5,85	5,90	6,31	
8.1.1.(a)	PDB per kapita.	BPS					
<b>Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.</b>							
	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS, DISNAKER	persen	11,83	10,95	9,87	
<b>Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.</b>							
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	BPS, DISPARBUD	jumlah	6127		562	
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	BPS, DISPARBUD	persen	1887987		1891022	Objek Wisata Alam dan Wisata Budaya
<b>Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.</b>							
8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 jumlah orang dewasa.	BPS, OJK	jumlah				
<b>Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.</b>							

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2021)	Evaluasi		Keterangan
					2022 (Target)	2022 (Realisasi)	
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS, DINSOS	persen	8,13	8	8,44	
10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.	BPS, DPMD	Jumlah	0	0	0	
<b>Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relative terhadap PDB global. yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.</b>							
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	Jiwa	125673		28594	Karawang Dalam Angka
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	BPBD, BMKG	Unit	1	174,33	1	EWS Banjir
<b>Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.</b>							
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	DLH	Persen	47,94	48	51,94	
<b>Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.</b>							
12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	DLH	persen	100	100	100	
<b>Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.</b>							

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2021)	Evaluasi		Keterangan
					2022 (Target)	2022 (Realisasi)	
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	BPS, DP3A	Persen	0,006	65	0,007	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten
<b>Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.</b>							
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	BPKAD	Persen	90,91	86,21	86,21	Persentase kesesuaian APBD dengan KUA PPAS
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).	Inspektorat	WTP		WTP	WTP	
<b>Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.</b>							
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	BPS, DP3A	Jumlah	14	20	14	Karawang Dalam Angka 2023
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	BPS, BKPSDM, DP3A	Jumlah				
<b>Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.</b>							
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	DISDUKCAPIL					



Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2021)	Evaluasi		Keterangan
					2022 (Target)	2022 (Realisasi)	
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	BPS, DISDUKCAPIL	persen	88,42	0,00	84,17	Statkesra Karawang 2021-2022
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	BPS, DISDUKCAPIL	persen	96,18	90,50	97,54	angka total
<b>Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.</b>							
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	BPS, BAPENDA	Rupiah				
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	BAPENDA	Persen	59,6	72,76		Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemungutan pajak daerah
<b>Negara-negara maju melaksanakan secara penuh komitmen atas bantuan pembangunan (<i>Official Development Assistance - ODA</i>), termasuk komitmen dari banyak negara maju untuk mencapai target 0.7 persen dari Pendapatan Nasional Bruto untuk bantuan pembangunan (ODA/GNI) bagi negara berkembang dan 0,15 sampai 0,20 persen ODA/ GNI kepada negara kurang berkembang; penyedia ODA didorong untuk mempertimbangkan penetapan target untuk memberikan paling tidak 0,20 persen dari ODA/GNI untuk negara kurang berkembang.</b>							
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.						

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2021)	Evaluasi		Keterangan
					2022 (Target)	2022 (Realisasi)	
<b>Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.</b>							
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register).	DISDUKCAPIL		ada	Ada		

## 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

### 2.3.1 Permasalahan Pokok

Berikut ini Tabel 2.181 menyajikan permasalahan-permasalahan pokok yang terjadi di Kabupaten Karawang.

**Tabel 2.181**  
**Identifikasi Permasalahan Pokok Daerah**

No.	Permasalahan Pokok	Analisis
1	Rendahnya pertumbuhan kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dalam PDRB	<p>Pertumbuhan kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dalam PDRB pada tahun 2021 sebesar 2,32%. Pada tahun 2022 mengalami penurunan 0,05% menjadi 2,27%. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala dalam bidang pertanian berupa: kekeringan lahan tidak bisa tanam, mundur tanam; terjadi gagal panen yang disebabkan oleh serangan hama wereng dan tikus; pola tanam padi-padi-padi menyebabkan menurunnya kesuburan tanah dan berkembangnya hama penyakit tanaman; rendahnya akses ke sumber pembiayaan.</p> <p>Sedangkan dalam bidang perikanan kendala yang dihadapi berupa sumber daya alam yang terbatas, Overfishing yang dapat mengakibatkan penurunan jumlah populasi ikan dan kerusakan ekosistem laut, sehingga dapat mempengaruhi produksi dan kualitas hasil perikanan, kurangnya pengembangan teknologi dan sumber daya manusia di sektor perikanan, kurangnya investasi dalam sektor perikanan yang dapat menghambat pengembangan teknologi, infrastruktur, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor perikanan, rendahnya daya beli masyarakat terhadap produk perikanan sehingga mempengaruhi permintaan dan harga produk perikanan di pasar, sehingga dapat mempengaruhi PDRB serta perubahan iklim yang dapat mempengaruhi produktivitas perikanan dan mempengaruhi keberlangsungan sumber daya perikanan.</p>
2	Belum optimalnya pemenuhan pelayanan dasar bidang Pendidikan.	<p>Indeks Pendidikan Kabupaten Karawang Tahun 2022 ditargetkan 60,67 poin, terealisasi 60,39 sehingga capaiannya 99,54%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 Indeks Pendidikan Tahun 2022 Meningkat 0,85 poin. Peningkatan ini didorong oleh peningkatan Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah. Indeks Pendidikan diformulasikan dari 2 variabel yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Berdasarkan data BPS, HLS Kabupaten Karawang Tahun 2022 mencapai 12,19 Tahun Atau setara Lulus SMA/ sederajat. Sedangkan RLS Kabupaten Karawang baru mencapai 7,96 atau setara SMP hampir kelas 2. Idealnya RLS = HLS, realisasinya terjadi gap antara keduanya sebesar 4,23 tahun. Realisasi Indeks Pendidikan belum mencapai target yang ditetapkan. Bila dilihat dari Pelaksanaan Program pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tidak tercapainya target indeks Pendidikan disebabkan karena 3 hal yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD;</li><li>Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan menengah pertama;</li><li>Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.</li></ol>

No.	Permasalahan Pokok	Analisis
3	Belum optimalnya pemenuhan pelayanan dasar bidang Kesehatan.	<p>Indeks Kesehatan diformulasikan dari Usia Harapan Hidup. Indeks Kesehatan Kabupaten Karawang Tahun 2022 sudah mencapai derajat yang tinggi ditunjukkan dengan angka 80,95. Realisasi indeks kesehatan belum mencapai target yang ditetapkan. Terlihat indikasi pelaksanaan program dan kegiatan yang kurang efektif dilihat dari tingginya angka kematian ibu, angka kesakitan dan angka kematian bayi serta tidak tercapainya sebagian besar Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan yang disebabkan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya upaya pemberdayaan masyarakat (UKM) sebagai salah satu upaya promotif dan preventif;</li> <li>- Pengetahuan/ pemahaman masyarakat tentang resiko pada ibu hamil yang masih rendah;</li> <li>- Persalinan belum semua dilakukan pertolongan oleh tenaga kesehatan kompeten dan difasilitas Kesehatan;</li> <li>- Pelaksanaan program KIA terintegrasi dengan program terkait belum terlaksana secara optimal</li> <li>- kurangnya kualitas pelayanan ANC terutama dalam hal edukasi makanan gizi seimbang pada ibu hamil menyebabkan banyak kasus BBLR penyebab paling banyak kasus kematian bayi;</li> <li>- Pelaksanaan kelas ibu balita dan SDIDTK di puskesmas oleh tenaga kesehatan belum optimal.</li> <li>- Hasil dari data penjangkaran kesehatan belum dianalisis dan disampaikan ke lintas program dan lintas sektor terkait terutama pihak sekolah;</li> <li>- Seringnya pergantian programer lansia sehingga pelaksanaan program lansia tidak berjalan optimal, puskesmas santun lansia belum berjalan sesuai dengan regulasi, belum ada peningkatan kapasitas petugas lansia dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan lansia di puskesmas, belum semua desa memiliki posbindu lansia, adapun posbindu lansia sementara yang sudah ada belum berjalan secara efektif dalam melaksanakan penjangkaran kesehatan pada lansia</li> <li>- Sering bergantinya programer DM dan HT di Puskesmas, sehingga pelaksanaan penjangkaran kurang optimal;</li> <li>- Capaian tes HIV untuk pasien TB dan ibu hamil masih jauh dari target karena belum semua fasilitas pelayanan kesehatan melakukan tes HIV.</li> </ul>
4.	Belum optimalnya pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	<p>Capaian Nilai SAKIP Tahun 2022 ditargetkan sebesar 67,5 poin terealisasi sebesar 66,57 poin dengan predikat “B”, sehingga kinerjanya mencapai 98,62%. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Baik”, yaitu pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sudah baik khususnya unit kerja utama. Namun masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja serta komitmen dalam manajemen kinerja. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian Nilai SAKIP Tahun 2022 menurun sebesar 0.29 poin. Penurunan disebabkan karena terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi tahun ini lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pemda maupun level organisasi perangkat daerah. Bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD, Nilai SAKIP Tahun 2022 sudah mencapai 93,10%. Nilai SAKIP Kabupaten Karawang masih berada dibawah nilai SAKIP Provinsi Jawa Barat.</p>

No.	Permasalahan Pokok	Analisis
5.	Rendahnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang Tahun 2022 meningkat sebesar 0,12 poin dari IKLH Tahun 2021. Peningkatan ini di dorong oleh meningkatnya indeks Kualitas Udara (IKU) yang cukup signifikan. Walaupun 2 komponen lainnya yaitu Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Lahan menurun dibandingkan tahun 2021, namun secara total Indeks terjadi peningkatan. Bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD yaitu sebesar 48,38, maka capaian IKLH Tahun 2022 terhadap RPJMD sudah mencapai 92,85%. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang Tahun 2022 yang ditargetkan di angka 47,40 terealisasi sebesar 44,92 . Belum tercapainya target disebabkan karena antara lain belum ada IPAL Komunal Domestik yang berfungsi dengan baik, sehingga limbah domestik langsung dialirkan ke sungai serta diduga masih ada pembuangan limbah dan sampah ke sungai yang belum diolah dengan baik oleh pelaku usaha dan masyarakat.
6.	Belum optimalnya pengarusutamaan gender.	Indeks Pembangunan Gender Tahun 2022 ditargetkan sebesar 90,58 poin, terealisasi sebesar 9,50 poin, sehingga tingkat capaiannya adalah sebesar 99,91% dengan predikat kinerja sangat tinggi. Hal ini disebabkan diantaranya adalah karena Layanan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan layanan motivator keluarga yang belum optimal. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021, Indeks Pembangunan Gender Tahun 2022 meningkat sebesar 0,21 poin. Angka-angka tersebut menunjukkan keberhasilan pembangunan dalam upaya pengarusutamaan Gender di Kabupaten Karawang. Bila dibandingkan dengan Target IPG pada akhir RPJMD dimana ditetapkan sebesar 91,50 poin, realisasi Tahun 2022 sudah mencapai 98,91% dari target RPJMD. Untuk itu perlu ditingkatkan lagi aktifitas yang lebih efektif pada tahun-tahun berikutnya. Bila dibandingkan dengan Realisasi IPG Jawa Barat dan Nasional, IPG Kabupaten Karawang Tahun 2022 masih lebih tinggi daripada IPG Jawa Barat dan sedikit lebih rendah dari IPG Nasional.
7.	Tingginya angka kemiskinan.	Dampak pandemi COVID-19 masih terasa di Kabupaten Karawang. Hal ini terlihat dari belum tercapainya target daerah untuk angka kemiskinan. Angka kemiskinan tahun 2022 sebesar 8,44% terealisasi di atas target daerah sebesar 8%.
8.	Rendahnya pertumbuhan PDRB bidang infrastruktur.	Pada tahun 2022, pertumbuhan PDRB bidang infrastruktur mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar 26,35% menjadi 8,21%.
9.	Belum tercapainya target daerah Indeks Reformasi Birokrasi (IRB).	Berdasarkan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2022, nilai IRB Kabupaten Karawang mengalami kenaikan dari 60,16 menjadi 63,36. Namun, capaian IRB tahun 2022 belum mencapai target daerah Kabupaten Karawang.

### 2.3.2 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2022

Berdasarkan hasil pelaksanaan evaluasi pembangunan Kabupaten Karawang tahun 2022, perlu diperhatikan beberapa hal yang harus mendapatkan fokus dan dikategorikan sebagai permasalahan/hambatan mendesak dalam setiap urusan pembangunan daerah pada Tabel 2.182 sebagai berikut:

**Tabel 2.182**  
**Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan**  
**Pemerintah Daerah**

No.	Nama Urusan	Identifikasi Permasalahan
<b>1</b>	<b>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>	
1	PENDIDIKAN	<p>Belum optimalnya ketersediaan basis data sebagai dasar perhitungan dalam penerapan dan pemenuhan SPM Bidang Pendidikan, terlebih untuk data eksternal yang bersifat lintas sektoral.</p> <p>Masih rendahnya capaian partisipasi sekolah pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini.</p> <p>Masih belum meratanya akses Pendidikan Kesetaraan sehingga belum dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat.</p> <p>Masih belum optimalnya penerapan tata kelola pendidikan.</p> <p>Mendesaknya layanan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh peserta didik dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran, mutu, dan relevansi pendidikan.</p> <p>Kualitas ruang kelas yang belum sepenuhnya ideal.</p> <p>Belum tuntasnya program wajib belajar Sembilan tahun di Kabupaten Karawang.</p>
2	KESEHATAN	<p>Masih tingginya kasus kematian ibu dan kasus kematian bayi (AKI dan AKB);</p> <p>Masih tingginya angka kematian dan kesakitan akibat penyakit menular dan tidak menular (COVID-19, DBD, AIDs, HT, DM, dan lain-lain);</p> <p>Masih rendahnya status gizi masyarakat (adanya kasus gizi buruk, stunting, dan obesitas);</p> <p>Masih rendahnya kualitas kesehatan lingkungan;</p> <p>Masih kurangnya jumlah dan jenis tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai standar;</p> <p>Belum terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai standar, puskesmas belum semua DTP baru 36 puskesmas;</p> <p>Belum tercapainya target jaminan Kesehatan menuju UHC (<i>Universal Health Coverage</i>);</p> <p>Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan;</p> <p>Masih kurangnya akses terhadap pelayanan kesehatan.</p>
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	<p>Cuaca/iklim berpengaruh pada proses pelaksanaan pekerjaan fisik dilapangan;</p> <p>Banyaknya aspirasi dari masyarakat/yang berkompeten terhadap usulan kegiatan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang melebihi jumlah anggaran yang ditetapkan;</p> <p>Waktu dan proses perencanaan terhadap proporsi kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) dengan tingkat beban kerja;</p> <p>Kualitas hasil pekerjaan;</p> <p>Belum Memiliki Standar pelayanan minimal.</p>
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	<p>Kebutuhan akan Perumahan yang layak huni;</p> <p>Masih banyaknya Rumah Tidak Layak Huni yang belum tertangani serta masih banyaknya permukiman kumuh yang kurang layak huni baik di perkotaan maupun pedesaan/nelayan.</p> <p>Kebutuhan akses pembiayaan perumahan;</p> <p>Keterbatasan anggaran dalam penyelenggaraan kegiatan.</p>

No.	Nama Urusan	Identifikasi Permasalahan
		<p>Pengembangan Perumahan yang mengarah pada pengembangan Ekonomi dan keberlangsungan lingkungan hidup;</p> <p>Keadaan iklim yang tidak menentu sering terjadi bencana seperti: ROB daerah pesisir, Angin Puting beliung, banjir kiriman, bencana kekeringan ataupun musibah kebakaran. Belum tersedianya Standar prosedur lingkup dinas dalam penanganan tanggap darurat bencana yang berkaitan dengan penanganan perumahan dan permukiman;</p> <p>Kebutuhan pelayanan prasarana dan Sarana permukiman yang memadai;</p> <p>Banyaknya jalan lingkungan, jalan setapak dan drainase belum tertangani, masih rendahnya cakupan pelayanan air bersih terutama masyarakat di pedesaan dan berpenghasilan rendah di wilayah pesisir pantai serta wilayah bagian selatan Karawang, Sulitnya mendapatkan air bersih terutama di daerah pesisir dan Karawang Selatan, masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat, masih rendahnya cakupan pelayanan air bersih terutama masyarakat di pedesaan dan berpenghasilan rendah di wilayah pesisir pantai serta wilayah bagian selatan Karawang, masih minimnya Penerangan jalan umum di perkotaan, pedesaan dan wilayah pesisir.</p> <p>Keterbatasan lahan untuk permukiman khususnya perkotaan;</p> <p>Harga lahan di perkotaan semakin tinggi, tingkat migrasi ke Kabupaten Karawang terus meningkat, masih rendahnya keinginan masyarakat untuk tinggal di hunian vertikal (rumah susun)</p> <p>Belum tersedianya database infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.</p>
5	SOSIAL	<p>Masih kurangnya SDM yang berkompeten di bidang pelayanan kesejahteraan sosial;</p> <p>Sarana dan prasarana kantor yang belum lengkap/belum memadai;</p> <p>Belum dilakukan pemutakhiran data 26 jenis PPKS di lingkungan Kabupaten Karawang sehingga mengalami kesulitan dalam menentukan calon penerima bantuan sosial yang berhak menerima bantuan sosial;</p> <p>Belum dilakukan pemilahan data PPKS di Kabupaten Karawang sehingga menyulitkan penentuan target, sasaran, dan capaian dalam pelaporannya.</p> <p>Pembangunan industri yang belum berpihak pada upaya peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial;</p> <p>Kurangnya Kerjasama antara Dinas Sosial Kabupaten Karawang dengan pihak luar seperti dinas terkait dan dunia usaha/CSR dalam peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial;</p> <p>Karawang merupakan daerah rawan bencana sehingga diperlukan banyak persediaan logistik dalam penanganan bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten Karawang.</p> <p>Belum optimalnya terkait anggaran untuk program yang mendukung pelaksanaan kegiatan yang menunjang kesejahteraan sosial;</p> <p>Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pelayanan dan penanganan permasalahan kesejahteraan sosial.</p>
6	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN	<p>Populasi penduduk kabupaten karawang yang heterogen dapat mengakibatkan ego sektoral dan memicu konflik di masyarakat;</p>

No.	Nama Urusan	Identifikasi Permasalahan
	PERLINDUNGAN MASYARAKAT	<p>Sering terjadinya rongrongan kehidupan sosial budaya, hal ini dapat menjadi bibit perpecahan diantara masyarakat;</p> <p>Kesadaran masyarakat dalam ketaatan kepada peraturan hukum khususnya produk hukum daerah masih kurang;</p> <p>Luasnya daerah Kabupaten Karawang tidak sebanding dengan rasio petugas keamanan dan ketertiban sehingga penanganan masalah-masalah trantibum banyak yang tidak terselesaikan;</p> <p>Minimnya kompetensi petugas penegak perda sehingga penanganan pelanggaran perda tidak maksimal;</p>
<b>2</b>	<b>URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR</b>	
1	Tenaga Kerja	<p>Jumlah Angkatan kerja baru/lulusan baru yang terus meningkat;</p> <p>Sarana dan Prasarana Pelatihan yang kurang dan masih jauh dari kesempurnaan rasio pelatihan;</p> <p>Adanya peran pihak ketiga dalam perekrutan Tenaga Kerja;</p> <p>Penyerapan dan penempatan tenaga kerja belum optimal;</p> <p>Rendahnya tingkat kepercayaan diri dan motivasi akan kemampuan personal yang dimiliki untuk membuka lapangan kerja/ wirausaha baru.</p>
2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	<p>Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan perempuan dan jumlah kasus KDRT.</p> <p>Perempuan banyak menjadi objek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan.</p> <p>Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruh terhadap buruh migran.</p> <p>Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.</p> <p>Rendahnya perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum (ABH).</p> <p>Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak.</p> <p>Belum optimalnya pemenuhan hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman.</p>
3	PANGAN	<p>Masih rendahnya skor PPH konsumsi pangan Kabupaten Karawang yang mencerminkan rendahnya keragaman konsumsi pangan masyarakat;</p> <p>Jumlah ketersediaan pangan daerah belum sesuai standar;</p> <p>Masih terdapat daerah rawan pangan di Kabupaten Karawang, dimana terdapat desa sangat rentan pangan (Desa Tegalega, Kec. Ciampel), dan 19 desa rentan pangan yang perlu menjadi perhatian dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Karawang;</p>
4	LINGKUNGAN HIDUP	<p>Belum dimilikinya manajemen data terpadu, sehingga mengalami kesulitan dalam analisis data, interpretasi dan pemanfaatan data tersebut untuk membuat suatu rencana kinerja berbasis data yang komprehensif;</p> <p>Penyusunan indikator kinerja kegiatan belum maksimal, sehingga ada beberapa kegiatan yang belum tepat dalam memaparkan indikator kinerja kegiatannya sehingga pada saat penyusunan LAKIP sulit untuk dilakukan pengukuran.</p>



No.	Nama Urusan	Identifikasi Permasalahan
		<p>Keterpaduan dan keterkaitan kebijakan dinas dengan pelaksanaan program dan kegiatan perlu upaya peningkatan serta didukung pendanaan yang efisien dan tepat sasaran;</p> <p>Sarana, prasarana dan sumber daya manusia dalam pengelolaan persampahan maupun dalam pengelolaan lingkungan hidup masih terbatas;</p> <p>Kurangnya kesadaran dari para pelaku usaha dan/atau kegiatan baik sektor swasta maupun masyarakat terhadap upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengelolaan persampahan;</p> <p>Belum optimalnya dukungan dari lintas sektor terkait dalam hal pengelolaan lingkungan dan peningkatan kebersihan di lingkup kabupaten.</p>
5	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	<p>Masih banyak masyarakat yang belum mengerti dengan persyaratan pengusulan dokumen kependudukan;</p> <p>Masyarakat mengharapkan pelayanan yang cepat/langsung jadi 1 hari;</p> <p>Masih banyaknya siswa/siswi SLTA yang belum melaksanakan perekaman karena waktu yang terbatas dengan kegiatan di sekolah;</p> <p>Masih banyak usia anak 0-17 tahun yang belum memiliki Kartu Identitas Anak;</p> <p>Dalam pengajuan permohonan pembuatan Akta Kelahiran, banyak Orang Tua / Pemohon Akta Kelahiran yang tidak memiliki Surat Nikah;</p> <p>Dalam pengajuan permohonan pembuatan dokumen pencatatan sipil, data berbeda antar dokumen persyaratan;</p> <p>Jaringan dan Tanda Tangan Elektronik (TTE) sering <i>error</i>.</p> <p>Perangkat perekaman banyak yang rusak dan tidak berfungsi.</p>
6	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	<p>Diperlukan perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan pembangunan yang terintegrasi dan terpadu guna mencapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program sehingga sasaran dan manfaat pembangunan lebih mudah dapat tercapai.</p>
7	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BENCANA	<p>Kurangnya tenaga penyuluh KB, jumlah Penyuluh KB sebanyak 241 dengan rincian ; PLKB Non PNS sebanyak 163 orang, P3K sebanyak 16 orang, Teladan ( Tenaga Lapangan Terdepan KB ) sebanyak 27 orang dan PLKB sebanyak 35 orang, sedangkan jumlah desa / kelurahan sebanyak 309 desa/kelurahan. Idealnya satu desa / kelurahan satu petugas Penyuluh KB;</p> <p>Kurangnya partisipasi masyarakat menggunakan alat kontrasepsi MKJP terutama MOW dan MOP;</p> <p>Kurangnya kelompok kegiatan terutama Pusat Informasi dan Konseling Remaja ( PIK – R );</p> <p>Terbatasnya tenaga medis yang menangani MKJP khususnya MOP dan MOW;</p> <p>Fungsi pengendalian penduduk belum optimal dilaksanakan tampak dari program selama lima tahun cenderung ke fungsi keluarga berencana.</p>
8	PERHUBUNGAN	<p>Perkembangan regulasi selain menjadi potensi strategis organisasi juga berpeluang menimbulkan hambatan dan kendala bagi lembaga dalam pelaksanaan tugasnya apabila tidak dilakukan adaptasi regulasi.</p> <p>Tidak tersedianya <i>blue print</i> (rencana induk) tentang pemetaan perencanaan sistem jaringan Transportasi di Kabupaten Karawang yang menjadi hambatan dalam penyusunan dan penetapan baik dalam tahap</p>

No.	Nama Urusan	Identifikasi Permasalahan
		<p>perencanaan juga tahap pelaksanaan program pembangunan, sehingga tidak terukurnya antara kebutuhan sarana prasarana kelengkapan jalan dengan proyeksi anggaran yang ditetapkan.</p> <p>Pertumbuhan infrastruktur jalan tidak seimbang dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor pada setiap tahun, apabila tidak diantisipasi sejak awal dimungkinkan dalam waktu 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun mendatang kemacetan lalu lintas akan menjadi permasalahan besar di Kabupaten Karawang.</p> <p>Sangat kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah yang menangani permasalahan infrastruktur jalan, hal ini mengakibatkan tidak ada sinkronisasi dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan jalan. Limitatif waktu peningkatan kapasitas dan kualitas jalan tidak direncanakan dengan perlengkapannya, sehingga banyak yang tidak dilengkapi dengan fasilitas keselamatan, petunjuk dan keamanan jalan.</p> <p>Tingkat kemampuan aparat Perhubungan Kabupaten Karawang khususnya dari segi penguasaan aspek teknis belum mampu mengentaskan masalah yang kompleks dengan teknologi terus berkembang dari tahun ke tahunnya.</p>
9	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	<p>Keterbatasan jumlah SDM;</p> <p>Sarana Prasarana belum memadai;</p> <p>Sinkronisasi kegiatan antar bidang.</p>
10	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	<p>Masih rendahnya kapasitas SDM Koperasi;</p> <p>Masih rendahnya kualitas kelembagaan koperasi;</p> <p>Masih rendahnya kualitas usaha koperasi, usaha kecil, dan menengah;</p> <p>Masih rendahnya pemasaran produk UMKM;</p> <p>Masih belum maksimalnya pemanfaatan teknologi oleh UMKM;</p> <p>Masih rendahnya produktivitas UMKM;</p> <p>Belum maksimalnya pembiayaan UMKM;</p> <p>Masih rendahnya manajemen pengelolaan UMKM.</p>
11	PENANAMAN MODAL	<p>Dalam pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Operasional atau Lapangan tidak terealisasi dikarenakan gagal lelang sebanyak 2 kali.</p> <p>Adanya perubahan nomenklatur Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan perubahan proses penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sehingga diperlukan adanya penyesuaian peraturan daerah agar dapat proses penerbitan dan penarikan retribusi dapat dilakukan.</p> <p>Adanya tantangan Geopolitik Ukraina dengan Rusia yang memengaruhi kondisi ekonomi dunia yang memungkinkan terjadinya resesi.</p> <p>Terjadinya COVID-19 yang menyebabkan <i>lockdown</i> cina sebagai pasar ekspor terbesar dan resesi yang dialami oleh Eropa dan Amerika sehingga menghambat investasi.</p> <p>Terbitnya Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Pertanahan Nasional Nomor : 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 Tahun 2021 tentang Penetapan Peta Lahan Sawah yang dilindungi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan</p>

No.	Nama Urusan	Identifikasi Permasalahan
		Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mempengaruhi terhadap luasan zonasi lahan pertanian yang dapat dialihfungsikan walaupun zona tersebut diperbolehkan untuk dialihfungsikan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang.
12	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Perlu pemantapan peran kepemudaan. Masih belum terkelolanya potensi kepemudaan dan keolahragaan.
13	KEBUDAYAAN	Kabupaten Karawang Belum Memiliki Museum; Kurangnya Data Base Cagar Budaya;
14	PERPUSTAKAAN	Kebiasaan budaya membaca dikalangan masyarakat belum optimal; Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM, sarana dan prasarana perpustakaan daerah dalam melayani masyarakat Kabupaten Karawang; Keberadaan gedung perpustakaan baik lokasi yang kurang strategis dan luas bangunan yang belum sesuai dengan kebutuhan.
15	KEARSIPAN	Dilihat dari aspek sumber daya manusia para pengelola arsip di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang masih belum memenuhi syarat, sampai saat ini belum sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi pendidikan dan mayoritas pengelola arsip yang ada masih berpendidikan SMA, dan belum mendapatkan pendidikan dan pelatihan tentang kearsipan sedangkan untuk menjadi fungsional arsiparis pada pengangkatan pertama harus berijazah minimal D3 dan harus mendapatkan pendidikan fungsional kearsipan.  Fasilitas sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis aktif dan arsip inaktif yang ada di Dinas Arsip dan Perpustakaan belum memenuhi standar pengelolaan arsip terutama untuk ruang penyimpanan arsip (Record Center), sehingga penataan dan pengelolaan arsip serta keamanannya kurang optimal akibatnya arsip belum tertata secara tertib. Kegiatan akuisisi arsip dari perangkat daerah belum terlaksana sesuai dengan ketentuan, karena kebanyakan perangkat daerah menyerahkan arsip tersebut masih dalam bentuk arsip kacau.
<b>3</b>	<b>URUSAN PILIHAN</b>	
1	KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dalam pencapaian target produksi perikanan tangkap dan budidaya, terdapat permasalahan antara lain: pendangkalan muara sungai akibat tingginya sedimentasi, kurangnya sarana dan prasarana penangkapan ikan, berkurangnya daya dukung lingkungan di perairan umum (sungai, rawa, dan genangan air lainnya) akibat pencemaran, kurangnya program <i>restocking</i> dari pemerintah terutama di perairan umum, masih sedikitnya nelayan yang memiliki sertifikat ANKAPIN, mahalnya harga sarana produksi perikanan budidaya (pakan, pupuk, obat-obatan, peralatan budidaya), sulitnya mencari benih berkualitas, kondisi cuaca yang sulit diprediksi, masih sedikitnya para pembudidaya yang memiliki sertifikat CPIB dan CBIB, masih sedikit yang memiliki kartu KUSUKA sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan bantuan.  Dalam pencapaian target produksi olahan hasil perikanan, terdapat beberapa permasalahan antara lain: sulitnya mendapatkan bahan baku olahan, masih kurangnya sarana gudang beku ( <i>cold storage</i> ), sulitnya

No.	Nama Urusan	Identifikasi Permasalahan
		<p>akses pemasaran, kurangnya pengetahuan para pengolah ikan, masih sedikit yang memiliki kartu KUSUKA sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan bantuan.</p> <p>Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) perikanan masih terkendala oleh permasalahan kurangnya jumlah masyarakat perikanan yang dilatih karena keterbatasan anggaran disamping itu sulitnya merubah karakter SDM perikanan.</p> <p>Pada sektor perikanan terdapat permasalahan masih rendahnya rata-rata pendapatan pembudidaya ikan, nelayan, pengolah hasil perikanan. Hal tersebut disebabkan belum optimalnya kuantitas dan kualitas produksi, baik produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya, olahan hasil ikan serta garam.</p> <p>Dalam pelaksanaan pelayanan publik sektor perikanan dan kelautan masih terdapat permasalahan yang perlu mendapat perhatian. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016, kewenangan kabupaten pada sektor perikanan dan kelautan menjadi berkurang.</p>
2	PARIWISATA	<p>Kabupaten Karawang Belum Memiliki Satu Destinasi Wisata Unggulan yang terintegrasi dengan destinasi wisata lainnya ;</p> <p>Kondisi Aksesibilitas di berbagai destinasi wisata yang belum semuanya baik;</p> <p>Ketersediaan destinasi wisata yang milik pemerintah daerah di Kabupaten Karawang;</p> <p>Belum dikembangkannya Desa Wisata Unggulan di Kabupaten Karawang;</p> <p>Ketersediaan berbagai fasilitas di Destinasi Wisata yang masih minim;</p> <p>Belum optimalnya promosi melalui media digital karena minimnya sarana dan prasarana yang tersedia.</p>
3	PERTANIAN	<p>Produktivitas/produksi pertanian masih rendah, pengembangan tanaman hortikultura, palawija, dan perkebunan masih sedikit, penggunaan alsintan belum maksimal;</p> <p>Perkembangan OPT masih sangat cepat sehingga sulit untuk dikendalikan, musim penghujan/kemarau yang menyebabkan gagal tanam/panen;</p> <p>Peran serta kelembagaan kelompok tani, kelembagaan penyuluh, dan kelembagaan BUMP dalam pembangunan pertanian belum maksimal;</p> <p>Kuantitas dan kualitas prasarana pertanian masih kurang;</p> <p>Rendahnya populasi ternak, produksi dan produktivitas ternak yang belum optimal serta pengawasan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan ketersediaan, peredaran obat hewan belum maksimal;</p>
4	PERDAGANGAN	<p>Belum terbangunnya sistem distribusi barang kebutuhan pokok dan strategis yang efektif dan efisien, disebabkan karena belum memadainya sarana dan prasarana logistik, seperti sarana transportasi (jalan, akses, dan alat angkut), sarana pergudangan dan keterampilan SDM;</p> <p>Rendahnya kualitas sarana dan prasarana perdagangan terutama pasar rakyat. Pasar berfungsi sebagai tempat yang penting dalam penyaluran barang. Sesuai dengan perkembangan pembangunan, saat ini banyak hadir pusat perbelanjaan modern, agar konsumen bisa berbelanja lebih efisien. Pembangunan pasar-pasar rakyat dilakukan sebagai upaya mengikis pasar-pasar modern yang mulai membanjiri masyarakat.</p>

No.	Nama Urusan	Identifikasi Permasalahan
		<p>Masih tingginya penggunaan barang impor yang relatif lebih terjangkau harganya. Ketergantungan konsumen Indonesia terhadap produk impor masih tinggi dibandingkan nilai ekspornya, padahal yang diharapkan adalah sebaliknya. Penyebab utama kondisi ini adalah daya saing produk-produk dalam negeri yang terus melemah.</p> <p>Masih rendahnya kesadaran pedagang untuk mena-ulangkan UTTP dan terbatasnya jumlah petugas di bidang pengawasan metrologi legal.</p>
5	PERINDUSTRIAN	<p>Belum optimalnya jejaring kemitraan usaha antara Industri Kecil Menengah (IKM) dengan industri besar, sektor IKM diharapkan menjadi mitra bisnis bagi perusahaan besar.</p> <p>Belum optimalnya pengembangan industri sesuai dengan tata ruang wilayah yang berwawasan lingkungan dalam meningkatkan investasi industri. Peningkatan pembangunan industri hendaknya jangan sampai membawa akibat rusaknya lingkungan hidup. Hal ini diatur oleh Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan industri, akan mendorong pengembangan Kawasan industri yang berwawasan lingkungan serta akan memberikan daya Tarik investasi industri. Terbatasnya dukungan infrastruktur sarana prasarana layanan teknis dan kondisi mesin yang sudah tua. Pelaku IKM harus selalu melakukan inovasi dan kreatif supaya mampu bersaing kendati terkena dampak kebijakan dan permasalahan internal maupun eksternal. Peningkatan sarana dan dalam rangka optimalisasi pelayanan teknis dilakukan melalui upaya pengembangan dan penerapan hasil rekayasa industri bagi IKM.</p> <p>Lemahnya daya saing IKM. Kurang kondusifnya, lingkungan usaha memiliki implikasi besar terhadap penurunan daya saing ekonomi, terutama sektor-sektor industri sebagai lapangan kesempatan kerja yang merupakan salah satu motor bagi pertumbuhan ekonomi.</p> <p>Belum optimalnya pengembangan IKM. IKM memiliki peranan strategis dalam struktur industri dan ekonomi Indonesia. Namun pengembangan IKM belum optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pasokan bahan baku untuk IKM. Penyebab lainnya masih rendahnya kualitas produk industri agro dan hasil hutan. Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah industri yang belum tertangani. Belum efisiensinya pemakaian energi di industri, kenaikan harga energi dan pencemaran lingkungan akibat emisi gas rumah kaca juga dapat menjadi akar masalah dari belum optimalnya pengembangan industri.</p>
<b>4</b>	<b>PENDUKUNG URUSAN</b>	
1	SEKRETARIAT DAERAH	<p>Pelaksanaan tugas dan fungsi masih ada yang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Belum optimalnya penggunaan SIRUP.</p> <p>Manfaat dari setiap Kerjasama belum dievaluasi secara mendetail.</p> <p>Masih terjadi kebutuhan anggaran yang tidak dapat diprediksi pada tahun perencanaan.</p>
2	SEKRETARIAT DPRD	Target proses penyusunan PERDA belum sesuai dengan kapasitas Sekretariat DPRD.
<b>5</b>	<b>PENUNJANG URUSAN</b>	

No.	Nama Urusan	Identifikasi Permasalahan
1	PERENCANAAN	Masih kurangnya fungsi koordinasi dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
		Belum optimalnya pelaksanaan pendampingan perencanaan dan monitoring evaluasi oleh bidang terhadap Perangkat Daerah di bawah koordinasinya.
		Masih kurangnya komitmen dan konsisten Perangkat Daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.
		Belum optimalnya sinkronisasi dokumen perencanaan maupun hasil kajian sebagai dasar acuan pelaksanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah.
		Masih rendahnya pelaksanaan kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota lain, pemerintah pusat, pihak swasta serta NGO.
		Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat.
		Rendahnya ketersediaan data sektoral yang terinci.
		Masih kurangnya kuantitas SDM yang berkualitas dan kompeten pada Bappeda dalam Menyusun d okumen perencanaan pembangunan daerah.
2	KEUANGAN	Belum optimalnya penyusunan anggaran dalam APBD;
		Daya serap anggaran belanja APBD Pemerintah Kabupaten Karawang rata-rata masih dibawah 90%;
		Belum optimalnya penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Karawang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
		Belum optimalnya pemanfaatan aset tetap tanah dan bangunan Pemerintah Kabupaten Karawang karena belum didukung dokumen kepemilikan yang lengkap;
		Belum optimalnya pengamanan aset baik fisik maupun administrasi;
		Adanya perubahan regulasi sebagai dasar hukum pengelolaan keuangan dan barang milik daerah (PP 12 Tahun 2019, Permendagri 90 Tahun 2019, dan Permendagri 77 Tahun 2020).
3	KEPEGAWAIAN	Capaian penilaian sistem merit masih harus terus ditingkatkan;
		Manajemen talenta belum dilaksanakan secara maksimal;
		Kekurangan pegawai;
		Perlu dikembangkannya Corporate university;
4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Sistem informasi manajemen ASN dan layanan kepegawaian secara elektronik belum optimal.
5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Masih minimnya pelaksanaan fungsi penelitian dan pengembangan dalam menciptakan inovasi daerah.
		Masih minimalnya pemanfaatan hasil kajian/penelitian sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pemerintah.
<b>6</b>	<b>PENGAWASAN URUSAN</b>	
1	PENGAWASAN	Masih kurangnya nilai maturitas SPIP.
		Masih kurangnya tenaga auditor.
<b>7</b>	<b>KEWILAYAHAN</b>	
1	PEMERINTAHAN	Pelayanan publik masih belum sesuai dengan harapan masyarakat.
<b>8</b>	<b>PEMERINTAHAN UMUM</b>	
1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	Menurunnya nilai persatuan dan kesatuan bangsa di masyarakat;

Sumber : Dinas terkait di Kabupaten Karawang

### 2.3.3 Permasalahan Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2022 untuk Dasar Identifikasi Isu Strategis

Berdasarkan evaluasi terhadap capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2022, masih banyak permasalahan yang perlu ditangani. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyusunan isu strategis agar dapat diselesaikan permasalahan pembangunan secara bertahap dengan tetap memperhatikan isu strategis pembangunan nasional dan isu strategis pembangunan provinsi. Tabel 2.183 menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Karawang Tahun 2022 yang dapat dipakai sebagai dasar untuk melakukan identifikasi isu strategis.

**Tabel 2.183**  
**Permasalahan Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2022 dan Penjelasannya**  
**Sebagai Dasar Identifikasi Isu Strategis**

No.	Permasalahan	Penjelasan	Identifikasi Isu Strategis
1	Pertumbuhan kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dalam PDRB yang masih rendah.	Rendahnya pertumbuhan kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dalam PDRB ditandai dengan a) produktivitas pertanian dan perikanan yang kurang optimal, b) teknologi yang kurang maju, c) kondisi pasar yang kurang menguntungkan, dan d) bencana dan perubahan iklim yang terjadi.	Peningkatan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.
2	Belum optimalnya pemenuhan pelayanan dasar bidang Pendidikan.	Belum optimalnya pemenuhan pelayanan dasar bidang Pendidikan ditandai dengan a) rendahnya tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD, b) rendahnya tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan menengah pertama, c) rendahnya tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan.	Peningkatan partisipasi warga negara dalam mengenyam Pendidikan.
3	Belum optimalnya pemenuhan pelayanan dasar bidang Kesehatan.	Belum optimalnya pemenuhan pelayanan dasar bidang Kesehatan ditandai dengan a) masih tingginya angka kematian ibu, angka kesakitan, dan angka kematian bayi, b) pengetahuan masyarakat tentang risiko pada ibu hamil yang masih rendah, c) persalinan belum semua ditolong oleh tenaga Kesehatan dan fasilitas Kesehatan, d) capaian tes HIV untuk pasien TB dan ibu hamil masih jauh dari target karena belum semua fasilitas pelayanan Kesehatan melakukan tes HIV, e) pelaksanaan kelas ibu balita dan SDIDTK di puskesmas oleh tenaga Kesehatan belum optimal.	Peningkatan pemenuhan pelayanan dasar bidang Kesehatan.

No.	Permasalahan	Penjelasan	Identifikasi Isu Strategis
4	Belum optimalnya pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Belum optimalnya pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ditandai dengan penurunan capaian nilai SAKIP tahun 2022.	Peningkatan implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pemda maupun level organisasi.
5	Rendahnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).	Rendahnya IKLH ditandai dengan a) belum adanya IPAL Komunal Domestik yang berfungsi dengan baik, b) masih ada pembuangan limbah ke sungai yang belum diolah dengan baik oleh pelaku usaha dan masyarakat.	Peningkatan kualitas air dan pembangunan IPAL Komunal yang berkualitas.
6	Belum optimalnya pengarusutamaan gender.	Belum optimalnya pengarusutamaan gender ditandai dengan layanan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan layanan motivator keluarga yang belum optimal.	Peningkatan layanan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan layanan motivator keluarga.
7	Tingginya angka kemiskinan.	Tingginya angka kemiskinan ditandai dengan tingginya jumlah penduduk miskin.	Pengurangan jumlah penduduk miskin.
8	Rendahnya pertumbuhan PDRB bidang infrastruktur.	Rendahnya pertumbuhan PDRB bidang infrastruktur ditandai dengan penurunan pada PDRB lapangan usaha a) pengadaan listrik dan gas, b) konstruksi.	Peningkatan PDRB bidang infrastruktur.
9	Belum tercapainya target daerah Indeks Reformasi Birokrasi (IRB).	Belum tercapainya target daerah IRB dikarenakan ada penurunan pada subkomponen kinerja.	Peningkatan nilai Indeks Reformasi Birokrasi (IRB).

Berdasarkan evaluasi terhadap capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2022, dapat ditetapkan isu strategis sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.
2. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang sehat dan cerdas.
3. Optimalisasi reformasi birokrasi pelayanan publik dan penyelenggaraan *e-government*.
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, penanganan persampahan, kerentanan bencana, dan perubahan iklim.
5. Pengembangan dan pembangunan infrastruktur antar wilayah secara merata untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

Untuk menentukan prioritas isu strategis tersebut, disusun sejumlah kriteria yang kemudian akan digunakan pada pembobotan seperti pada Tabel 2.184.



**Tabel 2.184**  
**Pembobotan Kriteria Untuk Prioritas Isu-Isu Strategis**

No.	Kriteria	Bobot
1.	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional.	20
2.	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.	10
3.	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat.	20
4.	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah.	10
5.	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani.	15
6.	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.	25
	<b>Total</b>	<b>100</b>

Dengan menggunakan kriteria pada Tabel 2.184, lalu diberikan skor untuk setiap isu strategis yang telah teridentifikasi. Skor yang diberikan antara nilai 1 sampai dengan 5. Isu yang memiliki kesesuaian paling tinggi dengan kriteria mendapatkan nilai 5. Sedangkan, isu yang kesesuaiannya paling rendah mendapatkan nilai 1. Skor yang diperoleh kemudian dikalikan dengan besaran bobot setiap kriteria, sehingga menghasilkan urutan prioritas isu strategis. Urutan prioritas isu strategis beserta rangkingnya ditampilkan pada Tabel 2.185 berikut ini.

**Tabel 2.185**  
**Urutan Prioritas Identifikasi Isu Strategis**  
**Berdasarkan Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2022**

No.	Isu Strategis	Ranking
1.	Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang sehat dan cerdas.	1
2.	Memperkuat ketahanan ekonomi di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.	2
3.	Optimalisasi reformasi birokrasi pelayanan publik dan penyelenggaraan <i>e-government</i> .	3
4.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup, penanganan persampahan, kerentanan bencana, dan perubahan iklim.	4
5.	Pengembangan dan pembangunan infrastruktur antar wilayah secara merata untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.	5

#### **2.4 Inovasi Daerah**

Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Karawang telah menerapkan beberapa inovasi daerah yang dilakukan oleh beberapa ASN yang mendapatkan promosi dan kompetisi ASN inovatif. Inovasi daerah yang dilakukan sudah terasa manfaatnya dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik sebagaimana Tabel 2.186 berikut ini :

**Tabel 2.186**  
**Inovasi Daerah yang diterapkan Tahun 2022**

<b>No</b>	<b>Judul Inovasi</b>	<b>Perangkat Daerah</b>	<b>Nama Inovator</b>
1	KLIRIN (Klinik Riset dan Inovasi) Kabupaten Karawang	BAPPEDA	Dr. Aries Purwanto, ST, M.Sc.
2	SIMPATIK (Sistem Manajemen Puskesmas Terpadu dan Inisiatif Kolaboratif)	Puskesmas Pakisjaya	Ali Ajazi, SKM
3	SILAHAV (Sistem Laporan Harian Vaksinasi)	Puskesmas Tanjungpura	Yayat Saleh, SKM, DDT, MKM
4	Pemanfaatan Sistem Teknologi Informatika Dalam Penggunaan Elektronik Medis	RSUD Karawang	Mulyati, S.Kep., Ners
5	SISKA CAKEP (Sistem Informasi Kelola Aset dan Pelacakan Alat Kesehatan)	RSKP Karawang	dr. Iwan Ariyanto
6	SIMPAN DI-COVID (Sistem Informasi Pemantauan Asesmen Indikator Situasi Covid-19)	DINKES	Saleh B Santoso, SKM, M.Epid
7	VIRAL (Visum Rekap Aktivitas Online)	DINKES	Nuraeni, SST
8	RASISTEM WA (Penerapan Aplikasi Sistem WhatsApp) di Puskesmas Adiarsa	DINKES	Qodirun Yahya, S.ST., MARS
9	CARITA (Catatan Ringkasan Kegiatan Kita) -- Percepatan Pelaporan & Pengawasan	DINKES	Yanto Ardiansyah, SKM, MM
10	SATIBER (Selaraskan Administrasi Tirtamulya Bersatu)	Puskesmas Tirtamulya	Enok Widiawati, SST
11	JAPRI (Jamur Krispy) Banyusari	Kecamatan Banyusari	Angga Satria Atmaja, S.IP
12	SAPA (Sistem Pelayanan Administrasi Perkantoran)	DPMPSTP	Asep Suryana, S.STP., MH
13	NUSANTARA (Normalisasi Saluran Tambak Rakyat)	Dinas Perikanan	Nur Ridwan S.,S.PKP.,MM
14	Pengembangan Kapasitas Petugas Pelayanan Pajak Daerah pada BAPENDA	BAPENDA	Sahali Kartawijaya, ST., MM

<b>No</b>	<b>Judul Inovasi</b>	<b>Perangkat Daerah</b>	<b>Nama Inovator</b>
15	FAVIS K2 (Form Aktivitas Visum Karawang Kulon)	Puskesmas Karawang Kulon	Nuning Wulandari, Amd.Keb
16	RENAKSI Strategi Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kel. Karangpawitan	Puskesmas Karawang Kulon	Hj. Gita P, S.Farm., Apt
17	Laporan Perkembangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Berbasis Android	Kecamatan Banyusari	Taufik Maulana, A.Md, S.E
18	Sistem Antrian Online Sebagai Upaya Peningkatan Ketertiban Pengunjung Puskesmas	DINKES	Neneng Suciati, S.ST
19	E-Survei Kepuasan Pasien	Puskesmas Plawad	Hj. Dewi Rosalina, SST
20	LAKTOBE (Lembar Data Aktual Online Berbasis Elektronik)	Puskesmas Cibuaya	Didi Ismail, AMK
21	ASIN PEDDA (Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah)	SETDA	Eva Verawaty, SH
22	SIMASGAWAI (Sistem Informasi Penggajian Pegawai)	RSKP Karawang	Wike Widuri, SKM
23	DOA PELAYAN SIKOMO (Dokumentasi Hasil Pelayanan dengan Sistem Komputerisasi)	DINKES	Hj. Carnah. N., SST
24	Sistem Pelayanan Berbasis Online yang Bersinergi (Si PlayBOY)	DINKES	Ilah Nurlaelah, SST
25	Cegah Remaja Putri (Rematri) Terhadap Anemia (CERITA)	DINKES	Abdul Subur, S.Kep., Ners
26	(GEMPITA) Gerakan Masyarakat Peduli Hipertensi Cibuaya	Puskesmas Cibuaya	dr. Eva Nurhasanah Kusumah
27	Penataan Arsip Kepegawaian Puskesmas Cilamaya	Puskesmas Cilamaya	Putih Sujatmiko, SKM
28	Sistem Informasi Surat Satu Pintu	DINKES	Evy Kusmawati, AM.Keb
29	GEDODAR (Gerakan Donor Daerah)	DINKES	Laela Jamilah, SKM
30	"SISIMO" (Sistem Informasi Surat Menyurat) Secara Online	DINKES	Ani Dahliani, S.Kep., Ners
31	Peningkatan Kualitas Pelayanan melalui Survey Kepuasan Masyarakat Online	Puskesmas Nagasari	Rini Tiksnowati K, S. Kep.
32	SIPERSI (Sistem Pelayanan Arsip Kepegawaian Purwasari)	DINKES	Suryamah, SST
33	Pengelolaan Tata Usaha Institusi Komprehensif (PETIK)	Puskesmas Curug	Siti Maryam, Amd.Keb
34	KB Bergerak Karawang Keren "KAKARAK"	DP2KB	H. Aep Saepudin, SKM

<b>No</b>	<b>Judul Inovasi</b>	<b>Perangkat Daerah</b>	<b>Nama Inovator</b>
35	Absensi 3 Dimensi	DP2KB	Rohyadi, SKM
36	Informasi Kabupaten Keluarga Berkualitas (INTEN KB)	DP2KB	Eddy Zulkarnaen, SKM, M.AP
37	PANSOS BEKEN (Pemanfaatan Media Sosial dalam Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Advokasi dan KIE Program Banggakencana)	DP2KB	Drs. Imam Al Husaeri, MM
38	Kader Kelompok Akseptor MOP dan MOW Program BANGGAKENCANA	DP2KB	Sofiah, S.H
39	Pusat Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Masyarakat	DINSOS	
40	Optimalisasi Aplikasi Daftar Satu Guna Meningkatkan Efektifitas Kerja	DISDIKPORA	H. Batong, S.Pd
41	SIAPP	Kecamatan Rengasdengklok	Aan Andarasu, Amd.kep
42	Optimalisasi Pelayanan Kebersihan dalam Memenuhi Pelayanan Sampah Rumah Tangga Masyarakat Desa Berupa Bak ArmRoll	DLH	Jufriyanto, AMAK
43	Optimalisasi Dokumen Laporan Sekolah Melalui File Box dan Scan Guna Meningkatkan Tertib Administrasi dan Efektifitas Kerja di Korwilcambidik Kecamatan Rawa Merta	DISDIKPORA	Neneng Herlina S.Pd MM
44	DAPEGCEN (Optimalisasi Data Kepegawaian melalui Excel dan Scanner	Kecamatan Batujaya	Adim,SM
45	Pengelolaan Dokumen Administrasi Akuntansi Keuangan UPTD Pasar Wilayah I KRW	Disperindag	Maman Suryaman, S.E.
46	Optimalisasi Sistem Informasi Layanan Administrasi Perkantoran Perjalanan Dinas (SAPA PERJADIN)	DPMPSTP	Rina Andriyani, SE
47	AKU KERJA (Aplikasi Kartu Pencari Kerja)	Kecamatan Jayakarta	Ujang Suharja, AM.Kep
48	SOL SEPATU MAS (Solusi Sederhana Pengolahan Sampah Terpadu Masyarakat)	UPTD Kebersihan Wil III CKP	Uman Jumana, S.T
49	Efisiensi Dan Efektifitas Pelayanan Publik Melalui "Tanggap Trantib"	Kecamatan Tirtamulya	Maman Kadarusman, S.Sos

<b>No</b>	<b>Judul Inovasi</b>	<b>Perangkat Daerah</b>	<b>Nama Inovator</b>
50	Optimalisasi Penatausahaan Barang Milik Daerah Melalui Aplikasi Google Drive	Kecamatan Pakisjaya	Muhammad, S, IP
51	Optimalisasi Data Masa Berlaku Akreditasi Sekolah Sekolah Dasar (SD) Di Korwilcambidik Kecamatan Cikampek	DISDIKPOR	Drs. H. Sanusi, M. Pd
52	Optimalisasi Usulan Perencanaan Pembangunan Dengan Format Excel Melalui Whatsapp Adiarsa Timur 2022	Kecamatan Karawang Timur	Iis Sahidah, SP
53	Sistem Informasi Manajemen Kinerja Dinas Sosial Karawang	DINSOS	Juju Juhairiah, S.Sos
54	Sistem Informasi Absensi Pegawai Menggunakan Fingerprint & Aplikasi Attendance Management	DLH	Erwin Baharudin, SE
55	Sosialisasi Pemanfaatan Limbah Kotoran Sapi Potong Di Rumah Potong Hewan Sebagai Sumber Energi Biogas Skala Rumah Tangga (Biogas Sikala)	DISTAN KP	Endang Sumarna. SP
56	Optimalisasi Pengarsipan Data KTP Dan KK Dengan Excen (Excel Dan Scanner)	Kecamatan Cilebar	Hery Herdiana, ST
57	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Karangpawitan	Kelurahan Karangpawitan	Dewi Ratna Komalasari, A.MD
58	Optimalisasi Informasi Pertanian Melalui K-Pop	DISTAN KP	Adhari Citra Kusumah, SP
59	BIOGAS SIKALA (Pemanfaatan Limbah Kotoran sapi potong hewan sebagai Sumber Energi Biogas Sederhana Skala Rumah Tangga	DISTAN KP	Endang Sumarna, SP
60	Penyusunan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Wewenang Untuk Memudahkan Pelayanan Bagi Masyarakat	BAPENDA	Asep Awaludin, SE
61	Penerimaan SITU (Surat Izin Tempat Usaha) Bagi Pemilik/Pelaku Usaha sebagai Upaya Taat Administrasi di Kec. Majalaya	Kecamatan Majalaya Timur	Wahyu Rukyana
62	Pengolahan Barang Milik Daerah di Kelurahan Palumbonsari	Kecamatan Karawang Timur	Ahmad Anwar, S.Kom
63	Implementasi Konsep Sekolah Sehat dan Vaksinasi Siswa pada Sekolah Dasar Negeri di Wilayah Kecamatan Tirtajaya	DISDIKPOR	Drs.Sofyan Hidayat, M.Pd.

<b>No</b>	<b>Judul Inovasi</b>	<b>Perangkat Daerah</b>	<b>Nama Inovator</b>
64	Pemetaan Mutu Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Berbasis IKM Wilayah Korwilcambidik Kecamatan Cilebar	DISDIKPORA	Heri Supriyadi, S.Pd
65	Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kelurahan Palumbonsari	Kecamatan Karawang Timur	Ahmad Anwar, S.Kom
66	Pendidikan Karakter melalui Pembiasaan Ibadah Shalat Dhuha & Sholat Dzuhur di Sekolah	DISDIKPORA	Drs. H. Udin. MPd
67	Sistem Online Profiling Wajib Pajak Daerah	BAPENDA	Okta Sukma Dwiva, S.STP.
68	Penerapan Sistem Penyimpanan Data Secara Digital untuk Rekapitulasi Data Kegiatan Proyek di UPTD Wilayah I	Dinas PRKP	Diana Apriyanti
69	Pemanfaatan Aplikasi SINAR (Sistem Informasi Nama Rupabumi) Dalam Rangka Pendataan Nama Rupabumi di Kecamatan Tirtamulya	Kecamatan Tirtamulya	Ujang Setiawan, SE, MM
70	Evaluasi dan Pembinaan Kepegawaian Serta Penerapan Aplikasi Google Form dalam Meningkatkan Disiplin Pegawai di Kecamatan Cibuaya	Kecamatan Cibuaya	Endi Suhendi, SM
71	PETA POLANTAS (Pemutakhiran Data Jompo, Lansia, dan Disabilitas)	Kecamatan Telagasari	H.Ahmad Soleh
72	Sistem Penjemputan Data Penduduk Rentan Kecamatan Klari	Kecamatan Klari	Ius Ruswanti, SH, MH
73	Penataan Aset Barang Milik UPTD Pelayanan Dinas PUPR Wilayah III	Dinas PUPR	Ronaldi Tachiri, S.M
74	Sistem Pengarsipan Dokumen Administrasi Keuangan Berbasis Web	Dinas PUPR	Candra Rustiana Dewi, SE
75	Pelatihan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Menjadi Aktor Penggerak Kepariwisata Desa	DISPARBUD	Asep Supriadi, S.Sos
76	Peningkatan Pemahaman Perizinan Koperasi Simpan Pinjam Melalui Sosialisasi Aplikasi Online Single Kabupaten Karawang	Dinkop UKM	Hj. Eva Irmala, SE

No	Judul Inovasi	Perangkat Daerah	Nama Inovator
77	Metode Pengawasan " <i>Added Source</i> " (Sistem Pengawasan Konstruksi/Bangunan Sederhana dengan Penambahan Personil Paruh Waktu dan Pengawas yang ada sebagai <i>Key Leader</i> ) Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Proses Konstruksi Bangunan	Dinas PUPR	Endang Hendriansyah, ST
78	Penataan Arsip Kepegawaian pada Kantor Kecamatan Klari	Kecamatan Klari	Nur Suherli, S. Kom
79	Optimalisasi Penatausahaan Laporan Keuangan Berbasis Google Drive pada Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang	DISNAKERTRANS	Adi Kusumah, SE
80	Optimalisasi Kinerja Satuan Tugas (Satgas PB) di Setiap Kecamatan	BPBD	Nelson Firdaus, S.STP
81	Presensi Tenaga Non Kedinasan Berbasis Platform pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karawang	Diskop UKM Kabupaten Karawang	Sriwulandewi, SE
82	Upaya Percepatan Pengajuan Proposal Pembangunan Rumah Layak Huni dari Desa/Kelurahan Melalui Penambahan Fitur e-Proposal pada Aplikasi IMAH (Information Management of Housing)	Dinas PRKP	Aup Aulia Setia Harga, SH, M.Si
83	Pelayanan Prima ( <i>Service Excellent</i> ) Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas dan Peningkatan Nilai Tambah RSUD Karawang	RSUD Karawang	Uung Susangka, S.Kep
84	PARE BAPANA (Panduan Kajian Rekonstruksi Pasca Bencana)	BPBD Kabupaten Karawang	Sahri Pranika, SE
85	Sistem Pengarsipan Dokumen Administrasi Keuangan Berbasis Web pada Dinas PUPR Kabupaten Karawang	Dinas PUPR	Candra Rustiana Dewi, SE
86	Pengelolaan Laporan Statistik Pertanian UPTD Pengelolaan Pertanian dalam Google Drive	DISTAN KP	Ahmad Solihin, SP
87	INSAF (Inventarisasi Sanksi Administrasi Berbasis Google Spreadsheet)	DLH	Permadi Utama, S.T.
88	Optimalisasi Fungsi UPTD Balai Benih dan Kaji Terap Teknologi Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagai Produsen Benih Bermutu Padi	DISTAN KP	Ajud Tajrudin, A. Md. SP



<b>No</b>	<b>Judul Inovasi</b>	<b>Perangkat Daerah</b>	<b>Nama Inovator</b>
89	Pengembangan Aplikasi SOPAN (Sistem Online Pelayanan) sebagai Upaya Memudahkan Wajib Pajak Untuk Melakukan Pendaftaran Semua Pelayanan PBB Pedesaan & Perkotaan	BAPENDA	Ibnu Nugraha Muslim, S.Sos.,MM
90	SELIKA TOPS PISAN -- Metode Selika Tops Pisan (Sinergitas Unsur Silika dan Kalium Tingkatkan Optimalisasi Produktivitas Padi Sawah, Padi Sehat Tahan Rebah) Upaya Peningkatan Produksi Padi Karawang	DISTAN KP/UPTD PP Kecamatan Jayakarta	Trisna Gunawan, SP
91	Penerimaan Si Enin dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah di Bidang Program & Pelaporan BAPENDA Kabupaten Karawang	BAPENDA	Nanan Fatmah, SST.Pa.
92	KAKANDA (Optimalisasi Peran Serta Masyarakat dalam Upaya Pengelolaan Sampah Lingkungan Melalui Pembentukan Kader Kebersihan Desa)	DLH/UPTD Wilayah III	Andi Kusnadi, Amd.Farm
93	Prototipe Penerangan Jalan Khas "Karawang Caang (Terang)"	Dinas PUPR	Satrio Pandu W, ST, M.Si
94	RAPERBUP Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Di Kabupaten Karawang	UPTD PPI/Dinas Perikanan	Moh Agung Mohklisin, S.T
95	Optimalisasi Layanan Pengaduan Masyarakat Berbasis Google Drive	Kecamatan Batu jaya	H. Mamat Rahmat, SE
96	Pengelolaan Arsip Buku Tanah Cara Manual, Dicitak Dan Scanner	Kecamatan Pedes	H.Odim, SE
97	Pengelolaan Dan Penggunaan Biochar Pada Tanaman Padi Sawah (Oryza Sativa L.) Untuk Meningkatkan Efisiensi Penggunaan Pupuk Di Kecamatan Cikampek	DISTAN KP	Ramdhani SP, Md
98	SI PEWARIS KLARI (Sistem Pelayanan Waris Kecamatan Klari)	Kecamatan Klari	Rita Julianingsih
99	Ruang Konsultasi Akuntansi (RKA) pada Website BPKAD Kabupaten Karawang	BPKAD	Risa Nova Triana, SE., MM
100	Pengembangan "SI BUNTAL" (Sistem Informasi Bahan Untuk Arsip Dan Layanan) Untuk Penataan Data Produksi Dan Pembudidayaan Ikan Dinas Perikanan	Dinas Perikanan	Rizali Husna, S.Pi., MM

<b>No</b>	<b>Judul Inovasi</b>	<b>Perangkat Daerah</b>	<b>Nama Inovator</b>
101	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Lahan Non Produktif Menjadi Biosistem Terpadu (Kolam Ikan Dan Akuaponik)	Dinas Perikanan	Rizal Abdillah, A.Md
102	Standar Operasional Prosedur (SOP) Sinergitas Perencanaan Terintegrasi Pada Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang	BAPPEDA	Tasar, SP
103	Gerakan Masyarakat Sadar Untuk Mencegah Stunting	Kecamatan Klari	Hj.Siti Sofiyatun, SST, MKM
104	Pendataan Aset Di Kecamatan Cilamaya Kulon Berbasis Google Form	Kecamatan Cilamaya Kulon	Indra Sudrajat, S.STP
105	Sistem Pelayanan Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Terintegrasi Berbasis Web Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab.Karawang	DISNAKERTRANS	Jajang Sugirwan, S.H.
106	Pemanfaatan Google Chrome Untuk Pembuatan Kartu Pencari Kerja Di Kecamatan Telukjambe Timur	Kecamatan Telukjambe Timur	Eman Sulaeman, S.H
107	Penyusunan Data Perangkat Desa Melalui Aplikasi Google Form Di Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang	Kecamatan Kutawaluya	Enjang Lukmanul Hakim, Amd.Kep
108	Sistem Konfirmasi Utang Supplier Sebagai Upaya Terlaksananya Penyajian Laporan Keuangan Yang Akurat, Transparan Dan Akuntabel	RSUD Karawang	Dian Handayani, SE
109	SI PENDEKAR (Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Kelurahan Karawang Wetan Melalui Aplikasi Whatsapp)	Kelurahan Karawang Wetan .	Cahyanti Nurvitasari, SE
110	Sistem Pemberian Pakan Semi Portable Dan Otomatis Pada Pembudidayaan Ikan Dengan Pemakaian Gabungan Solar Panel	Dinas Perikanan	Budi Hermawan, S. Pi
111	Pembuatan Plang Nama Nama Jalan Desa Di Wilayah Kecamatan Lemahabang Untuk Mempermudah Akses Sosial Di Masyarakat Dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Umum Secara Tidak Langsung	Kecamatan Lemahabang	Endi Suhendi, S.Pd.

No	Judul Inovasi	Perangkat Daerah	Nama Inovator
112	Optimalisasi Penggunaan SIM MIRSA Sub Koordinator Kelompok Sub Substansi Rumah Tangga dan Logistik RSUD Karawang	RSUD Karawang	Agung Riyanto, SE
113	Pengelolaan Tata Pengarsipan Kunjungan Pasien Terintegrasi ke Excel Dan Sistematis UPTD Puskesmas Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang	DISTAN KP	Artasim, SP
114	Pengembangan Sistem Informasi Bahan Untuk Arsip Dan Layanan (SI BUNTAL) Untuk Pelaporan Pengelolaan	UPTD PPI/Dinas Perikanan	Wawan Setiawan, A.Md
115	Optimalisasi Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa	DPMD	Shabrina Octvinadia R, S.IP.
116	PDKT (Penataan Dokumen Kepegawaian Terpadu) Secara Manual dan Elektronik	Kecamatan Pakisjaya	Ujang, SE
117	Peningkatan Kualitas Kinerja Kepala Sekolah Guru Sekolah Dasar Melalui Sistem KKG Online (E-KKGO)	Korwilcambidik Kecamatan Banyusari	H. Asep Suhendi, S.Pd, M. Pd
118	<b>C. Kompetisi ASN Inovatif 2022</b>		
119	Mengolah Sampah Organik Menjadi Eco Enzym	DISTAN KP	Siti Komalaningsih, SP
120	TEH MENI (Teh Herbal dari Tumbuhan Menoran)	UPTD Batujaya/DISTAN KP	Wiwin Masria Y Sihotang, SP
121	Penggunaan Google Workspace Dalam Upaya Tertib Administrasi Keuangan	DPMPSTP	Iqbal Baihaqi, A.Md
122	JAMBAL WANGI TIKLAR (Jambore Makanan Berbasis Kearifan Lokal)	SMPN 3 Klari	Muhammad Nurul Fajri, S.Pd
123	Aplikasi Agen Hayati <i>Paenibacillus Polymyxa</i>	UPTD Tegalwaru/DISTAN KP	Ulpa Mariam, SP
124	PRABUGENIK (Perangkap Lalat Buah dengan Metil Eugenol Organik)	DISTAN KP	Ilman Nur Syamsudin, SP
125	BANK CEONG (Bank Eceng Gondok dan Keong Mas untuk Pupuk Organik Cair)	DISTAN KP	Ajud Tajrudin, SP
126	Digitalisasi Perpustakaan Dengan Website dan Sistem Barcode	SMPN 2 Tirtajaya	Tessa Putri Chandra, S.Pd

<b>No</b>	<b>Judul Inovasi</b>	<b>Perangkat Daerah</b>	<b>Nama Inovator</b>
127	Sosialisasi ASI Perah di Ruang Perinatologi RSUD Karawang	RSUD Karawang	Tiara Dwindi P, S.Kep.Ns
128	Kartu Kontrol pemeriksaan gula darah rutin pada pasien Diabetes Melitus	Puskesmas Cibuaya	Mey Rizky, A.Md.Kep
129	Prolanis melalui pemantauan Kesehatan pasien Hipertensi dan Diabetes Melitus	Puskesmas Cibuaya	dr. Hatim Alwan
130	Buku Pasien TB Paru dan Leaflet Edukatif untuk Meningkatkan pengetahuan dan Kepatuhan Minum Obat Bagi Pasien TB Paru	Puskesmas Gempol	Muhammad Ismail B, Amd.Kep
131	SIMEONG (Sistem Monitoring Evaluasi Online dan Offline Go Good Governance)	Kecamatan Pedes	Ahmad Satibi, S.Sos

Sumber : Bappeda Kabupaten Karawang